



SALINAN

**MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI
DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 146 TAHUN 2023

TENTANG

**ARSITEKTUR SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN
TRANSMIGRASI**

**MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan integrasi proses bisnis, data dan informasi, aplikasi, infrastruktur, dan keamanan sistem pemerintah pemerintahan berbasis elektronik guna menghasilkan layanan pemerintah yang terintegrasi, perlu mengganti arsitektur sistem pemerintah pemerintahan berbasis elektronik di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 95 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

2. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 182);
3. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
4. Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2020 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 192);
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1753);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1256) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 823);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI TENTANG ARSITEKTUR SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI.
- KESATU : Menetapkan arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang selanjutnya disebut Arsitektur SPBE sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu memiliki kerangka kerja yang terdiri atas:
- a. kerangka kerja sistem pemerintah berbasis elektronik;
 - b. kerangka kerja Arsitektur SPBE;
 - c. kerangka kerja arsitektur proses bisnis;
 - d. kerangka kerja arsitektur data dan informasi;
 - e. kerangka kerja arsitektur layanan sistem pemerintah berbasis elektronik;

- f. kerangka kerja arsitektur aplikasi sistem pemerintah berbasis elektronik;
 - g. kerangka kerja arsitektur infrastruktur sistem pemerintah berbasis elektronik;
 - h. kerangka kerja arsitektur keamanan sistem pemerintah berbasis elektronik;
- KETIGA : Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU meliputi:
- 1. Domain Arsitektur Proses Bisnis;
 - 2. Domain Arsitektur Data dan Informasi;
 - 3. Domain Arsitektur Layanan SPBE;
 - 4. Domain Arsitektur Aplikasi SPBE;
 - 5. Domain Arsitektur Infrastruktur SPBE; dan
 - 6. Domain Arsitektur Keamanan SPBE.
- KEEMPAT : Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diselenggarakan oleh seluruh unit kerja berkoordinasi dengan Pusat Data dan Informasi.
- KELIMA : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 95 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Juni 2023

MENTERI DESA,
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN
TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ABDUL HALIM ISKANDAR



LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI DESA,
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN
TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 146 TAHUN 2023
TENTANG
ARSITEKTUR SISTEM PEMERINTAHAN
BERBASIS ELEKTRONIK KEMENTERIAN
DESA, PEMBANGUNAN DAERAH
TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI

ARSITEKTUR SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN
TRANSMIGRASI

SISTEMATIKA

BAB I PENDAHULUAN

- A. LATAR BELAKANG
- B. MAKSUD DAN TUJUAN
- C. RUANG LINGKUP
- D. PENGERTIAN UMUM

BAB II KERANGKA KERJA ARSITEKTUR SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

- A. KERANGKA KERJA SPBE
- B. KERANGKA KERJA ARSITEKTUR SPBE
- C. KERANGKA KERJA ARSITEKTUR PROSES BISNIS
- D. KERANGKA KERJA ARSITEKTUR DATA DAN INFORMASI
- E. KERANGKA KERJA ARSITEKTUR LAYANAN SPBE
- F. KERANGKA KERJA ARSITEKTUR APLIKASI SPBE
- G. KERANGKA KERJA ARSITEKTUR INFRASTRUKTUR SPBE
- H. KERANGKA KERJA ARSITEKTUR KEAMANAN SPBE

BAB III ARSITEKTUR SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK PADA LINGKUNGAN KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI

- A. DOMAIN PROSES BISNIS
- B. DOMAIN DATA DAN INFORMASI
- C. DOMAIN LAYANAN SPBE
- D. DOMAIN APLIKASI SPBE
- E. DOMAIN INFRASTRUKTUR SPBE
- F. DOMAIN KEAMANAN SPBE

BAB IV PENUTUP

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional, bahwa Instansi Pusat menyusun Arsitektur SPBE Instansi Pusat berpedoman pada Arsitektur SPBE Nasional dan rencana strategis Instansi Pusat. Dimana Arsitektur SPBE Instansi Pusat ditetapkan oleh pimpinan Instansi masing-masing. Sehingga, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi perlu menetapkan Arsitektur SPBE Kementerian dengan Keputusan Menteri.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud disusunnya Keputusan ini adalah untuk menyelaraskan proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur, aplikasi, dan keamanan SPBE pada seluruh Unit Kerja di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
2. Tujuan disusunnya Keputusan ini adalah sebagai acuan dalam pelaksanaan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur, aplikasi, dan keamanan SPBE, untuk menghasilkan layanan SPBE yang terpadu di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

C. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup dalam Keputusan Menteri ini memuat:

1. Kerangka Kerja Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik; dan
2. Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

D. Pengertian Umum

1. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, yang selanjutnya disebut SPBE Kementerian adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna yang diselenggarakan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
2. Arsitektur SPBE Kementerian adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
3. Perangkat Keras (*hardware*) adalah bagian dari sistem komputer sebagai perangkat yang dapat diraba, dilihat secara fisik, dan bertindak untuk menjalankan instruksi dari perangkat lunak (*software*).
4. Perangkat Lunak (*software*) adalah bagian dari sistem komputer yang tidak berwujud dan berupa data yang disimpan secara digital.

5. Sistem Integrasi Satu Data Kementerian yang selanjutnya disebut SADA Kementerian adalah kebijakan tata kelola data bidang Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar instansi pusat dan instansi daerah melalui pemenuhan standar data, metadata, interoperabilitas data, dan menggunakan kode referensi dan data induk.
6. Kementerian adalah Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
7. Menteri adalah Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

BAB II

KERANGKA KERJA ARSITEKTUR SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

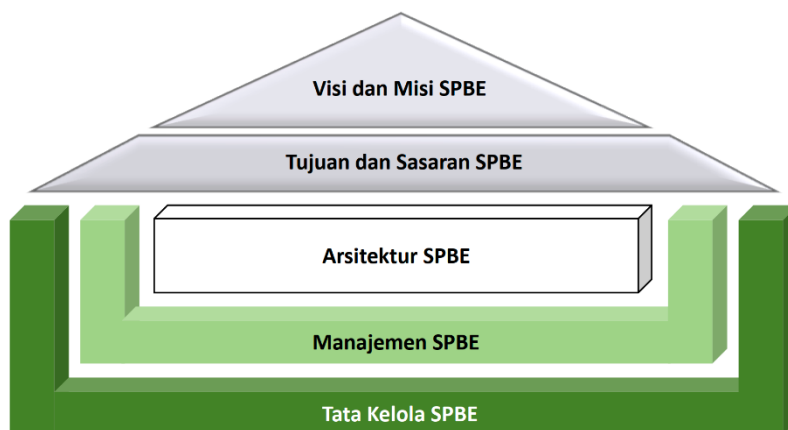
A. KERANGKA KERJA SPBE

Pelaksanaan penerapan SPBE dilaksanakan sesuai dengan kerangka kerja SPBE sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Pada dasarnya, kerangka kerja SPBE merupakan konseptualisasi atas pelaksanaan tata kelola SPBE, yang digunakan sebagai panduan dalam melakukan penerapan SPBE, baik di level nasional hingga Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah. Unsur-unsur SPBE mencakup:

- a. rencana induk SPBE Nasional;
- b. arsitektur SPBE;
- c. peta rencana SPBE;
- d. rencana dan anggaran SPBE;
- e. proses bisnis;
- f. data dan informasi;
- g. infrastruktur SPBE;
- h. aplikasi SPBE;
- i. keamanan SPBE; dan
- j. layanan SPBE.

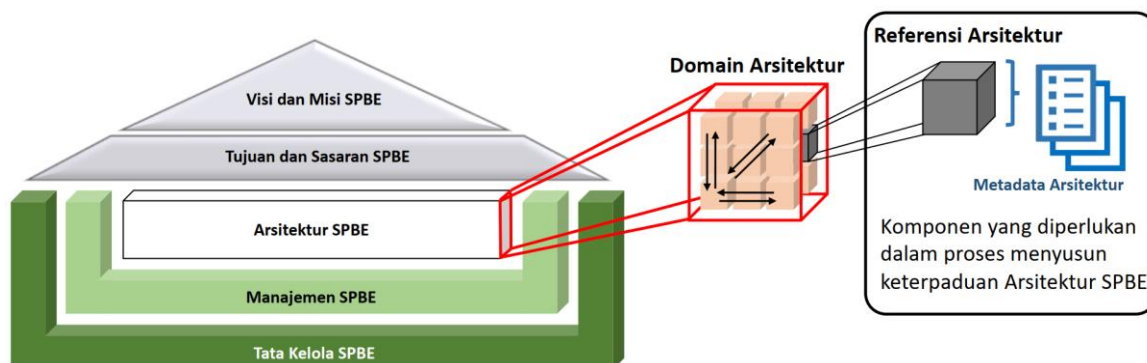
Arsitektur SPBE merupakan salah satu unsur SPBE yang bertujuan untuk memberikan keterpaduan dari seluruh Domain Arsitektur SPBE. Arsitektur SPBE terdiri dari:

- a. domain arsitektur proses bisnis;
- b. domain arsitektur data dan informasi;
- c. domain arsitektur infrastruktur SPBE;
- d. domain arsitektur aplikasi SPBE;
- e. domain arsitektur keamanan SPBE; dan
- f. domain arsitektur layanan SPBE.



Gambar 2.1 Kerangka Kerja SPBE

Seperti yang digambarkan pada Gambar 2.1, keterpaduan seluruh unsur-unsur SPBE dapat diwujudkan dalam sebuah kerangka kerja SPBE yang didalamnya memuat Arsitektur SPBE. Arsitektur SPBE menjadi pedoman integrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Arsitektur SPBE Nasional merupakan Arsitektur SPBE yang diterapkan secara nasional, melalui pengintegrasian seluruh penyelenggaraan pemerintahan secara elektronik, dengan menggambarkan secara terpadu, pada seluruh domain didalamnya, sehingga memberikan kemudahan dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas yang diharapkan. Arsitektur SPBE Nasional memberikan panduan dalam tata kelola SPBE di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi untuk melakukan identifikasi pada setiap domain, maka pada setiap domain terdapat struktur bertingkat, yang terbentuk dari berbagai komponen dasar yang disebut dengan referensi arsitektur, untuk memastikan relasi antar domain dan keselarasan antara Arsitektur SPBE Nasional dan Arsitektur SPBE pada lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.



Gambar 2.2 Komponen dalam Arsitektur SPBE

B. KERANGKA KERJA ARSITEKTUR SPBE

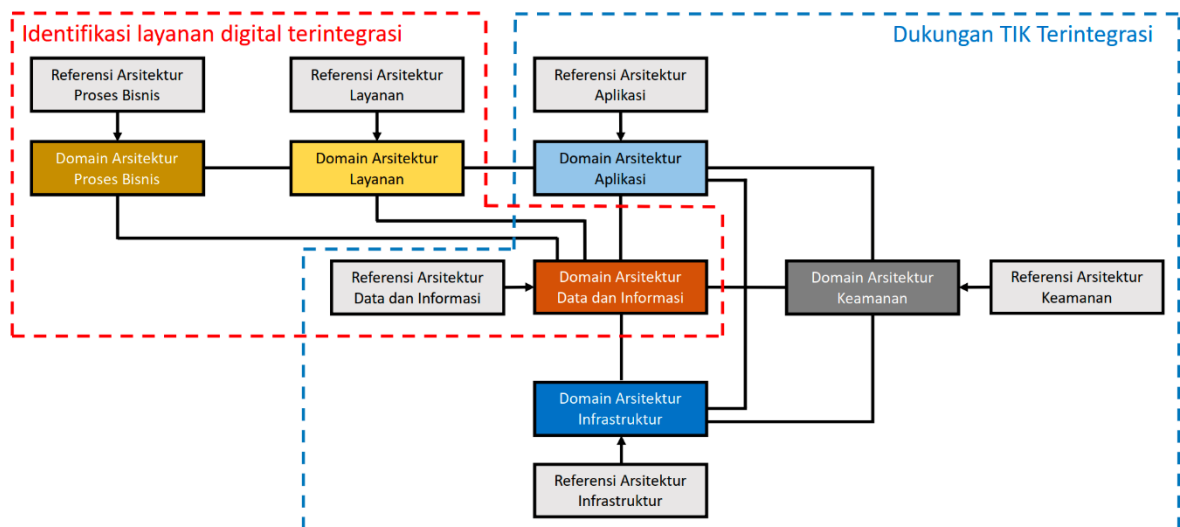
Dengan tujuan mewujudkan keterpaduan antar struktur di dalam Arsitektur SPBE, maka kerangka kerja Arsitektur SPBE menjadi panduan untuk mengidentifikasi pembentukan layanan pemerintah berbasis elektronik yang terintegrasi, meniadakan tumpang tindih pelaksanaan proses bisnis, dan memastikan penerapan data dan informasi berbagi pakai menjadi Satu Data Indonesia, melalui dukungan teknologi informasi dan komunikasi berbagi pakai yang terintegrasi. Referensi arsitektur terdiri atas 6 (enam) komponen, yaitu:

- a. referensi arsitektur proses bisnis;
- b. referensi arsitektur data dan informasi;
- c. referensi arsitektur layanan SPBE;
- d. referensi arsitektur aplikasi SPBE;
- e. referensi arsitektur infrastruktur SPBE; dan
- f. referensi arsitektur keamanan SPBE.

Serupa dengan referensi arsitektur, domain arsitektur juga terdiri atas 6 (enam) komponen, yaitu:

- a. domain arsitektur proses bisnis;
- b. domain arsitektur data dan informasi;
- c. domain arsitektur layanan SPBE;
- d. domain arsitektur aplikasi SPBE;
- e. domain arsitektur infrastruktur SPBE; dan
- f. domain arsitektur keamanan SPBE.

Secara garis besar keterkaitan antara semua Referensi Arsitektur SPBE dengan semua domain arsitekturnya tergambar pada Gambar 2.3. Pada ilustrasi tersebut dapat terlihat pengelompokan kegiatan penyelenggaraan SPBE yang terkait dengan identifikasi layanan digital terintegrasi dan identifikasi dukungan teknologi informasi dan komunikasi terintegrasi yang diperlukan.



Gambar 2.3 Keterkaitan Antar Komponen dalam Arsitektur SPBE

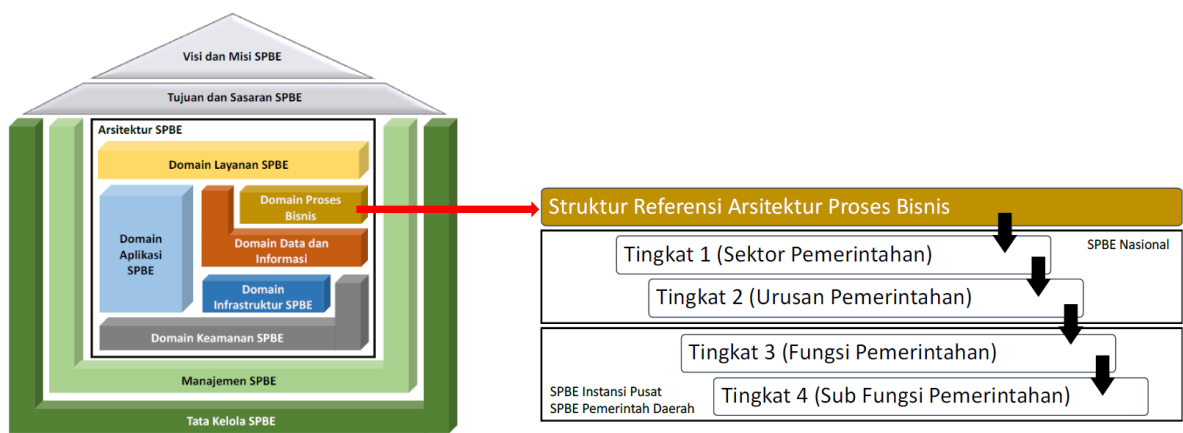
C. KERANGKA KERJA ARSITEKTUR PROSES BISNIS

1. Prinsip Arsitektur Proses Bisnis

Prinsip-prinsip proses bisnis dalam *framework Enterprise* Arsitektur Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi adalah sebagai berikut:

- a. bersifat konsisten dan komprehensif;
- b. bersifat kolaboratif dan adaptif sesuai dengan kebutuhan stakeholder dan mengikuti perubahan regulasi; dan
- c. dilakukan secara berkesinambungan.

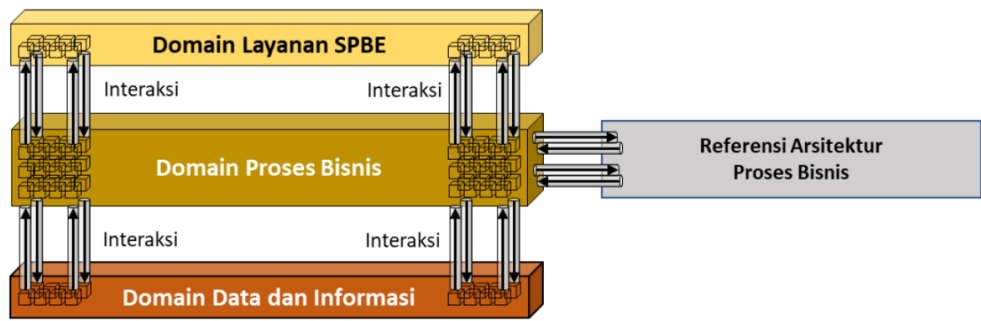
Arsitektur proses bisnis Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi menggambarkan proses, tugas dan fungsi utama dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dengan mengacu pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 17 tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tahun 2020-2024.



Gambar 2.4 Struktur Arsitektur Proses Bisnis

Penyusunan arsitektur proses bisnis ini mengacu pada proses bisnis di tingkat nasional dengan tujuan untuk membentuk layanan SPBE yang menggambarkan potensi kolaborasi antar Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah serta pengintegrasian secara terpadu di setiap elemen pemerintahan dalam melakukan tugas dan fungsi yang diemban. Seperti ditunjukkan pada Gambar 2.4, arsitektur proses bisnis berfokus pada Tingkat 3 (Fungsi Pemerintahan) yang menjelaskan lebih rinci arsitektur proses bisnis Tingkat 2 (Urusan Pemerintahan) dengan tetap mengacu pada arsitektur Tingkat 1 (Sektor Pemerintahan). Arsitektur proses bisnis Tingkat 3 disusun untuk mengatur fungsi pemerintahan dan dijelaskan lebih rinci pada arsitektur proses bisnis Tingkat 4 (Sub Fungsi Pemerintahan). Arsitektur ini disusun sesuai dengan kebutuhan dalam mendefinisikan data dan informasi yang dihasilkan dan layanan terintegrasi yang akan dibangun sebagai bagian dari layanan digital nasional.

- 2. Keterkaitan antar Domain
Domain Arsitektur Proses Bisnis memiliki interaksi dengan Domain Arsitektur Layanan SPBE serta Domain Arsitektur Data dan Informasi. Domain Arsitektur Proses Bisnis mencakup berbagai macam proses bisnis yang akan menghasilkan data dan informasi, serta akan mendefinisikan layanan pemerintah. Domain Arsitektur Proses Bisnis berelasi langsung dengan Domain Arsitektur Data dan Informasi, untuk menggambarkan data dan informasi yang diperlukan atau dihasilkan dalam proses bisnis yang berkaitan dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan. Domain Arsitektur Proses Bisnis juga harus dapat mengidentifikasi layanan yang dihasilkan dalam urusan pemerintahan yang dilaksanakan dalam fungsi pemerintahan di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Keterkaitan antara Domain Arsitektur Proses Bisnis, Domain Arsitektur Data dan Informasi, serta Domain Layanan SPBE ditunjukkan pada Gambar 2.5.



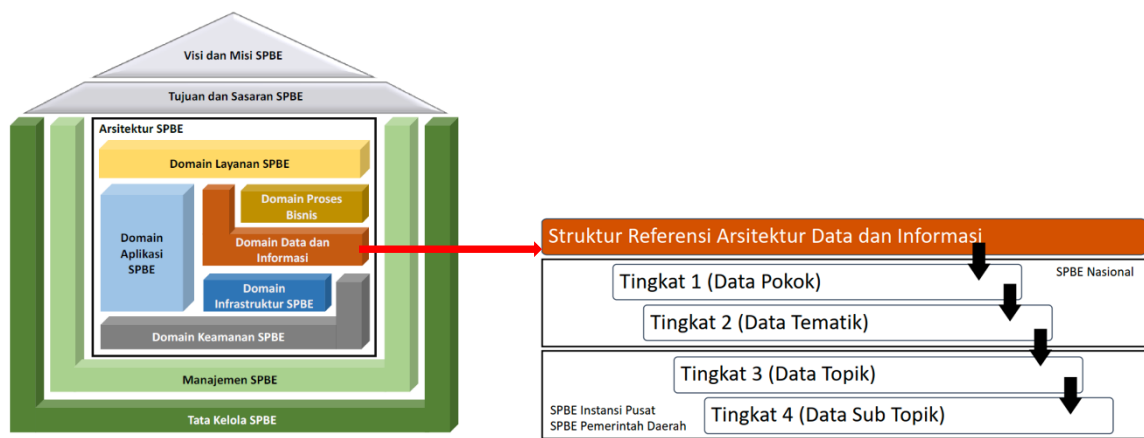
Gambar 2.5 Interaksi Domain Arsitektur Proses Bisnis, Domain Arsitektur Data dan Informasi, serta Domain Layanan SPBE

Arsitektur proses bisnis disusun berdasarkan tujuan pembangunan nasional, transformasi digital, penyediaan layanan pemerintahan internal, digital working collaboration, dan smart city. Identifikasi proses bisnis pada Pembangunan Kewilayahan antara lain untuk mendukung terbentuknya layanan SPBE dalam bidang Transmigrasi (termasuk di dalamnya pendidikan dan pelatihan, serta pengembangan kawasan transmigrasi) dan bidang Pembangunan Kawasan atau Daerah Tertinggal (termasuk di dalamnya pembangunan desa dan kawasan pedesaan, pemberdayaan masyarakat desa, dan pengembangan daerah tertentu), serta sebagai acuan untuk mengidentifikasi data dan informasi berupa data pokok dan data tematik yang dibutuhkan dan dihasilkan oleh fungsi-fungsi pemerintahan.

D. KERANGKA KERJA ARSITEKTUR DATA DAN INFORMASI

1. Prinsip Arsitektur Data dan Informasi

Dalam membangun tersedianya data dan informasi ini, pemetaan atas data dan informasi di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi diperlukan sehingga pertanggungjawaban atas kualitas data dapat dilaksanakan dengan baik. Domain arsitektur data dan informasi disusun berdasarkan kebutuhan data yang digunakan pada proses bisnis dan layanan di pemerintahan yang sudah diklasifikasikan dalam referensi arsitektur data dan informasi.

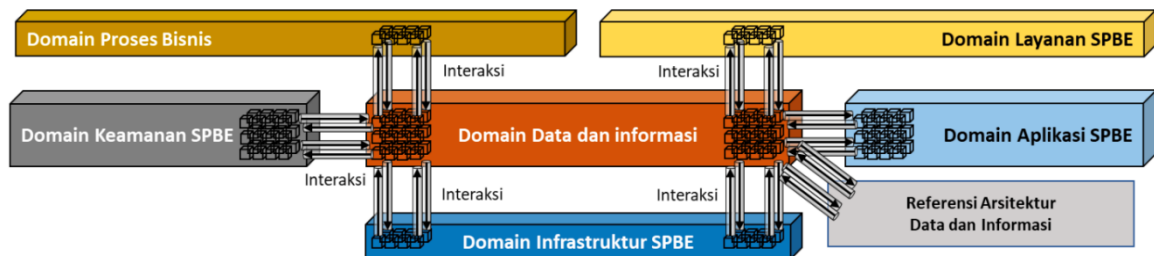


Gambar 2.6 Struktur Arsitektur Data dan Informasi

Dalam domain arsitektur data dan informasi yang dihasilkan dari berbagai aktivitas dalam proses bisnis pemerintahan, selanjutnya diklasifikasikan substansi data dan informasi ke dalam tingkatan struktur referensi arsitektur data dan informasi yang terdiri dari 4 (empat) tingkat, yaitu Tingkat 1 (Data Pokok) yang mengelompokkan data ke dalam data yang dihasilkan pada sektor pemerintahan dan data pendukung, Tingkat 2 (Data Tematik) yang menjelaskan urusan pemerintahan yang diemban oleh Pemerintah sesuai yang diamanatkan oleh undang-undang, dikelompokkan ke dalam data tematik urusan pemerintahan dan uraian data pendukung umum, Tingkat 3 (Data Topik) yang menjelaskan lebih rinci dari data tematik di tingkat nasional yang selanjutnya Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi mendefinisikan data dan informasi yang dihasilkan sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangan yang dimiliki, serta Tingkat 4 (Data Sub Topik) yang menjelaskan lebih rinci dari data topik.

2. Keterkaitan antar Domain

Domain arsitektur data dan informasi mempunyai relasi langsung dengan domain arsitektur proses bisnis sebagai sumber data dan informasi tersebut dan domain arsitektur infrastruktur SPBE di mana diklasifikasikan pada media penyimpan data tersebut. Semua data disimpan dalam infrastruktur SPBE yang terintegrasi. Data dan informasi harus dapat diakses dan dibagipakaikan melalui aplikasi SPBE sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan.



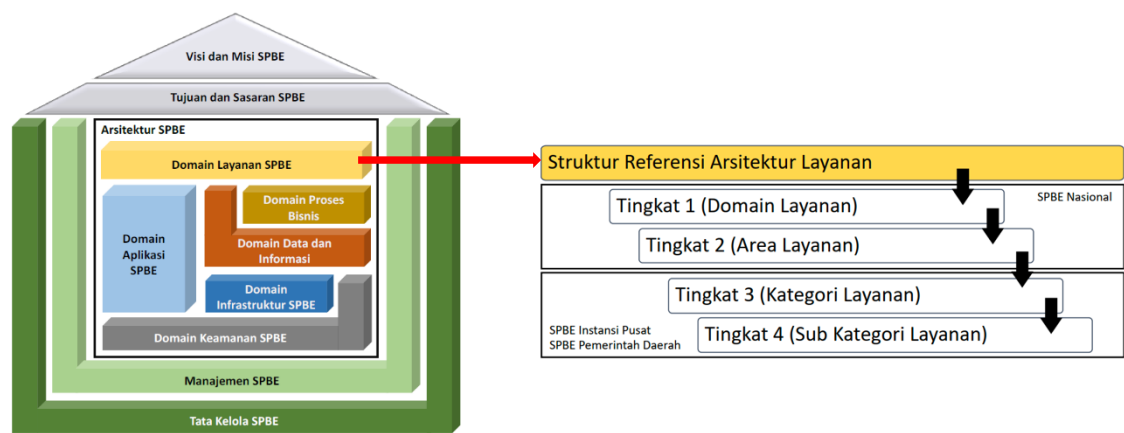
Gambar 2.7 Interaksi Domain Arsitektur Data dan Informasi, Domain Proses Bisnis, Domain Layanan SPBE, Domain Keamanan SPBE, Domain Aplikasi SPBE, serta Domain Infrastruktur SPBE

E. KERANGKA KERJA ARSITEKTUR LAYANAN SPBE

1. Prinsip Arsitektur Layanan SPBE

Dalam Peraturan Presiden mengenai SPBE, disebutkan bahwa layanan adalah keluaran yang dihasilkan oleh 1 (satu) atau beberapa fungsi aplikasi SPBE dan yang memiliki nilai manfaat. Sedangkan pengguna SPBE adalah Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, pegawai Aparatur Sipil Negara, perorangan, masyarakat, pelaku usaha, dan pihak lain yang memanfaatkan layanan. Sehingga, layanan menggunakan asas manfaat yang dihasilkan untuk para penggunanya. Diharapkan dengan penerapan domain layanan SPBE dalam melakukan identifikasi layanan pemerintah, maka dapat mempercepat terwujudnya agenda pembangunan untuk melakukan transformasi

pelayanan publik menuju layanan digital pemerintah terintegrasi, serta mempercepat tersedianya infrastruktur untuk ekonomi dan pelayanan dasar melalui pelayanan secara komprehensif, menjadikan pemerintah yang bersifat *user-centric* menuju penerapan Society 5. 0.

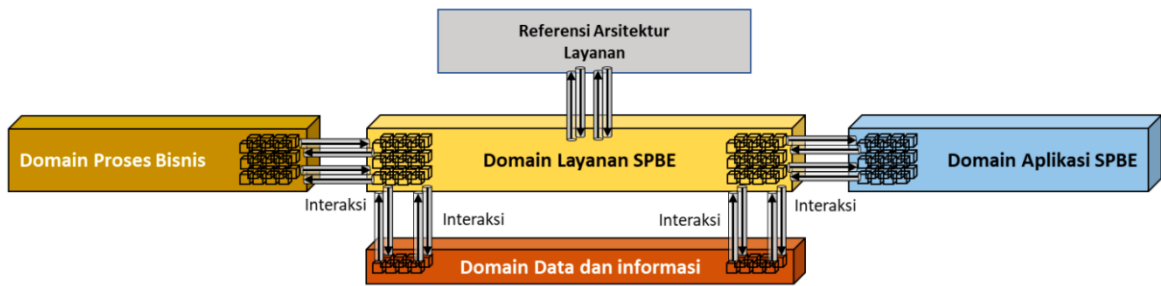


Gambar 2.8 Struktur Arsitektur Layanan SPBE

Dalam domain arsitektur layanan SPBE yang akan mendukung arah kebijakan nasional, selanjutnya diklasifikasikan substansi layanan SPBE ke dalam tingkatan struktur referensi arsitektur layanan SPBE yang berupa 4 (empat) tingkat, yaitu Tingkat 1 (Domain Layanan) yang mengelompokkan layanan pemerintahan ke dalam domain layanan pemerintahan, Tingkat 2 (Area Layanan) yang menjelaskan area layanan pemerintah sesuai dengan target layanan, Tingkat 3 (Kategori Layanan) yang menjelaskan layanan pemerintah yang merupakan layanan spesifik yang hanya dimiliki oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dalam hal ini adalah Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangan yang dimiliki, dan Tingkat 4 (Sub Kategori Layanan) yang menjelaskan lebih rinci dari kategori layanan.

2. Keterkaitan antar Domain

Dari berbagai layanan yang dihasilkan pemerintah, maka perlu dilakukan pengelompokan ataupun klasifikasi yang benar sesuai dengan struktur arsitektur layanan SPBE. Dengan adanya pengelompokan ini, memudahkan evaluasi terhadap layanan pemerintah yang didukung oleh sistem informasi secara keseluruhan yang berada pada domain aplikasi SPBE, sehingga menghilangkan duplikasi melalui berbagi pakai aplikasi dalam penyediaan layanan yang ada antar instansi pemerintahan, yang terbentuk dari domain proses bisnis, sehingga inovasi layanan baru untuk mendukung visi dan misi SPBE.

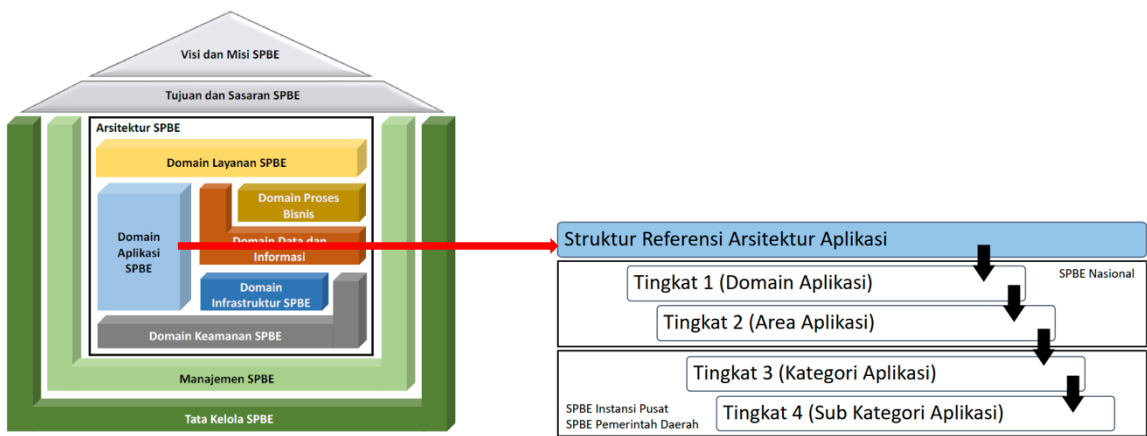


Gambar 2.9 Interaksi Domain Layanan SPBE, Domain Proses Bisnis, Domain Aplikasi SPBE, serta Domain Data dan Informasi

F. KERANGKA KERJA ARSITEKTUR APLIKASI SPBE

1. Prinsip Arsitektur Aplikasi SPBE

Arsitektur Aplikasi SPBE memastikan pelaksanaan pembangunan dan pengembangan aplikasi dilakukan secara berbagi pakai dan efisien, untuk melakukan tugas atau fungsi layanan SPBE, dengan memerhatikan faktor pengembangan aplikasi, tujuan pembangunan dan layanan pemerintahan, dan standardisasi. Kerangka kerja arsitektur aplikasi SPBE terdiri atas referensi arsitektur aplikasi SPBE dan domain arsitektur aplikasi SPBE.

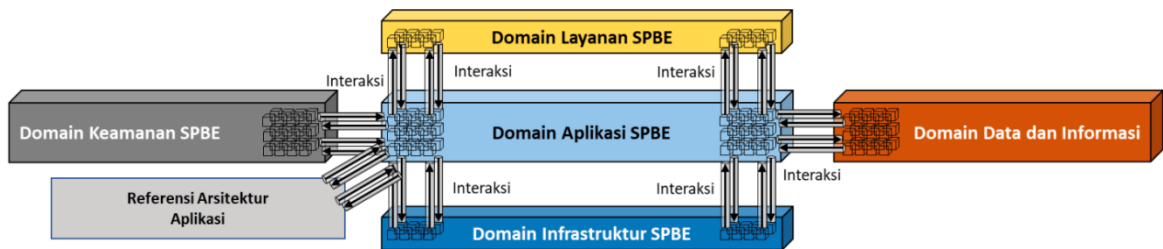


Gambar 2.10 Struktur Arsitektur Aplikasi SPBE

Dalam domain arsitektur aplikasi SPBE yang akan mendukung arah kebijakan nasional, selanjutnya diklasifikasikan substansi aplikasi SPBE ke dalam tingkatan struktur referensi arsitektur aplikasi SPBE berupa 4 (empat) tingkat, yaitu Tingkat 1 (Domain Aplikasi) yang mengelompokkan aplikasi pemerintah, Tingkat 2 (Area Aplikasi) yang menjelaskan area aplikasi pemerintah sesuai dengan target layanan, Tingkat 3 (Kategori Aplikasi) yang menjelaskan aplikasi pemerintah sesuai dengan target layanan spesifik yang hanya dimiliki oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dalam hal ini oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangan, dengan merelasikan kepada area layanan di tingkat nasional, dan Tingkat 4 (Sub Kategori Aplikasi) yang menjelaskan lebih rinci dari kategori aplikasi.

2. Keterkaitan antar Domain

Layanan SPBE yang dilakukan secara elektronik dihasilkan melalui sebuah aplikasi. Aplikasi SPBE diharapkan dapat mengakomodir fungsi-fungsi yang perlu dilakukan untuk menghasilkan layanan tersebut. Dengan demikian aplikasi ini dapat berupa sebuah aplikasi ataupun pengintegrasian dari beberapa aplikasi. Aplikasi SPBE terhubung secara terintegrasi secara lintas 15 elola 151, sehingga pembangunannya diwajibkan mengikuti kaidah pembangunan aplikasi SPBE sehingga mempermudah tata 15 elola aplikasi di lingkungan pemerintahan secara nasional. Penyusunan referensi arsitektur pada domain aplikasi SPBE bertujuan untuk melakukan klasifikasi aplikasi dan komponennya, melalui pemetaan aplikasi yang berkorelasi dengan arah kebijakan nasional berupa penciptaan layanan pemerintah terintegrasi, sehingga membantu secara signifikan dalam mengidentifikasi peluang ditemukannya duplikasi aplikasi dan peluang untuk berbagi pakai aplikasi.

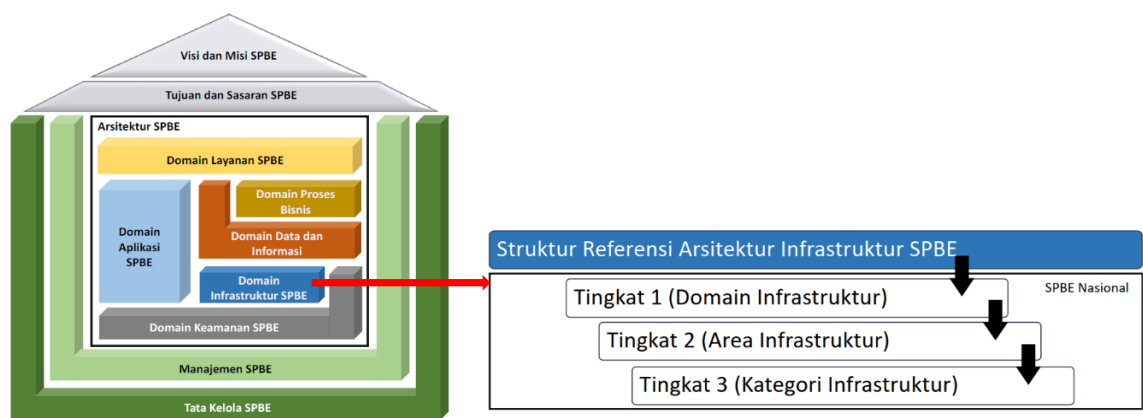


Gambar 2.11 Interaksi Domain Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE, Layanan SPBE, Domain Data dan Informasi, serta Domain Infrastruktur SPBE

G. KERANGKA KERJA ARSITEKTUR INFRASTRUKTUR SPBE

1. Prinsip Arsitektur Infrastruktur SPBE

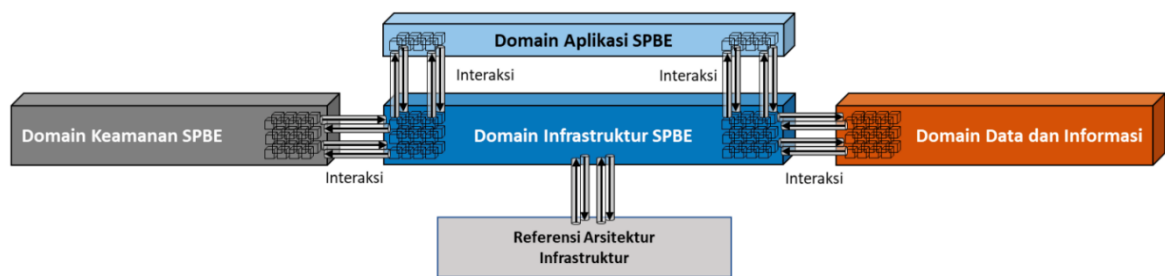
Arsitektur infrastruktur SPBE memastikan pelaksanaan pembangunan dan pengembangan infrastruktur SPBE nasional dilakukan secara berbagi pakai dan efisien, terhubung dengan infrastruktur SPBE Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, dengan memerhatikan pusat komputasi dan data terpusat, kapasitas besar untuk komputasi dan penyimpanan, penggunaan teknologi virtualisasi, pemanfaatan aset teknologi informasi dan komunikasi (*hardware / sofware / netware* secara optimal), kendali yang terpusat dan kolaborasi operasional, dukungan terkait media jaringan yang beragam, Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah sebagai pemakai, dan kerangka infrastruktur dan aplikasi pemerintah.



Gambar 2.12 Struktur Arsitektur Infrastruktur SPBE

Dalam domain arsitektur infrastruktur SPBE yang akan mendukung arah kebijakan nasional, selanjutnya substansi infrastruktur SPBE diklasifikasikan ke dalam tingkatan struktur referensi arsitektur infrastruktur SPBE berupa 3 (tiga) tingkat, yaitu Tingkat 1 (Domain Infrastruktur) yang mengelompokkan infrastruktur ke dalam domain infrastruktur, Tingkat 2 (Area Infrastruktur) yang menjelaskan area infrastruktur sesuai dengan domain infrastruktur dalam mendukung pengelolaan aplikasi serta data dan informasi, dikelompokkan ke dalam area infrastruktur, dan Tingkat 3 (Kategori Infrastruktur) yang menjelaskan lebih rinci dari area infrastruktur.

2. Keterkaitan antar Domain
- Domain infrastruktur SPBE akan memetakan semua perangkat keras, perangkat lunak, dan fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan sistem, aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data, perangkat integrasi/penghubung, dan perangkat elektronik lainnya, yang digunakan untuk menghasilkan layanan. Penyusunan referensi arsitektur pada domain infrastruktur SPBE bertujuan untuk memberikan dasar dalam mengklasifikasikan teknologi infrastruktur SPBE yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan SPBE. Referensi ini digunakan sebagai acuan dalam pemetaan infrastruktur SPBE yang digunakan saat ini dan yang direncanakan ke dalam domain arsitektur infrastruktur SPBE. Informasi ini diperlukan dalam mengidentifikasi infrastruktur SPBE yang dapat digunakan secara berbagi pakai dan mempermudah dalam melakukan konsolidasi dan utilisasinya, agar infrastruktur SPBE dapat dipergunakan secara terpadu serta efektif dan efisien.



Gambar 2.13 Interaksi Domain Infrastruktur SPBE, Domain Keamanan SPBE, Domain Aplikasi SPBE, serta Domain Data dan Informasi

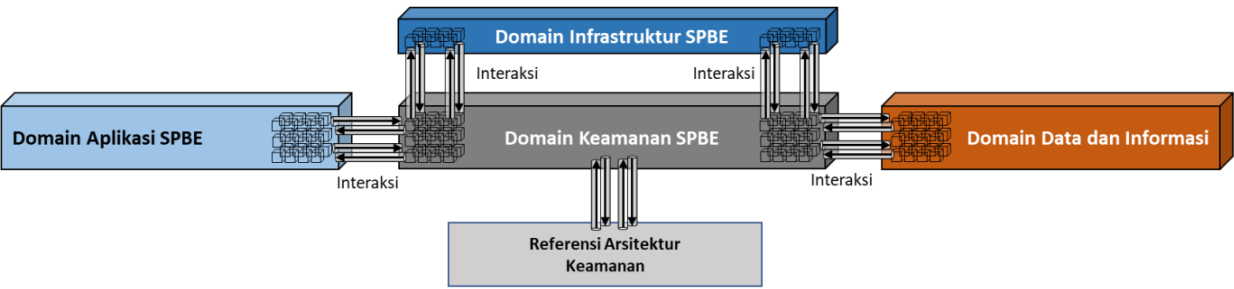
H. KERANGKA KERJA ARSITEKTUR KEAMANAN SPBE

1. Prinsip Arsitektur Keamanan SPBE

Domain arsitektur keamanan SPBE bertujuan untuk mendeskripsikan pengendalian dan pengintegrasian keamanan data dan informasi, aplikasi SPBE, serta infrastruktur SPBE yang terpadu dalam SPBE nasional dan menjadi acuan bagi Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, sehingga dapat dilakukan pengendalian melalui identifikasi program keamanan, pertimbangan kelaikan keamanan serta regulasi keamanan yang komprehensif. Penerapan keamanan harus memenuhi standar teknis dan prosedur keamanan. Dalam hal ini, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi telah melakukan identifikasi mengenai Standar Teknis dan Prosedur Keamanan SPBE, Standar Keamanan Internasional, ataupun regulasi lainnya menjadi acuan dalam penerapan keamanan SPBE.

2. Keterkaitan antar Domain

Domain arsitektur keamanan SPBE adalah domain arsitektur yang mendeskripsikan kerangka dasar keamanan terkait data dan informasi, aplikasi SPBE, dan infrastruktur SPBE untuk menghasilkan layanan pemerintah yang terintegrasi. Relasi domain arsitektur keamanan SPBE menyatakan hubungan dengan domain arsitektur data dan informasi, domain arsitektur aplikasi SPBE, dan domain arsitektur infrastruktur SPBE.



Gambar 2.14 Interaksi Domain Keamanan SPBE, Domain Aplikasi SPBE, Domain Infrastruktur SPBE, serta Domain Data dan Informasi

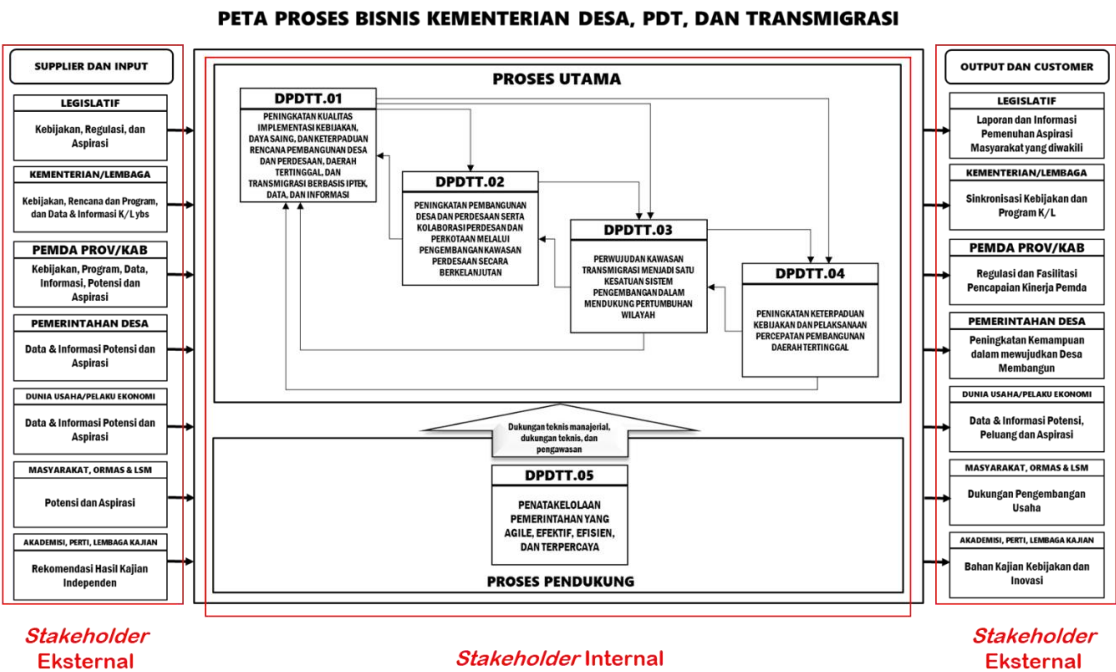
BAB III

ARSITEKTUR SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK PADA LINGKUNGAN KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI

A. DOMAIN PROSES BISNIS

1. Arsitektur Proses Bisnis

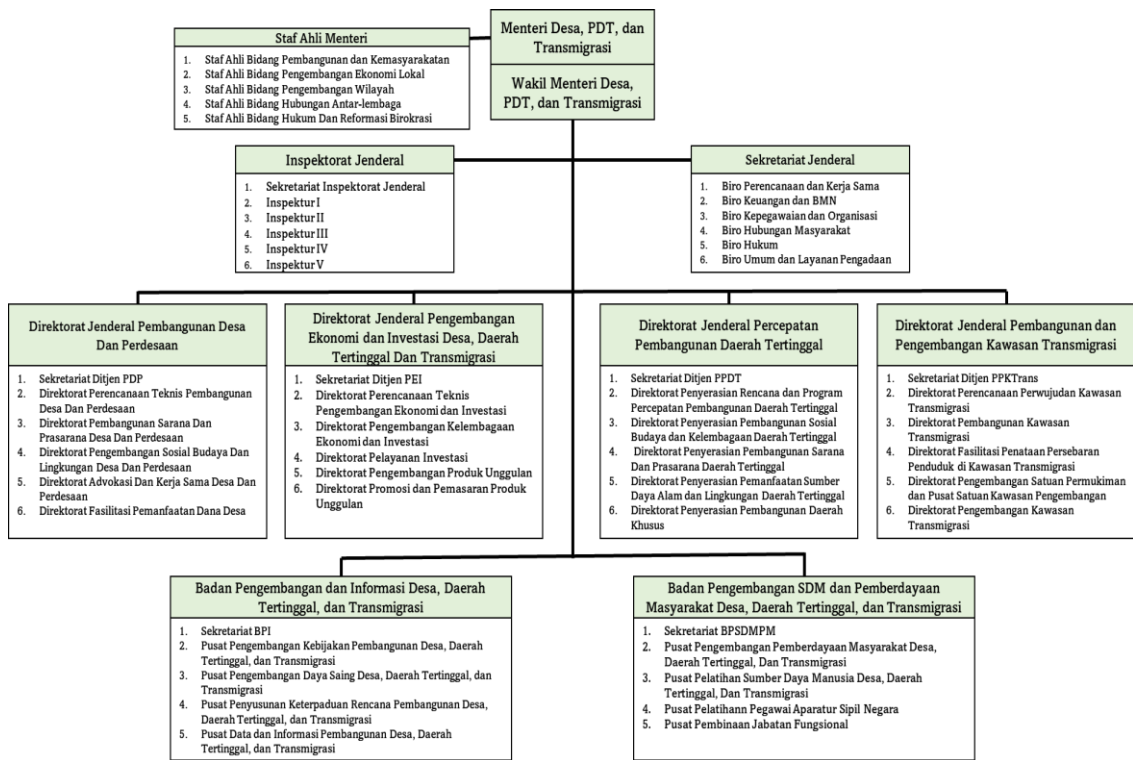
Berdasarkan visi, misi, dan sasaran Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, dilakukan pula identifikasi mitra kerja yang merupakan *stakeholders* beserta keterlibatan dan aktivitas yang dilakukan dalam kaitannya dengan proses bisnis Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, yang terdiri atas *stakeholder* internal dan *stakeholder* eksternal. *Stakeholder* internal dan *stakeholder* eksternal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dapat diidentifikasi berdasarkan dokumen Peta Proses Bisnis pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2022 tentang Peta Proses Bisnis Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 3.1.



Gambar 3.1. Peta Proses Bisnis Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

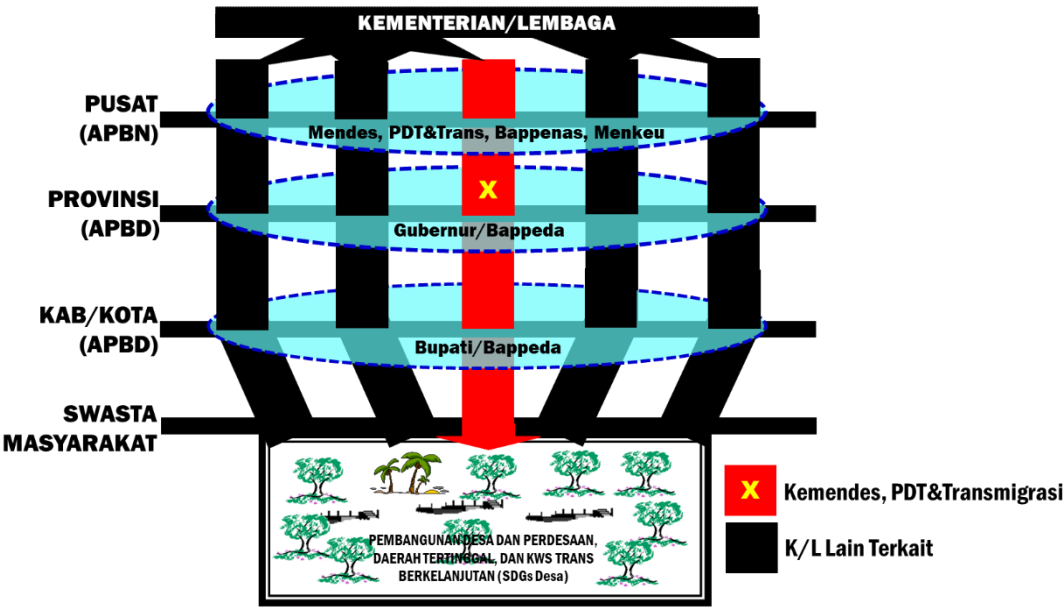
Stakeholder internal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dapat diidentifikasi dari struktur organisasi yang tercantum dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2020 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, yang terdiri atas 8 (delapan) Unit Kerja Eselon I, yaitu: (1) Sekretariat Jenderal, (2) Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan, (3) Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, (4) Direktorat Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal, (5) Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi, (6) Inspektorat Jenderal, (7) Badan Pengembangan dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, dan (8) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Struktur organisasi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 3.2.



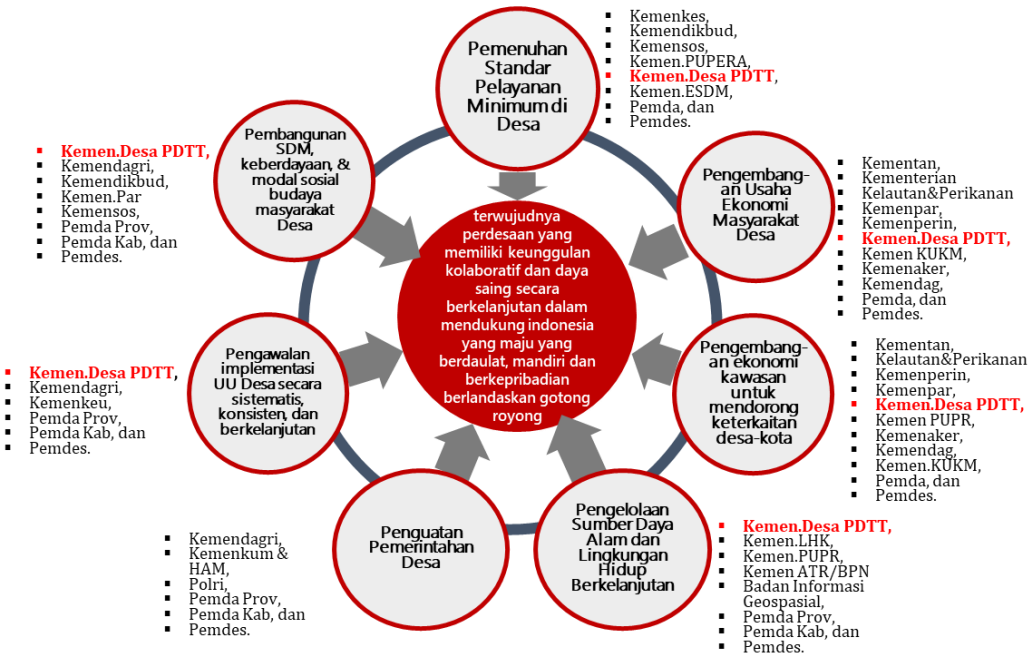
Gambar 3.2. Struktur Organisasi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

Identifikasi stakeholder eksternal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dilakukan secara vertikal dan horizontal. Identifikasi stakeholder eksternal secara vertikal dimana Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi mengkoordinasikan urusan ke Pemerintah Daerah (Provinsi, Kabupaten/Kota), dan Masyarakat, sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 3.3.



Gambar 3.3 Identifikasi Stakeholder Eksternal Secara Vertikal

Identifikasi stakeholder eksternal secara horizontal dimana Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi mengkoordinasikan masing-masing urusan terhadap Kementerian/Lembaga, sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 3.4.



Gambar 3.4. Identifikasi *Stakeholder* Eksternal Secara Horizontal

Pada kondisi eksisting arsitektur proses bisnis Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, diperlukan pemetaan struktur organisasi ke proses bisnis dan SOP yang sudah ada. Pemetaan tersebut berperan penting untuk memastikan keterlibatan unit-unit kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dalam mendukung pelaksanaan proses bisnis untuk mencapai tujuan dan sasaran Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Pemetaan

struktur organisasi ke proses bisnis dan SOP tersebut dilakukan berdasarkan dokumen Rekapitulasi SOP dan hasilnya ditunjukkan dalam bentuk ringkasan pemetaan pada Tabel 3.1.

Unit Kerja	Proses Bisnis Terkait	Jumlah SOP
Sekretariat Jenderal	DPDTT.05	161
Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan	DPDTT.02	45
Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	DPDTT.02 DPDTT.03 DPDTT.04	48
Direktorat Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal	DPDTT.04	41
Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	DPDTT.03	336
Inspektorat Jenderal	DPDTT.05	28
Badan Pengembangan dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	DPDTT.01	33
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	DPDTT.02 DPDTT.03 DPDTT.04 DPDTT.05	30
TOTAL		722

Tabel 3.1 Ringkasan Pemetaan Proses Bisnis dan SOP Berdasarkan Unit Kerja

Tabel menunjukkan ringkasan hasil pemetaan proses bisnis dan SOP berdasarkan unit kerja. Secara umum, proses bisnis utama (DPDTT.01, DPDTT.02, DPDTT.03 dan DPDTT.04) dilaksanakan oleh Badan Pengembangan dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan, Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Direktorat Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal, Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi, dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (BPI, PDP, PEI, PPDT, PPKT, BPSDM) berdasarkan bidang cakupan masing-masing, sedangkan proses bisnis pendukung (DPDTT.05) dilaksanakan oleh Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, dan Pusat Pelatihan Pegawai ASN Kementerian pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (SJ, IJ,

BPSDM3). Pelaksanaan lima proses bisnis tersebut didetailkan dalam 722 Standar Operasional Prosedur (SOP) yang saat ini sudah dimiliki Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

Proses bisnis di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dibuat dalam bentuk tingkatan mulai dari tingkat nasional (tingkat 1 dan 2) sampai pada tingkat lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (tingkat 3 sampai 4) dan mengacu pada Kode Referensi Arsitektur Bisnis (RAB) Nasional.

Tingkat 1	Tingkat 2	Tingkat 3	Tingkat 4
RAB.03 Pembangunan Kewilayahan	RAB.03.02 transmigrasi	RAB.03.02.05 Perwujudan Kawasan Transmigrasi Menjadi Satu Kesatuan Sistem Pengembangan dalam mendukung Pertumbuhan Wilayah	RAB.03.02.05.01 Perencanaan Teknis Perwujudan Kawasan Transmigrasi
			RAB.03.02.05.02 Fasilitasi Pembangunan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Serta Jaringan Konektivitas Intra Kawasan Transmigrasi, dan Antara Kawasan Transmigrasi Dengan Kawasan Sekitar
			RAB.03.02.05.03 Fasilitasi Penataan Persebaran Penduduk di Kawasan Transmigrasi
			RAB.03.02.05.04 Fasilitasi Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Transmigrasi

Tingkat 1	Tingkat 2	Tingkat 3	Tingkat 4
			RAB.03.02.05.05 Fasilitasi Pengembangan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Kawasan Transmigrasi
			RAB.03.02.05.06 Fasilitasi Pengembangan Sosial Budaya dan Kelembagaan Masyarakat Transmigrasi
			RAB.03.02.05.07 Fasilitasi Pengembangan Ekonomi dan Investasi di Kawasan Transmigrasi
	RAB.03.05 pembangunan kawasan atau daerah tertinggal	RAB.03.05.06 Peningkatan Pembangunan Desa dan Perdesaan Serta Kolaborasi Perdesaan dan Perkotaan Melalui Pengembangan Kawasan Perdesaan Secara Berkelanjutan	RAB.03.05.06.01 Perencanaan Teknis Perwujudan Desa Berkembang dan Desa Mandiri serta Kawasan Perdesaan
			RAB.03.05.06.02 Pengembangan Sarana dan Prasarana Desa dan Perdesaan
			RAB.03.05.06.03 Pengembangan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Desa dan Perdesaan
			RAB.03.05.06.04 Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Perdesaan

Tingkat 1	Tingkat 2	Tingkat 3	Tingkat 4
			RAB.03.05.06.05 Pengembangan Sosial Budaya dan Kelembagaan Desa dan Perdesaan
			RAB.03.05.06.06 Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa dan Perdesaan
			RAB.03.05.06.07 Penggunaan dan Pengelolaan Dana Desa
		RAB.03.05.07 Peningkatan Keterpaduan Kebijakan dan Pelaksanaan Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal	RAB.03.05.07.01 Penyerasian dan Penyusunan Kebijakan, Rencana dan Program Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Daerah Khusus (Kawasan Perbatasan, Pulau-Pulau Kecil Terluar, dan Kawasan Strategis di Daerah Tertinggal)
			RAB.03.05.07.02 Penyerasian dan Fasilitasi Pengembangan Sarana dan Prasarana Daerah Tertinggal
			RAB.03.05.07.03 Penyerasian dan Fasilitasi Pengembangan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Daerah Tertinggal

Tingkat 1	Tingkat 2	Tingkat 3	Tingkat 4
			RAB.03.05.07.04 Penyerasian dan Fasilitasi Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Daerah Tertinggal
			RAB.03.05.07.05 Penyerasian dan Fasilitasi Pengembangan Sosial Budaya dan Kelembagaan Daerah Tertinggal
			RAB.03.05.07.06 Penyerasian dan Fasilitasi Pengembangan Ekonomi dan Investasi Daerah Tertinggal
			RAB.03.05.07.07 Penyerasian dan Fasilitasi Pembangunan Daerah Khusus
RAB.05 Ketertiban Umum dan Keselamatan	RAB.05.01 hukum	RAB.05.01.06 Koordinasi, Pembinaan, Dan Pemberian Dukungan Regulasi, Advokasi, Dan Informasi Hukum	
RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.02 keuangan	RAB.09.02.10 Koordinasi, Pembinaan, Dan Pemberian Dukungan Pengelolaan Keuangan Dan Barang Milik Negara	

Tingkat 1	Tingkat 2	Tingkat 3	Tingkat 4
		RAB.09.02.11 Koordinasi, Pembinaan, Dan Pemberian Dukungan Pengelolaan Administrasi, Pelayanan Perkantoran, Dan Pelayanan Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah	
	RAB.09.04 komunikasi	RAB.09.04.05 Koordinasi, Pembinaan, Dan Pemberian Dukungan Pelayanan Kehumasan	
	RAB.09.05 perencanaan pembangunan nasional	RAB.09.05.09 Peningkatan Kualitas Implementasi Kebijakan, Daya Saing, dan Keterpaduan Rencana Pembangunan Desa dan Perdesaan, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi berbasis Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK), Data, dan Informasi	RAB 09.05.09.01 Peningkatan Kualitas Kebijakan Pembangunan Desa dan Perdesaan, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
			RAB 09.05.09.02 Pengembangan Inovasi Peningkatan Daya Saing Pembangunan Desa dan Perdesaan, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
			RAB.09.05.09.03 Penysunan Keterpaduan Rencana Pembangunan Desa dan Perdesaan, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

Tingkat 1	Tingkat 2	Tingkat 3	Tingkat 4
			RAB.09.05.09.04 Peningkatan Layanan Data dan Sistem Informasi Pembangunan Desa dan Perdesaan, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
		RAB.09.05.10 Koordinasi, Pembinaan, Dan Pemberian Dukungan Penetapan Kebijakan, Rencana, Program, Dan Anggaran	
	RAB.09.06 aparatur negara	RAB.09.06.10 Koordinasi, Pembinaan, Dan Pemberian Dukungan Pembinaan Organisasi, Tata Laksana, Dan Reformasi Birokrasi	
		RAB.09.06.11 Koordinasi, Pembinaan, Dan Pemberian Dukungan Manajemen Aparatur Sipil Negara	
		RAB.09.06.12 Pengawasan Dan Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan	

2. Metadata Arsitektur Proses Bisnis

Metadata Arsitektur Proses Bisnis adalah karakteristik atau ciri yang mendefinisikan setiap metadata pada Arsitektur Proses Bisnis. Cakupan atribut metadata arsitektur proses bisnis diantaranya adalah ID metadata, nama bisnis/ urusan, uraian proses bisnis, dan kode model referensi. Atribut metadata tersebut digunakan untuk membedakan Metadata Arsitektur Proses Bisnis dengan metadata domain Arsitektur SPBE lainnya. Rincian mengenai metadata Arsitektur Proses Bisnis SPBE adalah sebagai berikut:

ID	Nama Bisnis/Urusan	Uraian Proses Bisnis	Level 1	Level 2	Level 3	Level 4
DPDTT-DAB-03.02.05	Perwujudan Kawasan Transmigrasi Menjadi Satu Kesatuan Sistem Pengembangan dalam mendukung Pertumbuhan Wilayah	Penyediaan kebijakan dan regulasi untuk mendukung: a. meningkatnya status perkembangan Kawasan Transmigrasi yang direvitalisasi; b. terevitalisasinya Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dan Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDESMA) di Kawasan Transmigrasi; c. meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan investasi di Kawasan Transmigrasi mendukung transformasi ekonomi; dan d. meningkatnya kapasitas Sumber Daya Manusia Kawasan Transmigrasi.	RAB.03 Pembangunan Kewilayahan	RAB.03.02 transmigrasi	RAB.03.02.05 Perwujudan Kawasan Transmigrasi Menjadi Satu Kesatuan Sistem Pengembangan dalam mendukung Pertumbuhan Wilayah	
DPDTT-DAB-03.02.05.01	Fasilitasi Perencanaan Teknis Perwujudan Kawasan Transmigrasi	Fasilitasi Perencanaan Teknis Perwujudan Kawasan Transmigrasi, meliputi: a. pembangunan komitmen lintas K/L dan lintas Unit Kerja dalam perencanaan perwujudan Kawasan Transmigrasi; b. penyediaan norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagai pedoman bagi pemangku kepentingan dalam pelaksanaan penyusunan rencana teknis perwujudan Kawasan Transmigrasi; c. pelaksanaan penyusunan rencana teknis perwujudan	RAB.03 Pembangunan Kewilayahan	RAB.03.02 transmigrasi	RAB.03.02.05 Perwujudan Kawasan Transmigrasi Menjadi Satu Kesatuan Sistem Pengembangan dalam mendukung Pertumbuhan Wilayah	RAB.03.02.05.01 Fasilitasi Perencanaan Teknis Perwujudan Kawasan Transmigrasi

ID	Nama Bisnis/Urusan	Uraian Proses Bisnis	Level 1	Level 2	Level 3	Level 4
		Kawasan Transmigrasi sesuai dengan NSPK yang ditetapkan; dan d. penyediaan data dan informasi tentang perkembangan pelaksanaan penyusunan rencana teknis perwujudan Kawasan Transmigrasi.				
DPDTT-DAB-03.02.05.02	Fasilitasi Pembangunan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Serta Jaringan Konektivitas Intra Kawasan Transmigrasi, dan Antara Kawasan Transmigrasi Dengan Kawasan Sekitar	Fasilitasi Pembangunan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Serta Jaringan Konektivitas Intra Kawasan Transmigrasi, dan Antara Kawasan Transmigrasi Dengan Kawasan Sekitar, meliputi: a. pembangunan komitmen lintas K/L dan lintas Unit Kerja dalam Pembangunan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana serta Jaringan Konektivitas Intra Kawasan Transmigrasi, dan Antara Kawasan Transmigrasi dengan kawasan sekitar; b. penyediaan norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagai pedoman bagi pemangku kepentingan dalam Pelaksanaan Pembangunan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana serta Jaringan Konektivitas Intra Kawasan Transmigrasi, dan Antara Kawasan Transmigrasi dengan kawasan	RAB.03 Pembangunan Kewilayahan	RAB.03.02 transmigrasi	RAB.03.02.05 Perwujudan Kawasan Transmigrasi Menjadi Satu Kesatuan Sistem Pengembangan dalam mendukung Pertumbuhan Wilayah	RAB.03.02.05.02 Fasilitasi Pembangunan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Serta Jaringan Konektivitas Intra Kawasan Transmigrasi, dan Antara Kawasan Transmigrasi Dengan Kawasan Sekitar

ID	Nama Bisnis/Urusan	Uraian Proses Bisnis	Level 1	Level 2	Level 3	Level 4
		sekitar; c. pembangunan Kawasan Transmigrasi sesuai dengan struktur minimal yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan Perundang-undangan; dan d. penyediaan data dan informasi tentang perkembangan pelaksanaan Pembangunan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana serta Jaringan Konektivitas Intra Kawasan Transmigrasi, dan Antara Kawasan Transmigrasi dengan kawasan sekitar.				
DPDTT-DAB-03.02.05.03	Fasilitasi Penataan Persebaran Penduduk di Kawasan Transmigrasi	Fasilitasi Penataan Persebaran Penduduk di Kawasan Transmigrasi, meliputi: a. pembangunan komitmen lintas K/L dan lintas Unit Kerja dalam penataan persebaran penduduk di Kawasan Transmigrasi; b. penyediaan norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagai pedoman bagi pemangku kepentingan dalam pelaksanaan fasilitasi dan pelayanan penataan persebaran penduduk di Kawasan Transmigrasi; c. penataan persebaran penduduk di Kawasan Transmigrasi; dan	RAB.03 Pembangunan Kewilayahan	RAB.03.02 transmigrasi	RAB.03.02.05 Perwujudan Kawasan Transmigrasi Menjadi Satu Kesatuan Sistem Pengembangan dalam mendukung Pertumbuhan Wilayah	RAB.03.02.05.03 Fasilitasi Penataan Persebaran Penduduk di Kawasan Transmigrasi

ID	Nama Bisnis/Urusan	Uraian Proses Bisnis	Level 1	Level 2	Level 3	Level 4
		d. penyediaan data dan informasi tentang perkembangan pelaksanaan penataan persebaran penduduk di Kawasan Transmigrasi.				
DPDTT-DAB-03.02.05.04	Fasilitasi Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Transmigrasi	Fasilitasi Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Transmigrasi, meliputi: a. pembangunan komitmen lintas K/L dan lintas Unit Kerja dalam pengembangan Sumber Daya Manusia dan pemberdayaan masyarakat Transmigrasi; b. penyediaan norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagai pedoman bagi pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pengembangan Sumber Daya Manusia dan pemberdayaan masyarakat Transmigrasi; c. pelaksanaan pengembangan Sumber Daya Manusia dan pemberdayaan masyarakat transmigrasi serta meningkatnya kapasitas masyarakat Transmigrasi; dan d. penyediaan data dan informasi tentang perkembangan pelaksanaan pengembangan Sumber Daya Manusia dan pemberdayaan masyarakat Transmigrasi.	RAB.03 Pembangunan Kewilayahan	RAB.03.02 transmigrasi	RAB.03.02.05 Perwujudan Kawasan Transmigrasi Menjadi Satu Kesatuan Sistem Pengembangan dalam mendukung Pertumbuhan Wilayah	RAB.03.02.05.04 Fasilitasi Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Transmigrasi

ID	Nama Bisnis/Urusan	Uraian Proses Bisnis	Level 1	Level 2	Level 3	Level 4
DPDTT-DAB-03.02.05.05	Fasilitasi Pengembangan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Kawasan Transmigrasi	Fasilitasi Pengembangan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Kawasan Transmigrasi, meliputi: a. pembangunan komitmen lintas K/L dan lintas Unit Kerja dalam pengembangan Sumber Daya Alam dan lingkungan Kawasan Transmigrasi; b. penyediaan norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagai pedoman bagi pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pengembangan Sumber Daya Alam dan lingkungan Kawasan Transmigrasi; c. pelaksanaan pengembangan Sumber Daya Alam dan lingkungan Kawasan Transmigrasi; dan d. penyediaan data dan informasi tentang perkembangan pelaksanaan pengembangan Sumber Daya Alam dan lingkungan Kawasan Transmigrasi.	RAB.03 Pembangunan Kewilayahan	RAB.03.02 transmigrasi	RAB.03.02.05 Perwujudan Kawasan Transmigrasi Menjadi Satu Kesatuan Sistem Pengembangan dalam mendukung Pertumbuhan Wilayah	RAB.03.02.05.05 Fasilitasi Pengembangan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Kawasan Transmigrasi
DPDTT-DAB-03.02.05.06	Fasilitasi Pengembangan Sosial Budaya dan Kelembagaan Masyarakat Transmigrasi	Fasilitasi Pengembangan Sosial Budaya dan Kelembagaan Masyarakat Transmigrasi, meliputi: a. pembangunan komitmen lintas K/L dan lintas Unit Kerja dalam pelaksanaan Pengembangan Sosial Budaya dan kelembagaan	RAB.03 Pembangunan Kewilayahan	RAB.03.02 transmigrasi	RAB.03.02.05 Perwujudan Kawasan Transmigrasi Menjadi Satu Kesatuan Sistem Pengembangan dalam mendukung	RAB.03.02.05.06 Fasilitasi Pengembangan Sosial Budaya dan Kelembagaan Masyarakat Transmigrasi

ID	Nama Bisnis/Urusan	Uraian Proses Bisnis	Level 1	Level 2	Level 3	Level 4
		masyarakat Transmigrasi; b. penyediaan norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagai pedoman bagi pemangku kepentingan dalam pelaksanaan Pengembangan Sosial Budaya dan kelembagaan masyarakat Transmigrasi; c. pelaksanaan pengembangan Sumber Daya Alam dan lingkungan Kawasan Transmigrasi; dan d. penyediaan data dan informasi tentang perkembangan pelaksanaan pengembangan Sumber Daya Alam dan lingkungan Kawasan Transmigrasi.			Pertumbuhan Wilayah	
DPDTT-DAB-03.02.05.07	Fasilitasi Pengembangan Ekonomi dan Investasi di Kawasan Transmigrasi	Fasilitasi Pengembangan Ekonomi dan Investasi di Kawasan Transmigrasi, meliputi: a. pembangunan komitmen lintas K/L dan lintas Unit Kerja dalam pelaksanaan Pengembangan Ekonomi dan Investasi dalam pelaksanaan Transmigrasi; b. penyediaan norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagai pedoman bagi pemangku kepentingan dalam pelaksanaan	RAB.03 Pembangunan Kewilayahan	RAB.03.02 transmigrasi	RAB.03.02.05 Perwujudan Kawasan Transmigrasi Menjadi Satu Kesatuan Sistem Pengembangan dalam mendukung Pertumbuhan Wilayah	RAB.03.02.05.07 Fasilitasi Pengembangan Ekonomi dan Investasi di Kawasan Transmigrasi

ID	Nama Bisnis/Urusan	Uraian Proses Bisnis	Level 1	Level 2	Level 3	Level 4
		Pengembangan Ekonomi dan Investasi dalam pelaksanaan Transmigrasi; c. pelaksanaan Pengembangan Ekonomi dan Investasi dalam pelaksanaan Transmigrasi; dan d. penyediaan data dan informasi tentang perkembangan pelaksanaan Pengembangan Ekonomi dan Investasi dalam pelaksanaan Transmigrasi.				
DPDTT-DAB-03.05.06	Peningkatan Pembangunan Desa dan Perdesaan Serta Kolaborasi Perdesan dan Perkotaan Melalui Pengembangan Kawasan Perdesaan Secara Berkelanjutan	Penyediaan kebijakan dan regulasi untuk mendukung: a. berkembangnya status perkembangan Desa; b. meningkatnya status perkembangan kawasan perdesaan; c. menurunnya angka kemiskinan di perdesaan; d. terevitalisasinya Badan Usaha Milik Desa di Desa dan Badan Usaha Milik Desa Bersama di Kawasan Perdesaan; e. meningkatnya investasi di Desa dan Perdesaan mendukung transformasi ekonomi; dan f. meningkatnya kapasitas Sumber Daya Manusia Desa dan Perdesaan	RAB.03 Pembangunan Kewilayahan	RAB.03.05 pembangunan kawasan atau daerah tertinggal	RAB.03.05.06 Peningkatan Pembangunan Desa dan Perdesaan Serta Kolaborasi Perdesan dan Perkotaan Melalui Pengembangan Kawasan Perdesaan Secara Berkelanjutan	
DPDTT-DAB-03.05.06.01	Perencanaan Teknis Perwujudan Desa	Perencanaan Teknis Perwujudan Desa Berkembang dan Desa Mandiri serta Kawasan Perdesaan, meliputi: a. pembangunan komitmen lintas	RAB.03 Pembangunan Kewilayahan	RAB.03.05 pembangunan kawasan atau	RAB.03.05.06 Peningkatan Pembangunan Desa dan Perdesaan Serta	RAB.03.05.06.01 Perencanaan Teknis Perwujudan Desa Berkembang dan Desa

ID	Nama Bisnis/Urusan	Uraian Proses Bisnis	Level 1	Level 2	Level 3	Level 4
	Berkembang dan Desa Mandiri serta Kawasan Perdesaan	K/L dalam penyusunan regulasi perencanaan teknis untuk mendukung percepatan perwujudan Desa Berkembang dan Desa Mandiri serta Kawasan perdesaan; b. penyediaan norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagai pedoman dalam pelaksanaan penyusunan rencana teknis untuk mendukung percepatan perwujudan Desa Berkembang dan Desa Mandiri serta Kawasan perdesaan; dan c. pelaksanaan penyusunan rencana teknis yang dapat mendukung terpenuhinya indeks Desa yang berkembang dan mandiri, serta terpenuhinya indeks pembangunan Kawasan perdesaan yang berkembang mandiri, dan berdaya saing.		daerah tertinggal	Kolaborasi Perdesan dan Perkotaan Melalui Pengembangan Kawasan Perdesaan Secara Berkelanjutan	Mandiri serta Kawasan Perdesaan
DPDTT-DAB-03.05.06.02	Pengembangan Sarana dan Prasarana Desa dan Perdesaan	Pengembangan Sarana dan Prasarana Desa dan Perdesaan, meliputi: a. pembangunan komitmen lintas K/L dalam pengembangan sarana dan prasarana untuk mewujudkan Desa Berkembang dan Desa Mandiri serta Kawasan Perdesaan; b. penyediaan norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagai pedoman dalam pelaksanaan	RAB.03 Pembangunan Kewilayahan	RAB.03.05 pembangunan kawasan atau daerah tertinggal	RAB.03.05.06 Peningkatan Pembangunan Desa dan Perdesaan Serta Kolaborasi Perdesan dan Perkotaan Melalui Pengembangan Kawasan Perdesaan Secara Berkelanjutan	RAB.03.05.06.02 Pengembangan Sarana dan Prasarana Desa dan Perdesaan

ID	Nama Bisnis/Urusan	Uraian Proses Bisnis	Level 1	Level 2	Level 3	Level 4
		pengembangan sarana dan prasarana untuk mewujudkan Desa Berkembang dan Desa Mandiri serta Kawasan Perdesaan; c. pelaksanaan pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana untuk mewujudkan Desa Berkembang dan Desa Mandiri serta Kawasan Perdesaan; dan d. penyediaan data dan informasi perkembangan pelaksanaan pengembangan sarana dan prasarana untuk mewujudkan Desa Berkembang dan Desa Mandiri serta Kawasan Perdesaan.				
DPDTT-DAB-03.05.06.03	Pengembangan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Desa dan Perdesaan	Pengembangan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Desa dan Perdesaan, meliputi: a. pembangunan komitmen lintas K/L dalam pengembangan sumber daya alam dan lingkungan untuk mewujudkan Desa Berkembang dan Desa Mandiri serta Kawasan Perdesaan. b. penyediaan norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagai pedoman bagi pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pengembangan sumber daya alam dan lingkungan untuk mewujudkan	RAB.03 Pembangunan Kewilayahan	RAB.03.05 pembangunan kawasan atau daerah tertinggal	RAB.03.05.06 Peningkatan Pembangunan Desa dan Perdesaan Serta Kolaborasi Perdesaan dan Perkotaan Melalui Pengembangan Kawasan Perdesaan Secara Berkelanjutan	RAB.03.05.06.03 Pengembangan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Desa dan Perdesaan

ID	Nama Bisnis/Urusan	Uraian Proses Bisnis	Level 1	Level 2	Level 3	Level 4
		Desa Berkembang dan Desa Mandiri serta Kawasan Perdesaan; c. pelaksanaan pengembangan sumber daya alam dan lingkungan untuk mewujudkan Desa Berkembang dan Desa Mandiri serta Kawasan Perdesaan; dan d. penyediaan data dan informasi perkembangan pelaksanaan pengembangan sumber daya alam dan lingkungan dalam mewujudkan Desa Berkembang dan Desa Mandiri serta Kawasan Perdesaan.				
DPDTT-DAB-03.05.06.04	Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Perdesaan	Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Perdesaan, meliputi: a. pembangunan komitmen lintas K/L dalam pengembangan sumber daya manusia dan pemberdayaan masyarakat untuk mewujudkan Desa Berkembang dan Desa Mandiri serta Kawasan Perdesaan; b. penyediaan norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagai pedoman bagi pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia dan pemberdayaan masyarakat untuk mewujudkan Desa Berkembang dan Desa Mandiri	RAB.03 Pembangunan Kewilayahan	RAB.03.05 pembangunan kawasan atau daerah tertinggal	RAB.03.05.06 Peningkatan Pembangunan Desa dan Perdesaan Serta Kolaborasi Perdesaan dan Perkotaan Melalui Pengembangan Kawasan Perdesaan Secara Berkelanjutan	RAB.03.05.06.04 Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Perdesaan

ID	Nama Bisnis/Urusan	Uraian Proses Bisnis	Level 1	Level 2	Level 3	Level 4
		serta Kawasan Perdesaan; c. pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia dan pemberdayaan masyarakat untuk mewujudkan Desa Berkembang dan Desa Mandiri serta Kawasan Perdesaan; dan d. penyediaan data dan informasi perkembangan pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia dan pemberdayaan masyarakat dalam mewujudkan Desa Berkembang dan Desa Mandiri serta Kawasan Perdesaan.				
DPD TT-DAB-03.05.06.05	Pengembangan Sosial Budaya dan Kelembagaan Desa dan Perdesaan	Pengembangan Sosial Budaya dan Kelembagaan Desa dan Perdesaan, meliputi: a. pembangunan komitmen lintas K/L dalam pengembangan sosial budaya dan kelembagaan desa dan perdesaan untuk mewujudkan Desa Berkembang dan Desa Mandiri serta Kawasan Perdesaan; b. penyediaan norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagai pedoman bagi pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pengembangan sosial budaya dan kelembagaan desa dan perdesaan untuk mewujudkan Desa Berkembang dan Desa Mandiri serta Kawasan Perdesaan;	RAB.03 Pembangunan Kewilayahan	RAB.03.05 pembangunan kawasan atau daerah tertinggal	RAB.03.05.06 Peningkatan Pembangunan Desa dan Perdesaan Serta Kolaborasi Perdesaan dan Perkotaan Melalui Pengembangan Kawasan Perdesaan Secara Berkelanjutan	RAB.03.05.06.05 Pengembangan Sosial Budaya dan Kelembagaan Desa dan Perdesaan

ID	Nama Bisnis/Urusan	Uraian Proses Bisnis	Level 1	Level 2	Level 3	Level 4
		c. pelaksanaan pengembangan sosial budaya dan kelembagaan desa dan perdesaan untuk mewujudkan Desa Berkembang dan Desa Mandiri serta Kawasan Perdesaan; dan d. penyediaan data dan informasi perkembangan pelaksanaan pengembangan sosial budaya dan kelembagaan desa dan perdesaan untuk mewujudkan Desa Berkembang dan Desa Mandiri serta Kawasan Perdesaan.				
DPDTT-DAB-03.05.06.06	Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa dan Perdesaan	Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa dan Perdesaan, meliputi: a. pembangunan komitmen lintas K/L dalam pengembangan ekonomi dan investasi untuk mewujudkan Desa Berkembang dan Desa Mandiri serta Kawasan Perdesaan; b. penyediaan norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagai pedoman bagi pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pengembangan ekonomi dan investasi untuk mewujudkan Desa Berkembang dan Desa Mandiri serta Kawasan Perdesaan; c. pelaksanaan pengembangan ekonomi dan investasi untuk mewujudkan Desa Berkembang dan	RAB.03 Pembangunan Kewilayahan	RAB.03.05 pembangunan kawasan atau daerah tertinggal	RAB.03.05.06 Peningkatan Pembangunan Desa dan Perdesaan Serta Kolaborasi Perdesan dan Perkotaan Melalui Pengembangan Kawasan Perdesaan Secara Berkelanjutan	RAB.03.05.06.06 Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa dan Perdesaan

ID	Nama Bisnis/Urusan	Uraian Proses Bisnis	Level 1	Level 2	Level 3	Level 4
		Desa Mandiri serta Kawasan Perdesaan; dan d. penyediaan data dan informasi perkembangan pelaksanaan pengembangan ekonomi dan investasi untuk mewujudkan Desa Berkembang dan Desa Mandiri serta Kawasan Perdesaan.				
DPDTT-DAB-03.05.06.07	Penggunaan dan Pengelolaan Dana Desa	Penggunaan dan Pengelolaan Dana Desa, meliputi: a. pembangunan komitmen lintas K/L dalam penggunaan dan pengelolaan Dana Desa yang efektif dan efisien sehingga mampu mewujudkan Desa Berkembang dan Desa Mandiri serta Kawasan Perdesaan; b. penyediaan norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagai pedoman bagi pemangku kepentingan dalam pelaksanaan penggunaan dan pengelolaan Dana Desa yang efektif dan efisien sehingga mampu mewujudkan Desa Berkembang dan Desa Mandiri serta Kawasan Perdesaan; c. pelaksanaan penggunaan dan pengelolaan Dana Desa yang efektif dan efisien sehingga mampu mewujudkan Desa Berkembang dan Desa Mandiri serta Kawasan Perdesaan; dan	RAB.03 Pembangunan Kewilayahan	RAB.03.05 pembangunan kawasan atau daerah tertinggal	RAB.03.05.06 Peningkatan Pembangunan Desa dan Perdesaan Serta Kolaborasi Perdesan dan Perkotaan Melalui Pengembangan Kawasan Perdesaan Secara Berkelanjutan	RAB.03.05.06.07 Penggunaan dan Pengelolaan Dana Desa

ID	Nama Bisnis/Urusan	Uraian Proses Bisnis	Level 1	Level 2	Level 3	Level 4
		d. penyediaan data dan informasi perkembangan pelaksanaan penggunaan dan pengelolaan Dana Desa yang efektif dan efisien sehingga mampu mewujudkan Desa Berkembang dan Desa Mandiri serta Kawasan Perdesaan.				
DPDTT-DAB-03.05.07	Peningkatan Keterpaduan Kebijakan dan Pelaksanaan Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal	Pelaksanaan keterpaduan kebijakan dan pelaksanaan untuk mewujudkan: a. Berkurangnya jumlah Daerah Tertinggal; b. Menurunnya penduduk miskin di Daerah Tertinggal; c. Meningkatnya rata-rata Indeks Pembangunan d. Terevitalisasinya Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dan Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDESMA) di Daerah Tertinggal; e. Meningkatnya investasi di Daerah Tertinggal mendukung transformasi ekonomi; dan f. Meningkatnya kapasitas Sumber Daya Manusia Daerah Tertinggal.	RAB.03 Pembangunan Kewilayahan	RAB.03.05 pembangunan kawasan atau daerah tertinggal	RAB.03.05.07 Peningkatan Keterpaduan Kebijakan dan Pelaksanaan Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal	
DPDTT-DAB-03.05.07.01	Penyerasian dan Penyusunan Kebijakan, Rencana dan	Penyerasian dan Penyusunan Kebijakan, Rencana dan Program Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Daerah Khusus (Kawasan Perbatasan, Pulau-Pulau	RAB.03 Pembangunan Kewilayahan	RAB.03.05 pembangunan kawasan atau daerah tertinggal	RAB.03.05.07 Peningkatan Keterpaduan Kebijakan dan Pelaksanaan	RAB.03.05.07.01 Penyerasian dan Penyusunan Kebijakan, Rencana dan Program Percepatan

ID	Nama Bisnis/Urusan	Uraian Proses Bisnis	Level 1	Level 2	Level 3	Level 4
	Program Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Daerah Khusus (Kawasan Perbatasan, Pulau-Pulau Kecil Terluar, dan Kawasan Strategis di Daerah Tertinggal)	Kecil Terluar, dan Kawasan Strategis di Daerah Tertinggal), meliputi: a. pembangunan komitmen lintas K/L dan lintas Unit Kerja dalam Penyerasian Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal; b. penyediaan dokumen kesepakatan keserasian kebijakan, rencana dan program percepatan pembangunan Daerah Tertinggal dan Daerah Khusus (kawasan perbatasan, pulau-pulau kecil terluar, dan kawasan strategis di daerah tertinggal); dan c. penyediaan data dan informasi tentang perkembangan keserasian kebijakan, rencana, dan program Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Daerah Khusus (kawasan perbatasan, pulau-pulau kecil terluar, dan kawasan strategis di daerah tertinggal).			Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal	Pembangunan Daerah Tertinggal dan Daerah Khusus (Kawasan Perbatasan, Pulau-Pulau Kecil Terluar, dan Kawasan Strategis di Daerah Tertinggal)
DPDTT-DAB-03.05.07.02	Penyerasian dan Fasilitasi Pengembangan Sarana dan Prasarana	Penyerasian dan Fasilitasi Pengembangan Sarana dan Prasarana Daerah Tertinggal, meliputi: a. pembangunan komitmen lintas	RAB.03 Pembangunan Kewilayahan	RAB.03.05 pembangunan kawasan atau daerah tertinggal	RAB.03.05.07 Peningkatan Keterpaduan Kebijakan dan Pelaksanaan	RAB.03.05.07.02 Penyerasian dan Fasilitasi Pengembangan Sarana

ID	Nama Bisnis/Urusan	Uraian Proses Bisnis	Level 1	Level 2	Level 3	Level 4
	Daerah Tertinggal	K/L dan lintas Unit Kerja dalam Penyerasian dan Fasilitasi Pengembangan Sarana dan Prasarana untuk mendukung percepatan pembangunan Daerah Tertinggal; b. penyediaan dokumen kesepakatan keserasian kebijakan, rencana dan program lintas K/L dan Unit Kerja dalam Penyerasian dan Fasilitasi Pengembangan Sarana dan Prasarana untuk mendukung percepatan pembangunan Daerah Tertinggal; c. pelaksanaan Pengembangan Sarana dan Prasarana untuk mendukung percepatan pembangunan Daerah Tertinggal; dan d. penyediaan data dan informasi tentang perkembangan pelaksanaan Pengembangan Sarana dan Prasarana untuk mendukung percepatan pembangunan Daerah Tertinggal.			Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal	dan Prasarana Daerah Tertinggal
DPDTT-DAB-03.05.07.03	Penyerasian dan Fasilitasi Pengembangan Sumber Daya Alam dan	Penyerasian dan Fasilitasi Pengembangan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Daerah Tertinggal, meliputi: a. pembangunan komitmen lintas	RAB.03 Pembangunan Kewilayahan	RAB.03.05 pembangunan kawasan atau daerah tertinggal	RAB.03.05.07 Peningkatan Keterpaduan Kebijakan dan Pelaksanaan	RAB.03.05.07.03 Penyerasian dan Fasilitasi Pengembangan Sumber Daya Alam dan

ID	Nama Bisnis/Urusan	Uraian Proses Bisnis	Level 1	Level 2	Level 3	Level 4
	Lingkungan Daerah Tertinggal	K/L dan lintas Unit Kerja dalam Penyerasian dan Fasilitasi Pengembangan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Daerah Tertinggal; b. penyediaan dokumen kesepakatan keserasian kebijakan, rencana dan program lintas K/L dan Unit Kerja dalam Penyerasian dan Fasilitasi Pengembangan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Daerah Tertinggal; c. pelaksanaan dan perwujudan keserasian Pengembangan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Daerah Tertinggal; dan d. penyediaan data dan informasi tentang perkembangan pelaksanaan Pengembangan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Daerah Tertinggal.			Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal	Lingkungan Daerah Tertinggal
DPDTT-DAB-03.05.07.04	Penyerasian dan Fasilitasi Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Daerah Tertinggal	Penyerasian dan Fasilitasi Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Daerah Tertinggal, meliputi: a. pembangunan komitmen lintas K/L dan lintas Unit Kerja dalam Penyerasian dan Fasilitasi Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Daerah Tertinggal;	RAB.03 Pembangunan Kewilayahan	RAB.03.05 pembangunan kawasan atau daerah tertinggal	RAB.03.05.07 Peningkatan Keterpaduan Kebijakan dan Pelaksanaan Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal	RAB.03.05.07.04 Penyerasian dan Fasilitasi Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Daerah Tertinggal

ID	Nama Bisnis/Urusan	Uraian Proses Bisnis	Level 1	Level 2	Level 3	Level 4
		b. penyediaan dokumen kesepakatan keserasian kebijakan, rencana dan program lintas K/L dan Unit Kerja dalam Penyerasian dan Fasilitasi Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Daerah Tertinggal; c. pelaksanaan dan terwujudnya keserasian Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Daerah Tertinggal; dan d. penyediaan data dan informasi tentang perkembangan pelaksanaan Penyerasian dan Fasilitasi Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Daerah Tertinggal.				
DPDTT-DAB-03.05.07.05	Penyerasian dan Fasilitasi Pengembangan Sosial Budaya dan Kelembagaan Daerah Tertinggal	Penyerasian dan Fasilitasi Pengembangan Sosial Budaya dan Kelembagaan Daerah Tertinggal, meliputi: a. pembangunan komitmen lintas K/L dan lintas Unit Kerja dalam Penyerasian dan Fasilitasi Pengembangan Sosial Budaya dan kelembagaan Daerah Tertinggal; b. penyediaan dokumen kesepakatan keserasian kebijakan, rencana dan program lintas K/L dan Unit Kerja dalam Penyerasian	RAB.03 Pembangunan Kewilayahan	RAB.03.05 pembangunan kawasan atau daerah tertinggal	RAB.03.05.07 Peningkatan Keterpaduan Kebijakan dan Pelaksanaan Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal	RAB.03.05.07.05 Penyerasian dan Fasilitasi Pengembangan Sosial Budaya dan Kelembagaan Daerah Tertinggal

ID	Nama Bisnis/Urusan	Uraian Proses Bisnis	Level 1	Level 2	Level 3	Level 4
		dan Fasilitasi Pengembangan Pengembangan Sosial Budaya dan Kelembagaan Daerah Tertinggal; c. pelaksanaan dan terwujudnya keserasian Pengembangan Sosial Budaya dan Kelembagaan Daerah Tertinggal; d. penyediaan data dan informasi tentang perkembangan pelaksanaan Penyerasian dan Fasilitasi Pengembangan Sosial Budaya dan Kelembagaan Daerah Tertinggal.				
DPDTT-DAB-03.05.07.06	Penyerasian dan Fasilitasi Pengembangan Ekonomi dan Investasi Daerah Tertinggal	Penyerasian dan Fasilitasi Pengembangan Ekonomi dan Investasi Daerah Tertinggal, meliputi: a. pembangunan komitmen lintas K/L dan lintas Unit Kerja dalam Penyerasian dan Fasilitasi Pengembangan Ekonomi dan Investasi Daerah Tertinggal; b. penyediaan dokumen kesepakatan keserasian kebijakan, rencana dan program lintas K/L dan Unit Kerja dalam Penyerasian dan Fasilitasi Pengembangan Ekonomi dan Investasi Daerah Tertinggal; c. pelaksanaan dan terwujudnya	RAB.03 Pembangunan Kewilayahan	RAB.03.05 pembangunan kawasan atau daerah tertinggal	RAB.03.05.07 Peningkatan Keterpaduan Kebijakan dan Pelaksanaan Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal	RAB.03.05.07.06 Penyerasian dan Fasilitasi Pengembangan Ekonomi dan Investasi Daerah Tertinggal

ID	Nama Bisnis/Urusan	Uraian Proses Bisnis	Level 1	Level 2	Level 3	Level 4
		keserasian Pengembangan Ekonomi dan Investasi Daerah Tertinggal; dan d. penyediaan data dan informasi tentang perkembangan pelaksanaan Penyerasian dan Fasilitas Pengembangan Ekonomi dan Investasi Daerah Tertinggal.				
DPDTT-DAB-03.05.07.07	Penyerasian dan Fasilitas Pembangunan Daerah Khusus	perwujudan keserasian pelaksanaan percepatan pembangunan: a. Kawasan perbatasan di Daerah Tertinggal; b. Pulau-pulau Kecil terluar di Daerah Tertinggal; dan c. Kawasan Strategis di Daerah tertinggal.	RAB.03 Pembangunan Kewilayahan	RAB.03.05 pembangunan kawasan atau daerah tertinggal	RAB.03.05.07 Peningkatan Keterpaduan Kebijakan dan Pelaksanaan Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal	RAB.03.05.07.07 Penyerasian dan Fasilitas Pembangunan Daerah Khusus
DPDTT-DAB-05.01.06	Koordinasi, Pembinaan, Dan Pemberian Dukungan Regulasi, Advokasi, Dan Informasi Hukum	peningkatan kualitas regulasi sebagai dasar pelaksanaan bagi seluruh Unit kerja dilingkungan kementerian, terlaksananya advokasi dan pemberian pertimbangan hukum serta sosialisasi dan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH).	RAB.05 Ketertiban Umum dan Keselamatan	RAB.05.01 hukum	RAB.05.01.06 Koordinasi, Pembinaan, Dan Pemberian Dukungan Regulasi, Advokasi, Dan Informasi Hukum	

ID	Nama Bisnis/Urusan	Uraian Proses Bisnis	Level 1	Level 2	Level 3	Level 4
DPDTT-DAB-09.02.10	Koordinasi, Pembinaan, Dan Pemberian Dukungan Pengelolaan Keuangan Dan Barang Milik Negara	pelaksanaan pengelolaan keuangan dan Barang Milik Negara secara efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.02 keuangan	RAB.09.02.10 Koordinasi, Pembinaan, Dan Pemberian Dukungan Pengelolaan Keuangan Dan Barang Milik Negara	
DPDTT-DAB-09.02.11	Koordinasi, Pembinaan, Dan Pemberian Dukungan Pengelolaan Administrasi, Pelayanan Perkantoran, Dan Pelayanan Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah	peningkatan kualitas layanan administrasi, layanan perkantoran, dan layanan pengadaan barang dan jasa Pemerintah	RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.02 keuangan	RAB.09.02.11 Koordinasi, Pembinaan, Dan Pemberian Dukungan Pengelolaan Administrasi, Pelayanan Perkantoran, Dan Pelayanan Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah	
DPDTT-DAB-09.04.05	Koordinasi, Pembinaan, Dan Pemberian Dukungan	peningkatan persepsi publik yang positif terhadap Kementerian dan terlayani dan di tindak-lanjutnya pengaduan masyarakat dalam pembangunan	RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.04 komunikasi	RAB.09.04.05 Koordinasi, Pembinaan, Dan Pemberian	

ID	Nama Bisnis/Urusan	Uraian Proses Bisnis	Level 1	Level 2	Level 3	Level 4
	Pelayanan Kehumasan	Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi			Dukungan Pelayanan Kehumasan	
DPDTT-DAB-09.05.09	Peningkatan Kualitas Implementasi Kebijakan, Daya Saing, dan Keterpaduan Rencana Pembangunan Desa dan Perdesaan, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi berbasis Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK), Data, dan Informasi	Peningkatan kualitas implementasi kebijakan yang berbasis pada ilmu pengetahuan dan teknologi, inovasi, serta data dan informasi dalam keterpaduan rencana untuk meningkatkan daya saing pembangunan desa dan perdesaan, daerah tertinggal, dan transmigrasi.	RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.05 perencanaan pembangunan nasional	RAB.09.05.09 Peningkatan Kualitas Implementasi Kebijakan, Daya Saing, dan Keterpaduan Rencana Pembangunan Desa dan Perdesaan, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi berbasis Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK), Data, dan Informasi	
DPDTT-DAB-09.05.09.01	Peningkatan Kualitas Kebijakan Pembangunan Desa dan Perdesaan, Daerah	Pemberian rekomendasi hasil kajian yang menjadi masukan secara substantif dalam penyusunan suatu kebijakan yang berkualitas dan	RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.05 perencanaan pembangunan nasional	RAB.09.05.09 Peningkatan Kualitas Implementasi Kebijakan, Daya Saing, dan Keterpaduan Rencana	RAB 09.05.09.01 Peningkatan Kualitas Kebijakan Pembangunan Desa dan Perdesaan, Daerah

ID	Nama Bisnis/Urusan	Uraian Proses Bisnis	Level 1	Level 2	Level 3	Level 4
	Tertinggal, dan Transmigrasi	diimplementasikan menjadi suatu kegiatan Kementerian			Pembangunan Desa dan Perdesaan, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi berbasis Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK), Data, dan Informasi	Tertinggal, dan Transmigrasi
DPDTT-DAB-09.05.09.02	Pengembangan Inovasi Peningkatan Daya Saing Pembangunan Desa dan Perdesaan, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	Pemberian rekomendasi hasil kajian Model Inovasi dan/atau Model Kreativitas Peningkatan Daya Saing Pembangunan Desa dan Perdesaan, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang diimplementasikan menjadi suatu kegiatan Kementerian	RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.05 perencanaan pembangunan nasional	RAB.09.05.09 Peningkatan Kualitas Implementasi Kebijakan, Daya Saing, dan Keterpaduan Rencana Pembangunan Desa dan Perdesaan, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi berbasis Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK), Data, dan Informasi	RAB 09.05.09.02 Pengembangan Inovasi Peningkatan Daya Saing Pembangunan Desa dan Perdesaan, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
DPDTT-DAB-09.05.09.03	Penyusunan Keterpaduan Rencana Pembangunan Desa dan Perdesaan, Daerah	Penyediaan rencana terpadu pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang mencakup: a. Rencana Induk Pembangunan Desa dan Perdesaan, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; b. Peta Jalan (<i>roadmap</i>) Pembangunan Desa dan Perdesaan;	RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.05 perencanaan pembangunan nasional	RAB.09.05.09 Peningkatan Kualitas Implementasi Kebijakan, Daya Saing, dan Keterpaduan Rencana Pembangunan Desa dan Perdesaan,	RAB.09.05.09.03 Penyusunan Keterpaduan Rencana Pembangunan Desa dan Perdesaan, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

ID	Nama Bisnis/Urusan	Uraian Proses Bisnis	Level 1	Level 2	Level 3	Level 4
	Tertinggal, dan Transmigrasi	c. Peta Jalan (<i>roadmap</i>) Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal; d. Peta Jalan (<i>roadmap</i>) Pembangunan Transmigrasi; dan e. Rencana Kawasan Transmigrasi yang ditetapkan oleh Menteri menjadi Kawasan Transmigrasi.			Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi berbasis Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK), Data, dan Informasi	
DPDTT-DAB-09.05.09.04	Peningkatan Layanan Data dan Sistem Informasi Pembangunan Desa dan Perdesaan, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	Peningkatan Layanan Data dan Sistem Informasi Pembangunan Desa dan Perdesaan, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.05 perencanaan pembangunan nasional	RAB.09.05.09 Peningkatan Kualitas Implementasi Kebijakan, Daya Saing, dan Keterpaduan Rencana Pembangunan Desa dan Perdesaan, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi berbasis Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK), Data, dan Informasi	RAB.09.05.09.04 Peningkatan Layanan Data dan Sistem Informasi Pembangunan Desa dan Perdesaan, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

ID	Nama Bisnis/Urusan	Uraian Proses Bisnis	Level 1	Level 2	Level 3	Level 4
DPDTT-DAB-09.05.10	Koordinasi, Pembinaan, Dan Pemberian Dukungan Penetapan Kebijakan, Rencana, Program, Dan Anggaran	penyediaan dukungan kebijakan, rencana, program, dan anggaran sebagai dasar pelaksanaan seluruh Unit Kerja di lingkungan Kementerian	RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.05 perencanaan pembangunan nasional	RAB.09.05.10 Koordinasi, Pembinaan, Dan Pemberian Dukungan Penetapan Kebijakan, Rencana, Program, Dan Anggaran	
DPDTT-DAB-09.06.10	Koordinasi, Pembinaan, Dan Pemberian Dukungan Pembinaan Organisasi, Tata Laksana, Dan Reformasi Birokrasi	peningkatan kapasitas organisasi yang didukung oleh sistem dan tatalaksana, serta meningkatnya kualitas implementasi reformasi Birokrasi Kementerian.	RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.06 aparatur negara	RAB.09.06.10 Koordinasi, Pembinaan, Dan Pemberian Dukungan Pembinaan Organisasi, Tata Laksana, Dan Reformasi Birokrasi	
DPDTT-DAB-09.06.11	Koordinasi, Pembinaan, Dan Pemberian Dukungan Manajemen Aparatur Sipil Negara	perwujudan Manajemen Aparatur Sipil yang diselenggarakan berdasarkan Sistem Merit	RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.06 aparatur negara	RAB.09.06.11 Koordinasi, Pembinaan, Dan Pemberian Dukungan Manajemen Aparatur Sipil Negara	

ID	Nama Bisnis/Urusan	Uraian Proses Bisnis	Level 1	Level 2	Level 3	Level 4
DPDTT-DAB- 09.06.12	Pengawasan Dan Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan	peningkatan kualitas pengawasan, pengendalian mutu, dan akuntabilitas aparatur yang baik serta aturan yang efektif	RAB.09 Pemerintahan Umum	RAB.09.06 aparatur negara	RAB.09.06.12 Pengawasan Dan Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan	

B. DOMAIN DATA DAN INFORMASI

1. Arsitektur Data dan Informasi

Dalam Peraturan Presiden mengenai Satu Data Indonesia, disebutkan bahwa Satu Data Indonesia adalah kebijakan tata kelola Data pemerintah untuk menghasilkan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah melalui pemenuhan Standar Data, Metadata, Interoperabilitas Data, dan menggunakan Kode Rferensi dan Data Induk. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka diperlukan pemenuhan atas data pemerintah yang akurat, terbuka, dan interoperabel atau mudah dibagipakaikan antar pengguna data. Dengan demikian, pemanfaatan data pemerintah tidak hanya terbatas pada penggunaan secara internal antar Instansi Pemerintah, tetapi juga sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan data bagi masyarakat.

Peraturan Presiden mengenai Satu Data Indonesia juga mengamanatkan penetapan Data Prioritas dalam rangka mendukung prioritas pembangunan dan prioritas Presiden dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Rencana Kerja Pemerintah (RKP), mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, dan/atau memenuhi kebutuhan mendesak. Terdapat 16 Data Prioritas Statistik dan 8 Data Prioritas Spasial pada lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi seperti pada Tabel 3.4.

Tabel 3.4 Data Prioritas Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

No	Jenis Data	Nama Data	Produsen Data	Kementerian Pengusul
1	Statistik	Data Bantuan Desa Wisata	Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan	Kementerian Desa PDTT
2	Statistik	Data Bum Desa dan BUM Desa Bersama Berbadan Hukum	Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	Kementerian Desa PDTT

No	Jenis Data	Nama Data	Produsen Data	Kementerian Pengusul
3	Statistik	Data Desa yang telah mendapatkan intervensi pelatihan	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	Kementerian Desa PDTT
4	Statistik	Data Fasilitas Advokasi dan Diseminasi Kebijakan Pembangunan	Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan	Kementerian Desa PDTT
5	Statistik	Data Hasil Kebijakan dan Pengembangan Daya Saing Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Tahun 2022	Badan Pengembangan dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	Kementerian Desa PDTT
6	Statistik	Data Indeks Desa Membangun (IDM)	Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan	Kementerian Desa PDTT
7	Statistik	Data Indeks Perkembangan Kawasan Perdesaan (IPKP)	Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan	Kementerian Desa PDTT
8	Statistik	Data Indeks Komposit Ketertinggalan	Direktorat Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal	Kementerian Desa PDTT
9	Statistik	Data Intervensi Program dan Kegiatan PPDT oleh Kementerian/Lembaga di Daerah Tertinggal	Direktorat Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal	Kementerian Desa PDTT

No	Jenis Data	Nama Data	Produsen Data	Kementerian Pengusul
10	Statistik	Data Jumlah Masyarakat Desa yang telah diberikan pelatihan	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	Kementerian Desa PDTT
11	Statistik	Data Layanan Penurunan Stunting	Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan	Kementerian Desa PDTT
12	Statistik	Data Lokasi Desa Cerdas Fase I dan II	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	Kementerian Desa PDTT
13	Statistik	Data Penetapan Duta Digital Desa Cerdas Fase I Dan Fase II	Badan Pengembangan dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	Kementerian Desa PDTT
14	Statistik	Data Persebaran Kawasan Transmigrasi	Badan Pengembangan dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	Kementerian Desa PDTT
15	Statistik	Data Persebaran Lokasi Transmigrasi	Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Kementerian Desa PDTT

No	Jenis Data	Nama Data	Produsen Data	Kementerian Pengusul
16	Statistik	Data Potensi Unggulan Kabupaten Daerah Tertinggal	Direktorat Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal	Kementerian Desa PDTT
17	Spasial	Data Delineasi Kawasan Transmigrasi	Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS
18	Spasial	Peta Persebaran Kawasan Transmigrasi skala 1:50.000	Badan Pengembangan dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
19	Spasial	Peta Persebaran Lokasi Transmigrasi skala 1:50.000	Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
20	Spasial	Shapefile delineasi kawasan 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar)	Direktorat Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS
21	Spasial	Shapefile peta Delineasi Kawasan Transmigrasi	Badan Pengembangan dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS
22	Statistik	Data Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi		Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS

No	Jenis Data	Nama Data	Produsen Data	Kementerian Pengusul
23	Statistik	Data Tenaga Kerja Peserta Program Padat Karya	Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan	Kementerian Ketenagakerjaan
24	Statistik	Jumlah Desa yang memiliki Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) berdasarkan kategori/jenis usaha	Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

Arah kebijakan dan strategi dalam penyusunan Arsitektur SPBE memerhatikan keselarasan program pembangunan nasional yang didasarkan kebijakan Satu Data Indonesia. SPBE mendukung pelaksanaan tata kelola data dalam Satu Data Indonesia dengan pemberian dukungan teknologi informasi dan komunikasi baik melalui pembangunan atau pengembangan aplikasi maupun pembangunan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi berbagi pakai yang dibutuhkan. Sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan kegiatan SPBE dan Satu Data Indonesia diharapkan terwujud melalui kerangka SPBE terkait Arsitektur Data dan Informasi.

Domain arsitektur data dan informasi disusun berdasarkan kebutuhan data yang digunakan pada proses bisnis dan layanan yang diklasifikasikan dalam referensi arsitektur data dan informasi. Domain arsitektur data dan informasi digunakan untuk mengetahui data apa saja yang digunakan dalam proses bisnis, ataupun layanan SPBE yang sifatnya berdiri sendiri, serta dengan prinsip yang sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Satu Data Indonesia. Arsitektur Data dan Informasi menggambarkan kebutuhan data pada setiap Proses dan Sub Proses Arsitektur Proses Bisnis pada lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Arsitektur Data dan Informasi digambarkan sebagai berikut:

Tabel 3.5 Pemetaan DAD terhadap RAD

Tingkat 1	Tingkat 2	Tingkat 3	Tingkat 4
RAD.02 Informasi Ekonomi dan Industri	RAD.02.02 Data perdagangan	RAD.02.02.04 ekspor impor	RAD.02.02.04.01 Data Lokasi dan Produk Unggulan dan Data Indikator Keberhasilan program DSA
	RAD.02.03 Data pertanian	RAD.02.03.06 peningkatan nilai tambah dan daya saing	RAD.02.03.06.01 Data Komoditi Unggulan (Local Based)
	RAD.02.08 Data investasi	RAD.02.08.03 Manajemen perizinan penanaman modal	RAD.02.08.03.01 Data Proses Izin pelaksanaan Transmigrasi, data calon mitra dan para mitra yang hendak membangun usaha di lokasi kawasan transmigrasi, data status dan alur proses verifikasi dan persetujuan posisi mitra sebagai investor usaha
	RAD.02.10 Data usaha kecil dan menengah	RAD.02.10.02 kelembagaan usaha kecil dan menengah	RAD.02.10.02.01 Data Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa)
			RAD.02.10.02.02 Data Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDesma)
			RAD.02.10.02.03 Data Status Perkembangan Badan Usaha Milik Desa

Tingkat 1	Tingkat 2	Tingkat 3	Tingkat 4
			RAD.02.10.02.04 Data Status Perkembangan Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUM Desa Bersama)
			RAD.02.10.02.05 Data Status Perkembangan Tranformasi UPK Eks-PNPM MPd
		RAD.02.10.04 pemberdayaan dan pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah	RAD.02.10.04.01 Data Lokus Penerima Bantuan Permodalan Badan Usaha Milik Desa
			RAD.02.10.04.02 Data Perhutanan Sosial
			RAD.02.10.04.03 Data Best Practice BUM Desa, Data Kontak-Kontak BUM Desa yang dilakukan pemberdayaan pembelajaran, database pihak oftaker produk BUMDesa, Data Modul Materi Pembelajaran BUM Desa
RAD.03 Informasi Pembangunan Kewilayahan	RAD.03.02 Data transmigrasi	RAD.03.02.02 bidang transmigrasi	RAD.03.02.02.01 Data Dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi

Tingkat 1	Tingkat 2	Tingkat 3	Tingkat 4
			RAD.03.02.02.02 Data Fasilitas Hak Penggunaan Lahan (HPL) Transmigrasi
			RAD.03.02.02.03 Data Status Kawasan Transmigrasi
			RAD.03.02.02.04 Data Profil Satuan Permukiman Transmigrasi
			RAD.03.02.02.05 Data Penempatan Transmigran
			RAD.03.02.02.06 Data Daftar Aset Kawasan Transmigrasi
			RAD.03.02.02.07 Data Pembangunan Permukiman Transmigrasi
			RAD.03.02.02.08 Peta Persebaran Lokasi Transmigrasi Skala 1:50.000
			RAD.03.02.02.09 Peta Persebaran Kawasan Transmigrasi Skala 1:50.000
			RAD.03.02.02.10 Data Pendaftar Transmigrasi Online/Animo Transmigrasi

Tingkat 1	Tingkat 2	Tingkat 3	Tingkat 4
		RAD.03.02.04 pengembangan kawasan transmigrasi	RAD.03.02.04.01 Data Status Satuan Permukiman Bina
			RAD.03.02.04.02 Data Hasil Evaluasi Kawasan Transmigrasi
			RAD.03.02.04.03 Data Hasil Evaluasi Kawasan Perkotaan Baru
			RAD.03.02.04.04 Data Hasil Evaluasi Satuan Kawasan Pengembangan Transmigrasi
			RAD.03.02.04.05 Data Hasil Evaluasi Satuan Permukiman Transmigrasi
			RAD.03.02.04.06 Data Pengembangan Satuan Permukiman dan Pusat Satuan Kawasan Pengembangan
	RAD.03.03 Data transportasi	RAD.03.03.01 pembinaan transportasi regional	RAD.03.03.01.01 Data Menu Kegiatan
	RAD.03.05 Data pembangunan kawasan atau daerah tertinggal	RAD.03.05.02 pembangunan kawasan atau daerah tertinggal	RAD.03.05.02.01 Data desa di daerah tertinggal
			RAD.03.05.02.02 Data kecamatan di daerah tertinggal
			RAD.03.05.02.03 Data kabupaten daerah tertinggal
			RAD.03.05.02.04 Data provinsi yang

Tingkat 1	Tingkat 2	Tingkat 3	Tingkat 4
			memiliki daerah tertinggal
			RAD.03.05.02.05 Data usulan kebutuhan di daerah tertinggal
			RAD.03.05.02.06 Data produk unggulan di daerah tertinggal
			RAD.03.05.02.07 Data kriteria dan indikator daerah tertinggal
			RAD.03.05.02.08 Data BUMDes di daerah tertinggal
			RAD.03.05.02.09 Data IDM
			RAD.03.05.02.10 Data dokumen hukum
			RAD.03.05.02.11 Data Koperasi
			RAD.03.05.02.12 Data UKM
			RAD.03.05.02.13 Data IKM
			RAD.03.05.02.14 Data BTS
			RAD.03.05.02.15 Data Sebaran Lokus DTE
			RAD.03.05.02.16 Data Lokasi Intervensi Pemerintah Program/Kegiatan Pengembangan Produk Unggulan
		RAD.03.05.03 pembangunan desa dan	RAD.03.05.03.01 Data Indeks Desa Membangun

Tingkat 1	Tingkat 2	Tingkat 3	Tingkat 4
		kawasan pedesaan	RAD.03.05.03.02 Data Bantuan Desa Wisata
			RAD.03.05.03.03 Data Bantuan Pembangunan Embung
			RAD.03.05.03.04 Data Cakupan Layanan yang diterima oleh Kelompok Sasaran Penurunan Stunting
			RAD.03.05.03.05 Data Progres Penyaluran Dana Desa
			RAD.03.05.03.06 Data Hasil Pemanfaatan Dana Desa untuk Sarana dan Prasarana
			RAD.03.05.03.07 Data Hasil Pemanfaatan Dana Desa untuk Non Sarana dan Prasarana
			RAD.03.05.03.08 Data Jumlah Pekerja Padat Karya Tunai Desa
			RAD.03.05.03.09 Data Jumlah Penerima Bantuan Langsung Tunai Desa (Keluarga Penerima Manfaat)
			RAD.03.05.03.10 Data Kerja Sama Antar Desa dalam Satu Kecamatan

Tingkat 1	Tingkat 2	Tingkat 3	Tingkat 4
			RAD.03.05.03.11 Data Kerja Sama Antar Desa di Luar Kecamatan
			RAD.03.05.03.12 Data Kerja Sama Desa/Badan Usaha Milik Desa dengan Pihak Ketiga
			RAD.03.05.03.13 Data Kerja Sama Antar Desa Program Nasional Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat (Eks PNPM)
			RAD.03.05.03.14 Data Fasilitasi Advokasi dan Diseminasi Kebijakan Pembangunan
			RAD.03.05.03.15 Data Hasil Kajian
			RAD.03.05.03.16 Data Policy Brief
			RAD.03.05.03.17 Data Peta Jalan (Roadmap)
			RAD.03.05.03.18 Data Penetapan Target Peningkatan Status Desa
			RAD.03.05.03.19 Data Rencana Induk Pembangunan Perdesaan
			RAD.03.05.03.20 Data Rencana Kawasan Transmigrasi
			RAD.03.05.03.21 Data Program

Tingkat 1	Tingkat 2	Tingkat 3	Tingkat 4
			Pengembangan Desa Digital (Smart Village)
			RAD.03.05.03.22 Data SID
			RAD.03.05.03.23 Data SDGs
			RAD.03.05.03.24 Data Sistem Informasi Pembangunan Berbasis Masyarakat
		RAD.03.05.04 pemberdayaan masyarakat desa	RAD.03.05.04.01 Data Daftar Lokus Transformasi Ekonomi Kampung Terpadu
			RAD.03.05.04.02 Data Daftar Fasilitator Kabupaten
			RAD.03.05.04.03 Data Daftar Fasilitator Kecamatan
			RAD.03.05.04.04 Data Daftar Kader Desa
			RAD.03.05.04.05 Data Laporan Harian Pendamping Desa (TPP)
RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.02 Data keuangan	RAD.09.02.02 keuangan negara	
		RAD.09.02.05 penganggaran	
		RAD.09.02.08 pengadaan dan manajemen aset	
	RAD.09.03 Data informasi	RAD.09.03.05 pengelolaan	RAD.09.03.05.01 Data permohonan

Tingkat 1	Tingkat 2	Tingkat 3	Tingkat 4
		informasi publik	informasi dan pengaduan masyarakat
			RAD.09.03.05.02 Data Informasi Publik
			RAD.09.03.05.03 Data Buku di Perpustakaan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
			RAD.09.03.05.04 Data Pengaduan Masyarakat
			RAD.09.03.05.05 Data WBS
			RAD.09.03.05.06 Data Conselling & Consulting
			RAD.09.03.05.07 Data Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)
			RAD.09.03.05.08 Data Temuan Internal dan Eksternal
			RAD.09.03.05.09 Data Tindaklanjut Hasil Pengawasan
			RAD.09.03.05.10 Data Keputusan Irjen
			RAD.09.03.05.11 Data Undang-Undang
			RAD.09.03.05.12 Data Pengganti Undang - undang (PERPPU)
			RAD.09.03.05.13 Data Peraturan Pemerintah

Tingkat 1	Tingkat 2	Tingkat 3	Tingkat 4
			RAD.09.03.05.14 Data Peraturan Presiden
			RAD.09.03.05.15 Data Keputusan Presiden
			RAD.09.03.05.16 Data Instruksi Presiden
			RAD.09.03.05.17 Data Peraturan Menteri
			RAD.09.03.05.18 Data Keputusan Menteri
			RAD.09.03.05.19 Data Instruksi Menteri
			RAD.09.03.05.20 Data Surat Edaran Menteri
			RAD.09.03.05.21 Data Surat Edaran Sekjen
			RAD.09.03.05.22 Data Memorandum Of Undertanding (MoU) & PKB
			RAD.09.03.05.23 Data Rancangan Peraturan Menteri
			RAD.09.03.05.24 Data Rancangan Undang - undang
			RAD.09.03.05.25 Data Surat Edaran UKE I Terbuka
			RAD.09.03.05.26 Data Surat Keputusan
			RAD.09.03.05.27 Data Monografi Hukum
			RAD.09.03.05.28 Data Artikel Hukum

Tingkat 1	Tingkat 2	Tingkat 3	Tingkat 4
			RAD.09.03.05.29 Data Yurisprudensi
			RAD.09.03.05.30 Data Berita
			RAD.09.03.05.31 Data SPI
		RAD.09.03.06 Data Pengadaan Barang/Jasa	RAD.09.03.06.01 Data Progress Tender
			RAD.09.03.06.02 Data Rekapitulasi Sirup
	RAD.09.05 Data perencanaan pembangunan nasional	RAD.09.05.01 perencanaan pembangunan nasional	
		RAD.09.05.09 Data Rencana Strategis	
		RAD.09.05.10 Data Rencana Kerja Tahunan	
	RAD.09.06 Data aparatur negara	RAD.09.06.01 pengelolaan aparatur negara	RAD.09.06.01.01 Data Kehadiran
		RAD.09.06.01 pengelolaan aparatur negara	RAD.09.06.01.02 Data Pegawai
		RAD.09.06.01 pengelolaan aparatur negara	RAD.09.06.01.03 Data Evaluasi dan Kinerja pegawai
		RAD.09.06.04 pembinaan reformasi birokrasi	RAD.09.06.04.01 pembinaan reformasi birokrasi instansi
		RAD.09.06.05 akuntabilitas kinerja	RAD.09.06.05.01 Data Laporan Kinerja

Tingkat 1	Tingkat 2	Tingkat 3	Tingkat 4
			RAD.09.06.05.02 Data Laporan Hasil Evaluasi SAKIP
			RAD.09.06.05.03 Data Perjanjian Kinerja
			RAD.09.06.05.04 Data Indikator Kinerja Utama
			RAD.09.06.05.05 Data Target Kinerja dan Anggaran
			RAD.09.06.05.06 Data Capaian Unit
			RAD.09.06.05.07 Data Capaian Triwulan
			RAD.09.06.05.08 Data Capaian Tahunan
			RAD.09.06.05.09 Data Nilai Kinerja Unit
		RAD.09.06.08 kearsipan nasional	RAD.09.06.08.01 pembinaan kearsipan instansi

2. Metadata Arsitektur Data dan Informasi

Metadata Arsitektur Data dan Informasi adalah karakteristik atau ciri yang mendefinisikan setiap metadata pada Arsitektur Data dan Informasi. Cakupan atribut metadata arsitektur data dan informasi diantaranya adalah ID metadata, nama data, uraian data, tujuan data, kode model referensi, sifat data, jenis data, validitas data, penanggung jawab, interoperabilitas data dan ID metadata terkait. Atribut metadata tersebut digunakan untuk membedakan Metadata Arsitektur Data dan Informasi dengan metadata domain Arsitektur SPBE lainnya. Rincian mengenai metadata Arsitektur Data dan Informasi adalah sebagai berikut:

Tabel 3.6 Metadata Arsitektur Data dan Informasi

ID Data	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Sifat Data	Jenis Data	Validitas Data	Produsen Data/Penanggung Jawab Data	Interoperabilitas	Proses Bisnis Terkait	Layanan Terkait	Level 1	Level 2	Level 3	Level 4
DPD TT -DAD- 02.02. 04.01	Data Desa Sejahtera Astra	Data terkait program Desa Sejahtera Astra (kerja sama dengan PT Astra Internasional)	untuk memberikan informasi program Desa Sejahtera Astra (kerja sama dengan PT Astra Internasional)	Terbatas	String	Tahunan	Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	Tidak	DPD TT -DAB- 03.05. 06.06 DPD TT -DAB- 03.02. 05.07 DPD TT -DAB- 03.05. 07.06	DPD TT- DAL- 01.03.07.01 Layanan Sistem Monitoring dan Evaluasi TEKAD	RAD.02 Informasi Ekonomi dan Industri	RAD.02. 02 Data perdagangan	RAD.02. 02.04 ekspor impor	RAD.02.02 .04.01 Data Lokasi dan Produk Unggulan dan Data Indikator Keberhasilan program DSA
DPD TT -DAD- 02.03. 06.01	Data Produk Unggulan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	Data terkait produk unggulan yang ada di desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi	untuk memberikan informasi produk unggulan yang ada di desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi	Terbuka	String	Tahunan	Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	Tidak	DPD TT -DAB- 03.05. 06.06 DPD TT -DAB- 03.02. 05.07 DPD TT -DAB- 03.05. 07.06	DPD TT- DAL- 01.03.07.01 Layanan Sistem Monitoring dan Evaluasi TEKAD	RAD.02 Informasi Ekonomi dan Industri	RAD.02. 03 Pertanian	RAD.02. 03.06 peningkatan nilai tambah dan daya saing	RAD.02.03 .06.01 Data Komoditi Unggulan (Local Based)
DPD TT -DAD- 02.08. 03.01	Data Mitra Usaha yang mengajukan izin penanaman	Data terkait Mitra Usaha dan guidance bagi para Mitra usaha untuk mengajukan	untuk memberikan informasi kepada mitra usaha/	Tertutup	String	Realtime	Direktorat Pelayanan Investasi Desa, Daerah Tertinggal,	Tidak	DPD TT -DAB- 03.02. 05.07	DPD TT- DAL- 01.16.04.01 e-IPT (Layanan Pemberian	RAD.02 Informasi Ekonomi	RAD.02. 08 Investasi	RAD.02. 08.03 Manajemen perizinan	RAD.02.08 .03.01 Data Proses Izin pelaksanaan

ID Data	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Sifat Data	Jenis Data	Validitas Data	Produsen Data/Penanggung Jawab Data	Interoperabilitas	Proses Bisnis Terkait	Layanan Terkait	Level 1	Level 2	Level 3	Level 4
	n modal di wilayah Transmigrasi (e-iPT)	penanaman modal di wilayah kawasan Transmigrasi	investor/pe modal mengenai panduan dan aturan serta alur proses perzinan dan penanaman modal di wilayah kawasan transmigrasi				dan Transmigrasi			Izin Pelaksanaan Transmigrasi bagi calon mitra/mitra badan usaha berbasis elektronik)	i dan Industri		penanam an modal	Transmigrasi, data calon mitra dan para mitra yang hendak membangun usaha di lokasi kawasan transmigrasi, data status dan alur proses verifikasi dan persetujuan posisi mitra sebagai investor usaha
DPD TT -DAD-02.10.02.01	Data Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa)	Data terkait BUM Desa yang mendaftar badan hukum pada portal BUMDes	untuk memberikan informasi BUM Desa yang mendaftar badan hukum pada portal BUM Desa	Terbuka	String	Realtime	Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan	Ya	DPD TT -DAB-03.05.06.06 DPD TT -DAB-03.02.05.07 DPD TT -DAB-03.05.07.06	DPD TT -DAL-01.11.03.01 Layanan Pendaftaran Nama dan Penerbitan Sertifikat Badan Hukum BUM Desa/BUM	RAD.02 Informasi Ekonomi dan Industri	RAD.02.10 Data usaha kecil dan menengah	RAD.02.10.02 kelembagaan usaha kecil dan menengah	RAD.02.10.02.01 Data Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa)

ID Data	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Sifat Data	Jenis Data	Validitas Data	Produsen Data/Penanggung Jawab Data	Interoperabilitas	Proses Bisnis Terkait	Layanan Terkait	Level 1	Level 2	Level 3	Level 4
							Transmigrasi			Desa Bersama				
DPD TT-DAD-02.10.02.02	Data Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDesma)	Data terkait BUM Desa Bersama yang mendaftar badan hukum pada portal BUMDes	untuk memberikan informasi BUM Desa Bersama yang mendaftar badan hukum pada portal BUM Desa	Terbuka	String	Realtime	Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	Ya	DPD TT-DAB-03.05.06.06 DPD TT-DAB-03.02.05.07 DPD TT-DAB-03.05.07.06	DPD TT-DAL-01.11.03.01 Layanan Pendaftaran Nama dan Penerbitan Sertifikat Badan Hukum BUM Desa/BUM Desa Bersama	RAD.02 Informasi Ekonomi dan Industri	RAD.02.10 Data usaha kecil dan menengah	RAD.02.10.02 kelembagaan usaha kecil dan menengah	RAD.02.10.02.02 Data Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDesma)
DPD TT-DAD-02.10.02.03	Data Pemeringkatan Badan Usaha Milik Desa	Data Terkait Scoring dan Status Klasifikasi dan Kategorisasi Perkembangan BUM Desa	untuk memberikan informasi mengenai status klasifikasi dan kategorisasi perkembangan BUM Desa	Tertutup	String	Realtime	Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	Tidak	DPD TT-DAB-03.05.06.06 DPD TT-DAB-03.02.05.07 DPD TT-DAB-03.05.07.06	DPD TT-DAL-01.11.03.02 Layanan pemeringkatan BUM Desa	RAD.02 Informasi Ekonomi dan Industri	RAD.02.10 Data usaha kecil dan menengah	RAD.02.10.02 kelembagaan usaha kecil dan menengah	RAD.02.10.02.03 Data Status Perkembangan Badan Usaha Milik Desa
DPD TT-DAD-	Data Pemeringkatan	Data Terkait Scoring dan Status Klasifikasi	untuk memberikan informasi	Tertutup	String	Realtime	Direktorat Jenderal Pengemba	Tidak	DPD TT-DAB-03.05.	DPD TT-DAL-01.11.03.02	RAD.02 Informasi	RAD.02.10 Data usaha	RAD.02.10.02 kelemba	RAD.02.10.02.04 Data

ID Data	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Sifat Data	Jenis Data	Validitas Data	Produsen Data/Penanggung Jawab Data	Interoperabilitas	Proses Bisnis Terkait	Layanan Terkait	Level 1	Level 2	Level 3	Level 4
02.10.02.04	Badan Usaha Milik Desa Bersama	dan Kategorisasi Perkembangan BUM Desa Bersama	mengenai status klasifikasi dan kategorisasi perkembangan BUM Desa Bersama				ngan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi		06.06 DPDTT -DAB-03.02.05.07 DPDTT -DAB-03.05.07.06	Layanan pemeringkatan BUM Desa	Ekonomi dan Industri	kecil dan menengah	gaan usaha kecil dan menengah	Status Perkembangan Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUM Desa Bersama)
DPDTT -DAD-02.10.02.05	Data Transformasi UPK Eks PNPM-MPd	Data mengenai Pemetaan transformasi UPK Eks PNPM-MPd	untuk memberikan informasi mengenai status UPK Eks PNPM MPd yang bertransformasi kepada bentuk kelembagaan usaha lainnya	Tertutup	String	Realtime	Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	Tidak	DPDTT -DAB-03.05.06.06 DPDTT -DAB-03.02.05.07 DPDTT -DAB-03.05.07.06	DPDTT-DAL-01.11.03.02 Layanan Monev Transformasi UPK PNPM MPd	RAD.02 Informasi Ekonomi dan Industri	RAD.02.10 Data usaha kecil dan menengah	RAD.02.10.02 kelembagaan usaha kecil dan menengah	RAD.02.10.02.05 Data Status Perkembangan Transformasi UPK Eks- PNPM MPd
DPDTT -DAD-02.10.04.01	Data Lokus Penerima Bantuan Permodalan Badan Usaha Milik Desa	Data terkait BUM Desa yang menerima bantuan permodalan dari Ditjen PEI DDTT	untuk memberikan informasi BUM Desa yang mendapatkan bantuan permodalan dari Ditjen PEI	Tertutup	String	Tahunan	Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	Tidak	DPDTT -DAB-03.05.06.06 DPDTT -DAB-03.02.05.07 DPDTT -DAB-03.05.07.06	DPDTT-DAL-01.11.03.01 Layanan Pendaftaran Nama dan Penerbitan Sertifikat Badan Hukum BUM Desa/BUM Desa Bersama	RAD.02 Informasi Ekonomi dan Industri	RAD.02.10 Data usaha kecil dan menengah	RAD.02.10.04 pemberdayaan dan pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah	RAD.02.10.04.01 Data Lokus Penerima Bantuan Permodalan Badan Usaha Milik Desa

ID Data	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Sifat Data	Jenis Data	Validitas Data	Produsen Data/Penanggung Jawab Data	Interoperabilitas	Proses Bisnis Terkait	Layanan Terkait	Level 1	Level 2	Level 3	Level 4
DPD TT -DAD- 02.10. 04.02	Data Perhutanan Sosial	Data terkait bantuan perhutanan sosial	untuk memberikan informasi tentang data bantuan perhutanan sosial	Tertutup	String	Tahunan	Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	Tidak	DPD TT -DAB- 03.05. 06.06 DPD TT -DAB- 03.02. 05.07 DPD TT -DAB- 03.05. 07.06	DPD TT- DAL- 01.43.02.01 Layanan Monev Transformasi UPK PNPM MPd	RAD.02 Informasi Ekonomi dan Industri	RAD.02. 10 Data usaha kecil dan menengah	RAD.02. 10.04 pemberdayaan dan pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah	RAD.02.10 .04.02 Data Perhutanan Sosial
DPD TT -DAD- 02.10. 04.03	Data Program Pemberdayaan Pembelajaran bagi BUM Desa berbasis Digital (BUMDes Learning)	Data mengenai media pembelajaran dua arah bagi BUM Desa	Sebagai sarana informasi dan komunikasi terkait pengelolaan usaha, praktik-praktik baik, dan inovasi BUM Desa serta sebagai media pembelajaran bagi BUM Desa	Tertutup	String	Realtime	Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	Tidak	DPD TT -DAB- 03.05. 06.06 DPD TT -DAB- 03.02. 05.07 DPD TT -DAB- 03.05. 07.06	DPD TT- DAL- 01.11.03.03 Layanan BUMDes Learning (Pembelajaran BUM Desa Berbasis Digital)	RAD.02 Informasi Ekonomi dan Industri	RAD.02. 10 Data usaha kecil dan menengah	RAD.02. 10.04 pemberdayaan dan pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah	RAD.02.10 .04.03 Data Best Practice BUM Desa, Data Kontak-Kontak BUM Desa yang dilakukan pemberdayaan pembelajaran, database pihak oftaker produk BUMDesa, Data Modul Materi Pembelajaran

ID Data	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Sifat Data	Jenis Data	Validitas Data	Produsen Data/Penanggung Jawab Data	Interoperabilitas	Proses Bisnis Terkait	Layanan Terkait	Level 1	Level 2	Level 3	Level 4
														an BUM Desa
DPD TT -DAD- 03.02. 02.01	Data Dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Data dokumen perencanaan teknis (RTSP, RSKP, RT Sarpras, Renbangmas) yang telah disusun sebagai dasar perencanaan pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi	dokumentasi data perencanaan teknis yang telah disusun	Terbatas	String	Tahunan	Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Tidak	DPD TT -DAB- 03.02. 05.01	DPD TT- DAL- 01.43.03.04 Layanan Informasi Peta Terpadu Kawasan Transmigrasi	RAD.03 Informasi Pembangunan Kewilayah	RAD.03. 02 Data transmigrasi	RAD.03. 02.02 bidang transmigrasi	RAD.03.02.01 Data Dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi
DPD TT -DAD- 03.02. 02.02	Data Fasilitas Hak Penggunaan Lahan (HPL) Transmigrasi	Data Luasan lokasi transmigrasi yang telah difasilitasi penerbitan SK HPL	dokumentasi tahunan data lokasi yang telah difasilitasi penerbitan HPL	Terbatas	String	Tahunan	Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Tidak	DPD TT -DAB- 03.02. 05.01	DPD TT- DAL- 01.43.03.04 Layanan Informasi Peta Terpadu Kawasan Transmigrasi	RAD.03 Informasi Pembangunan Kewilayah	RAD.03. 02 Data transmigrasi	RAD.03. 02.02 bidang transmigrasi	RAD.03.02.02 Data Fasilitas Hak Penggunaan Lahan (HPL) Transmigrasi
DPD TT -DAD- 03.02. 02.03	Data Status Kawasan Transmigrasi	Data status kawasan transmigrasi (Mandiri, Berdaya Saing, Berkembang, Tertinggal)	dokumentasi status kawasan transmigrasi	Terbuka	String	Tahunan	Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Tidak	DPD TT -DAB- 03.02. 05.01	DPD TT- DAL- 01.43.03.04 Layanan Informasi Peta Terpadu Kawasan Transmigrasi	RAD.03 Informasi Pembangunan Kewilayah	RAD.03. 02 Data transmigrasi	RAD.03. 02.02 bidang transmigrasi	RAD.03.02.03 Data Status Kawasan Transmigrasi

ID Data	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Sifat Data	Jenis Data	Validitas Data	Produsen Data/Penanggung Jawab Data	Interoperabilitas	Proses Bisnis Terkait	Layanan Terkait	Level 1	Level 2	Level 3	Level 4
DPD TT -DAD- 03.02. 02.04	Data Profil Satuan Permukiman Transmigrasi	Data informasi terkait lokasi transmigrasi (mulai dari tahun penempatan, status lokasi hingga rekomendasi sarpras)	dokumentasi informasi lokasi SP Transmigrasi	Terbuka	String	Tahunan	Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Tidak	DPD TT -DAB- 03.02. 05.03	DPD TT- DAL- 01.43.03.05 Layanan Database Kependudukan di Kawasan Transmigrasi	RAD.03 Informasi Pembangunan Kewilayah	RAD.03.02 Data transmigrasi	RAD.03.02.02 bidang transmigrasi	RAD.03.02.04 Data Profil Satuan Permukiman Transmigrasi
DPD TT -DAD- 03.02. 02.05	Data Penempatan Transmigran	Data Penempatan Transmigrasi (TPA, TPS, Tahun Penempatan, dsb)	dokumentasi data penempatan transmigrasi	Terbuka	String	Tahunan	Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Tidak	DPD TT -DAB- 03.02. 05.03	DPD TT- DAL- 01.43.03.05 Layanan Database Kependudukan di Kawasan Transmigrasi	RAD.03 Informasi Pembangunan Kewilayah	RAD.03.02 Data transmigrasi	RAD.03.02.02 bidang transmigrasi	RAD.03.02.05 Data Penempatan Transmigran
DPD TT -DAD- 03.02. 02.06	Data Daftar Aset Kawasan Transmigrasi	Data Aset di kawasan transmigrasi meliputi Tahun pengadaan, jenis aset, status hibah, nomor registrasi	Dokumentasi data aset kawasan transmigrasi	Terbatas	String	Tahunan	Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Tidak	DPD TT -DAB- 03.02. 05.03	DPD TT- DAL- 01.43.03.05 Layanan Database Kependudukan di Kawasan Transmigrasi	RAD.03 Informasi Pembangunan Kewilayah	RAD.03.02 Data transmigrasi	RAD.03.02.02 bidang transmigrasi	RAD.03.02.06 Data Daftar Aset Kawasan Transmigrasi
DPD TT -DAD- 03.02. 02.07	Data Pembangunan Permukiman Transmigrasi	Data Pembangunan di kawasan transmigrasi meliputi sarana, prasarana dan	Dokumentasi data pembangunan kawasan transmigrasi	Terbuka	String	Tahunan	Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan	Tidak	DPD TT -DAB- 03.02. 05.02	DPD TT- DAL- 01.43.03.05 Layanan Database Kependudukan di	RAD.03 Informasi Pembangunan Kewilayah	RAD.03.02 Data transmigrasi	RAD.03.02.02 bidang transmigrasi	RAD.03.02.07 Data Pembangunan Permukiman

ID Data	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Sifat Data	Jenis Data	Validitas Data	Produsen Data/Penanggung Jawab Data	Interoperabilitas	Proses Bisnis Terkait	Layanan Terkait	Level 1	Level 2	Level 3	Level 4
		utilitas umum lainnya					Transmigrasi			Kawasan Transmigrasi				Transmigrasi
DPD TT-DAD-03.02.02.08	Peta Persebaran Lokasi Transmigrasi Skala 1:50.000	Data Spasial Persebaran Lokasi Transmigrasi	dokumentasi Persebaran Lokasi Transmigrasi	Terbatas	String	Tahunan	Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Ya	DPD TT-DAB-03.02.05.01	DPD TT-DAL-01.43.03.04 Layanan Informasi Peta Terpadu Kawasan Transmigrasi	RAD.03 Informasi Pembangunan Kewilayahan	RAD.03.02 Data transmigrasi	RAD.03.02.02 bidang transmigrasi	RAD.03.02.08 Peta Persebaran Lokasi Transmigrasi Skala 1:50.000
DPD TT-DAD-03.02.02.09	Peta Persebaran Kawasan Transmigrasi Skala 1:50.000	Data Spasial Persebaran Kawasan Transmigrasi	dokumentasi Persebaran Kawasan Transmigrasi	Terbatas	String	Tahunan	Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Ya	DPD TT-DAB-03.02.05.01	DPD TT-DAL-01.43.03.04 Layanan Informasi Peta Terpadu Kawasan Transmigrasi	RAD.03 Informasi Pembangunan Kewilayahan	RAD.03.02 Data transmigrasi	RAD.03.02.02 bidang transmigrasi	RAD.03.02.09 Peta Persebaran Kawasan Transmigrasi Skala 1:50.000
DPD TT-DAD-03.02.02.10	Data Pendaftar Transmigrasi Online/Animo Transmigrasi	Data animo transmigrasi hasil pendaftaran transmigrasi online	dokumentasi data animo transmigrasi	Terbatas/Tertutup	String	Realtime	Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Tidak	DPD TT-DAB-03.02.05.03	DPD TT-DAL-01.43.03.05 Layanan Database Kependudukan di Kawasan Transmigrasi	RAD.03 Informasi Pembangunan Kewilayahan	RAD.03.02 Data transmigrasi	RAD.03.02.02 bidang transmigrasi	RAD.03.02.10 Data Pendaftar Transmigrasi Online/Animo Transmigrasi

ID Data	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Sifat Data	Jenis Data	Validitas Data	Produsen Data/Penanggung Jawab Data	Interoperabilitas	Proses Bisnis Terkait	Layanan Terkait	Level 1	Level 2	Level 3	Level 4
DPD TT -DAD- 03.02. 04.01	Data Status Satuan Permukiman Bina	Data status permukiman yang masih dibina oleh Kementerian Desa PDTT (T1 - T6)	dokumentasi tahunan status SP Bina		String	Tahunan	Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Tidak	DPD TT -DAB- 03.02. 05.03	DPD TT- DAL- 01.43.03.05 Layanan Database Kependudukan di Kawasan Transmigrasi	RAD.03 Informasi Pembangunan Kewilayahan	RAD.03. 02 Data transmigrasi	RAD.03. 02.04 pengembangan kawasan transmigrasi	RAD.03.02 .04.01 Data Status Satuan Permukiman Bina
DPD TT -DAD- 03.02. 04.02	Data Hasil Evaluasi Kawasan Transmigrasi	Data hasil evaluasi kawasan Transmigrasi per Dimensi Ekonomi Sosial Budaya Lingkungan Jejaring Prasarana Kelembagaan	dokumentasi tahunan hasil evaluasi kawasan transmigrasi	Terbatas	String	Tahunan	Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Tidak	DPD TT -DAB- 03.02. 05.01	DPD TT- DAL- 01.43.03.04 Layanan Informasi Peta Terpadu Kawasan Transmigrasi	RAD.03 Informasi Pembangunan Kewilayahan	RAD.03. 02 Data transmigrasi	RAD.03. 02.04 pengembangan kawasan transmigrasi	RAD.03.02 .04.02 Data Hasil Evaluasi Kawasan Transmigrasi
DPD TT -DAD- 03.02. 04.03	Data Hasil Evaluasi Kawasan Perkotaan Baru	Data hasil evaluasi KPB meliputi Potensi, Permasalahan dan Rekomendasi	dokumentasi hasil evaluasi kawasan perkotaan baru (KPB) per tahun	Terbatas	String	Tahunan	Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Tidak	DPD TT -DAB- 03.02. 05.01	DPD TT- DAL- 01.43.03.04 Layanan Informasi Peta Terpadu Kawasan Transmigrasi	RAD.03 Informasi Pembangunan Kewilayahan	RAD.03. 02 Data transmigrasi	RAD.03. 02.04 pengembangan kawasan transmigrasi	RAD.03.02 .04.03 Data Hasil Evaluasi Kawasan Perkotaan Baru
DPD TT -DAD- 03.02. 04.04	Data Hasil Evaluasi Satuan	Data hasil evaluasi SKP meliputi	dokumentasi hasil evaluasi SKP	Terbatas	String	Tahunan	Direktorat Jenderal Pembangunan	Tidak	DPD TT -DAB- 03.02. 05.01	DPD TT- DAL- 01.43.03.04 Layanan Informasi Peta Terpadu Kawasan Transmigrasi	RAD.03 Informasi Pembangunan Kewilayahan	RAD.03. 02 Data transmigrasi	RAD.03. 02.04 pengembangan kawasan transmigrasi	RAD.03.02 .04.04 Data Hasil

ID Data	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Sifat Data	Jenis Data	Validitas Data	Produsen Data/Penanggung Jawab Data	Interoperabilitas	Proses Bisnis Terkait	Layanan Terkait	Level 1	Level 2	Level 3	Level 4
03.02.04.04	Kawasan Pengembangan Transmigrasi	kecamatan yang termasuk SKP, Desa eksisting, status desa, pusat SKP	Transmigrasi per tahun				nan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi		03.02.05.01	Layanan Informasi Peta Terpadu Kawasan Transmigrasi	Pembangunan Kewilayahan	transmigrasi	angan kawasan transmigrasi	Evaluasi Satuan Kawasan Pengembangan Transmigrasi
DPD TT-DAD-03.02.04.05	Data Hasil Evaluasi Satuan Permukiman Transmigrasi	Data hasil evaluasi SP Transmigrasi per Dimensi Ekonomi Sosial Budaya Lingkungan Jejaring Prasarana Kelembagaan	dokumentasi hasil evaluasi SP Transmigrasi per tahun	Terbatas	String	Tahunan	Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Tidak	DPD TT-DAB-03.02.05.01	DPD TT-DAL-01.43.03.04 Layanan Informasi Peta Terpadu Kawasan Transmigrasi	RAD.03 Informasi Pembangunan Kewilayahan	RAD.03.02 Data transmigrasi	RAD.03.02.04 pengembangan kawasan transmigrasi	RAD.03.02.04.05 Data Hasil Evaluasi Satuan Permukiman Transmigrasi
DPD TT-DAD-03.02.04.06	Data Pengembangan Satuan Permukiman dan Pusat Satuan Kawasan Pengembangan	Data Pengembangan SPPSKP meliputi sosial budaya, pengembangan usaha dan kelembagaan, prasarana dan sarana dan pengelolaan lingkungan, pengurusan hak atas tanah, serta advokasi pertanahan	dokumentasi data hasil kegiatan Direktorat SPPSKP	Terbatas	String	Tahunan	Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Tidak	DPD TT-DAB-03.02.05.01 DPD TT-DAB-03.02.05.02 DPD TT-DAB-03.02.05.03 DPD TT-DAB-03.02.05.05 DPD TT-DAB-03.02.05.06	DPD TT-DAL-01.43.03.05 Layanan Database Kependudukan di Kawasan Transmigrasi	RAD.03 Informasi Pembangunan Kewilayahan	RAD.03.02 Data transmigrasi	RAD.03.02.04 pengembangan kawasan transmigrasi	RAD.03.02.04.06 Data Pengembangan Satuan Permukiman dan Pusat Satuan Kawasan Pengembangan

ID Data	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Sifat Data	Jenis Data	Validitas Data	Produsen Data/Penanggung Jawab Data	Interoperabilitas	Proses Bisnis Terkait	Layanan Terkait	Level 1	Level 2	Level 3	Level 4
DPD TT-DAD-03.03.01	Data Menu Kegiatan	Data Menu Kegiatan Dana Alokasi Khusus Transportasi Perdesaan yang dilaksanakan oleh daerah	Menginformasikan menu kegiatan yang boleh dilaksanakan oleh daerah berdasarkan Petunjuk Teknis (Perpres) dan Petunjuk Operasional (Permendes)	Terbatas	Char	Tahunan	Biro Perencanaan dan Kerja Sama	Ya	DPD TT-DAB-09.05.10	DPD TT-DAL-02.03.04.01 Layanan Monitoring dan Evaluasi Dana Alokasi Khusus	RAD.03 Informasi Pembangunan Kewilayah	RAD.03.03 transportasi	RAD.03.03.01 pembinaan transportasi regional	RAD.03.03.01.01 Data Menu Kegiatan
DPD TT-DAD-03.03.02	Data Usulan Kegiatan	Data Usulan Kegiatan DAK Transdes yang telah disetujui antara Kemendes, Bappenas, dan daerah	Menginformasikan Detail Kegiatan yang dilaksanakan oleh daerah	Terbatas	String	Tahunan	Biro Perencanaan dan Kerja Sama	Ya	DPD TT-DAB-09.05.10	DPD TT-DAL-02.03.04.01 Layanan Monitoring dan Evaluasi Dana Alokasi Khusus	RAD.03 Informasi Pembangunan Kewilayah	RAD.03.03 transportasi	RAD.03.03.01 pembinaan transportasi regional	RAD.03.03.01 pembinaan transportasi regional
DPD TT-DAD-03.05.02.01	Data desa di daerah tertinggal	1. Jumlah penduduk 2. Luas wilayah	Inventarisasi data desa di daerah tertinggal	Terbuka	Char	Tahunan	Direktorat Penyerasian Rencana dan Program Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal	Tidak	DPD TT-DAB-03.05.07.01	DPD TT-DAL-02.03.02.01 Layanan Informasi Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (SIPPD T)	RAD.03 Informasi Pembangunan Kewilayah	RAD.03.05 data pembangunan kawasan atau daerah tertinggal	RAD.03.05.02 pembangunan kawasan atau daerah tertinggal	RAD.03.05.02.01 Data desa di daerah tertinggal

ID Data	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Sifat Data	Jenis Data	Validitas Data	Produsen Data/Penanggung Jawab Data	Interoperabilitas	Proses Bisnis Terkait	Layanan Terkait	Level 1	Level 2	Level 3	Level 4
DPD TT -DAD- 03.05. 02.02	Data kecamatan di daerah tertinggal	1. Jumlah desa 2. Jumlah penduduk 3. Luas wilayah	Inventarisasi data kecamatan di daerah tertinggal	Terbuka	Char	Tahunan	Direktorat Penyerasian Rencana dan Program Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal	Tidak	DPD TT -DAB- 03.05. 07.01	DPD TT- DAL- 02.03.02.01 Layanan Informasi Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (SIP PDT)	RAD.03 Informasi Pembangunan Kewilayahan	RAD.03. 05 data pembangunan kawasan atau daerah tertinggal 1	RAD.03. 05.02 pembangunan kawasan atau daerah tertinggal 1	RAD.03.05 .02.02 Data kecamatan di daerah tertinggal
DPD TT -DAD- 03.05. 02.03	Data kabupaten daerah tertinggal	1. Jumlah kecamatan 2. Jumlah penduduk 3. Luas wilayah	Inventarisasi data kabupaten daerah tertinggal	Terbuka	Char	Tahunan	Direktorat Penyerasian Rencana dan Program Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal	Tidak	DPD TT -DAB- 03.05. 07.01	DPD TT- DAL- 02.03.02.01 Layanan Informasi Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (SIP PDT)	RAD.03 Informasi Pembangunan Kewilayahan	RAD.03. 05 data pembangunan kawasan atau daerah tertinggal 1	RAD.03. 05.02 pembangunan kawasan atau daerah tertinggal 1	RAD.03.05 .02.03 Data kabupaten daerah tertinggal
DPD TT -DAD- 03.05. 02.04	Data provinsi yang memiliki daerah tertinggal	1. Jumlah kabupaten 2. Jumlah penduduk 3. Luas wilayah	Inventarisasi data kabupaten daerah tertinggal	Terbuka	Char	Tahunan	Direktorat Penyerasian Rencana dan Program Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal	Tidak	DPD TT -DAB- 03.05. 07.01	DPD TT- DAL- 02.03.02.01 Layanan Informasi Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (SIP PDT)	RAD.03 Informasi Pembangunan Kewilayahan	RAD.03. 05 data pembangunan kawasan atau daerah tertinggal 1	RAD.03. 05.02 pembangunan kawasan atau daerah tertinggal 1	RAD.03.05 .02.04 Data provinsi yang memiliki daerah tertinggal
DPD TT -DAD- 03.05. 02.05	Data usulan kebutuhan di daerah tertinggal	Usulan kebutuhan daerah tertinggal sesuai kriteria	Inventarisasi data usulan kebutuhan daerah tertinggal yang akan	Terbatas	Char	Tahunan	1. Kabupaten daerah tertinggal 2. Provinsi yang	Tidak	DPD TT -DAB- 03.05. 07.01	DPD TT- DAL- 02.03.02.01 Layanan Informasi Percepatan	RAD.03 Informasi Pembangunan	RAD.03. 05 data pembangunan kawasan atau	RAD.03. 05.02 pembangunan kawasan atau	RAD.03.05 .02.05 Data usulan kebutuhan

ID Data	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Sifat Data	Jenis Data	Validitas Data	Produsen Data/Penanggung Jawab Data	Interoperabilitas	Proses Bisnis Terkait	Layanan Terkait	Level 1	Level 2	Level 3	Level 4
		dan indikator ketertinggalan	menjadi bahan rancangan awal dokumen perencanaan percepatan pembangunan daerah tertinggal				memiliki daerah tertinggal			Pembangunan Daerah Tertinggal (SIPPD)	Kewilayahan	daerah tertinggal 1	daerah tertinggal 1	di daerah tertinggal
DPD TT-DAD-03.05.02.06	Data produk unggulan di daerah tertinggal	Produk unggulan di daerah tertinggal mencakup produk unggulan bidang Pertanian, Peternakan, Perikanan, Industri kerajinan, Industri pengolahan makanan, Industri pariwisata, dan Industri tekstil dan pakaian	Inventarisasi potensi produk unggulan yang dapat dikembangkan	Terbuka	Char	Tahunan	1. Kabupaten daerah tertinggal 2. Provinsi yang memiliki daerah tertinggal 3. Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal dan	Tidak	DPD TT-DAD-03.05.07.01	DPD TT-DAL-02.03.02.01 Layanan Informasi Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (SIPPD)	RAD.03 Informasi Pembangunan Kewilayahan	RAD.03.05 data pembangunan kawasan atau daerah tertinggal 1	RAD.03.05.02 pembangunan kawasan atau daerah tertinggal 1	RAD.03.05.02.06 Data produk unggulan di daerah tertinggal

ID Data	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Sifat Data	Jenis Data	Validitas Data	Produsen Data/Penanggung Jawab Data	Interoperabilitas	Proses Bisnis Terkait	Layanan Terkait	Level 1	Level 2	Level 3	Level 4
							Transmigrasi							
DPD TT-DAD-03.05.02.07	Data kriteria dan indikator daerah tertinggal	Kriteria dan indikator masing masing daerah tertinggal	Menampilkan klasifikasi kriteria dan indikator masing masing daerah tertinggal	Terbuka	Numerik	Tahunan	Direktorat Penyerasian Rencana dan Program Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal	Tidak	DPD TT-DAB-03.05.07.01	DPD TT-DAL-02.03.02.01 Layanan Informasi Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (SIPPDT)	RAD.03 Informasi Pembangunan Kewilayahan	RAD.03.05 data pembangunan kawasan atau daerah tertinggal 1	RAD.03.05.02 pembangunan kawasan atau daerah tertinggal 1	RAD.03.05.02.07 Data kriteria dan indikator daerah tertinggal
DPD TT-DAD-03.05.02.08	Data BUMDes di daerah tertinggal	Jumlah BUMDes di masing masing daerah tertinggal	Menampilkan jumlah BUMDes di masing masing daerah tertinggal	Terbuka	Numerik	Realtime	Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	Ya	DPD TT-DAB-03.05.07.01	DPD TT-DAL-02.03.02.01 Layanan Informasi Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (SIPPDT)	RAD.03 Informasi Pembangunan Kewilayahan	RAD.03.05 data pembangunan kawasan atau daerah tertinggal 1	RAD.03.05.02 pembangunan kawasan atau daerah tertinggal 1	RAD.03.05.02.08 Data BUMDes di daerah tertinggal
DPD TT-DAD-03.05.02.09	Data IDM	Status desa yang ada di daerah tertinggal	Menampilkan status seluruh desa yang ada di daerah tertinggal	Terbuka	Numerik	Tahunan	Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan	Ya	DPD TT-DAB-03.05.07.01	DPD TT-DAL-02.03.02.01 Layanan Informasi Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (SIPPDT)	RAD.03 Informasi Pembangunan Kewilayahan	RAD.03.05 data pembangunan kawasan atau daerah tertinggal 1	RAD.03.05.02 pembangunan kawasan atau daerah tertinggal 1	RAD.03.05.02.09 Data IDM

ID Data	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Sifat Data	Jenis Data	Validitas Data	Produsen Data/Penanggung Jawab Data	Interoperabilitas	Proses Bisnis Terkait	Layanan Terkait	Level 1	Level 2	Level 3	Level 4
DPD TT -DAD- 03.05. 02.10	Data dokumen hukum	Dokumen hukum terkait percepatan pembangunan daerah tertinggal	Menampilkan seluruh dokumen hukum terkait percepatan pembangunan daerah tertinggal	Terbuka	Char	Realtime	Biro Hukum	Ya	DPD TT -DAB- 03.05. 07.01	DPD TT- DAL- 02.03.02.01 Layanan Informasi Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (SIP PDT)	RAD.03 Informasi Pembangunan Kewilayah an	RAD.03. 05 data pembangunan kawasan atau daerah tertinggal 1	RAD.03. 05.02 pembangunan kawasan atau daerah tertinggal 1	RAD.03.05 .02.10 Data dokumen hukum
DPD TT -DAD- 03.05. 02.11	Data Koperasi	Jumlah koperasi di masing masing daerah tertinggal	Menampilkan jumlah koperasi di masing masing daerah tertinggal	Terbuka	Numerik	Tahunan	Kementerian Koperasi dan UKM	Tidak	DPD TT -DAB- 03.05. 07.01	DPD TT- DAL- 02.03.02.01 Layanan Informasi Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (SIP PDT)	RAD.03 Informasi Pembangunan Kewilayah an	RAD.03. 05 data pembangunan kawasan atau daerah tertinggal 1	RAD.03. 05.02 pembangunan kawasan atau daerah tertinggal 1	RAD.03.05 .02.11 Data Koperasi
DPD TT -DAD- 03.05. 02.12	Data UKM	Jumlah UKM di masing masing daerah tertinggal	Menampilkan jumlah UKM di masing masing daerah tertinggal	Terbuka	Numerik	Tahunan	Kementerian Koperasi dan UKM	Tidak	DPD TT -DAB- 03.05. 07.01	DPD TT- DAL- 02.03.02.01 Layanan Informasi Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (SIP PDT)	RAD.03 Informasi Pembangunan Kewilayah an	RAD.03. 05 data pembangunan kawasan atau daerah tertinggal 1	RAD.03. 05.02 pembangunan kawasan atau daerah tertinggal 1	RAD.03.05 .02.12 Data UKM
DPD TT -DAD- 03.05. 02.13	Data IKM	Jumlah IKM di masing masing daerah tertinggal	Menampilkan jumlah IKM di masing masing daerah tertinggal	Terbuka	Numerik	Tahunan	Kementerian Koperasi dan UKM	Tidak	DPD TT -DAB- 03.05. 07.01	DPD TT- DAL- 02.03.02.01 Layanan Informasi Percepatan Pembangunan	RAD.03 Informasi Pembangunan Kewilayah an	RAD.03. 05 data pembangunan kawasan atau daerah	RAD.03. 05.02 pembangunan kawasan atau daerah	RAD.03.05 .02.13 Data IKM

ID Data	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Sifat Data	Jenis Data	Validitas Data	Produsen Data/Penanggung Jawab Data	Interoperabilitas	Proses Bisnis Terkait	Layanan Terkait	Level 1	Level 2	Level 3	Level 4
										an Daerah Tertinggal (SIPPD)		tertinggal 1	tertinggal 1	
DPD TT-DAD-03.05.02.14	Data BTS	Jumlah BTS dan pengguna internet di daerah tertinggal	Menampilkan jumlah BTS dan pengguna internet masing-masing daerah tertinggal	Terbuka	Numerik	Tahunan	Direktorat Penyerasian Rencana dan Program Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal	Tidak	DPD TT-DAB-03.05.07.01	DPD TT-DAL-02.03.02.01 Layanan Informasi Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (SIPPD)	RAD.03 Informasi Pembangunan Kewilayah	RAD.03.05 data pembangunan kawasan atau daerah tertinggal 1	RAD.03.05.02 pembangunan kawasan atau daerah tertinggal 1	RAD.03.05.02.14 Data BTS
DPD TT-DAD-03.05.02.15	Data Sebaran Lokus DTE	Jumlah dan sebaran DTE	Menampilkan sebaran lokus DTE	Terbuka	Char	5 tahunan	Direktorat Penyerasian Rencana dan Program Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal	Tidak	DPD TT-DAB-03.05.07.01	DPD TT-DAL-02.03.02.01 Layanan Informasi Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (SIPPD)	RAD.03 Informasi Pembangunan Kewilayah	RAD.03.05 data pembangunan kawasan atau daerah tertinggal 1	RAD.03.05.02 pembangunan kawasan atau daerah tertinggal 1	RAD.03.05.02.15 Data Sebaran Lokus DTE
DPD TT-DAD-03.05.02.16	Data Pengembangan Produk Unggulan	Data terkait program/kegiatan pengembangan produk unggulan	untuk memberikan informasi terkait program/kegiatan pengembangan produk unggulan	Terbuka	String	Tahunan	Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	Tidak	DPD TT-DAB-03.05.06.06 DPD TT-DAB-03.02.05.07 DPD TT-DAB-03.05.07.06	DPD TT-DAL-01.03.07.01 Layanan Sistem Monitoring dan Evaluasi TEKAD	RAD.03 Informasi Pembangunan Kewilayah	RAD.03.05 data pembangunan kawasan atau daerah tertinggal 1	RAD.03.05.02 pembangunan kawasan atau daerah tertinggal 1	RAD.03.05.02.16 Data Lokasi Intervensi Pemerintah Program/Kegiatan Pengembangan Produk Unggulan

ID Data	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Sifat Data	Jenis Data	Validitas Data	Produsen Data/Penanggung Jawab Data	Interoperabilitas	Proses Bisnis Terkait	Layanan Terkait	Level 1	Level 2	Level 3	Level 4
DPD TT -DAD- 03.05. 02.16	Data admin pusat	Data diri admin di tingkat pemerintah pusat	Data diri admin di tingkat pemerintah pusat	Terbatas	Char	Lainnya (insiden til)	Direktorat Penyerasian Rencana dan Program Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal	Tidak	DPD TT -DAB- 03.05. 07.01	DPD TT- DAL- 02.03.02.01 Layanan Informasi Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (SIP PDT)	RAD.03 Informasi Pembangunan Kewilayah an	RAD.03. 05 data pembangunan kawasan atau daerah tertingga 1	RAD.03. 05.02 pembangunan kawasan atau daerah tertingga 1	
DPD TT -DAD- 03.05. 02.17	Data admin provinsi	Data diri admin di tingkat pemerintah provinsi	Data diri admin di tingkat pemerintah provinsi	Terbatas	Char	Lainnya (insiden til)	Direktorat Penyerasian Rencana dan Program Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal	Tidak	DPD TT -DAB- 03.05. 07.01	DPD TT- DAL- 02.03.02.01 Layanan Informasi Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (SIP PDT)	RAD.03 Informasi Pembangunan Kewilayah an	RAD.03. 05 data pembangunan kawasan atau daerah tertingga 1	RAD.03. 05.02 pembangunan kawasan atau daerah tertingga 1	
DPD TT -DAD- 03.05. 02.18	Data admin kabupaten	Data diri admin di tingkat pemerintah kabupaten	Data diri admin di tingkat pemerintah kabupaten	Terbatas	Char	Lainnya (insiden til)	Direktorat Penyerasian Rencana dan Program Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal	Tidak	DPD TT -DAB- 03.05. 07.01	DPD TT- DAL- 02.03.02.01 Layanan Informasi Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (SIP PDT)	RAD.03 Informasi Pembangunan Kewilayah an	RAD.03. 05 data pembangunan kawasan atau daerah tertingga 1	RAD.03. 05.02 pembangunan kawasan atau daerah tertingga 1	
DPD TT -DAD- 03.05. 03.01	Data Indeks Desa Membangun	Evaluasi Perkembangan Status Desa	Melakukan Evaluasi Desa dalam Pemanfaatan Dana desa dan	Terbuka	Numerik	Tahunan	Direktorat Jenderal Pembangunan Desa	Ya	DPD TT -DAB- 03.05. 06.01	DPD TT- DAL- 01.21.02.01 Layanan Evaluasi Perkembang	RAD.03 Informasi Pembangunan	RAD.03. 05 data pembangunan kawasan atau	RAD.03. 05.03 pembangunan desa dan kawasan	RAD.03.05 .03.01 Data Indeks Desa

ID Data	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Sifat Data	Jenis Data	Validitas Data	Produsen Data/Penanggung Jawab Data	Interoperabilitas	Proses Bisnis Terkait	Layanan Terkait	Level 1	Level 2	Level 3	Level 4
			Pendampingan				dan Perdesaan			an Status Desa	Kewilayahan	daerah tertinggal	pedesaan	Membangun
DPD TT-DAD-03.05.03.02	Data Bantuan Desa Wisata	Lokasi Bantuan Desa Wisata Ditjen PDP	Memberikan Informasi Kegiatan yang ada di UKE I	Terbuka	Char	Tahunan	Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan	Ya	DPD TT-DAB-03.05.06.03	DPD TT-DAL-01.11.03.04 Layanan Media Promosi Desa Wisata	RAD.03 Informasi Pembangunan Kewilayahan	RAD.03.05 data pembangunan kawasan atau daerah tertinggal	RAD.03.05.03 pembangunan desa dan kawasan pedesaan	RAD.03.05.03.02 Data Bantuan Desa Wisata
DPD TT-DAD-03.05.03.03	Data Bantuan Pembangunan Embung	Data Bantuan Pembangunan Embung	Memberikan Informasi Kegiatan yang ada di UKE I	Terbuka	String	Tahunan	Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan	Ya	DPD TT-DAB-03.05.06.03	DPD TT-DAL-01.11.03.04 Layanan Media Promosi Desa Wisata	RAD.03 Informasi Pembangunan Kewilayahan	RAD.03.05 data pembangunan kawasan atau daerah tertinggal	RAD.03.05.03 pembangunan desa dan kawasan pedesaan	RAD.03.05.03.03 Data Bantuan Pembangunan Embung
DPD TT-DAD-03.05.03.04	Data Cakupan Layanan yang diterima oleh Kelompok Sasaran Penurunan Stunting	Perekaman Data Cakupan Layanan yang diterima oleh Kelompok Sasaran Penurunan Stunting	Memberikan Informasi Kegiatan yang ada di UKE I	Terbuka	String	Realtime	Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan	Ya	DPD TT-DAB-03.05.06.05	DPD TT-DAL-01.21.02.02 Layanan Evaluasi Konvergensi Stunting	RAD.03 Informasi Pembangunan Kewilayahan	RAD.03.05 data pembangunan kawasan atau daerah tertinggal	RAD.03.05.03 pembangunan desa dan kawasan pedesaan	RAD.03.05.03.04 Data Cakupan Layanan yang diterima oleh Kelompok Sasaran

ID Data	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Sifat Data	Jenis Data	Validitas Data	Produsen Data/Penanggung Jawab Data	Interoperabilitas	Proses Bisnis Terkait	Layanan Terkait	Level 1	Level 2	Level 3	Level 4
														Penurunan Stunting
DPD TT-DAD-03.05.03.05	Data Progres Penyaluran Dana Desa	Perekaman Pemanfaatan Penyaluran Dana Desa	Memberikan Informasi Penyaluran Dana Desa	Terbuka	Numerik	Realtime	Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan	Ya	DPD TT-DAB-03.05.06.07	DPD TT-DAL-01.21.02.04 Layanan Pencatatan Pemanfaatan Dana Desa	RAD.03 Informasi Pembangunan Kewilayah	RAD.03.05 data pembangunan kawasan atau daerah tertinggal	RAD.03.05.03 pembangunan desa dan kawasan pedesaan	RAD.03.05.03.05 Data Progres Penyaluran Dana Desa
DPD TT-DAD-03.05.03.06	Data Hasil Pemanfaatan Dana Desa untuk Sarana dan Prasarana	Perekaman Pemanfaatan Dana Desa untuk Sarana dan Prasarana	Memberikan Informasi Dana Desa untuk Sarana dan Prasarana	Terbuka	String	Realtime	Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan	Ya	DPD TT-DAB-03.05.06.07	DPD TT-DAL-01.21.02.04 Layanan Pencatatan Pemanfaatan Dana Desa	RAD.03 Informasi Pembangunan Kewilayah	RAD.03.05 data pembangunan kawasan atau daerah tertinggal	RAD.03.05.03 pembangunan desa dan kawasan pedesaan	RAD.03.05.03.06 Data Hasil Pemanfaatan Dana Desa untuk Sarana dan Prasarana
DPD TT-DAD-03.05.03.07	Data Hasil Pemanfaatan Dana Desa untuk Non Sarana dan Prasarana	Perekaman Pemanfaatan Dana Desa untuk Non Sarana dan Prasarana	Memberikan Informasi Dana Desa untuk Non Sarana dan Prasarana	Terbuka	String	Realtime	Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan	Ya	DPD TT-DAB-03.05.06.07	DPD TT-DAL-01.21.02.04 Layanan Pencatatan Pemanfaatan Dana Desa	RAD.03 Informasi Pembangunan Kewilayah	RAD.03.05 data pembangunan kawasan atau daerah tertinggal	RAD.03.05.03 pembangunan desa dan kawasan pedesaan	RAD.03.05.03.07 Data Hasil Pemanfaatan Dana Desa untuk Non Sarana dan Prasarana
DPD TT-DAD-	Data Jumlah Pekerja Padat	Perekaman Data Jumlah Pekerja	Memberikan Informasi Data Jumlah	Terbuka	Numerik	Realtime	Direktorat Jenderal Pembangunan Desa	Ya	DPD TT-DAB-	DPD TT-DAL-01.21.02.04 Layanan	RAD.03 Informasi Pembangunan	RAD.03.05 data pembangunan	RAD.03.05.03 pembangunan	RAD.03.05.03.08 Data Jumlah

ID Data	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Sifat Data	Jenis Data	Validitas Data	Produsen Data/Penanggung Jawab Data	Interoperabilitas	Proses Bisnis Terkait	Layanan Terkait	Level 1	Level 2	Level 3	Level 4
03.05.03.08	Karya Tunai Desa	Padat Karya Tunai Desa	Pekerja Padat Karya Tunai Desa				dan Perdesaan		03.05.06.07	Pencatatan Pemanfaatan Dana Desa	gunan Kewilayahan	kawasan atau daerah tertinggi 1	desa dan kawasan pedesaan	Pekerja Padat Karya Tunai Desa
DPD TT -DAD- 03.05.03.09	Data Jumlah Penerima Bantuan Langsung Tunai Desa (Keluarga Penerima Manfaat)	Perekaman Data Jumlah Penerima Bantuan Langsung Tunai Desa (Keluarga Penerima Manfaat)	Memberikan Informasi Data Jumlah Penerima Bantuan Langsung Tunai Desa (Keluarga Penerima Manfaat)	Terbuka	Numerik	Realtime	Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan	Ya	DPD TT -DAB- 03.05.06.07	DPD TT -DAL- 01.21.02.04 Layanan Pencatatan Pemanfaatan Dana Desa	RAD.03 Informasi Pembangunan Kewilayahan	RAD.03.05 data pembangunan kawasan atau daerah tertinggi 1	RAD.03.05.03 pembangunan desa dan kawasan pedesaan	RAD.03.05.03.09 Data Jumlah Penerima Bantuan Langsung Tunai Desa (Keluarga Penerima Manfaat)
DPD TT -DAD- 03.05.03.10	Data Kerja Sama Antar Desa dalam Satu Kecamatan	Perekaman Data Kerja Sama Antar Desa dalam Satu Kecamatan	Memberikan Informasi Data Kerja Sama Antar Desa dalam Satu Kecamatan	Terbuka	Char	Realtime	Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan	Ya	DPD TT -DAB- 03.05.06.05	DPD TT -DAL- 01.21.02.01 Layanan Evaluasi Perkembangan Status Desa	RAD.03 Informasi Pembangunan Kewilayahan	RAD.03.05 data pembangunan kawasan atau daerah tertinggi 1	RAD.03.05.03 pembangunan desa dan kawasan pedesaan	RAD.03.05.03.10 Data Kerja Sama Antar Desa dalam Satu Kecamatan
DPD TT -DAD- 03.05.03.11	Data Kerja Sama Antar Desa di Luar Kecamatan	Perekaman Data Kerja Sama Antar Desa di Luar Kecamatan	Memberikan Informasi Data Kerja Sama Antar Desa di Luar Kecamatan	Terbuka	Char	Realtime	Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan	Ya	DPD TT -DAB- 03.05.06.05	DPD TT -DAL- 01.21.02.01 Layanan Evaluasi Perkembangan Status Desa	RAD.03 Informasi Pembangunan Kewilayahan	RAD.03.05 data pembangunan kawasan atau daerah tertinggi 1	RAD.03.05.03 pembangunan desa dan kawasan pedesaan	RAD.03.05.03.11 Data Kerja Sama Antar Desa di Luar Kecamatan

ID Data	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Sifat Data	Jenis Data	Validitas Data	Produsen Data/Penanggung Jawab Data	Interoperabilitas	Proses Bisnis Terkait	Layanan Terkait	Level 1	Level 2	Level 3	Level 4
DPD TT -DAD- 03.05. 03.12	Data Kerja Sama Desa/Badan Usaha Milik Desa dengan Pihak Ketiga	Perekaman Data Kerja Sama Desa/Badan Usaha Milik Desa dengan Pihak Ketiga	Memberikan Informasi Data Kerja Sama Desa/Badan Usaha Milik Desa dengan Pihak Ketiga	Terbuka	Char	Realtime	Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan	Ya	DPD TT -DAB- 03.05. 06.05	DPD TT- DAL- 01.21.02.01 Layanan Evaluasi Perkembangan Status Desa	RAD.03 Informasi Pembangunan Kewilayah	RAD.03. 05 data pembangunan kawasan atau daerah tertinggi 1	RAD.03. 05.03 pembangunan desa dan kawasan pedesaan	RAD.03.05 .03.12 Data Kerja Sama Desa/Badan Usaha Milik Desa dengan Pihak Ketiga
DPD TT -DAD- 03.05. 03.13	Data Kerja Sama Antar Desa Program Nasional Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat (Eks PNPM)	Perekaman Data Kerja Sama Antar Desa Eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (Eks PNPM)	Memberikan Informasi Data Kerja Sama Antar Desa Eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (Eks PNPM)	Terbuka	Char	Realtime	Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan	Ya	DPD TT -DAB- 03.05. 06.05	DPD TT- DAL- 01.21.02.01 Layanan Evaluasi Perkembangan Status Desa	RAD.03 Informasi Pembangunan Kewilayah	RAD.03. 05 data pembangunan kawasan atau daerah tertinggi 1	RAD.03. 05.03 pembangunan desa dan kawasan pedesaan	RAD.03.05 .03.13 Data Kerja Sama Antar Desa Program Nasional Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat (Eks PNPM)
DPD TT -DAD- 03.05. 03.14	Data Fasilitasi Advokasi dan Diseminasi Kebijakan Pembangunan	Perekaman Data Fasilitasi Advokasi dan Diseminasi Kebijakan Pembangunan	Memberikan Informasi Data Fasilitasi Advokasi dan Diseminasi Kebijakan Pembangunan	Terbuka	Char	Realtime	Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan	Ya	DPD TT -DAB- 03.05. 06.05	DPD TT- DAL- 01.21.02.01 Layanan Evaluasi Perkembangan Status Desa	RAD.03 Informasi Pembangunan Kewilayah	RAD.03. 05 data pembangunan kawasan atau daerah tertinggi 1	RAD.03. 05.03 pembangunan desa dan kawasan pedesaan	RAD.03.05 .03.14 Data Fasilitasi Advokasi dan Diseminasi Kebijakan Pembangunan

ID Data	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Sifat Data	Jenis Data	Validitas Data	Produsen Data/Penanggung Jawab Data	Interoperabilitas	Proses Bisnis Terkait	Layanan Terkait	Level 1	Level 2	Level 3	Level 4
DPD TT -DAD- 03.05. 03.15	Data Hasil Kajian	Data analisis kebijakan terkait dengan isu strategis bidang desa, daerah tertinggal, ekonomi dan investasi desa, pemberdayaan masyarakat desa dan transmigrasi	Dasar pembuatan kebijakan	Terbuka	String	Tahunan	Badan Pengembangan dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	Ya	DPD TT -DAB- 09.05. 09.01	DPD TT- DAL- 01.43.03.13 Layanan Penyedia Dokumen Kebijakan Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	RAD.03 Informasi Pembangunan Kewilayah	RAD.03. 05 data pembangunan kawasan atau daerah tertinggal 1	RAD.03. 05.03 pembangunan desa dan kawasan pedesaan	RAD.03.05 .03.15 Data Hasil Kajian
DPD TT -DAD- 03.05. 03.16	Data Policy Brief	Data analisis terkait dengan isu strategis pengembangan kreatifitas dan inovasi, teknologi tepat guna, teknologi tinggi dan teknologi digital yang berdaya daya saing di desa daerah tertinggal dan transmigrasi	Bahan pengembangan kebijakan	Terbuka	String	Tahunan	Badan Pengembangan dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	Ya	DPD TT -DAB- 09.05. 09.01	DPD TT- DAL- 01.43.03.13 Layanan Penyedia Dokumen Kebijakan Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	RAD.03 Informasi Pembangunan Kewilayah	RAD.03. 05 data pembangunan kawasan atau daerah tertinggal 1	RAD.03. 05.03 pembangunan desa dan kawasan pedesaan	RAD.03.05 .03.16 Data Policy Brief
DPD TT -DAD- 03.05. 03.17	Data Peta Jalan (Roadmap)	Data penyusunan peta jalan bidang pembangunan desa dan kawasan perdesaan, daerah tertinggal, dan transmigrasi	Bahan penyusunan peta jalan bidang pembangunan desa dan kawasan perdesaan, daerah tertinggal,	Terbuka	String	Tahunan	Badan Pengembangan dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	Ya	DPD TT -DAB- 09.05. 09.03	DPD TT- DAL- 01.43.03.14 Layanan penyedia dokumen keterpaduan rencana pembangunan desa,	RAD.03 Informasi Pembangunan Kewilayah	RAD.03. 05 data pembangunan kawasan atau daerah tertinggal 1	RAD.03. 05.03 pembangunan desa dan kawasan pedesaan	RAD.03.05 .03.17 Data Peta Jalan (Roadmap)

ID Data	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Sifat Data	Jenis Data	Validitas Data	Produsen Data/Penanggung Jawab Data	Interoperabilitas	Proses Bisnis Terkait	Layanan Terkait	Level 1	Level 2	Level 3	Level 4
			dan transmigrasi							daerah tertinggal, dan transmigrasi				
DPDTT-DAD-03.05.03.18	Data Penetapan Target Peningkatan Status Desa	Data penetapan target peningkatan status desa	Bahan penetapan target peningkatan status desa	Terbuka	String	Tahunan	Badan Pengembangan dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	Ya	DPDTT-DAB-09.05.09.03	DPDTT-DAL-01.43.03.14 Layanan penyedia dokumen keterpaduan pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi	RAD.03 Informasi Pembangunan Kewilayah	RAD.03.05 data pembangunan kawasan atau daerah tertinggal	RAD.03.05.03 pembangunan desa dan kawasan pedesaan	RAD.03.05.03.18 Data Penetapan Target Peningkatan Status Desa
DPDTT-DAD-03.05.03.19	Data Rencana Induk Pembangunan Perdesaan	Data penyusunan Rencana Induk Pembangunan Perdesaan, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	Bahan penyusunan Rencana Induk Pembangunan Perdesaan, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	Terbuka	String	Tahunan	Badan Pengembangan dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	Ya	DPDTT-DAB-09.05.09.03	DPDTT-DAL-01.43.03.14 Layanan penyedia dokumen keterpaduan rencana pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi	RAD.03 Informasi Pembangunan Kewilayah	RAD.03.05 data pembangunan kawasan atau daerah tertinggal	RAD.03.05.03 pembangunan desa dan kawasan pedesaan	RAD.03.05.03.19 Data Rencana Induk Pembangunan Perdesaan

ID Data	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Sifat Data	Jenis Data	Validitas Data	Produsen Data/Penanggung Jawab Data	Interoperabilitas	Proses Bisnis Terkait	Layanan Terkait	Level 1	Level 2	Level 3	Level 4
DPD TT -DAD- 03.05. 03.20	Data Rencana Kawasan Transmigrasi	Data penyusunan Rencana Kawasan Transmigrasi	Bahan penyusunan Rencana Kawasan Transmigrasi	Terbuka	String	Tahunan	Badan Pengembangan dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	Ya	DPD TT -DAB- 09.05. 09.03	DPD TT- DAL- 01.43.03.14 Layanan penyedia dokumen keterpaduan rencana pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi	RAD.03 Informasi Pembangunan Kewilayah	RAD.03. 05 data pembangunan kawasan atau daerah tertinggal 1	RAD.03. 05.03 pembangunan desa dan kawasan pedesaan	RAD.03.05 .03.20 Data Rencana Kawasan Transmigrasi
DPD TT -DAD- 03.05. 03.21	Data Program Pengembangan Desa Digital (Smart Village)	Data Desa Yang mendapat Pengembangan Desa Digital Melalui Smart Village	Dokumentasi Persebaran Lokasi Desa Digital	Terbatas	String	Tahunan	Badan Pengembangan dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	Ya	DPD TT -DAB- 09.05. 09.02	DPD TT- DAL- 01.43.03.15 Layanan Penyedia Dokumen Kebijakan Pengembangan Daya Saing Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	RAD.03 Informasi Pembangunan Kewilayah	RAD.03. 05 data pembangunan kawasan atau daerah tertinggal 1	RAD.03. 05.03 pembangunan desa dan kawasan pedesaan	RAD.03.05 .03.21 Data Program Pengembangan Desa Digital (Smart Village)
DPD TT -DAD-	Data SID	Data yang melingkupi data capaian SDGS Desa, Data	Sebagai informasi yang Dashboard	Terbuka	String	Tahunan	Badan Pengembangan dan Informasi	Ya	DPD TT -DAB-	DPD TT- DAL- 01.21.02.05 Layanan	RAD.03 Informasi Pembangunan	RAD.03. 05 data pembangunan	RAD.03. 05.03 pembangunan	RAD.03.05 .03.22 Data SID

ID Data	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Sifat Data	Jenis Data	Validitas Data	Produsen Data/Penanggung Jawab Data	Interoperabilitas	Proses Bisnis Terkait	Layanan Terkait	Level 1	Level 2	Level 3	Level 4
03.05.03.22		Indeks Desa Membangun, Data BUMDes/BUMDesa bersama, Data Pembangunan Desa, Data Pendamping Desa, Data Kontak Sapa Desa,	Eksekutif SDGs Desa yaitu Analisa yang lebih detail dan mendalam serta menampilkan informasi masalah, Desa dapat mengetahui profil desa berupa data statistik penduduk, pekerjaan, pendidikan dll				Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi		09.05.09.04	Dashboard Data dan Informasi Desa (SID)	gunakan Kewilayahan	kawasan atau daerah tertinggal	desa dan kawasan pedesaan	
DPD TT -DAD- 03.05.03.23	Data SDGs	Data berisi kuesioner Desa, RT, Keluarga dan Individu yang kemudian diolah menjadi 18 Tujuan SDGs Desa	upaya terpadu mewujudkan Desa tanpa kemiskinan dan kelaparan, Desa ekonomi tumbuh merata, Desa peduli kesehatan, Desa peduli lingkungan, Desa peduli pendidikan, Desa ramah	Terbuka	String	Tahunan	Badan Pengembangan dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	Ya	DPD TT -DAB- 09.05.09.04	DPD TT -DAL- 01.21.02.06 Layanan Pendataan Kuesioner Desa, RT, Keluarga dan Individu	RAD.03 Informasi Pembangunan Kewilayahan	RAD.03.05 data pembangunan kawasan atau daerah tertinggal	RAD.03.05.03 pembangunan desa dan kawasan pedesaan	RAD.03.05 .03.23 Data SDGs

ID Data	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Sifat Data	Jenis Data	Validitas Data	Produsen Data/Penanggung Jawab Data	Interoperabilitas	Proses Bisnis Terkait	Layanan Terkait	Level 1	Level 2	Level 3	Level 4
			perempuan, Desa berjejaring, dan Desa tanggap budaya untuk percepatan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan											
DPD TT-DAD-03.05.03.24	Data Sistem Informasi Pembangunan Berbasis Masyarakat	Data identifikasi anak-anak usia sekolah yang putus sekolah atau berisiko putus sekolah karena terdampak pandemi Covid-19	Sebagai alat monitoring Anak Tidak Sekolah (ATS) dan Anak Berpeluang Putus Sekolah (APBS)	Terbuka	String	Tahunan	Ditjen Pembangunan Desa dan Perdesaan	Ya	DPD TT-DAB-03.05.06.04	DPD TT-DAL-01.21.02.03 Layanan Informasi Pembangunan Berbasis Masyarakat	RAD.03 Informasi Pembangunan Kewilayahan	RAD.03.05 data pembangunan kawasan atau daerah tertinggal	RAD.03.05.03 pembangunan desa dan kawasan pedesaan	RAD.03.05.03.24 Data Sistem Informasi Pembangunan Berbasis Masyarakat
DPD TT-DAD-03.05.04.01	Data Daftar Lokus Transformasi Ekonomi Kampung Terpadu (TEKAD)	Data lokasi pelaksanaan program TEKAD di 5 provinsi (Maluku, Maluku Utara, NTT, Papua, Papua Barat)	untuk memberikan informasi data lokasi pelaksanaan program TEKAD di 5 provinsi (Maluku, Maluku Utara, NTT, dan	Tertutup	String	Tahunan	Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan	Tidak	DPD TT-DAB-03.05.06.06 DPD TT-DAB-03.02.05.07 DPD TT-DAB-	DPD TT-DAL-01.03.07.01 Layanan Sistem Monitoring dan Evaluasi TEKAD	RAD.03 Informasi Pembangunan Kewilayahan	RAD.03.05 data pembangunan kawasan atau daerah tertinggal	RAD.03.05.04 pemberdayaan masyarakat desa	RAD.03.05.04.01 Data Daftar Lokus Transformasi Ekonomi Kampung Terpadu

ID Data	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Sifat Data	Jenis Data	Validitas Data	Produsen Data/Penanggung Jawab Data	Interoperabilitas	Proses Bisnis Terkait	Layanan Terkait	Level 1	Level 2	Level 3	Level 4
			Papua, Papua Barat)				Transmigrasi		03.05.07.06					
DPD TT-DAD-03.05.04.02	Data Daftar Fasilitator Kabupaten	Data terkait fasilitator kabupaten program TEKAD	untuk memberikan informasi data fasilitator kabupaten program TEKAD	Tertutup	String	Tahunan	Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	Tidak	DPD TT-DAB-03.05.06.06 DPD TT-DAB-03.02.05.07 DPD TT-DAB-03.05.07.06	DPD TT-DAL-01.03.07.01 Layanan Sistem Monitoring dan Evaluasi TEKAD	RAD.03 Informasi Pembangunan Kewilayahan	RAD.03.05 data pembangunan kawasan atau daerah tertinggal 1	RAD.03.05.04 pemberdayaan masyarakat desa	RAD.03.05.04.02 Data Daftar Fasilitator Kabupaten
DPD TT-DAD-03.05.04.03	Data Daftar Fasilitator Kecamatan	Data terkait fasilitator kecamatan program TEKAD	untuk memberikan informasi data fasilitator kecamatan program TEKAD	Tertutup	String	Tahunan	Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	Tidak	DPD TT-DAB-03.05.06.06 DPD TT-DAB-03.02.05.07 DPD TT-DAB-03.05.07.06	DPD TT-DAL-01.03.07.01 Layanan Sistem Monitoring dan Evaluasi TEKAD	RAD.03 Informasi Pembangunan Kewilayahan	RAD.03.05 data pembangunan kawasan atau daerah tertinggal 1	RAD.03.05.04 pemberdayaan masyarakat desa	RAD.03.05.04.03 Data Daftar Fasilitator Kecamatan

ID Data	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Sifat Data	Jenis Data	Validitas Data	Produsen Data/Penanggung Jawab Data	Interoperabilitas	Proses Bisnis Terkait	Layanan Terkait	Level 1	Level 2	Level 3	Level 4
DPD TT -DAD- 03.05. 04.04	Data Daftar Kader Desa	Data terkait kader desa program TEKAD	untuk memberikan informasi data kader desa program TEKAD	Tertutup	String	Tahunan	Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	Tidak	DPD TT -DAB- 03.05. 06.06 DPD TT -DAB- 03.02. 05.07 DPD TT -DAB- 03.05. 07.06	DPD TT- DAL- 01.03.07.01 Layanan Sistem Monitoring dan Evaluasi TEKAD	RAD.03 Informasi Pembangunan Kewilayahan	RAD.03.05 data pembangunan kawasan atau daerah tertinggal	RAD.03.05.04 pemberdayaan masyarakat desa	RAD.03.05.04.04 Data Daftar Kader Desa
DPD TT -DAD- 03.05. 04.05	Data Laporan Harian Pendamping Desa (TPP)	Data laporan aktivitas Tenaga Pendamping Profesional PLD, PD,TA Kab, TA Prov, TPP Pusat	Sebagai alat pencatatan laporan aktivitas TPP	Terbatas/Tertutup	String	Bulanan	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	Ya	DPD TT -DAB- 03.05. 06.04 DPD TT -DAB- 03.02. 05.04 DPD TT -DAB- 03.05. 07.04	DPD TT- DAL- 01.21.02.07 Layanan Pencatatan Aktivitas harian Tenaga Pendamping Profesional (TPP)	RAD.03 Informasi Pembangunan Kewilayahan	RAD.03.05 data pembangunan kawasan atau daerah tertinggal	RAD.03.05.04 pemberdayaan masyarakat desa	RAD.03.05.04.05 Data Laporan Harian Pendamping Desa (TPP)

ID Data	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Sifat Data	Jenis Data	Validitas Data	Produsen Data/Penanggung Jawab Data	Interoperabilitas	Proses Bisnis Terkait	Layanan Terkait	Level 1	Level 2	Level 3	Level 4
DPD TT -DAD- 09.02. 02.01	Data Realisasi Anggaran	- Data Realisasi Per Eselon 1 Jenis belanja - Realiasi Anggaran per-satker per jenis belanja - Data Kegiatan perjenis belanja - Data Kewenangan perjenis belanja - Data Sumber Dana per jenis Belanja	melakukan monitoring transaksi Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN), dan menyajikan reporting sesuai kebutuhan	Terbatas	Varcha r	Setiap realisasi anggaran dibutuhkan	UKE I	Ya	DPD TT -DAB- 09.02. 10	DPD TT- DAL- 02.02.04.02 Layanan Online Monitoring SPAN (OMSPAN)	RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09. 02 Data keuangan	RAD.09. 02.02 keuangan negara	
DPD TT -DAD- 09.02. 02.02	Data Pengelolaan Keuangan	- Modul Anggaran -> Data petikan DIPA, RKAKL - Modul Komitmen -> Data SPP - Modul Pembayaran -> Data SPM - Modul Perbendaharaan -> Data LPJ Bendahara - Modul Aset -> Data Laporan Aset - Modul Persediaan -> Data Laporan Persediaan - Modul Piutang -	Melakukan pengelolaan keuangan yang meliputi tahapan perencanaan hingga pertanggung jawaban anggaran	Terbatas	Varcha r	Setiap pengelolaan keuangan melakukan perencanaan, pelaksanaan anggaran, dan pelaporan keuangan	Seluruh satker di Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi dan Kementerian Keuangan	Ya	DPD TT -DAB- 09.02. 10	DPD TT- DAL- 02.02.09.03 Layanan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI)	RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09. 02 Data keuangan	RAD.09. 02.02 keuangan negara	

ID Data	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Sifat Data	Jenis Data	Validitas Data	Produsen Data/Penanggung Jawab Data	Interoperabilitas	Proses Bisnis Terkait	Layanan Terkait	Level 1	Level 2	Level 3	Level 4
		> Data Laporan Penerimaan - Modul Pelaporan -> Data Laporan Keuangan												
DPD TT -DAD- 09.02. 05	Data RKAKL	Dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan suatu K/L dan sebagai penjabaran dari Renja K/L yang bersangkutan dalam satu tahun anggaran serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya	Menginformasikan Dokumen perencanaan dan penganggaran Kementerian Desa, PDTT	Terbuka	String	Tahunan	UKE I, UKE II, dan seluruh Balai	Ya	DPD TT -DAB- 09.05. 10	DPD TT- DAL- 02.07.02.01 Layanan Pengawasan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09. 02 Data keuangan	RAD.09. 02.05 penganggaran	
DPD TT -DAD- 09.02. 08.01	Data Usulan Hibah	Data Usulan Hibah dari Unit Kerja Esselon I	Menginformasikan data usulan hibah dari Unit Kerja Esselon I	Terbatas	Varchar	Setiap ada usulan	UKE I	Ya	DPD TT -DAB- 09.02. 10	DPD TT- DAL- 02.02.05.01 Layanan Sistem Informasi Manajemen Usulan Hibah	RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09. 02 Data keuangan	RAD.09. 02.08 pengadaan dan manajemen aset	

ID Data	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Sifat Data	Jenis Data	Validitas Data	Produsen Data/Penanggung Jawab Data	Interoperabilitas	Proses Bisnis Terkait	Layanan Terkait	Level 1	Level 2	Level 3	Level 4
DPD TT -DAD- 09.02. 08.02	Data Pendukung Hibah	Data Pendukung Hibah dari Unit Kerja Esselon I	Menginformasikan data pendukung hibah dari Unit Kerja Esselon I	Terbatas	Varchar	Setiap ada usulan	UKE I	Ya	DPD TT -DAB- 09.02. 10	DPD TT- DAL- 02.02.05.01 Layanan Sistem Informasi Manajemen Usulan Hibah	RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09. 02 Data keuangan	RAD.09. 02.08 pengadaan dan manajemen aset	
DPD TT -DAD- 09.02. 08.03	Data Persetujuan Hibah	Data Persetujuan Hibah yang disetujui oleh Sekretariat Jenderal	Menginformasikan Persetujuan Hibah yang disetujui oleh Sekretariat Jenderal	Terbatas	Varchar	Setiap ada usulan	UKE I	Ya	DPD TT -DAB- 09.02. 10	DPD TT- DAL- 02.02.05.01 Layanan Sistem Informasi Manajemen Usulan Hibah	RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09. 02 Data keuangan	RAD.09. 02.08 pengadaan dan manajemen aset	
DPD TT -DAD- 09.02. 08.04	Data SK Penghapusan Hibah	Data SK Penghapusan Hibah	Menginformasikan SK Penghapusan Hibah	Terbatas	Varchar	Setiap ada usulan	UKE I	Ya	DPD TT -DAB- 09.02. 10	DPD TT- DAL- 02.02.05.01 Layanan Sistem Informasi Manajemen Usulan Hibah	RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09. 02 Data keuangan	RAD.09. 02.08 pengadaan dan manajemen aset	
DPD TT -DAD- 09.02. 08.05	Data Pengembalian Hibah	Data Pengembalian Hibah	Menginformasikan pengembalian Hibah Barang Milik Negara	Terbatas	Varchar	Setiap ada pengembalian	UKE I	Ya	DPD TT -DAB- 09.02. 10	DPD TT- DAL- 02.02.05.01 Layanan Sistem Informasi Manajemen Usulan Hibah	RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09. 02 Data keuangan	RAD.09. 02.08 pengadaan dan manajemen aset	

ID Data	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Sifat Data	Jenis Data	Validitas Data	Produsen Data/Penanggung Jawab Data	Interoperabilitas	Proses Bisnis Terkait	Layanan Terkait	Level 1	Level 2	Level 3	Level 4
DPD TT -DAD- 09.03. 05.01	Data permohonan informasi dan pengaduan masyarakat	1. Nama Pemohon 2. NIK Pemohon 3. Nomor HP Pemohon 4. E-mail Pemohon 5. Provinsi Pemohon 6. Kabupaten Pemohon 7. Kecamatan Pemohon 8. Desa Pemohon 9. Permasalahan 10. Sub Permasalahan 11. Judul 12. Deskripsi	Inventarisasi data permohonan informasi dan pengaduan masyarakat	Terbatas	Char	Realtime	Seluruh UKE I Kemendes a PD TT	Tidak	DPD TT -DAB- 09.04. 05	DPD TT- DAL- 01.43.03.01 Layanan Permohonan Informasi dan Pengaduan Masyarakat Terpadu	RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09. 03 Data informasi	RAD.09. 03.05 Pengelolaan Informasi Publik	RAD.09.03 .05.01 Data permohonan informasi dan pengaduan masyarakat
DPD TT -DAD- 09.03. 05.02	Data Informasi Publik	1. Informasi Berkala 2. Informasi Setiap Saat 3. Informasi Serta Merta	Inventarisasi informasi publik di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	Terbuka	Char	Tahunan	Biro Hubungan Masyarakat	Tidak	DPD TT -DAB- 09.04. 05	DPD TT- DAL- 01.43.03.02 Layanan Informasi Publik	RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09. 03 Data informasi	RAD.09. 03.05 Pengelolaan Informasi Publik	RAD.09.03 .05.02 Data Informasi Publik

ID Data	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Sifat Data	Jenis Data	Validitas Data	Produsen Data/Penanggung Jawab Data	Interoperabilitas	Proses Bisnis Terkait	Layanan Terkait	Level 1	Level 2	Level 3	Level 4
DPD TT -DAD- 09.03. 05.03	Data Buku di Perpustakaan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	1. Data buku-buku yang ada di perpustakaan 2. Data peminjam buku di perpustakaan	Inventarisasi Buku dan peminjam buku di perpustakaan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	Terbuka	Char	Tahunan	Biro Hubungan Masyarakat	Tidak	DPD TT -DAB- 09.04. 05	DPD TT- DAL- 01.43.03.03 Layanan Perpustakaan	RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09. 03 Data informasi	RAD.09. 03.05 Pengelolaan Informasi Publik	RAD.09.03 .05.03 Data Buku di Perpustakaan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
DPD TT -DAD- 09.03. 05.04	Data Pengaduan Masyarakat	1. Uraian pengaduan 2. Jumlah Pengaduan 3. Progres tindak lanjut pengaduan	Inventarisasi data hasil pengaduan masyarakat yang masuk melalui Itjen	Terbatas	Char	Lainnya	Inspektoriat Investigasi	Ya	DPD TT -DAB- 09.06. 12	DPD TT- DAL- 01.43.03.11 Layanan Pengaduan Masyarakat Terpadu	RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09. 03 Data informasi	RAD.09. 03.05 pengelolaan informasi publik	RAD.09.03 .05.04 Data Pengaduan Masyarakat
DPD TT -DAD- 09.03. 05.05	Data WBS	1. Uraian pengaduan 2. Jumlah Pengaduan 3. Progres tindak lanjut pengaduan	Inventarisasi data hasil pengaduan perorangan/ unit kerja yang masuk melalui Itjen	Terbatas	Char	Lainnya	Inspektoriat Investigasi	Ya	DPD TT -DAB- 09.06. 12	DPD TT- DAL- 01.43.03.11 Layanan Pengaduan Masyarakat Terpadu	RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09. 03 Data informasi	RAD.09. 03.05 pengelolaan informasi publik	RAD.09.03 .05.05 Data WBS
DPD TT -DAD- 09.03. 05.06	Data Conselling	1. Uraian konsultasi 2. Data pemohon	Inventarisasi data hasil penyelenggara	Terbatas	Char	Lainnya	Sekretariat Inspektoriat Jenderal	Tidak	DPD TT -DAB- 09.06. 12	DPD TT- DAL- 01.43.03.12	RAD.09 Informasi	RAD.09. 03 Data	RAD.09. 03.05 pengelolaan	RAD.09.03 .05.06 Data

ID Data	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Sifat Data	Jenis Data	Validitas Data	Produsen Data/Penanggung Jawab Data	Interoperabilitas	Proses Bisnis Terkait	Layanan Terkait	Level 1	Level 2	Level 3	Level 4
09.03.05.06	& Consulting	konsultasi 3. Hasil konsultasi	raan konseling dan konsultasi				c.q. Kabag Tindaklanj ut dan Umum		09.06.12	Layanan Konsultasi Terpadu	Pemerintahan Umum	informasi	aan informasi publik	Conselling & Consulting
DPD TT -DAD- 09.03. 05.07	Data Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)	1. Objek Pemeriksaan 2. Jenis Pengawasan 3. Uraian pemeriksaan/pe ngaduan 4. Lokasi 5. Jumlah orang 6. Nama 7. Jabatan 8. Jumlah hari 9. Jumlah/bentuk output	Inventarisasi data program kerja pengawasan tahunan sebagai dasar penetapan pelaksanaan pengawasan tiap tahunnya	Terbatas	Char	Tahunan	Sekretariat Inspektora t Jenderal c.q. Kabag Tindaklanj ut dan Umum	Tidak	DPD TT -DAB- 09.06.12	DPD TT- DAL- 01.43.03.10 Layanan Pengawasan Internal Pemerintah	RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.03 Data informasi	RAD.09.03.05 pengelolaan informasi publik	RAD.09.03.05.07 Data Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)
DPD TT -DAD- 09.03. 05.08	Data Temuan Internal dan Eksternal	1. Jenis Temuan 2. Jumlah Temuan 3. Uraian Temuan	Inventarsasi data hasil temuan hasil penyelenggara raan pengawasan baik yang dilakukan secara internal dan yang dilakukan dari BPK dan BPKP	Terbatas	Char	Lainnya	Sekretariat Inspektora t Jenderal c.q. Kabag Tindaklanj ut dan Umum	Tidak	DPD TT -DAB- 09.06.12	DPD TT- DAL- 01.43.03.10 Layanan Pengawasan Internal Pemerintah	RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.03 Data informasi	RAD.09.03.05 pengelolaan informasi publik	RAD.09.03.05.08 Data Temuan Internal dan Eksternal
DPD TT -DAD- 05.09	Data Tindaklanj ut Hasil	1. Jenis Temuan 2. Jumlah Temuan	Inventarisasi data progres tindaklanj ut	Terbatas	Char	Lainnya	Sekretariat Inspektora t Jenderal	Tidak	DPD TT -DAB- 05.09	DPD TT- DAL- 01.43.03.10	RAD.09 Informasi	RAD.09.03 Data	RAD.09.03.05 pengelolaan	RAD.09.03.05.09 Data

ID Data	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Sifat Data	Jenis Data	Validitas Data	Produsen Data/Penanggung Jawab Data	Interoperabilitas	Proses Bisnis Terkait	Layanan Terkait	Level 1	Level 2	Level 3	Level 4
09.03.05.09	Pengawasan	3. Uraian Temuan 4. Progres Tindaklanjuti	hasil pengawasan				c.q. Kabag Tindaklanjuti dan Umum		09.06.12	Layanan Pengawasan Internal Pemerintah	Pemerintahan Umum	informasi	aan informasi publik	Tindaklanjuti Hasil Pengawasan
DPD TT-DAD-09.03.05.10	Data Keputusan Irjen	Data Kebijakan di lingkungan Itjen	Penyebarluasan dan pencarian peraturan perundang-undangan, bahan dokumentasi hukum lainnya dan informasi hukum.	Terbatas	Char	Tahunan	Sekretariat Inspektoriat Jenderal c.q. Kabag Tindaklanjuti dan Umum	Ya	DPD TT-DAB-09.06.12	DPD TT-DAL-01.43.03.10 Layanan Pengawasan Internal Pemerintah	RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.03 Data informasi	RAD.09.03.05 pengelolaan informasi publik	RAD.09.03.05.10 Data Keputusan Irjen
DPD TT-DAD-09.03.05.11	Data Undang-Undang	Data berupa Peraturan Perundang-undangan	Penyebarluasan dan pencarian peraturan perundang-undangan, bahan dokumentasi hukum lainnya dan informasi hukum.	Terbuka	Jenis Peraturan	Realtime	UKE I	Ya	DPD TT-DAB-05.01.06	DPD TT-DAL-02.09.03.01 Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH Kemendesa)	RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.03 Data informasi	RAD.09.03.05 pengelolaan informasi publik	RAD.09.03.05.11 Data Undang-Undang
DPD TT-DAD-09.03.05.12	Data Pengganti Undang-undang (PERPPU)	Data berupa Pengganti Undang-undang (PERPPU)	Penyebarluasan dan pencarian peraturan perundang-undangan, bahan dokumentasi hukum	Terbuka	Jenis Peraturan	Realtime	UKE I	Ya	DPD TT-DAB-05.01.06	DPD TT-DAL-02.09.03.01 Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum	RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.03 Data informasi	RAD.09.03.05 pengelolaan informasi publik	RAD.09.03.05.12 Data Pengganti Undang-undang (PERPPU)

ID Data	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Sifat Data	Jenis Data	Validitas Data	Produsen Data/Penanggung Jawab Data	Interoperabilitas	Proses Bisnis Terkait	Layanan Terkait	Level 1	Level 2	Level 3	Level 4
			lainnya dan informasi hukum.							(JDIH Kemendesa)				
DPD TT -DAD- 09.03. 05.13	Data Peraturan Pemerintah	Data berupa Peraturan Pemerintah	Penyebarluasan dan pencarian peraturan perundang-undangan, bahan dokumentasi hukum lainnya dan informasi hukum.	Terbuka	Jenis Peraturan	Realtime	UKE I	Ya	DPD TT -DAB- 05.01. 06	DPD TT- DAL- 02.09.03.01 Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH Kemendesa)	RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.03 Data informasi	RAD.09.03.05 pengelolaan informasi publik	RAD.09.03.05.13 Data Peraturan Pemerintah
DPD TT -DAD- 09.03. 05.14	Data Peraturan Presiden	Data berupa Peraturan Presiden RI	Penyebarluasan dan pencarian peraturan perundang-undangan, bahan dokumentasi hukum lainnya dan informasi hukum.	Terbuka	Jenis Peraturan	Realtime	UKE I	Ya	DPD TT -DAB- 05.01. 06	DPD TT- DAL- 02.09.03.01 Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH Kemendesa)	RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.03 Data informasi	RAD.09.03.05 pengelolaan informasi publik	RAD.09.03.05.14 Data Peraturan Presiden
DPD TT -DAD- 09.03. 05.15	Data Keputusan Presiden	Data berupa Keputusan Presiden RI	Penyebarluasan dan pencarian peraturan perundang-undangan, bahan dokumentasi hukum lainnya dan	Terbatas	Jenis Peraturan	Realtime	UKE I	Ya	DPD TT -DAB- 05.01. 06	DPD TT- DAL- 02.09.03.01 Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH Kemendesa)	RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.03 Data informasi	RAD.09.03.05 pengelolaan informasi publik	RAD.09.03.05.15 Data Keputusan Presiden

ID Data	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Sifat Data	Jenis Data	Validitas Data	Produsen Data/Penanggung Jawab Data	Interoperabilitas	Proses Bisnis Terkait	Layanan Terkait	Level 1	Level 2	Level 3	Level 4
			informasi hukum.											
DPD TT -DAD- 09.03. 05.16	Data Instruksi Presiden	Data berupa Instruksi Presiden RI	Penyebarluasan dan pencarian peraturan perundang-undangan, bahan dokumentasi hukum lainnya dan informasi hukum.	Terbatas	Jenis Peraturan	Realtime	UKE I	Ya	DPD TT -DAB- 05.01. 06	DPD TT-DAL-02.09.03.01 Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH Kemendesa)	RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.03 Data informasi	RAD.09.03.05 pengelolaan informasi publik	RAD.09.03.05.16 Data Instruksi Presiden
DPD TT -DAD- 09.03. 05.17	Data Peraturan Menteri	Data berupa Peraturan Menteri	Penyebarluasan dan pencarian peraturan perundang-undangan, bahan dokumentasi hukum lainnya dan informasi hukum.	Terbuka	Jenis Peraturan	Realtime	UKE I	Ya	DPD TT -DAB- 05.01. 06	DPD TT-DAL-02.09.03.01 Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH Kemendesa)	RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.03 Data informasi	RAD.09.03.05 pengelolaan informasi publik	RAD.09.03.05.17 Data Peraturan Menteri
DPD TT -DAD- 09.03. 05.18	Data Keputusan Menteri	Data berupa Keputusan Menteri	Penyebarluasan dan pencarian peraturan perundang-undangan, bahan dokumentasi hukum lainnya dan	Terbatas	Jenis Peraturan	Realtime	UKE I	Ya	DPD TT -DAB- 05.01. 06	DPD TT-DAL-02.09.03.01 Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH Kemendesa)	RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.03 Data informasi	RAD.09.03.05 pengelolaan informasi publik	RAD.09.03.05.18 Data Keputusan Menteri

ID Data	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Sifat Data	Jenis Data	Validitas Data	Produsen Data/Penanggung Jawab Data	Interoperabilitas	Proses Bisnis Terkait	Layanan Terkait	Level 1	Level 2	Level 3	Level 4
			informasi hukum.											
DPD TT -DAD- 09.03. 05.19	Data Instruksi Menteri	Data berupa Instruksi Menteri	Penyebarluasan dan pencarian peraturan perundang-undangan, bahan dokumentasi hukum lainnya dan informasi hukum.	Terbatas	Jenis Peraturan	Realtime	UKE I	Ya	DPD TT -DAB- 05.01. 06	DPD TT- DAL- 02.09.03.01 Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH Kemendesa)	RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.03 Data informasi	RAD.09.03.05 pengelolaan informasi publik	RAD.09.03.05.19 Data Instruksi Menteri
DPD TT -DAD- 09.03. 05.20	Data Surat Edaran Menteri	Data berupa Surat Edaran Menteri	Penyebarluasan dan pencarian peraturan perundang-undangan, bahan dokumentasi hukum lainnya dan informasi hukum.	Terbatas	Jenis Peraturan	Realtime	UKE I	Ya	DPD TT -DAB- 05.01. 06	DPD TT- DAL- 02.09.03.01 Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH Kemendesa)	RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.03 Data informasi	RAD.09.03.05 pengelolaan informasi publik	RAD.09.03.05.20 Data Surat Edaran Menteri
DPD TT -DAD- 09.03. 05.21	Data Surat Edaran Sekjen	Data berupa Surat Edaran Sekjen	Penyebarluasan dan pencarian peraturan perundang-undangan, bahan dokumentasi hukum lainnya dan	Terbatas	Jenis Peraturan	Realtime	UKE I	Ya	DPD TT -DAB- 05.01. 06	DPD TT- DAL- 02.09.03.01 Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH Kemendesa)	RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.03 Data informasi	RAD.09.03.05 pengelolaan informasi publik	RAD.09.03.05.21 Data Surat Edaran Sekjen

ID Data	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Sifat Data	Jenis Data	Validitas Data	Produsen Data/Penanggung Jawab Data	Interoperabilitas	Proses Bisnis Terkait	Layanan Terkait	Level 1	Level 2	Level 3	Level 4
			informasi hukum.											
DPD TT -DAD- 09.03. 05.22	Data Memorandum Of Understanding (MoU) & PKB	Data berupa MoU & PKB	Penyebarluasan dan pencarian peraturan perundang-undangan, bahan dokumentasi hukum lainnya dan informasi hukum.	Terbatas	Jenis Peraturan	Realtime	UKE I	Ya	DPD TT -DAB- 05.01. 06	DPD TT- DAL- 02.09.03.01 Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH Kemendesa)	RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.03 Data informasi	RAD.09.03.05 pengelolaan informasi publik	RAD.09.03.05.22 Data Memorandum Of Understanding (MoU) & PKB
DPD TT -DAD- 09.03. 05.23	Data Rancangan Peraturan Menteri	Data berupa usulan Rancangan Peraturan Menteri Desa, PDTT	Penyebarluasan dan pencarian peraturan perundang-undangan, bahan dokumentasi hukum lainnya dan informasi hukum.	Terbatas	Jenis Peraturan	Realtime	UKE I	Ya	DPD TT -DAB- 05.01. 06	DPD TT- DAL- 02.09.03.01 Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH Kemendesa)	RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.03 Data informasi	RAD.09.03.05 pengelolaan informasi publik	RAD.09.03.05.23 Data Rancangan Peraturan Menteri
DPD TT -DAD- 09.03. 05.24	Data Rancangan Undang - undang	Data berisikan usulan Rancangan Undang-Undang	Penyebarluasan dan pencarian peraturan perundang-undangan, bahan dokumentasi hukum lainnya dan	Terbatas	Jenis Peraturan	Realtime	UKE I	Ya	DPD TT -DAB- 05.01. 06	DPD TT- DAL- 02.09.03.01 Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH Kemendesa)	RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.03 Data informasi	RAD.09.03.05 pengelolaan informasi publik	RAD.09.03.05.24 Data Rancangan Undang - undang

ID Data	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Sifat Data	Jenis Data	Validitas Data	Produsen Data/Penanggung Jawab Data	Interoperabilitas	Proses Bisnis Terkait	Layanan Terkait	Level 1	Level 2	Level 3	Level 4
			informasi hukum.											
DPD TT-DAD-09.03.05.25	Data Surat Edaran UKE I Terbuka	Data berupa Surat Edaran UKE I	Penyebarluasan dan pencarian peraturan perundang-undangan, bahan dokumentasi hukum lainnya dan informasi hukum.	Terbatas	Jenis Peraturan	Realtime	UKE I	Ya	DPD TT-DAB-05.01.06	DPD TT-DAL-02.09.03.01 Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH Kemendesa)	RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.03 Data informasi	RAD.09.03.05 pengelolaan informasi publik	RAD.09.03.05.25 Data Surat Edaran UKE I Terbuka
DPD TT-DAD-09.03.05.26	Data Surat Keputusan	Data berupa Surat Keputusan dari UKE I	Penyebarluasan dan pencarian peraturan perundang-undangan, bahan dokumentasi hukum lainnya dan informasi hukum.	Terbatas	Jenis Peraturan	Realtime	UKE I	Ya	DPD TT-DAB-05.01.06	DPD TT-DAL-02.09.03.01 Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH Kemendesa)	RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.03 Data informasi	RAD.09.03.05 pengelolaan informasi publik	RAD.09.03.05.26 Data Surat Keputusan
DPD TT-DAD-09.03.05.27	Data Monografi Hukum	Data berupa Monografi Hukum	Data karya tulis ilmiah Hukum	Terbuka	karya tulis ilmiah hasil penelitian yang luas dan detail pada	Realtime	UKE I	Ya	DPD TT-DAB-05.01.06	DPD TT-DAL-02.09.03.01 Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH Kemendesa)	RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.03 Data informasi	RAD.09.03.05 pengelolaan informasi publik	RAD.09.03.05.27 Data Monografi Hukum

ID Data	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Sifat Data	Jenis Data	Validitas Data	Produsen Data/Penanggung Jawab Data	Interoperabilitas	Proses Bisnis Terkait	Layanan Terkait	Level 1	Level 2	Level 3	Level 4
					sebuah topik Hukum									
DPD TT -DAD- 09.03. 05.28	Data Artikel Hukum	Data berupa Artikel Hukum	Hasil karya penulisan karyawan atau seseorang untuk di infokan ke publik	Terbuka	Data Hasil karya penulisan karyawan atau seseorang untuk di infokan ke publik	Realtime	UKE I	Ya	DPD TT -DAB- 05.01. 06	DPD TT- DAL- 02.09.03.01 Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH Kemendesa)	RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.03 Data informasi	RAD.09.03.05 pengelolaan informasi publik	RAD.09.03.05.28 Data Artikel Hukum
DPD TT -DAD- 09.03. 05.29	Data Yurisprudensi	Data berupa mengenai Yurisprudensi	Data Yurisprudensi	Terbuka	Data serangkaian putusan hukum yang dikeluarkan oleh pengadilan	Realtime	UKE I	Ya	DPD TT -DAB- 05.01. 06	DPD TT- DAL- 02.09.03.01 Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH Kemendesa)	RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.03 Data informasi	RAD.09.03.05 pengelolaan informasi publik	RAD.09.03.05.29 Data Yurisprudensi
DPD TT -DAD- 09.03. 05.30	Data Berita	Data berupa berita kegiatan hukum di lingkungan Kementerian Desa, PDTT	Memberikan Informasi Kegiatan yang ada di UKE I atau di Kementerian Desa, PDTT	Terbuka	Data berupa berita kegiatan hukum yang ada di	Realtime	UKE I	Ya	DPD TT -DAB- 05.01. 06	DPD TT- DAL- 02.09.03.01 Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum	RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.03 Data informasi	RAD.09.03.05 pengelolaan informasi publik	RAD.09.03.05.30 Data Berita

ID Data	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Sifat Data	Jenis Data	Validitas Data	Produsen Data/Penanggung Jawab Data	Interoperabilitas	Proses Bisnis Terkait	Layanan Terkait	Level 1	Level 2	Level 3	Level 4
					Kementerian Desa, PDTT					(JDIH Kemendesa)				
DPD TT -DAD- 09.03. 05.31	Data SPI	Data Responden 1. Nama 2. Nomor Tlp/HP 3. Nomor KTP/NIP 4. Jabatan	Memberikan survei/sebagai responden	Terbatas	Char	Realtime	KPK Inspektora t Jenderal KDPD TT	Ya	DPD TT -DAB- 09.06. 12	DPD TT- DAL- 02.06.01.01 Layanan Survei Penilaian Integritas	RAD.09 Informa si Pemerin tahan Umum	RAD.09.03 Data informas i	RAD.09.03.05 pengelol aan informas i publik	RAD.09.03 .05.31 Data SPI
DPD TT -DAD- 09.03. 06.01	Data Rekapitulasi Pelaksana an Pengadaan Barang/Ja sa KDPD TT	1. Data paket pekerjaan beserta pagu dari seluruh satker baik dana APBN, Loan, Dana TP (pelaksanaan tender di pusat) 2. Jumlah paket beserta pagu pekerjaan yang telah terumumkan pada SiRUP 3. Jumlah paket beserta pagu usulan paket tender yang disampaikan seluruh satker ke UKPBJ 4. Jumlah paket beserta pagu pekerjaan yang sedang proses tender	Memberikan informasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa di lingkungan Kementerian Desa,PDT, dan Transmigrasi	Terbuka	Varcha r	Minggu an	Seluruh satker di Kementeri an Desa, PDT, dan Transmigr asi	Ya	DPD TT -DAB- 09.02. 11	DPD TT- DAL- 02.02.08.01 Layanan Pengadaan Barang/Jas a Pemerintah	RAD.09 Informa si Pemerin tahan Umum	RAD.09.03 Data informas i	RAD.09.03.06 Data Pengada an Barang/ Jasa	RAD.09.03 .06.01 Data Progress Tender

ID Data	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Sifat Data	Jenis Data	Validitas Data	Produsen Data/Penanggung Jawab Data	Interoperabilitas	Proses Bisnis Terkait	Layanan Terkait	Level 1	Level 2	Level 3	Level 4
DPD TT -DAD- 09.03. 06.02	Data Rekapitulasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan	1. Data paket pekerjaan beserta pagu yang telah diumumkan pada Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) 2. DataPAKET pekerjaan yang menggunakan TKDN 3. Data paket pekerjaan yang menggunakan penyedia dalam pelaksanaan pekerjaan 4. Data paket pekerjaan yang dilaksanakan secara swakelola	Memberikan informasi progress penayangan paket pekerjaan pada Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP)	Terbuka	Varchar	Mingguan	Seluruh satker di Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi	Ya	DPD TT -DAB- 09.02. 11	DPD TT- DAL- 02.02.08.01 Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09. 03 Data informasi	RAD.09. 03.06 Data Pengadaan Barang/ Jasa	RAD.09.03 .06.02 Data Rekapitulasi Sirup
DPD TT -DAD- 09.03. 09	Data Tenaga Pendamping Profesional yang Terkontrak Untuk Melakukan Pendampingan	Data diri Tenaga Pendamping Profesional yang terkontrak untuk melakukan pendampingan baik di tingkat Pusat, Provinsi, Kabupaten, dan Desa	dokumentasi diri Tenaga Pendamping Profesional yang terkontrak untuk melakukan pendampingan	Terbatas/Tertutup	String	Bulanan	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan	Ya	DPD TT -DAB- 03.05. 06.04 DPD TT -DAB- 03.02. 05.04 DPD TT -DAB- 03.05. 07.04	DPD TT- DAL- 01.43.03.06 Layanan Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat	RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09. 03 Data informasi		

ID Data	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Sifat Data	Jenis Data	Validitas Data	Produsen Data/Penanggung Jawab Data	Interoperabilitas	Proses Bisnis Terkait	Layanan Terkait	Level 1	Level 2	Level 3	Level 4
							Transmigrasi							
DPD TT -DAD- 09.03. 10	Data Kinerja Tenaga Pendamping Profesional	Data hasil kinerja Tenaga Pendamping Profesional sebagai bahan evaluasi kinerja	dokumentasi hasil kinerja Tenaga Pendamping Profesional	Tertutup	String	Bulanan	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	Tidak	DPD TT -DAB- 03.05. 06.04 DPD TT -DAB- 03.02. 05.04 DPD TT -DAB- 03.05. 07.04	DPD TT- DAL- 01.43.03.06 Layanan Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat	RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09. 03 Data informasi		
DPD TT -DAD- 09.03. 11	Data Pendamping Desa yang Bersertifikat	Data Pendamping Desa yang Bersertifikat setelah mengikuti Uji Kompetensi	dokumentasi Pendamping Desa yang Bersertifikat	Terbatas/Tertutup	String	Tahunan	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	Tidak	DPD TT -DAB- 03.05. 06.04 DPD TT -DAB- 03.02. 05.04 DPD TT -DAB- 03.05. 07.04	DPD TT- DAL- 01.43.03.06 Layanan Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat	RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09. 03 Data informasi		
DPD TT -DAD- 09.03. 12	Data Pendamping Desa	Data Pendamping Desa yang telah	dokumentasi Pendamping	Terbatas	String	Tahunan	Badan Pengembangan	Tidak	DPD TT -DAB- 03.05.	DPD TT- DAL- 01.43.03.07	RAD.09 Informasi	RAD.09. 03 Data		

ID Data	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Sifat Data	Jenis Data	Validitas Data	Produsen Data/Penanggung Jawab Data	Interoperabilitas	Proses Bisnis Terkait	Layanan Terkait	Level 1	Level 2	Level 3	Level 4
09.03.12	yang Bersertifikat Mengikuti Pengembangan Kapasitas	mengikuti pengembangan kapasitas dan memiliki sertifikat	Desa yang telah mengikuti pengembangan kapasitas dan memiliki sertifikat				Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi		06.04 DPDTT-DAB-03.02.05.04 DPDTT-DAB-03.05.07.04	Layanan Pelatihan Sumber Daya Masyarakat	Pemerintahan Umum	informasi		
DPDTT-DAD-09.03.13	Data Jumlah Pejabat Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat (PSM)	Data Jumlah Pejabat Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat (PSM) aktif yang ada di Indonesia	dokumentasi jumlah Pejabat Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat (PSM) aktif yang ada di Indonesia	Terbatas	String	Tiga Bulanan	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	Tidak	DPDTT-DAB-09.06.11	DPDTT-DAL-01.43.03.08 Layanan Pembinaan Jabatan Fungsional	RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.03 Data informasi		
DPDTT-DAD-09.03.14	Data Penggerak Swadaya Masyarakat (PSM) yang dilakukan Uji Kompetensi	Data Penggerak Swadaya Masyarakat (PSM) yang melakukan Uji Kompetensi dan sudah tersertifikasi	dokumentasi Penggerak Swadaya Masyarakat (PSM) yang melakukan Uji Kompetensi	Terbatas	String	Enam Bulanan	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan	Tidak	DPDTT-DAB-09.06.11	DPDTT-DAL-01.43.03.08 Layanan Pembinaan Jabatan Fungsional	RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.03 Data informasi		

ID Data	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Sifat Data	Jenis Data	Validitas Data	Produsen Data/Penanggung Jawab Data	Interoperabilitas	Proses Bisnis Terkait	Layanan Terkait	Level 1	Level 2	Level 3	Level 4
	i (Tersertifikasi)		dan sudah tersertifikasi				Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi							
DPD TT -DAD- 09.03. 15	Data Kegiatan Peningkatan Kapasitas yang diselenggarakan Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional	Data Kegiatan Peningkatan Kapasitas yang diselenggarakan Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional	dokumentasi Kegiatan Peningkatan Kapasitas yang diselenggarakan Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional	Terbatas	String	Tiga Bulanan	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	Tidak	DPD TT -DAB- 09.06. 11	DPD TT- DAL- 01.43.03.08 Layanan Pembinaan Jabatan Fungsional	RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09. 03 Data informasi		
DPD TT -DAD- 09.03. 16	Data Pejabat Fungsional yang ditingkatkan Kapasitasnya	Data Pejabat Fungsional PSM yang mengikuti peningkatan kapasitas	dokumentasi Pejabat Fungsional PSM yang mengikuti peningkatan kapasitas	Terbatas	String	Enam Bulanan	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan	Tidak	DPD TT -DAB- 09.06. 11	DPD TT- DAL- 01.43.03.08 Layanan Pembinaan Jabatan Fungsional	RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09. 03 Data informasi		

ID Data	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Sifat Data	Jenis Data	Validitas Data	Produsen Data/Penanggung Jawab Data	Interoperabilitas	Proses Bisnis Terkait	Layanan Terkait	Level 1	Level 2	Level 3	Level 4
							Transmigrasi							
DPD TT -DAD- 09.03. 17	Data Rekapitulasi Penilaian dan Evaluasi Jabatan Fungsional	Data Rekapitulasi Penilaian dan Evaluasi Jabatan Fungsional PSM	dokumentasi rekapitulasi penilaian dan evaluasi Jabatan Fungsional PSM	Terbatas	String	Enam Bulanan	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	Tidak	DPD TT -DAB- 09.06. 11	DPD TT- DAL- 01.43.03.08 Layanan Pembinaan Jabatan Fungsional	RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09. 03 Data informasi		
DPD TT -DAD- 09.03. 18	Data Alumni Pelatihan Struktural	Data Alumni Pelatihan Struktural di lingkungan Kemendesa PDTT	dokumentasi Alumni Pelatihan Struktural di lingkungan Kemendesa PDTT	Terbatas	String	Tiga Bulanan	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	Tidak	DPD TT -DAB- 09.06. 11	DPD TT- DAL- 01.43.03.09 Layanan Pelatihan Pegawai ASN	RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09. 03 Data informasi		
DPD TT -DAD-	Data Alumni	Data Alumni Pelatihan Fungsional di	dokumentasi Alumni Pelatihan	Terbatas	String	Tiga Bulanan	Badan Pengembangan	Tidak	DPD TT -DAB-	DPD TT- DAL- 01.43.03.09	RAD.09 Informasi	RAD.09. 03 Data		

ID Data	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Sifat Data	Jenis Data	Validitas Data	Produsen Data/Pena nggung Jawab Data	Interoperabilitas	Proses Bisnis Terkait	Layanan Terkait	Level 1	Level 2	Level 3	Level 4
09.03.19	Pelatihan Fungsional	lingkungan Kemendesa PD TT	Fungsional di lingkungan Kemendesa PD TT				Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi		09.06.11	Layanan Pelatihan Pegawai ASN	Pemerintahan Umum	informasi		
DPD TT -DAD-09.03.20	Data Alumni Pelatihan Teknis	Data Alumni Pelatihan Teknis di lingkungan Kemendesa PD TT	dokumentasi Alumni Pelatihan Teknis di lingkungan Kemendesa PD TT	Terbatas	String	Tiga Bulanan	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	Tidak	DPD TT -DAB-09.06.11	DPD TT-DAL-01.43.03.09 Layanan Pelatihan Pegawai ASN	RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.03 Data informasi		
DPD TT -DAD-09.03.21	Data Pelaksanaan Pelatihan Pegawai Aparatur Sipil Negara	Data Pelaksanaan Pelatihan Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kemendesa PD TT	dokumentasi Pelaksanaan Pelatihan Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan	Terbuka	String	Tiga Bulanan	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan	Tidak	DPD TT -DAB-09.06.11	DPD TT-DAL-01.43.03.09 Layanan Pelatihan Pegawai ASN	RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.03 Data informasi		

ID Data	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Sifat Data	Jenis Data	Validitas Data	Produsen Data/Penanggung Jawab Data	Interoperabilitas	Proses Bisnis Terkait	Layanan Terkait	Level 1	Level 2	Level 3	Level 4
	Kementerian		Kemendesa PDDTT				Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi							
DPD TT -DAD-09.03.22	Data Jenis Peningkatan Kapasitas dan Pengembangan dan Tenaga Pelatih	Data Jenis Peningkatan Kapasitas dan Pengembangan dan Tenaga Pelatih Pegawai ASN di lingkungan Kemendesa PDDTT	dokumentasi Jenis Peningkatan Kapasitas dan Pengembangan dan Tenaga Pelatih Pegawai ASN di lingkungan Kemendesa PDDTT	Terbuka	String	Tahunan	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	Tidak	DPD TT -DAB-09.06.11	DPD TT-DAL-01.43.03.09 Layanan Pelatihan Pegawai ASN	RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.03 Data informasi		
DPD TT -DAD-09.03.23	Data Jenis Kerjasama Pelatihan Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kementerian	Data Jenis Kerjasama Pelatihan Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kemendesa PDDTT	dokumentasi Jenis Kerjasama Pelatihan Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kemendesa PDDTT	Terbatas	String	Tahunan	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan	Tidak	DPD TT -DAB-09.06.11	DPD TT-DAL-01.43.03.09 Layanan Pelatihan Pegawai ASN	RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.03 Data informasi		

ID Data	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Sifat Data	Jenis Data	Validitas Data	Produsen Data/Penanggung Jawab Data	Interoperabilitas	Proses Bisnis Terkait	Layanan Terkait	Level 1	Level 2	Level 3	Level 4
							Transmigrasi							
DPD TT -DAD- 09.03. 24	Data Rencana Pelatihan Tingkat Provinsi dan Kabupaten	Data Rencana Pelatihan Masyarakat Tingkat Provinsi dan Kabupaten	dokumentasi Rencana Pelatihan Masyarakat Tingkat Provinsi dan Kabupaten	Terbatas	String	Tiga Bulanan	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	Tidak	DPD TT -DAB- 03.05. 06.04 DPD TT -DAB- 03.02. 05.04 DPD TT -DAB- 03.05. 07.04	DPD TT- DAL- 01.43.03.07 Layanan Pelatihan Sumber Daya Masyarakat	RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09. 03 Data informasi		
DPD TT -DAD- 09.03. 25	Data Kebutuhan Pelatihan Masyarakat Tingkat Provinsi dan Kabupaten	Data Kebutuhan Pelatihan Masyarakat Tingkat Provinsi dan Kabupaten	dokumentasi Kebutuhan Pelatihan Masyarakat Tingkat Provinsi dan Kabupaten	Terbatas	String	Tiga Bulanan	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	Tidak	DPD TT -DAB- 03.05. 06.04 DPD TT -DAB- 03.02. 05.04 DPD TT -DAB- 03.05. 07.04	DPD TT- DAL- 01.43.03.07 Layanan Pelatihan Sumber Daya Masyarakat	RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09. 03 Data informasi		
DPD TT -DAD- 09.03. 26	Data Sumber Daya Manusia / Penggiat Kader	Data Sumber Daya Manusia / Penggiat Kader	dokumentasi Sumber Daya Manusia / Penggiat Kader	Terbatas	String	Realtime	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	Tidak	DPD TT -DAB- 03.05. 06.04 DPD TT -DAB- 03.02. 05.04 DPD TT -DAB- 03.05. 07.04	DPD TT- DAL- 01.43.03.07 Layanan Pelatihan Sumber Daya Masyarakat	RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09. 03 Data informasi		

ID Data	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Sifat Data	Jenis Data	Validitas Data	Produsen Data/Pena nggung Jawab Data	Interoperabilitas	Proses Bisnis Terkait	Layanan Terkait	Level 1	Level 2	Level 3	Level 4
09.03.26	Manusia/P enggiat Kader Desa yang Mendapatk an Sertifikat Pelatihan	Desa yang Mendapatkan Sertifikat Pelatihan	Manusia / Penggiat Kader Desa yang Mendapatka n Sertifikat Pelatihan				Sumber Daya Manusia dan Pemberday aan Masyaraka t Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigr asi		06.04 DPDTT -DAB-03.02.05.04 DPDTT -DAB-03.05.07.04	Layanan Pelatihan Sumber Daya Masyarakat	Pemerin tahan Umum	informas i		
DPDTT -DAD-09.03.27	Data Jenis Kerja Sama Pelatihan Sumber Daya Manusia Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigr asi	Data Jenis Kerja Sama Pelatihan Sumber Daya Manusia Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	dokumentas i Jenis Kerja Sama Pelatihan Sumber Daya Manusia Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigras i	Terbatas	String	Tahuna n	Badan Pengemba ngan Sumber Daya Manusia dan Pemberday aan Masyaraka t Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigr asi	Tidak	DPDTT -DAB-03.05.06.04 DPDTT -DAB-03.02.05.04 DPDTT -DAB-03.05.07.04	DPDTT-DAL-01.43.03.07 Layanan Pelatihan Sumber Daya Masyarakat	RAD.09 Informa si Pemerin tahan Umum	RAD.09.03 Data informas i		
DPDTT -DAD-09.03.28	Data Jumlah Kader Masyaraka t Desa	Data Jumlah Kader Masyarakat Desa	dokumentas i Jumlah Kader Masyarakat Desa	Terbatas	String	Realtime	Badan Pengemba ngan Sumber Daya Manusia dan Pemberday aan	Tidak	DPDTT -DAB-03.05.06.04 DPDTT -DAB-03.02.05.04 DPDTT	DPDTT-DAL-01.43.03.07 Layanan Pelatihan Sumber Daya Masyarakat	RAD.09 Informa si Pemerin tahan Umum	RAD.09.03 Data informas i		

ID Data	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Sifat Data	Jenis Data	Validitas Data	Produsen Data/Penanggung Jawab Data	Interoperabilitas	Proses Bisnis Terkait	Layanan Terkait	Level 1	Level 2	Level 3	Level 4
							Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi		-DAB-03.05.07.04					
DPD TT-DAD-09.03.29	Data Desa yang telah diberikan Pelatihan	Data Desa yang telah diberikan Pelatihan oleh BPSDM Kemendesa PD TT	dokumentasi Desa yang telah diberikan Pelatihan oleh BPSDM Kemendesa PD TT	Terbatas	String	Tiga Bulanan	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	Tidak	DPD TT-DAB-03.05.06.04 DPD TT-DAB-03.02.05.04 DPD TT-DAB-03.05.07.04	DPD TT-DAL-01.43.03.07 Layanan Pelatihan Sumber Daya Masyarakat	RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.03 Data informasi		
DPD TT-DAD-09.03.30	Data Jumlah Masyarakat Desa yang telah diberikan Pelatihan	Data Jumlah Masyarakat Desa yang telah diberikan Pelatihan oleh BPSDM Kemendesa PD TT	dokumentasi Jumlah Masyarakat Desa yang telah diberikan Pelatihan oleh BPSDM Kemendesa PD TT	Terbatas	String	Realtime	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan	Tidak	DPD TT-DAB-03.05.06.04 DPD TT-DAB-03.02.05.04 DPD TT-DAB-03.05.07.04	DPD TT-DAL-01.43.03.07 Layanan Pelatihan Sumber Daya Masyarakat	RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.03 Data informasi		

ID Data	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Sifat Data	Jenis Data	Validitas Data	Produsen Data/Penanggung Jawab Data	Interoperabilitas	Proses Bisnis Terkait	Layanan Terkait	Level 1	Level 2	Level 3	Level 4
							Transmigrasi							
DPD TT -DAD- 09.03. 31	Data BUMDes yang telah diberikan Pelatihan	Data BUMDes yang telah diberikan Pelatihan oleh BPSDM Kemendesa PD TT	dokumentasi BUMDes yang telah diberikan Pelatihan oleh BPSDM Kemendesa PD TT	Terbatas	String	Tiga Bulanan	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	Tidak	DPD TT -DAB- 03.05. 06.04 DPD TT -DAB- 03.02. 05.04 DPD TT -DAB- 03.05. 07.04	DPD TT- DAL- 01.43.03.07 Layanan Pelatihan Sumber Daya Masyarakat	RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09. 03 Data informasi		
DPD TT -DAD- 09.03. 32	Data Calon Transmigran yang telah diberikan Pelatihan	Data Calon Transmigran yang telah diberikan Pelatihan oleh BPSDM Kemendesa PD TT	dokumentasi Calon Transmigran yang telah diberikan Pelatihan oleh BPSDM Kemendesa PD TT	Terbatas	String	Tiga Bulanan	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	Tidak	DPD TT -DAB- 03.05. 06.04 DPD TT -DAB- 03.02. 05.04 DPD TT -DAB- 03.05. 07.04	DPD TT- DAL- 01.43.03.07 Layanan Pelatihan Sumber Daya Masyarakat	RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09. 03 Data informasi		
DPD TT -DAD- Pemberday	Data Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa	Data Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa	dokumentasi Kader Pemberdaya	Terbatas	String	Realtime	Badan Pengembangan	Tidak	DPD TT -DAB- 03.05.	DPD TT- DAL- 01.43.03.07	RAD.09 Informasi	RAD.09. 03 Data		

ID Data	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Sifat Data	Jenis Data	Validitas Data	Produsen Data/Pena nggung Jawab Data	Interoperabilitas	Proses Bisnis Terkait	Layanan Terkait	Level 1	Level 2	Level 3	Level 4
09.03.33	aan Masyarakat Desa (KPMD) yang telah diberikan Pelatihan	(KPMD) yang telah diberikan Pelatihan oleh BPSDM Kemendesa PDTT	an Masyarakat Desa (KPMD) yang telah diberikan Pelatihan oleh BPSDM Kemendesa PDTT				Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi		06.04 DPDTT -DAB-03.02.05.04 DPDTT -DAB-03.05.07.04	Layanan Pelatihan Sumber Daya Masyarakat	Pemerintahan Umum	informasi		
DPDTT -DAD-09.03.34	Data Desa yang telah diberikan Pendampingan	Data Desa yang telah diberikan Pendampingan oleh BPSDM Kemendesa PDTT	dokumentasi Desa yang telah diberikan Pendampingan oleh BPSDM Kemendesa PDTT	Terbatas	String	Tiga Bulanan	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	Tidak	DPDTT -DAB-03.05.06.04 DPDTT -DAB-03.02.05.04 DPDTT -DAB-03.05.07.04	DPDTT-DAL-01.43.03.07 Layanan Pelatihan Sumber Daya Masyarakat	RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.03 Data informasi		
DPDTT -DAD-09.03.35	Data Jumlah Masyarakat Desa yang telah diberikan Pendampingan	Data Jumlah Masyarakat Desa yang telah diberikan Pendampingan oleh BPSDM Kemendesa PDTT	dokumentasi Jumlah Masyarakat Desa yang telah diberikan Pendampingan oleh BPSDM	Terbatas	String	Tiga Bulanan	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan	Tidak	DPDTT -DAB-03.05.06.04 DPDTT -DAB-03.02.05.04 DPDTT	DPDTT-DAL-01.43.03.07 Layanan Pelatihan Sumber Daya Masyarakat	RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.03 Data informasi		

ID Data	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Sifat Data	Jenis Data	Validitas Data	Produsen Data/Penanggung Jawab Data	Interoperabilitas	Proses Bisnis Terkait	Layanan Terkait	Level 1	Level 2	Level 3	Level 4
			Kemendesa PDTT				Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi		-DAB-03.05.07.04					
DPD TT-DAD-09.03.36	Data BUMDes yang telah diberikan Pendampingan	Data BUMDes yang telah diberikan Pendampingan oleh BPSDM Kemendesa PD TT	dokumentasi BUMDes yang telah diberikan Pendampingan oleh BPSDM Kemendesa PD TT	Terbatas	String	Tiga Bulanan	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	Tidak	DPD TT-DAB-03.05.06.04 DPD TT-DAB-03.02.05.04 DPD TT-DAB-03.05.07.04	DPD TT-DAL-01.43.03.07 Layanan Pelatihan Sumber Daya Masyarakat	RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.03 Data informasi		
DPD TT-DAD-09.03.37	Data Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna di Lokus Pelatihan	Data Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna di Lokus Pelatihan Masyarakat yang telah dilakukan oleh BPSDM Kemendesa PD TT	dokumentasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna di Lokus Pelatihan Masyarakat yang telah dilakukan oleh BPSDM Kemendesa PD TT	Terbatas	String	Tiga Bulanan	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan	Tidak	DPD TT-DAB-03.05.06.04 DPD TT-DAB-03.02.05.04 DPD TT-DAB-03.05.07.04	DPD TT-DAL-01.43.03.07 Layanan Pelatihan Sumber Daya Masyarakat	RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.03 Data informasi		

ID Data	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Sifat Data	Jenis Data	Validitas Data	Produsen Data/Penanggung Jawab Data	Interoperabilitas	Proses Bisnis Terkait	Layanan Terkait	Level 1	Level 2	Level 3	Level 4
							Transmigrasi							
DPDTT-DAD-09.03.38	Data Unit Kerja	Data satuan kerja tingkat jabatan Eselon I, Eselon II, dan Seluruh Balai dalam struktur organisasi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	Menginformasikan Unit Kerja yang terdapat pada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	Terbuka	Char	Tahunan	UKE I, UKE II, dan seluruh Balai	Ya	DPDTT-DAB-09.05.10	DPDTT-DAL-02.07.02.01 Layanan Pengawasan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.03 Data informasi		
DPDTT-DAD-09.05.09	Data Rencana Strategis	Dokumen perencanaan suatu organisasi yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dan di dalamnya dijelaskan mengenai strategi atau arahan sebagai dasar dalam mengambil keputusan dalam periode 5 tahun	Menginformasikan hasil yang ingin dicapai dan strategi yang akan dilakukan oleh Kementerian Desa, PDPT	Terbuka	String	Lima Tahunan	UKE I, UKE II, dan seluruh Balai	Ya	DPDTT-DAB-09.05.10	DPDTT-DAL-02.07.02.01 Layanan Pengawasan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.05 perencanaan pembangunan nasional	RAD.09.05.01 perencanaan pembangunan nasional	
DPDTT-DAD-09.05.10	Data Rencana Kerja Tahunan	Dokumen penjabaran dari Renstra, memuat seluruh rencana atau target kinerja yang hendak dicapai	Menginformasikan rencana atau target kinerja yang hendak dicapai oleh	Terbuka	String	Tahunan	UKE I, UKE II, dan seluruh Balai	Ya	DPDTT-DAB-09.05.10	DPDTT-DAL-02.07.02.01 Layanan Pengawasan Akuntabilitas Kinerja	RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09.05 perencanaan pembangunan nasional	RAD.09.05.01 perencanaan pembangunan nasional	

ID Data	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Sifat Data	Jenis Data	Validitas Data	Produsen Data/Penanggung Jawab Data	Interoperabilitas	Proses Bisnis Terkait	Layanan Terkait	Level 1	Level 2	Level 3	Level 4
		dalam satu tahun yang dituangkan dalam sejumlah indikator kinerja strategis yang relevan	Kementerian Desa, PDTT dalam satu tahun							Instansi Pemerintah				
DPD TT -DAD- 09.05. 11	Data Kecamatan	Data Usulan Kabupaten penerima Dana Alokasi Khusus	Menginformasikan Lokasi Kecamatan DAK Transdes dilakukan	Terbatas	String	Tahunan	Bappenas	Ya	DPD TT -DAB- 09.05. 10	DPD TT- DAL- 02.03.04.01 Layanan Monitoring dan Evaluasi Dana Alokasi Khusus	RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09. 05 perencanaan pembangunan nasional		
DPD TT -DAD- 09.06. 01.01	Data Kehadiran	Perekaman Data kehadiran Pegawai	Memberikan informasi data kehadiran pegawai	Terbuka	Char / Kualitatif	Harian	Biro KEPO	Ya	DPD TT -DAB- 09.06. 11	DPD TT- DAL- 02.04.01.04 Layanan Presensi Pegawai	RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09. 06 aparatur negara	RAD.09. 06.01 pengelolaan aparatur negara	RAD.09.06 .01.01 Data Kehadiran
DPD TT -DAD- 09.06. 01.02	Data Kepegawaian	Data yang mencakup Data Pegawai, Data Riwayat Jabatan/pendidikan/diklat/ Pegawai, Data Cuti Pegawai, Data Kehadiran Data Dokumentasi Pegawai Data Pensiun	Memberikan data pegawai	Terbuka	Char / Kualitatif	Realtime	Biro KEPO	Ya	DPD TT -DAB- 09.06. 11	DPD TT- DAL- 02.04.01.01 Layanan Informasi Manajemen Kepegawaian	RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09. 06 aparatur negara	RAD.09. 06.01 pengelolaan aparatur negara	RAD.09.06 .01.02 Data Pegawai

ID Data	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Sifat Data	Jenis Data	Validitas Data	Produsen Data/Penanggung Jawab Data	Interoperabilitas	Proses Bisnis Terkait	Layanan Terkait	Level 1	Level 2	Level 3	Level 4
		Data Tugas Belajar Data Unit Kerja Data Jabatan Kosong												
DPD TT -DAD- 09.06. 01.03	Data Evaluasi dan Kinerja pegawai	Data SKP (Sasaran Kinerja Pegawai), Evaluasi dan Penilaian SKP	Memberikan Data Evaluasi dan Kinerja pegawai	Terbuka	Char / Kualitatif	Tahunan	Biro KEPO	Ya	DPD TT -DAB- 09.06. 11	DPD TT- DAL- 02.04.01.05 Layanan Kinerja Pegawai	RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09. 06 aparatur negara	RAD.09. 06.01 pengelolaan aparatur negara	RAD.09.06 .01.03 Data Evaluasi dan Kinerja pegawai
DPD TT -DAD- 09.06. 04.01	Data Evaluasi RB	Data WBK WBBM (Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani), data PMPRB (Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)), Rencana Kerja Tahunan	Memberikan data Evaluasi RB	Terbatas	Char / Kualitatif	Tiga Bulanan	Biro KEPO	Ya	DPD TT -DAB- 09.06. 10	DPD TT- DAL- 02.04.09.01 Layanan Evaluasi Reformasi Birokrasi	RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09. 06 aparatur negara	RAD.09. 06.04 pembinaan reformasi birokrasi	RAD.09.06 .04.01 pembinaan reformasi birokrasi instansi
DPD TT -DAD- 09.06. 05.01	Data Laporan Kinerja	Dokumen capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran	Menginformasikan Laporan Capaian Kinerja dalam pelaksanaan anggaran Kementerian Desa, PDTT	Terbuka	String	Tahunan	UKE I, UKE II, dan seluruh Balai	Tidak	DPD TT -DAB- 09.05. 10	DPD TT- DAL- 02.07.02.01 Layanan Pengawasan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09. 06 aparatur negara	RAD.09. 06.05 akuntabilitas kinerja	RAD.09.06 .05.01 Data Laporan Kinerja

ID Data	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Sifat Data	Jenis Data	Validitas Data	Produsen Data/Penanggung Jawab Data	Interoperabilitas	Proses Bisnis Terkait	Layanan Terkait	Level 1	Level 2	Level 3	Level 4
DPD TT -DAD- 09.06. 05.02	Data Laporan Hasil Evaluasi SAKIP	Dokumen Analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan untuk tujuan peningkatan akuntabilitas dan kinerja instansi/unit kerja pemerintah	Menginformasikan Laporan Hasil Evaluasi SAKIP yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Desa PD TT	Terbatas	String	Tahunan	UKE I, UKE II, dan seluruh Balai	Tidak	DPD TT -DAB- 09.05. 10	DPD TT- DAL- 02.07.02.01 Layanan Pengawasan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09. 06 aparatur negara	RAD.09. 06.05 akuntabilitas kinerja	RAD.09.06 .05.02 Data Laporan Hasil Evaluasi SAKIP
DPD TT -DAD- 09.06. 05.03	Data Perjanjian Kinerja	Dokumen perjanjian yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja	Menginformasikan Perjanjian Kinerja Kementerian Desa PD TT	Terbuka	String	Tahunan	UKE I, UKE II, dan seluruh Balai	Tidak	DPD TT -DAB- 09.05. 10	DPD TT- DAL- 02.07.02.01 Layanan Pengawasan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09. 06 aparatur negara	RAD.09. 06.05 akuntabilitas kinerja	RAD.09.06 .05.03 Data Perjanjian Kinerja
DPD TT -DAD- 09.06. 05.04	Data Indikator Kinerja Utama	Informasi Ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan	Menginformasikan Ukuran keberhasilan	Terbuka	String	Lima Tahunan	UKE I, UKE II, dan	Tidak	DPD TT -DAB- 09.05. 10	DPD TT- DAL- 02.07.02.01 Layanan	RAD.09 Informasi Pemerin	RAD.09. 06 aparatur negara	RAD.09. 06.05 akuntabilitas	RAD.09.06 .05.04 Data Indikator

ID Data	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Sifat Data	Jenis Data	Validitas Data	Produsen Data/Penanggung Jawab Data	Interoperabilitas	Proses Bisnis Terkait	Layanan Terkait	Level 1	Level 2	Level 3	Level 4
		sasaran strategis organisasi tingkat Kementerian, Unit Kerja Eselon I, Unit Kerja Eselon II, dan seluruh Balai	dari suatu tujuan dan sasaran strategis Kementerian Desa PDTT				seluruh Balai			Pengawasan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	tahan Umum		litas kinerja	Kinerja Utama
DPD TT -DAD- 09.06. 05.05	Data Target Kinerja dan Anggaran	Informasi target per Indikator Kinerja Utama yang ingin dicapai dalam Perjanjian Kinerja	Menginformasikan target Indikator Kinerja Utama dan Anggaran yang ingin dicapai per triwulan dan per tahun	Terbuka	String	Tahunan	UKE I, UKE II, dan seluruh Balai	Tidak	DPD TT -DAB- 09.05. 10	DPD TT- DAL- 02.07.02.01 Layanan Pengawasan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09. 06 aparatur negara	RAD.09. 06.05 akuntabilitas kinerja	RAD.09.06 .05.05 Data Target Kinerja dan Anggaran
DPD TT -DAD- 09.06. 05.06	Data Capaian Unit	Informasi Capaian atau Realisasi per Indikator Kinerja Utama yang diraih oleh Kementerian, Unit Kerja Eselon I, Unit Kerja Eselon II, dan seluruh Balai	Menginformasikan capaian atau realisasi yang dicapai oleh Kementerian, Unit Kerja Eselon I, Unit Kerja Eselon II, dan seluruh Balai per triwulan dan per tahun	Terbuka	String	Tahunan	UKE I, UKE II, dan seluruh Balai	Tidak	DPD TT -DAB- 09.05. 10	DPD TT- DAL- 02.07.02.01 Layanan Pengawasan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09. 06 aparatur negara	RAD.09. 06.05 akuntabilitas kinerja	RAD.09.06 .05.06 Data Capaian Unit

ID Data	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Sifat Data	Jenis Data	Validitas Data	Produsen Data/Penanggung Jawab Data	Interoperabilitas	Proses Bisnis Terkait	Layanan Terkait	Level 1	Level 2	Level 3	Level 4
DPD TT -DAD- 09.06. 05.07	Data Capaian Triwulan	Informasi Capaian atau Realisasi per Indikator Kinerja Utama yang diraih oleh Kementerian, Unit Kerja Eselon I dan Unit Kerja Eselon II per triwulan dalam periode satu tahun	Menginformasikan capaian atau realisasi yang dicapai oleh Kementerian , Unit Kerja Eselon I dan Unit Kerja Eselon II per triwulan	Terbuka	String	Tiga Bulanan	UKE I, UKE II, dan seluruh Balai	Tidak	DPD TT -DAB- 09.05. 10	DPD TT- DAL- 02.07.02.01 Layanan Pengawasan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09. 06 aparatur negara	RAD.09. 06.05 akuntabilitas kinerja	RAD.09.06 .05.07 Data Capaian Triwulan
DPD TT -DAD- 09.06. 05.08	Data Capaian Tahunan	Informasi Capaian atau Realisasi per Indikator Kinerja Utama yang diraih oleh Kementerian, Unit Kerja Eselon I dan Unit Kerja Eselon II dalam periode satu tahun	Menginformasikan capaian atau realisasi yang dicapai oleh Kementerian , Unit Kerja Eselon I dan Unit Kerja Eselon II per tahun	Terbuka	String	Tahunan	UKE I, UKE II, dan seluruh Balai	Tidak	DPD TT -DAB- 09.05. 10	DPD TT- DAL- 02.07.02.01 Layanan Pengawasan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09. 06 aparatur negara	RAD.09. 06.05 akuntabilitas kinerja	RAD.09.06 .05.08 Data Capaian Tahunan
DPD TT -DAD- 09.06. 05.09	Data Nilai Kinerja Unit	Informasi Nilai Kinerja Unit/ Nilai Indikator Unit yang dilakukan setelah verifikasi data capaian terhadap seluruh indikator	Menginformasikan Nilai Kinerja Unit yang diperoleh dari Capaian Perjanjian Kinerja dibandingkan dengan Target	Terbatas	String	Tahunan	Biro Perencanaan dan Kerja Sama	Tidak	DPD TT -DAB- 09.05. 10	DPD TT- DAL- 02.07.02.01 Layanan Pengawasan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09. 06 aparatur negara	RAD.09. 06.05 akuntabilitas kinerja	RAD.09.06 .05.09 Data Nilai Kinerja Unit

ID Data	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Sifat Data	Jenis Data	Validitas Data	Produsen Data/Penanggung Jawab Data	Interoperabilitas	Proses Bisnis Terkait	Layanan Terkait	Level 1	Level 2	Level 3	Level 4
DPD TT -DAD- 09.06. 08.01	Data Surat Rekomendasi Penerbitan Serifikat elektronik Pejabat Eselon I dan II	1. Nama 2. NIP 3. NIK 4. Pangkat dan Golongan 5. Jabatan 6. Unit Kerja 7. Alamat email 8. No Telp	Memberikan informasi Penerbitan sertifikat elektronik eselon I dan II Kemenesa PD TT	Terbuka	Varcha r	Tahuna n	Bagian Layanan Pengadaan	Ya	DPD TT -DAB- 09.02. 11	DPD TT- DAL- 02.06.08.01 Layanan Persuratan dan Kearsipan	RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09. 06 aparatur negara	RAD.09. 06.08 kearsipan nasional	RAD.09.06 .08.01 pembinaan kearsipan instansi
DPD TT -DAD- 09.06. 08.02	Data ST administrator Eselon II	Surat Tugas administrator eselon II	Memberikan Informasi Penugasan administrator Per Eselon II	Terbuka	Varcha r	Tahuna n	Bagian Layanan Pengadaan	Ya	DPD TT -DAB- 09.02. 11	DPD TT- DAL- 02.06.08.02 Layanan Persuratan dan Kearsipan	RAD.09 Informasi Pemerintahan Umum	RAD.09. 06 aparatur negara	RAD.09. 06.08 kearsipan nasional	RAD.09.06 .08.01 pembinaan kearsipan instansi

C. DOMAIN LAYANAN SPBE

1. Arsitektur Layanan SPBE

Pemerintah harus terus berinovasi dan mengembangkan sistem yang memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemajuan bagi masyarakat. SPBE merupakan salah satu terobosan dalam mewujudkan layanan prima kepada masyarakat melalui peningkatan efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas kinerja pemerintahan. Layanan SPBE diarahkan untuk peningkatan kualitas Layanan SPBE dengan melakukan pengembangan Layanan SPBE yang berorientasi kepada pengguna, terintegrasi, dan berkesinambungan. Peningkatan kualitas tersebut dapat dicapai salah satunya melalui integrasi Layanan SPBE. Diharapkan dengan penerapan domain layanan SPBE dalam melakukan identifikasi layanan pemerintah dapat mempercepat terwujudnya agenda pembangunan untuk melakukan transformasi pelayanan publik menuju layanan digital pemerintah terintegrasi. Masing-masing layanan yang terdapat pada lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi disusun dalam tabel dibawah ini:

Tabel 3.7 Pemetaan DAL terhadap RAL

Tingkat 1	Tingkat 2	Tingkat 3	Tingkat 4
RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.03 Kenegaraan	RAL.01.03.07 Program Prioritas Nasional	RAL.01.03.07.01 Sistem Monitoring dan Evaluasi TEKAD
			RAL.01.11.03.01 Layanan Pendaftaran Nama dan Penerbitan Sertifikat Badan Hukum BUM Desa/BUM Desa Bersama
	RAL.01.11 Badan Usaha Milik Negara	RAL.01.11.03 Pengembangan usaha BUMN/BUMD	RAL.01.11.03.02 Layanan pemeringkatan BUM Desa
			RAL.01.11.03.03 Layanan BUMDes Learning (Pembelajaran BUM Desa Berbasis Digital)

Tingkat 1	Tingkat 2	Tingkat 3	Tingkat 4
			RAL.01.11.03.04 Layanan Media Promosi Desa Wisata
	RAL.01.16 Perizinan dan Akreditasi	RAL.01.16.04 Perizinan Penanaman Modal	RAL.01.16.04.01 e-IPT (Layanan Pemberian Izin Pelaksanaan Transmigrasi bagi calon mitra/mitra badan usaha berbasis elektronik)
	RAL.01.21 Pembangunan Kawasan atau Daerah Tertinggal	RAL.01.21.02 Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	RAL.01.21.02.01 Layanan Evaluasi Perkembangan Status Desa
			RAL.01.21.02.02 Layanan Konvergensi Stunting
			RAL.01.21.02.03 Layanan Informasi Pembangunan Berbasis Masyarakat
			RAL.01.21.02.04 Layanan Pencatatan Pemanfaatan Dana Desa
			RAL.01.21.02.05 Layanan Dashboard Data dan Informasi Desa (SID)
			RAL.01.21.02.06 Layanan Pendataan Kuesioner Desa, RT, Keluarga dan Individu

Tingkat 1	Tingkat 2	Tingkat 3	Tingkat 4
	RAL.01.43 Informasi	RAL.01.43.02 Informasi Statistik	RAL.01.21.02.07 Pencatatan Aktivitas harian Tenaga Pendamping Profesional (TPP)
			RAL.01.43.02.01 Layanan Monev Transformasi UPK PNPM MPd
		RAL.01.43.03 Pelayanan Informasi	RAL.01.43.03.01 Layanan Permohonan Informasi dan Pengaduan Masyarakat Terpadu
			RAL.01.43.03.02 Layanan Informasi Publik
			RAL.01.43.03.03 Layanan Perpustakaan
			RAL.01.43.03.04 Layanan Informasi Peta Terpadu Kawasan Transmigrasi
			RAL.01.43.03.05 Layanan Database Kependudukan di Kawasan Transmigrasi
			RAL.01.43.03.06 Layanan Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat
			RAL.01.43.03.07 Layanan Pelatihan Sumber Daya Masyarakat

Tingkat 1	Tingkat 2	Tingkat 3	Tingkat 4
			RAL.01.43.03.08 Layanan Pembinaan Jabatan Fungsional
			RAL.01.43.03.09 Layanan Pelatihan Pegawai ASN
			RAL.01.43.03.10 Layanan Pengawasan Internal Pemerintah
			RAL.01.43.03.11 Layanan Pengaduan Masyarakat Terpadu
			RAL.01.43.03.12 Layanan Konsultasi Terpadu
			RAL.01.43.03.13 Layanan Penyedia Dokumen Kebijakan Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
			RAL.01.43.03.14 Layanan penyedia dokumen keterpaduan rencana pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi

Tingkat 1	Tingkat 2	Tingkat 3	Tingkat 4
			RAL.01.43.03.15 Layanan Penyedia Dokumen Kebijakan Pengembangan Daya Saing Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
			RAL.01.43.03.16 Layanan Konsultasi dan Audiensi Badan Pengembangan dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
RAL.02 Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL.02.02 Keuangan	RAL.02.02.04 Penganggaran	RAL.02.02.04.02 Layanan Online Monitoring SPAN (OMSPAN)
		RAL.02.02.05 Pengelolaan Barang Milik Negara	RAL.02.02.05.01 Layanan Sistem Informasi Manajemen Usulan Hibah
		RAL.02.02.08 Penyelenggara Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	RAL.02.02.08.01 Penyelenggara Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
		RAL.02.02.09 Pengelolaan Keuangan	RAL.02.02.09.03 Layanan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI)

Tingkat 1	Tingkat 2	Tingkat 3	Tingkat 4
	RAL.02.03 Perencanaan Pembangunan Nasional	RAL.02.03.02 Penyusunan Perencanaan	RAL.02.03.02.01 Layanan Informasi Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (SIP PDT)
		RAL.02.03.04 Evaluasi Perencanaan	RAL.02.03.04.01 Layanan Monitoring dan Evaluasi Dana Alokasi Khusus
	RAL.02.04 Aparatur Negara	RAL.02.04.01 Manajemen Kepegawaian	RAL.02.04.01.01 Layanan Informasi Manajemen Kepegawaian
			RAL.02.04.01.02 Layanan Informasi Data Pegawai
			RAL.02.04.01.03 Layanan Cuti dan Izin Belajar Pegawai
			RAL.02.04.01.04 Layanan Presensi Pegawai
			RAL.02.04.01.05 Layanan Kinerja Pegawai
		RAL.02.04.09 Manajemen Reformasi Birokrasi	RAL.02.04.09.01 Layanan Evaluasi Reformasi Birokrasi
			RAL.02.04.01.06 Layanan kepegawaian, Organisasi dan Reformasi Birokrasi
			RAL.02.04.01.07 Layanan Perencanaan

Tingkat 1	Tingkat 2	Tingkat 3	Tingkat 4
			RAL.02.04.01.08 Perekrutan dan Seleksi
			RAL.02.04.01.09 Pengembangan Kapasitas
			RAL.02.04.01.10 Penilaian Kinerja dan Reward
			RAL.02.04.01.11 Promosi Rotasi dan Karir
			RAL.02.04.01.12 Layanan Persiapan Purna Bakti
	RAL.02.06 Dukungan Operasional Organisasi	RAL.02.06.01 Pelaporan	RAL.02.06.01.01 Survei Penilaian Integritas
		RAL.02.06.08 Dukungan Kearsipan	RAL.02.06.08.01 Dukungan Kearsipan
	RAL.02.07 Akuntabilitas Kinerja	RAL.02.07.02 Pengawasan Kinerja	RAL.02.07.02.01 Layanan Pengawasan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
	RAL.02.09 Data dan Informasi Pemerintahan	RAL.02.09.03 Pengelolaan Data dan Informasi	RAL.02.09.03.01 Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH Kemendes)

2. Metadata Arsitektur Layanan SPBE

Rincian arsitektur Layanan dituangkan dalam metadata arsitektur layanan sebagai penggambaran layanan. Metadata Arsitektur Layanan adalah karakteristik atau ciri yang mendefinisikan setiap metadata pada Arsitektur Layanan. Rincian mengenai metadata Arsitektur Layanan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.8 Metadata Arsitektur Layanan SPBE

ID Layanan	Nama Layanan	Tujuan Layanan	Fungsi Layanan	Unit Pelaksana Layanan	Kementerian/Lembaga Terkait	Target Layanan	Metode Layanan	Proses Bisnis	Level 1	Level 2	Level 3	Level 4
DPDPT-DAL-01.03.07.01	Layanan Sistem Monitorin g dan Evaluasi TEKAD	Memudahk an para Fasilitator Kabupaten , Fasilitator Kecamatan , dan Kader Desa dalam melaporka n laporan capaian hasil Kinerja Harian program TEKAD	Memberikan kemudahan bagi para Fasilitator Kabupaten, Fasilitator Kecamatan, dan Kader Desa dalam melaporkan kegiatan Harian pelaksanaan program TEKAD	Direktora t Pengembangan Produk Unggulan Desa, Daerah Tertinggal , dan Transmig rasi	(Internal Kemendesa PDTT) Pemda Kab/Provinsi	Internal Kementeri an Desa, Pembangu nan Daerah Tertinggal dan Transmigra si dibawah naungan IFAD	website (tekad.kemendesa.go.id)	DPDPT-DAB-03.05.06.06 DPDPT-DAB-03.02.05.07 DPDPT-DAB-03.05.07.06	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.03 Kenegara an	RAL.01.03.07 Program Prioritas Nasional	RAL.01.03.07.01 Sistem Monitoring dan Evaluasi TEKAD
DPDPT-DAL-01.11.03.01	Layanan Pendaftar an Nama dan Penerbita n Sertifikat Badan Hukum BUM Desa/BU M Desa Bersama	Memberika n layanan Pendaftara n nama dan Badan Hukum BUM Desa dan BUM Desa bersama	Melakukan penerbitan Sertifikat Badan Hukum untuk Bum Desa dan BUM Desa bersama dari Kementerian Hukum dan HAM	Direktora t Pengembangan Kelembag aan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal , dan Transmig rasi	KemenkumHAM	pengurus BUM Desa/BUM Desa Bersama	website (bumdes.kemendesa.go.id)	DPDPT-DAB-03.05.06.06 DPDPT-DAB-03.02.05.07 DPDPT-DAB-03.05.07.06	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.11 Badan Usaha Milik Negara	RAL.01.11.03 Pengembangan usaha BUMN/BUMD	RAL.01.11.03.01 Layanan Pendaftara n Nama dan Penerbitan Sertifikat Badan Hukum BUM Desa/BUM Desa Bersama

ID Layanan	Nama Layanan	Tujuan Layanan	Fungsi Layanan	Unit Pelaksana Layanan	Kementerian/L embaga Terkait	Target Layanan	Metode Layanan	Proses Bisnis	Level 1	Level 2	Level 3	Level 4
DPD TT-DAL-01.16.04.01	e-IPT (Layanan Pemberian Izin Pelaksanaan Transmigrasi bagi calon mitra/mitra badan usaha berbasis elektronik)	Memudahkan badan usaha untuk melakukan penanaman modal di desa, daerah tertinggal dan transmigrasi.	Memberikan kemudahan bagi badan usaha dalam permohonan perizinan penanaman modal.	Direktorat Pelayanan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	Pemda Kab/Provinsi	perusahaan swasta dan BUMN/BUMD	website (https://e-ipt.kemendesa.go.id/) tatap muka (ruang SELARAS)	DPD TT-DAB-03.02.05.07	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.16 Perizinan dan Akreditasi	RAL.01.16.04 Perizinan Penanaman Modal	RAL.01.16.04.01 e-IPT (Layanan Pemberian Izin Pelaksanaan Transmigrasi bagi calon mitra/mitra badan usaha berbasis elektronik)
DPD TT-DAL-01.21.02.01	Layanan Evaluasi Perkembangan Status Desa	Menghasilkan status perkembangan Desa dalam rangka percepatan pembangunan Desa	Pengukuran perkembangan status desa dan menghasilkan rekomendasi pembangunan desa berdasarkan hasil pengukuran IDM	Direktorat Advokasi dan Kerja Sama, Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan	Dinas PMD Provinsi, Bappeda Provinsi, Dinas PMD Kabupaten, Bappeda Kabupaten, Kecamatan dan Pemerintah Desa	Desa	Website (https://idm.kemendesa.go.id/)	DPD TT-DAB-03.05.06.01	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.21.01 Pembangunan Kawasan atau Daerah Tertinggal	RAL.01.21.02 Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	RAL.01.21.02.01 Layanan Evaluasi Perkembangan Status Desa
DPD TT-DAL-01.21.02.02	Layanan Evaluasi Konvergensi Stunting	Menghasilkan Pencatatan Konvergensi Stunting	Pengukuran Konvergensi Stunting di desa	Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan	Dinas PMD Provinsi, Bappeda Provinsi, Dinas Kesehatan Provinsi, Dinas PMD Kabupaten, Bappeda Kabupaten,	Remaja Putri Calon Pengantin dan calon pasangan usia subur Ibu hamil dan ibu hamil KEK	Website (ehdw.kemendesa.go.id)	DPD TT-DAB-03.05.06.05	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.21.01 Pembangunan Kawasan atau Daerah Tertinggal	RAL.01.21.02 Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	RAL.01.21.02.02 Layanan Konvergensi Stunting

ID Layanan	Nama Layanan	Tujuan Layanan	Fungsi Layanan	Unit Pelaksana Layanan	Kementerian/L embaga Terkait	Target Layanan	Metode Layanan	Proses Bisnis	Level 1	Level 2	Level 3	Level 4
					Dinas Kesehatan Provinsi, Puskesmas, Kecamatan dan Pemerintah Desa	Bayi 0-59 bulan Keluarga beresiko stunting dan keluarga rentan						
DPDTT-DAL-01.21.02.03	Layanan Informasi Pembangunan Berbasis Masyarakat	Memudahkan Pemdes dalam melaksanakan perencanaan pembangunan desa berdasarkan data	pemetaan data desa di bidang ekonomi, kesehatan, pemukiman, sanitasi dan pendidikan	Pusdatin, PSBLDP	UNICEF	Masyarakat	sensus BNBA melalui sipbm,kemendesa.go.id	DPDTT-DAB-03.05.06.05	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.21 Pembangunan Kawasan atau Daerah Tertinggal	RAL.01.21.02 Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	RAL.01.21.02.03 Layanan Informasi Pembangunan Berbasis Masyarakat
DPDTT-DAL-01.21.02.04	Layanan Pencatatan Pemanfaatan Dana Desa	Menghasilkan Pencatatan Pemanfaatan Dana Desa	Pencatatan Pemanfaatan Dana Desa	Pusdatin, BPSDM, Direktorat Fasilitas Pemanfaatan Dana Desa	1. Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi (Monev DD) 2. Kementerian Dalam Negeri (Siskeudes) 3. Kementerian Keuangan (Omspan)	Pencatatan Pemanfaatan DD untuk mengukur keberhasilan Dana Desa baik di level desa, kabupaten/kota, provinsi dan skala nasional	Website (https://monevdd.kemendesa.go.id)	DPDTT-DAB-03.05.06.07	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.21 Pembangunan Kawasan atau Daerah Tertinggal	RAL.01.21.02 Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	RAL.01.21.02.04 Layanan Pencatatan Pemanfaatan Dana Desa

ID Layanan	Nama Layanan	Tujuan Layanan	Fungsi Layanan	Unit Pelaksana Layanan	Kementerian/Lembaga Terkait	Target Layanan	Metode Layanan	Proses Bisnis	Level 1	Level 2	Level 3	Level 4
DPDPT-DAL-01.21.02.05	Layanan Dashboard Data dan Informasi Desa (SID)	Memudahkan Desa menyusun data dan informasi Desa serta memfokuskan prioritas pemanfaatan Dana Desa	Memudahkan Desa menyusun data dan informasi digital tentang kondisi objektif Desa, menyusun perencanaan Pembangunan Desa yang berbasis data detail dan riil, mengarahkan kerja Pembangunan Desa secara sistematis, terukur, terarah, berkelanjutan, serta memfokuskan prioritas pemanfaatan Dana Desa, sesuai dengan kebutuhan kewargaan dan kewilayahan Desa untuk mempercepat pencapaian	Pusat Data dan Informasi	Pemerintah Daerah, Desa dan Publik	Desa	Website (https://sid.kemendesa.go.id/)	DPDPT-DAB-09.05.09.04	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.21 Pembangunan Kawasan atau Daerah Tertinggal 1	RAL.01.21.02 Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	RAL.01.21.02.05 Layanan Dashboard Data dan Informasi Desa (SID)

ID Layanan	Nama Layanan	Tujuan Layanan	Fungsi Layanan	Unit Pelaksana Layanan	Kementerian/L embaga Terkait	Target Layanan	Metode Layanan	Proses Bisnis	Level 1	Level 2	Level 3	Level 4
			18 tujuan SDGs Desa									
DPD TT-DAL-01.21.02.06	Layanan Pendataan Kuesioner Desa, RT, Keluarga dan Individu	Memudahkan Desa dalam penyusunan RPJMDesa berdasarkan data yang bersumber dari kuesioner SDGs Desa	Pendataan SDGs Desa berbasis website yang terdiri dari pendataan kuesioner Desa, RT, Keluarga dan Individu	Pusdatin BPI	Pemerintah Daerah, Desa dan Publik	Desa	Website (https://dashboard-sdgs.kemendesa.go.id)	DPD TT-DAB-09.05.09.04	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.21 Pembang unan Kawasan atau Daerah Tertingga l	RAL.01.21.02 Pembang unan Desa dan Pemberda yaan Masyarak at Desa	RAL.01.21.02.06 Layanan Pendataan Kuesioner Desa, RT, Keluarga dan Individu
DPD TT-DAL-01.21.02.07	Layanan Pencatatan Aktivitas harian Tenaga Pendampi ng Profesion al (TPP)	Aplikasi yang diperuntuk an kepada TPP (Tenaga Pendampin g Profesion al) untuk share informasi, berita dan pencatatan laporan kegiatan harian.	Media pendokument asian atau pencatatan laporan harian TPP, sebagai bahan evaluasi kinerja dan penggajian TPP	BPSDM	Pemerintah Daerah, Desa dan Publik	TPP	Website (https://dailyreportpendamping.kemendesa.go.id)	DPD TT-DAB-03.05.06.04	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.21 Pembang unan Kawasan atau Daerah Tertingga l	RAL.01.21.02 Pembang unan Desa dan Pemberda yaan Masyarak at Desa	RAL.01.21.02.07 Pencatatan Aktivitas harian Tenaga Pendampi ng Profesion al (TPP)
DPD TT-DAL-01.43.02.01	Layanan Monev Transformasi UPK PNPM MPd	Menyediakan gambaran data UPK Eks PNPM MPd yang telah	Untuk melihat perkembangan transofrmasi UPK Eks PNPM MPd	Direktora t Pengemb angan Kelembag aan Ekonomi	KemenkopUK M	Pengurus UPK eks PNPM MPd	website (http://transformasi-upk.kemendesa.go.id)	DPD TT-DAB-03.05.06.06 DPD TT-DAB-03.02.0	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.43 Informasi	RAL.01.43.02 Informasi Statistik	RAL.01.43.02.01 Layanan Monev Transform asi UPK PNPM MPd

ID Layanan	Nama Layanan	Tujuan Layanan	Fungsi Layanan	Unit Pelaksana Layanan	Kementerian/Lembaga Terkait	Target Layanan	Metode Layanan	Proses Bisnis	Level 1	Level 2	Level 3	Level 4
		bertransformasi menjadi lembaga ekonomi lainnya		dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi				5.07 DPDPT-DAB-03.05.07.06				
DPDPT-DAL-01.43.03.01	Layanan Permohonan Informasi dan Pengaduan Masyarakat Terpadu	Memanfaatkan berbagai media informasi masyarakat menjadi lebih dekat untuk menyampaikan aspirasi	Kanal aduan dan permintaan informasi	Biro Hubungan Masyarakat	Kementerian PANRB, Komisi Informasi Pusat, Ombudsman RI	Masyarakat	Website, Call Center, SMS Center, Whatsapp, Facebook, Twitter, Surat, Tatap Muka, Selaras	DPDPT-DAB-09.04.05	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.43 Informasi	RAL.01.43.03 Pelayan Informasi	RAL.01.43.03.01 Layanan Permohonan Informasi dan Pengaduan Masyarakat Terpadu
DPDPT-DAL-01.43.03.02	Layanan Informasi Publik	Memberikan informasi sesuai dengan ketentuan UU 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Memberikan informasi publik	Biro Hubungan Masyarakat	Komisi Informasi Pusat, Ombudsman RI, Kementerian Komunikasi dan Informatika	Masyarakat	Website, Tatap Muka	DPDPT-DAB-09.04.05	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.43 Informasi	RAL.01.43.03 Pelayan Informasi	RAL.01.43.03.02 Layanan Informasi Publik
DPDPT-DAL-01.43.03.03	Layanan Perpustakaan	Memberikan informasi terkait Kegiatan dan Buku-Buku	Memberikan informasi publik	Biro Hubungan Masyarakat	Perpustakaan Nasional	Masyarakat	Website, Tatap Muka, Sosial Media	DPDPT-DAB-09.04.05	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.43 Informasi	RAL.01.43.03 Pelayan Informasi	RAL.01.43.03.03 Layanan Perpustakaan

ID Layanan	Nama Layanan	Tujuan Layanan	Fungsi Layanan	Unit Pelaksana Layanan	Kementerian/Lembaga Terkait	Target Layanan	Metode Layanan	Proses Bisnis	Level 1	Level 2	Level 3	Level 4
		Perpusatakaan										
DPDTT-DAL-01.43.03.04	Layanan Informasi Peta Terpadu Kawasan Transmigrasi	Memudahkan dalam memperoleh informasi tentang kawasan - kawasan transmigrasi dalam bentuk spasial	Menyajikan informasi mengenai kawasan transmigrasi	Direktorat Perencanaan Perwujudan Kawasan Transmigrasi, Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Kementerian ATR/BPN KLHK BIG	Masyarakat	Website (sipukat.kemendesa.go.id)	DPDTT-DAB-03.02.05.01	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.43 Informasi	RAL.01.43.03 Pelayan Informasi	RAL.01.43.03.04 Layanan Informasi Peta Terpadu Kawasan Transmigrasi
DPDTT-DAL-01.43.03.05	Layanan Database Kependudukan di Kawasan Transmigrasi	Memberikan informasi data penataan persebaran penduduk	Melayani pendaftaran dan seleksi calon transmigran	Direktorat Fasilitas Penataan Persebaran Penduduk di Kawasan Transmigrasi	Kemendagri	Masyarakat	Website (sibarduktrans.kemendesa.go.id)	DPDTT-DAB-03.02.05.03	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.43 Informasi	RAL.01.43.03 Pelayan Informasi	RAL.01.43.03.05 Layanan Database Kependudukan di Kawasan Transmigrasi
DPDTT-DAL-01.43.03.06	Layanan Pengembangan Pemberdayaan	Terlaksananya pemberdayaan masyarakat desa,	Pelaksanaan pengembangan pemberdayaan masyarakat,	BPSDM	Pemda, Dinas PMD	Masyarakat	Tatap muka	DPDTT-DAB-03.05.06.04 DPDTT-DAB-	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.43 Informasi	RAL.01.43.03 Pelayan Informasi	RAL.01.43.03.06 Layanan Pengembangan Pemberday

ID Layanan	Nama Layanan	Tujuan Layanan	Fungsi Layanan	Unit Pelaksana Layanan	Kementerian/Lembaga Terkait	Target Layanan	Metode Layanan	Proses Bisnis	Level 1	Level 2	Level 3	Level 4
	Masyarakat	daerah tertinggal, dan transmigrasi	pengembangan sistem dan model pemberdayaan masyarakat, serta pengembangan sistem pelayanan pendampingan masyarakat Desa dan Perdesaan, daerah tertinggal, dan Kawasan Transmigrasi					03.02.05.04 DPDPT-DAB-03.05.07.04				aan Masyarakat
DPDPT-DAL-01.43.03.07	Layanan Pelatihan Sumber Daya Masyarakat	Meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	Pelaksanaan pelatihan, pengembangan kelembagaan dan tenaga pelatihan, pengembangan standarasi dan sertifikasi profesi, dan pengembangan kerja sama pelatihan sumber daya manusia Desa dan Perdesaan, daerah	BPSDM	Pemda Kab/Provinsi	Pemda, Masyarakat, dan Internal Kemendes a PDPT	Tatap muka, Website Akademi Desa	DPDPT-DAB-03.05.06.04 DPDPT-DAB-03.02.05.04 DPDPT-DAB-03.05.07.04	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.43 Informasi	RAL.01.43.03 Pelayanan Informasi	RAL.01.43.03.07 Layanan Pelatihan Sumber Daya Masyarakat

ID Layanan	Nama Layanan	Tujuan Layanan	Fungsi Layanan	Unit Pelaksana Layanan	Kementerian/Lembaga Terkait	Target Layanan	Metode Layanan	Proses Bisnis	Level 1	Level 2	Level 3	Level 4
			tertinggal, dan transmigrasi;									
DPDPTT-DAL-01.43.03.08	Layanan Pembinaan Jabatan Fungsional	Tersedianya Fungsi Tertentu yang Kompeten dengan Melaksanakan pembinaan jabatan fungsional yang berada dalam pembinaan teknis Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	Pelaksanaan pengembangan jabatan fungsional, pengembangan standarisasi kompetensi, pengembangan profesi dan sertifikasi kelembagaan dan jabatan fungsional, serta evaluasi dan penilaian jabatan fungsional;	BPSDM	Pemda Kab/Provinsi	Internal Kemendes a PDPTT, JF PSM	Tatap muka	DPDPTT-DAB-09.06.11	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.43 Informasi	RAL.01.43.03 Pelayan Informasi	RAL.01.43.03.08 Layanan Pembinaan Jabatan Fungsional
DPDPTT-DAL-01.43.03.09	Layanan Pelatihan Pegawai ASN	Meningkatkan Kompetensi ASN Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,	Penyelenggaraan pelatihan, pengembangan kelembagaan dan tenaga kepelatihan, pengembangan kerja sama	BPSDM	LAN, KemenPAN, BKN, dan Lembaga Pelatihan Pemerintah dan Swasta	Internal Kemendes a PDPTT	Tatap muka, E-Learning (https://e-learningasn.pusdiklat.kemendes.go.id)	DPDPTT-DAB-09.06.11	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.43 Informasi	RAL.01.43.03 Pelayan Informasi	RAL.01.43.03.09 Layanan Pelatihan Pegawai ASN

ID Layanan	Nama Layanan	Tujuan Layanan	Fungsi Layanan	Unit Pelaksana Layanan	Kementerian/Lembaga Terkait	Target Layanan	Metode Layanan	Proses Bisnis	Level 1	Level 2	Level 3	Level 4
		dan Transmigrasi	pelatihan pegawai Aparatur Sipil Negara Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi									
DPDTT-DAL-01.43.03.10	Layanan Pengawasan Internal Pemerintah	Memudahkan proses pemantauan dan pengendalian kinerja dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan menuju terwujudnya pemerintahan yang baik dan bersih (good and clean government) di Kementerian Desa PDTT	Memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan.	Inspektoral Jenderal	BPK, BPKP, KemenPAN, Bappenas	Internal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	Website (http://eko.kemendes.go.id/sitika/), Whatsapp, Facebook, Twitter, Surat, Tatap Muka, Selaras	DPDTT-DAB-09.06.12	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.43 Informasi	RAL.01.43.03 Pelayan Informasi	RAL.01.43.03.10 Layanan Pengawasan Internal Pemerintah

ID Layanan	Nama Layanan	Tujuan Layanan	Fungsi Layanan	Unit Pelaksana Layanan	Kementerian/Lembaga Terkait	Target Layanan	Metode Layanan	Proses Bisnis	Level 1	Level 2	Level 3	Level 4
DPD TT-DAL-01.43.03.11	Layanan Pengaduan Masyarakat Terpadu	sarana dalam pencegahan, pengungkapan pelanggaran atau tindak kecurangan	Penanganan pengaduan masyarakat terpadu yang memfokuskan pada penanganan dugaan tindak pidana korupsi.	Inspektoral Jenderal	Kementerian PANRB KPK	Masyarakat	Website (https://wbs.kemendesa.go.id), SMS Center, Whatsapp, Facebook, Twitter, Surat, Tatap Muka, Selaras	DPD TT-DAB-09.06.12	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.43 Informasi	RAL.01.43.03 Pelayanannya Informasi	RAL.01.43.03.11 Layanan Pengaduan Masyarakat Terpadu
DPD TT-DAL-01.43.03.12	Layanan Konsultasi Terpadu	Menerapkan fungsi consulting bagi para satuan kerja (satker) di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	meningkatkan kinerja Itjen dalam menerapkan fungsi pelayanan konsultasi melalui sistem berbasis web	Inspektoral Jenderal	BPK, BPKP, KemenPAN	Internal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	Website (https://si-kupas.kemendesa.go.id), SMS Center, Whatsapp, Facebook, Twitter, Surat, Tatap Muka, Selaras	DPD TT-DAB-09.06.12	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.43 Informasi	RAL.01.43.03 Pelayanannya Informasi	RAL.01.43.03.12 Layanan Konsultasi Terpadu
DPD TT-DAL-01.43.03.13	Layanan Penyediaan Dokumen Kebijakan Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan	Menyediakan bahan dalam perumusan kebijakan dan pelaksanaannya kebijakan	Publikasi Sosialisasi Menyebarkan dokumen kebijakan yang telah disusun	Pusat Pengembangan Kebijakan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	LAN, Bappenas, Kemenko PMK, Perguruan Tinggi	Unit Kerja Eselon I Teknis	website (jurnal.desa-ejournal.kemendesa.go.id , policybrief-ejournal.kemendesa.go.id , policypaper-ejournal.kemendesa.go.id)	DPD TT-DAB-09.05.09.01	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.43 Informasi	RAL.01.43.03 Pelayanannya Informasi	RAL.01.43.03.13 Layanan Penyediaan Dokumen Kebijakan Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan

ID Layanan	Nama Layanan	Tujuan Layanan	Fungsi Layanan	Unit Pelaksana Layanan	Kementerian/L embaga Terkait	Target Layanan	Metode Layanan	Proses Bisnis	Level 1	Level 2	Level 3	Level 4
	Transmigrasi											Transmigrasi
DPDTT-DAL-01.43.03.14	Layanan penyedia dokumen keterpaduan rencana pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi	Tersedianya rencana terpadu pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi	Publikasi Sosialisasi dokumen keterpaduan rencana pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi	Pusat Penyusunan Keterpaduan Rencana Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	Bappenas, Bappeda, Kemenko PMK, Perguruan Tinggi	Unit Kerja Eselon I Teknis dan Pemda	Dokumen	DPDTT-DAB-09.05.09.03	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.43 Informasi	RAL.01.43.03 Pelayan Informasi	RAL.01.43.03.14 Layanan penyedia dokumen keterpaduan rencana pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi
DPDTT-DAL-01.43.03.15	Layanan Penyedia Dokumen Kebijakan Pengembangan Daya Saing Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	Menyediakan bahan dalam perumusan kebijakan pengembangan Daya Saing Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	Publikasi Sosialisasi Menyebarkan dokumen kebijakan yang telah disusun	Pusat Pengembangan Daya Saing Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	Bappenas, Kemenko PMK, Perguruan Tinggi, Swasta	Unit Kerja Eselon I Teknis	Dokumen	DPDTT-DAB-09.05.09.02	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.43 Informasi	RAL.01.43.03 Pelayan Informasi	RAL.01.43.03.15 Layanan Penyedia Dokumen Kebijakan Pengembangan Daya Saing Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
DPDTT-DAL-01.43.03.16	Layanan Konsultasi dan Audiensi Badan Pengembangan dan	Memberikan media layanan berupa konsultasi dan audiensi	Menyediakan Layanan Data dan Informasi, terkait: 1. Data Hasil Kajian;	Perwakilan/ PIC dari Sekretariat dan/ atau Pusat-	Para stakeholders internal dan/ atau eksternal KemenDesaPD TT	Unit Kerja Eselon I Teknis	Tatap muka melalui media Konsultasi dan/ atau Audiensi	DPDTT-DAB-09.05.09	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.43 Informasi	RAL.01.43.03 Pelayan Informasi	RAL.01.43.03.15 Layanan Konsultasi dan Audiensi Badan

ID Layanan	Nama Layanan	Tujuan Layanan	Fungsi Layanan	Unit Pelaksana Layanan	Kementerian/Lembaga Terkait	Target Layanan	Metode Layanan	Proses Bisnis	Level 1	Level 2	Level 3	Level 4
	Informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	kepada <i>stakeholders</i> terkait baik internal maupun eksternal KemenDesaPDTT	2. Data Policy Brief; 3. Data Peta Jalan (Roadmap); 4. Data Penetapan Target Peningkatan Status Desa; 5. Data Rencana Induk Pembangunan Perdesaan; 6. Data Rencana Kawasan Transmigrasi; dan 7. Data Program Pengembangan Desa Digital (Smart Village)	Pusat di lingkup BPIDDTT								Pengembangan dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
DPDPT-DAL-02.02.04.02	Layanan Online Monitoring SPAN (OMSPAN)	Monitoring Realisasi Anggaran	Melakukan monitoring transaksi Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN), dan menyajikan reporting sesuai kebutuhan	Biro Keuangan dan Barang Milik Negara	Kementerian Keuangan	Internal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	Website (https://spanint.kemenkeu.go.id/)	DPDPT-DAB-09.02.10	RAL.02 Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL.02.02 Keuangan	RAL.02.02.04 Penganggaran	RAL.02.02.04.02 Layanan Online Monitoring SPAN (OMSPAN)

ID Layanan	Nama Layanan	Tujuan Layanan	Fungsi Layanan	Unit Pelaksana Layanan	Kementerian/Lembaga Terkait	Target Layanan	Metode Layanan	Proses Bisnis	Level 1	Level 2	Level 3	Level 4
DPD TT-DAL-02.02.05.01	Layanan Sistem Informasi Manajemen Usulan Hibah	Mengelola dan memantau proses administrasi Hibah, serta validasi data dalam administrasi Hibah yang mudah digunakan oleh user	Monitoring dan administrasi bantuan pemerintah berupa Hibah di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	Biro Keuangan dan Barang Milik Negara	Kementerian Keuangan	Internal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	Website (simuh.kemendesa.go.id)	DPD TT-DAB-09.02.10	RAL.02 Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL.02.02 Keuangan	RAL.02.02.05 Pengelolaan Barang Milik Negara	RAL.02.02.05.01 Layanan Sistem Informasi Manajemen Usulan Hibah
DPD TT-DAL-02.02.08.01	Layanan Pengadaan Barang/Jasa	Memberikan layanan pengadaan Barang/Jasa pemerintah bagi para stakeholder	Menyediakan layanan pengadaan barang/jasa pemerintah yang terdiri atas : 1.Layanan pengelolaan barang/jasa; 2. Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik, 3.Pengelolaan SDM dan kelembagaan PBJ; 4. Pemberian pendampingan konsultasi dan	Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ)	LKPP,Kementerian PUPR	Seluruh Unit Kerja Eselon I dan para pelaku usaha	Tatap muka dan daring Website (https://lpse.kemendesa.go.id/)	DPD TT-DAB-09.02.11	RAL.02 Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL.02.02 Keuangan	RAL.02.02.08 Penyelenggara Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan	RAL.02.02.08.01 Penyelenggara Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan

ID Layanan	Nama Layanan	Tujuan Layanan	Fungsi Layanan	Unit Pelaksana Layanan	Kementerian/Lembaga Terkait	Target Layanan	Metode Layanan	Proses Bisnis	Level 1	Level 2	Level 3	Level 4
			bimbingan teknis PBJ, 5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri yang berkaitan dengan PBJ									
DPD TT-DAL-02.02.09.03	Layanan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI)	Sarana bagi satker dalam mendukung Implementasi SPAN untuk melakukan pengelolaan keuangan	Melakukan pengelolaan keuangan yang meliputi tahapan perencanaan hingga pertanggungjawaban anggaran	Seluruh Unit Kerja Eselon I yang menangani Keuangan di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	Kementerian Keuangan	Internal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	Website (https://sakti.kemenkeu.go.id/)	DPD TT-DAB-09.02.10	RAL.02 Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL.02.02 Keuangan	RAL.02.02.09 Pengelolaan Keuangan	RAL.02.02.09.03 Layanan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI)
DPD TT-DAL-02.03.02.02	Layanan Informasi Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (SIP PDT)	Menyusun rancangan awal Keppres RAN-PPDT setiap tahun (T-1)	Inventarisasi daftar usulan kebutuhan dan produk unggulan di daerah tertinggal yang akan dituangkan	Direktorat Penyerahan Rencanan dan Program Percepatan	1. Kemenko PMK 2. Bappenas 3. Kemendagri 4. Kemenkeu 5. Kemen Kesehatan 6. Kemen PUPR	1. Pemerintah kabupaten daerah tertinggal 2. Pemerintah provinsi	1. Website (sippdt.kemendes.go.id) 2. Tatap muka daring dan luring	DPD TT-DAB-03.05.07.01	RAL.02 Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL.02.03 Perencanaan Pembangunan Nasional	RAL.02.03.02 Penyusunan Perencanaan	RAL.02.03.02.01 Layanan Informasi Percepatan Pembangunan Daerah

ID Layanan	Nama Layanan	Tujuan Layanan	Fungsi Layanan	Unit Pelaksana Layanan	Kementerian/L embaga Terkait	Target Layanan	Metode Layanan	Proses Bisnis	Level 1	Level 2	Level 3	Level 4
			dalam dokumen perencanaan	Pembang unan Daerah Tertinggal	7. Kemen Perhubungan 8. Kemen Kominfo 9. Kemenparekraf 10. Kemen Sosial 11. Kemen Naker 12. Kemenag 13. Kemen ESDM 14. Kemen LHK 15. Kemen Kelautan Perikanan 16. Kemen Perindustrian 17. Kemen Koperasi UKM 18. Kemen Perdagangan 19. Kemen Pertanian 20. Kemendes PDTT 21. BKKBN 22. Basarnas 23. Badan Pangan Nasional 24. Perpusnas	yang memiliki daerah tertinggal						Tertinggal (SIP PDT)
DPD TT-DAL-02.03.04.01	Layanan Monitorin g dan Evaluasi Dana	Memudahk an proses pemantaua n dan evaluasi	Monitoring pelaksanaan kegiatan Dana Alokasi Khusus	Biro Perencan aan dan Kerja Sama	Kementerian Keuangan, Bappenas, Bappeda, Dinas	Masyaraka t	Website (emonev.kemendesa.go.id)	DPD TT-DAB-09.05.10	RAL.02 Layanan Administ rasi	RAL.02.03 Perencan aan Pembang	RAL.02.03.04 Evaluasi Perencan aan	RAL.02.03.04.01 Layanan Monitoring dan

ID Layanan	Nama Layanan	Tujuan Layanan	Fungsi Layanan	Unit Pelaksana Layanan	Kementerian/L embaga Terkait	Target Layanan	Metode Layanan	Proses Bisnis	Level 1	Level 2	Level 3	Level 4
	Alokasi Khusus	Dana Alokasi Khusus Transportasi Perdesaan	Transportasi Perdesaan		Perhubungan, Dinas PU				Pemerintahan	unan Nasional		Evaluasi Dana Alokasi Khusus
DPD TT-DAL-02.06.01.01	Layanan Survei Penilaian Integritas	Sarana untuk meningkatkan kesadaran Risiko Korupsi dan perbaikan sistem antikorupsi	Sebagai motor penggerak perubahan dalam percepatan kemajuan upaya pencegahan korupsi dimana hasil akhir layanan survei tersebut berupa rekomendasi perbaikan sistem pencegahan korupsi di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	Inspektoral Jenderal	KPK, KemenPANRB	Internal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	Website KPK, SMS Blast, Whatsapp	DPD TT-DAB-09.06.12	RAL.02 Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL.02.06 Dukungan Operasional Organisasi	RAL.02.06.01 Pelaporan	RAL.02.06.01.01 Survei Penilaian Integritas
DPD TT-DAL-02.06.08.01	Layanan Persuratan dan Kearsipan	Untuk Efisiensi Penyelenggaraan Administrasi	Memudahkan Pembuatan Naskah dinas dari awal Pembuatan,	Biro Umum dan Layanan	ANRI, MenPanRB, MENKOMINFO, BSSN	Unit Pengolah Kearsipan	website srikandi.arsip.go.id	DPD TT-DAB-09.02.11	RAL.02 Layanan Administrasi	RAL.02.06 Dukungan Operasio	RAL.02.06.08 Dukungan Kearsipan	RAL.02.06.08.01 Dukungan Kearsipan

ID Layanan	Nama Layanan	Tujuan Layanan	Fungsi Layanan	Unit Pelaksana Layanan	Kementerian/Lembaga Terkait	Target Layanan	Metode Layanan	Proses Bisnis	Level 1	Level 2	Level 3	Level 4
		si Pemerintah an dan Penyeleng araan kearsipan yang terPadu	Penandatanganan, Pengiriman, Pemberkasan , dan Usul Pindah Arsip	Pengadaaan					Pemerintahan	nal Organisasi		
DPD TT- DAL- 02.07.02.0 1	Layanan Pengawasan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Memudahkan proses pemantauan dan pengendalian kinerja dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan kinerja Unit Kerja di Kementerian Desa PDTT	Pemetaan Kinerja yang menunjang terhadap program Kementerian dan Monitoring kinerja Unit Kerja secara triwulan	Biro Perencanaan dan Kerja Sama	Kementerian PANRB	Internal Pemerintah	Website (sakup.kemendesa.go.id)	DPD TT- DAB- 09.06.1 2	RAL.02 Layanan Administ rasi Pemerintahan	RAL.02.0 7 Akuntabilitas Kinerja	RAL.02.0 7.02 Pengawasan Kinerja	RAL.02.07. 02.01 Layanan Pengawasan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
DPD TT- DAL- 02.09.03.0 1	Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH Kemendesa)	Memperluas akses dan pencarian terhadap peraturan perundang- undangan, bahan dokumenta si hukum lainnya	Memberikan informasi dan kemudahan pencarian peraturan perundang- undangan, bahan dokumentasi hukum lainnya dan informasi hukum	Biro Hukum	Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Masyarakat	Website (jdih.kemendesa.go.id) dan Sosial Media	DPD TT- DAB- 05.01.0 6	RAL.02 Layanan Administ rasi Pemerintahan	RAL.02.0 9 Data dan Informasi Pemerintahan	RAL.02.0 9.03 Pengelolaan Data dan Informasi	RAL.02.09. 03.01 Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH Kemendesa)

ID Layanan	Nama Layanan	Tujuan Layanan	Fungsi Layanan	Unit Pelaksana Layanan	Kementerian/L embaga Terkait	Target Layanan	Metode Layanan	Proses Bisnis	Level 1	Level 2	Level 3	Level 4
		dan informasi hukum bidang Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	terkait desa, daerah tertinggal dan transmigrasi									
DPDTT-DAL.01.11.03.02	Layanan pemeringkatan BUM Desa	Menyediakan data mengenai perkembangan kemajuan BUM Desa/BUM Desa Bersama dalam rangka pembinaan dan pengembangan BUM Desa/BUM Desa Bersama serta untuk melihat pencapaian target RPJMN 2020-2024	Untuk melihat perkembangan usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama sehingga diketahui keberadaan suatu BUM Desa/BUM Desa Bersama satu sama lain, serta untuk melihat tolak ukur terhadap capaian kinerja usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama	Direktorat Pengembangan Kelembagaan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	Kementerian Dalam Negeri Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kementerian ESDM Kementerian PPN/Bappenas Kemenko PMK Kementerian Kelautan Kemenko Marves	Pengurus BUM Desa/BUM Desa Bersama	website (https://pemeringkatan.kemendesa.go.id)	DPDTT-DAB-03.05.06.06 DPDTT-DAB-03.02.05.07 DPDTT-DAB-03.05.07.06	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.11 Badan Usaha Milik Negara	RAL.01.11.03 Pengembangan usaha BUMN/BUMD	RAL.01.11.03.02 Layanan pemeringkatan BUM Desa

ID Layanan	Nama Layanan	Tujuan Layanan	Fungsi Layanan	Unit Pelaksana Layanan	Kementerian/L embaga Terkait	Target Layanan	Metode Layanan	Proses Bisnis	Level 1	Level 2	Level 3	Level 4
DPD TT-DAL.01.11.03.03	Layanan BUMDes Learning (Pembelajaran BUM Desa Berbasis Digital)	Menyediakan design ekosistem peningkatan kapasitas BUM Desa, peningkatan permodalan BUM Desa, Peningkatan Akses Pasar BUM Desa, dan Peningkatan Pengembangan Usaha BUM Desa	Sebagai sarana informasi dan komunikasi terkait pengelolaan usaha, praktik-praktik baik, dan inovasi BUM Desa/BUM Desa Bersama serta sebagai media pembelajaran bagi BUM Desa	Direktorat Pengembangan Kelembagaan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	(Internal Kemendesa PDTT)	Pengurus BUM Desa/BUM Desa Bersama	website (http://bumdesalearning.kemendesa.go.id)	DPD TT-DAB-03.05.06.06 DPD TT-DAB-03.02.05.07 DPD TT-DAB-03.05.07.06	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.11 Badan Usaha Milik Negara	RAL.01.11.03 Pengembangan usaha BUMN/BUMD	RAL.01.11.03.03 Layanan BUMDes Learning (Pembelajaran BUM Desa Berbasis Digital)
DPD TT-DAL.01.11.03.04	Layanan Media Promosi Desa Wisata	memfasilitasi Desa untuk mempromosikan Desa Wisata dengan berbasis digital, sehingga dengan begitu maka dapat memberikan	sebagai media promosi bagi pengelola desa wisata dan sebagai pusat informasi bagi wisatawan	Ditjen PDP	Pemerintah Daerah, Desa dan Publik	Masyarakat	Website (https://desawisata.kemendesa.go.id/)	DPD TT-DAB-03.05.06.03	RAL.01 Layanan Publik	RAL.01.11 Badan Usaha Milik Negara	RAL.01.11.03 Pengembangan usaha BUMN/BUMD	RAL.01.11.03.04 Layanan Media Promosi Desa Wisata

ID Layanan	Nama Layanan	Tujuan Layanan	Fungsi Layanan	Unit Pelaksana Layanan	Kementerian/L embaga Terkait	Target Layanan	Metode Layanan	Proses Bisnis	Level 1	Level 2	Level 3	Level 4
		peningkatan pertumbuhan ekonomi Desa										
DPDTT-DAL.02.04.01.01	Layanan Informasi Manajemen Kepegawaian	Memudahkan dan Menghasilkan Data Kepegawaian	Monitoring dan Pengelolaan data Kepegawaian	Biro Kepegawaian dan Organisasi	BKN	Pegawai Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	Website(simpeg.kemendesa.go.id)	DPDTT-DAB-09.06.11	RAL.02 Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL.02.04 Aparatur Negara	RAL.02.04.01 Manajemen Kepegawaian	RAL.02.04.01.01 Layanan Informasi Manajemen Kepegawaian
DPDTT-DAL.02.04.01.02	Layanan Informasi Data Pegawai	Menghasilkan data pegawai	Memberikan informasi data pegawai	Biro Kepegawaian dan Organisasi	BKN	Pegawai Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	Website(simpeg.kemendesa.go.id)	DPDTT-DAB-09.06.11	RAL.02 Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL.02.04 Aparatur Negara	RAL.02.04.01 Manajemen Kepegawaian	RAL.02.04.01.02 Layanan Informasi Data Pegawai
DPDTT-DAL.02.04.01.03	Layanan Cuti dan Izin Belajar Pegawai	Memudahkan proses pengajuan Cuti dan Izin Belajar Pegawai	Memberikan informasi Cuti dan Izin Belajar Pegawai	Biro Kepegawaian dan Organisasi	BKN	Pegawai Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	Website(simpeg.kemendesa.go.id)	DPDTT-DAB-09.06.11	RAL.02 Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL.02.04 Aparatur Negara	RAL.02.04.01 Manajemen Kepegawaian	RAL.02.04.01.03 Layanan Cuti dan Izin Belajar Pegawai
DPDTT-DAL.02.04.01.04	Layanan Presensi Pegawai	Menghasilkan data	Memberikan data presensi pegawai	Biro Kepegawaian dan	BKN	Pegawai Kementerian Desa,	Website(simpeg.kemendesa.go.id)	DPDTT-DAB-	RAL.02 Layanan Administrasi	RAL.02.04	RAL.02.04.01 Manajemen	RAL.02.04.01.04 Layanan

ID Layanan	Nama Layanan	Tujuan Layanan	Fungsi Layanan	Unit Pelaksana Layanan	Kementerian/Lembaga Terkait	Target Layanan	Metode Layanan	Proses Bisnis	Level 1	Level 2	Level 3	Level 4
		presensi pegawai		Organisasi		Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi		09.06.11	rasi Pemerintahan	Aparatur Negara	en Kepegawaian	Presensi Pegawai
DPDPT-DAL.02.04.01.05	Layanan Kinerja Pegawai	Memudahkan pegawai dalam laporan kinerja	Memberikan informasi kinerja pegawai	Biro Kepegawaian dan Organisasi	BKN	Pegawai Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	Website(https://kinerja.bkn.go.id)	DPDPT-DAB-09.06.11	RAL.02 Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL.02.04 Aparatur Negara	RAL.02.04.01 Manajemen Kepegawaian	RAL.02.04.01.05 Layanan Kinerja Pegawai
DPDPT-DAL.02.04.01.06	Layanan kepegawaian, Organisasi dan Reformasi Birokrasi	Memudahkan pegawai dalam mendapatkan informasi terkait layanan kepegawaian, Organisasi dan Reformasi Birokrasi	Memberikan informasi terkait kepegawaian, Organisasi dan Reformasi Birokrasi	Biro Kepegawaian dan Organisasi	BKN	Pegawai Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	Website(clbk.kemendesa.go.id)	DPDPT-DAB-09.06.10	RAL.02 Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL.02.04 Aparatur Negara	RAL.02.04.01 Manajemen Kepegawaian	RAL.02.04.01.06 Layanan kepegawaian, Organisasi dan Reformasi Birokrasi
DPDPT-DAL.02.04.01.07	Layanan Perencanaan Pegawai	Memudahkan Evaluasi Jabatan, Standar	Memberikan informasi Evaluasi Jabatan, Standar	Biro Kepegawaian dan Organisasi	BKN	Pegawai Kementerian Desa, Pembangunan	Website(siasn.bkn.go.id)	DPDPT-DAB-09.06.11	RAL.02 Layanan Administrasi	RAL.02.04 Aparatur Negara	RAL.02.04.01 Manajemen	RAL.02.04.01.07 Layanan Perencanaan

ID Layanan	Nama Layanan	Tujuan Layanan	Fungsi Layanan	Unit Pelaksana Layanan	Kementerian/Lembaga Terkait	Target Layanan	Metode Layanan	Proses Bisnis	Level 1	Level 2	Level 3	Level 4
		Kompetensi Jabatan (SKJ) dan Perencanaan Kebutuhan berupa pengajuan SOTK + info jabatan, Pengajuan Penetapan Formasi Nasional dan Standar Kompetensi Jabatan	Kompetensi Jabatan (SKJ) dan Perencanaan Kebutuhan berupa pengajuan SOTK + info jabatan, Pengajuan Penetapan Formasi Nasional dan Standar Kompetensi Jabatan			Daerah Tertinggal dan Transmigrasi			Pemerintahan		Kepegawaian	
DPD TT-DAL.02.04.01.08	Layanan Perekrutan dan Seleksi	Memudahkan Pendaftaran CASN, Penetapan NIP, Seleksi Terbuka SSJPT, Seleksi Pindah Instansi Melalui SSPI	Memberikan informasi Pendaftaran CASN, Penetapan NIP, Seleksi Terbuka SSJPT, Seleksi Pindah Instansi Melalui SSPI	Biro Kepegawaian dan Organisasi	BKN	Masyarakat	Website(siasn.bkn.go.id)	DPD TT-DAB-09.06.11	RAL.02 Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL.02.04 Aparatur Negara	RAL.02.04.01 Manajemen Kepegawaian	RAL.02.04.01.08 Perekrutan dan Seleksi
DPD TT-DAL.02.04.01.09	Layanan Pengembangan Kapasitas	Memudahkan proses Talent Manajemen, Manajemen	Memberikan informasi terkait Talent Manajemen, Manajemen	Biro Kepegawaian dan Organisasi	BKN	Pegawai Kementerian Desa, Pembangunan Daerah	Website(siasn.bkn.go.id)	DPD TT-DAB-09.06.11	RAL.02 Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL.02.04 Aparatur Negara	RAL.02.04.01 Manajemen Kepegawaian	RAL.02.04.01.09 Pengembangan Kapasitas

ID Layanan	Nama Layanan	Tujuan Layanan	Fungsi Layanan	Unit Pelaksana Layanan	Kementerian/Lembaga Terkait	Target Layanan	Metode Layanan	Proses Bisnis	Level 1	Level 2	Level 3	Level 4
		n Jabatan Fungsional	Jabatan Fungsional			Tertinggal dan Transmigrasi						
DPD TT-DAL.02.04.01.10	Penilaian Kinerja dan Reward	Memudahkan proses Layanan Kinerja, Integrated Disiplin (IDIS), Monitoring Wasdal, Layanan BANKUM, Layanan BAPEK	Memberikan informasi terkait Layanan Kinerja, Integrated Disiplin (IDIS), Monitoring Wasdal, Layanan BANKUM, Layanan BAPEK	Biro Kepegawaian dan Organisasi	BKN	Pegawai Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	Website(siasn.bkn.go.id)	DPD TT-DAB-09.06.11	RAL.02 Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL.02.04 Aparatur Negara	RAL.02.04.01 Manajemen Kepegawaian	RAL.02.04.01.10 Penilaian Kinerja dan Reward
DPD TT-DAL.02.04.01.11	Promosi Rotasi dan Karir	Memudahkan proses Peremajaan Data dan PDM, Kenaikan Pangkat, Kenaikan Jabatan, Pindah Instansi, Pencantuman Gelar, Layanan SKK	Memberikan informasi terkait Peremajaan Data dan PDM, Kenaikan Pangkat, Kenaikan Jabatan, Pindah Instansi, Pencantuman Gelar, Layanan SKK	Biro Kepegawaian dan Organisasi	BKN	Pegawai Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	Website(siasn.bkn.go.id)	DPD TT-DAB-09.06.11	RAL.02 Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL.02.04 Aparatur Negara	RAL.02.04.01 Manajemen Kepegawaian	RAL.02.04.01.11 Promosi Rotasi dan Karir
DPD TT-DAL.02.04.01.12	Layanan Persiapan Purna Bakti	Memudahkan proses Pemberhentian dan Pensiun	Memberikan informasi terkait Pemberhentian dan Pensiun	Biro Kepegawaian dan Organisasi	BKN	Pegawai Kementerian Desa, Pembangunan Daerah	Website(siasn.bkn.go.id)	DPD TT-DAB-09.06.11	RAL.02 Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL.02.04 Aparatur Negara	RAL.02.04.01 Manajemen Kepegawaian	RAL.02.04.01.12 Layanan Persiapan Purna Bakti

ID Layanan	Nama Layanan	Tujuan Layanan	Fungsi Layanan	Unit Pelaksana Layanan	Kementerian/L embaga Terkait	Target Layanan	Metode Layanan	Proses Bisnis	Level 1	Level 2	Level 3	Level 4
						Tertinggal dan Transmigrasi						
DPDTT-DAL.02.04.09.01	Layanan Evaluasi Reformasi Birokrasi	Memudakan satuan kerja dalam sistem penilaian kinerja RB	memberikan informasi sistem penilaian kinerja RB dari satuan kerja	Biro Kepegawaian dan Organisasi	Menpan RB	Satuan Kerja RB	Website(erb.kemendesa.go.id)	DPDTT-DAB-09.06.10	RAL.02 Layanan Administrasi Pemerintahan	RAL.02.04 Aparatur Negara	RAL.02.04.09 Manajemen Reformasi Birokrasi	RAL.02.04.09.01 Layanan Evaluasi Reformasi Birokrasi

D. DOMAIN APLIKASI SPBE

1. Arsitektur Aplikasi SPBE

Aplikasi SPBE adalah satu atau sekumpulan program komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas atau fungsi Layanan SPBE. Layanan SPBE yang dilakukan secara elektronik dihasilkan melalui sebuah aplikasi. Aplikasi SPBE diharapkan dapat mengakomodir fungsi-fungsi yang perlu dilakukan untuk menghasilkan layanan tersebut. Dengan demikian, aplikasi dapat berupa sebuah aplikasi ataupun pengintegrasian dari beberapa aplikasi. Penyusunan referensi arsitektur pada domain aplikasi SPBE bertujuan untuk melakukan klasifikasi aplikasi dan komponennya, melalui pemetaan aplikasi yang berkorelasi dengan arah kebijakan nasional berupa penciptaan layanan pemerintah terintegrasi, sehingga membantu secara signifikan dalam mengidentifikasi peluang ditemukannya duplikasi aplikasi dan peluang untuk berbagi pakai aplikasi.

Aplikasi SPBE sendiri terbagi menjadi Aplikasi Umum dan Aplikasi Khusus. Aplikasi Umum adalah Aplikasi SPBE yang sama, standar, dan digunakan secara bagi pakai oleh instansi pusat dan/atau pemerintah daerah. Sementara, Aplikasi Khusus adalah Aplikasi SPBE yang dibangun, dikembangkan, digunakan, dan dikelola oleh instansi pusat atau pemerintah daerah tertentu untuk memenuhi kebutuhan khusus yang bukan kebutuhan instansi pusat dan pemerintah daerah lain. Terdapat 44 aplikasi pada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, dapat dikategorikan berdasarkan arsitektur aplikasi SPBE sebagai berikut:

Tabel 3.9 Arsitektur Aplikasi SPBE RAA.01 Aplikasi Umum

Tingkat 1	Tingkat 2	Tingkat 3	Nama Aplikasi
RAA.01 Aplikasi Umum	RAA.01.01 Aplikasi Umum Layanan Publik	RAA.01.01.15 Aplikasi Pariwisata	Aplikasi Desa Wisata Nusantara (web)
RAA.01 Aplikasi Umum	RAA.01.01 Aplikasi Umum Layanan Publik	RAA.01.01.15 Aplikasi Pariwisata	Aplikasi Desa Wisata Nusantara (mobile)
RAA.01 Aplikasi Umum	RAA.01.01 Aplikasi Umum Layanan Publik	RAA.01.01.18 Aplikasi Transmigrasi	Sistem Informasi Peta Terpadu Kawasan Transmigrasi (SIPUKAT)
RAA.01 Aplikasi Umum	RAA.01.01 Aplikasi Umum	RAA.01.01.21 Aplikasi Pembangunan	Sistem Informasi Desa

Tingkat 1	Tingkat 2	Tingkat 3	Nama Aplikasi
	Layanan Publik	Kawasan atau Daerah Tertinggal	
RAA.01 Aplikasi Umum	RAA.01.01 Aplikasi Umum Layanan Publik	RAA.01.01.28 Aplikasi Hukum	JDIH
RAA.01 Aplikasi Umum	RAA.01.01 Aplikasi Umum Layanan Publik	RAA.01.01.33 Aplikasi Ilmu Pengetahuan	E PERPUSTAKAAN
RAA.01 Aplikasi Umum	RAA.01.01 Aplikasi Umum Layanan Publik	RAA.01.01.44 Aplikasi Informasi	Sipemandu
RAA.01 Aplikasi Umum	RAA.01.01 Aplikasi Umum Layanan Publik	RAA.01.01.44 Aplikasi Informasi	PPID
RAA.01 Aplikasi Umum	RAA.01.01 Aplikasi Umum Layanan Publik		Portal Satu Data
RAA.01 Aplikasi Umum	RAA.01.02 Aplikasi Umum Administrasi Pemerintahan	RAA.01.02.02 Aplikasi Keuangan	Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI)
RAA.01 Aplikasi Umum	RAA.01.02 Aplikasi Umum Administrasi Pemerintahan	RAA.01.02.04 Aplikasi Aparatur Negara	e-Kinerja BKN
RAA.01 Aplikasi Umum	RAA.01.02 Aplikasi Umum Administrasi Pemerintahan	RAA.01.02.04 Aplikasi Aparatur Negara	SIASN BKN
RAA.01 Aplikasi Umum	RAA.01.02 Aplikasi Umum	RAA.01.02.06 Aplikasi Dukungan	SPSE

Tingkat 1	Tingkat 2	Tingkat 3	Nama Aplikasi
	Administrasi Pemerintahan	Operasional Organisasi	
RAA.01 Aplikasi Umum	RAA.01.02 Aplikasi Umum Administrasi Pemerintahan	RAA.01.02.06 Aplikasi Dukungan Operasional Organisasi	Online Monitoring SPAN (OMSPAN)
RAA.01 Aplikasi Umum	RAA.01.02 Aplikasi Umum Administrasi Pemerintahan	RAA.01.02.06 Aplikasi Dukungan Operasional Organisasi	SRIKANDI
RAA.01 Aplikasi Umum	RAA.01.02 Aplikasi Umum Administrasi Pemerintahan	RAA.01.02.07 Aplikasi Akuntabilitas Kinerja	E-KONTROL/SITIKA
RAA.01 Aplikasi Umum	RAA.01.02 Aplikasi Umum Administrasi Pemerintahan	RAA.01.02.07 Aplikasi Akuntabilitas Kinerja	WBS
RAA.01 Aplikasi Umum	RAA.01.02 Aplikasi Umum Administrasi Pemerintahan	RAA.01.02.07 Aplikasi Akuntabilitas Kinerja	SPI
RAA.01 Aplikasi Umum	RAA.01.02 Aplikasi Umum Administrasi Pemerintahan	RAA.01.02.07 Aplikasi Akuntabilitas Kinerja	SIKUPAS

Tabel 3.10 Arsitektur Aplikasi SPBE RAA.02 Aplikasi Khusus

Tingkat 1	Tingkat 2	Nama Aplikasi
RAA.02 Aplikasi Khusus	RAA.02.01 Aplikasi Khusus Fungsi Tertentu	SDGs Desa
RAA.02 Aplikasi Khusus	RAA.02.01 Aplikasi Khusus Fungsi Tertentu	Indeks Desa Membangun
RAA.02 Aplikasi Khusus	RAA.02.01 Aplikasi Khusus Fungsi Tertentu	EHDW
RAA.02 Aplikasi Khusus	RAA.02.01 Aplikasi Khusus Fungsi Tertentu	SIPBM
RAA.02 Aplikasi Khusus	RAA.02.01 Aplikasi Khusus Fungsi Tertentu	Sibarduktrans
RAA.02 Aplikasi Khusus	RAA.02.01 Aplikasi Khusus Fungsi Tertentu	Portal BUM Desa
RAA.02 Aplikasi Khusus	RAA.02.01 Aplikasi Khusus Fungsi Tertentu	e-IPT
RAA.02 Aplikasi Khusus	RAA.02.01 Aplikasi Khusus Fungsi Tertentu	Daily Report Pendamping
RAA.02 Aplikasi Khusus	RAA.02.01 Aplikasi Khusus Fungsi Tertentu	e-Presensi
RAA.02 Aplikasi Khusus	RAA.02.01 Aplikasi Khusus Fungsi Tertentu	Sistem Informasi Kepegawaian
RAA.02 Aplikasi Khusus	RAA.02.01 Aplikasi Khusus Fungsi Tertentu	Sistem Informasi Manajemen Usulan Hibah dan BMN (SIMUHBMN)
RAA.02 Aplikasi Khusus	RAA.02.01 Aplikasi Khusus Fungsi Tertentu	Sistem Informasi Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (SIP PDT)
RAA.02 Aplikasi Khusus	RAA.02.01 Aplikasi Khusus Fungsi Tertentu	EMONEV DAK
RAA.02 Aplikasi Khusus	RAA.02.01 Aplikasi Khusus Fungsi Tertentu	ESAKIP
RAA.02 Aplikasi Khusus	RAA.02.01 Aplikasi Khusus Fungsi Tertentu	E-RB

Tingkat 1	Tingkat 2	Nama Aplikasi
RAA.02 Aplikasi Khusus	RAA.02.01 Aplikasi Khusus Fungsi Tertentu	CLBK
RAA.02 Aplikasi Khusus	RAA.02.01 Aplikasi Khusus Fungsi Tertentu	Monev Transformasi UPK PNPM MPd
RAA.02 Aplikasi Khusus	RAA.02.01 Aplikasi Khusus Fungsi Tertentu	Layanan pemeringkatan BUM Desa
RAA.02 Aplikasi Khusus	RAA.02.01 Aplikasi Khusus Fungsi Tertentu	BUMDes Learning (Pembelajaran BUM Desa Berbasis Digital)
RAA.02 Aplikasi Khusus	RAA.02.01 Aplikasi Khusus Fungsi Tertentu	MONEV DD
RAA.02 Aplikasi Khusus	RAA.02.01 Aplikasi Khusus Fungsi Tertentu	Sistem Informasi LMS "SIPINTAR APIK" (web)
RAA.02 Aplikasi Khusus	RAA.02.01 Aplikasi Khusus Fungsi Tertentu	Sistem Informasi LMS "SIPINTAR APIK" (mobile)
RAA.02 Aplikasi Khusus	RAA.02.01 Aplikasi Khusus Fungsi Tertentu	Sistem Monitoring dan Evaluasi TEKAD
RAA.02 Aplikasi Khusus	RAA.02.01 Aplikasi Khusus Fungsi Tertentu	SIDITRANS
RAA.02 Aplikasi Khusus	RAA.02.01 Aplikasi Khusus Fungsi Tertentu	E-MONEV

2. Metadata Arsitektur Aplikasi SPBE

Metadata Arsitektur Aplikasi SPBE adalah karakteristik atau ciri yang mendefinisikan setiap metadata pada Arsitektur Aplikasi SPBE. Rincian Metadata Aplikasi SPBE adalah sebagai berikut:

Tabel 3.11 Metadata Arsitektur Aplikasi SPBE

ID Aplikasi	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	Fungsi Aplikasi	Luaran	Basis Aplikasi	Tipe Lisensi Aplikasi	Bahasa Pemrograman	Framework Pembangunan Aplikasi	Unit Pengembangan	Nama Basis Data	Unit Operasional Teknologi	Level 1	Level 2	Data dan Informasi	Layanan
DPD TT-DAA-01.01.15.01	Aplikasi Desa Wisata Nusantara (web)	memfasilitasi Desa untuk mempromosikan Desa Wisata dengan berbasis digital, sehingga dengan begitu maka dapat memberikan peningkatan pertumbuhan ekonomi Desa	sebagai media promosi bagi pengelola desa wisata dan sebagai pusat informasi bagi wisatawan	Katalog Desa Wisata	Web Based	Open Source	PHP	Code Igniter	Pusdatin BPI	My Sql	Ditjen PDP	RAA.01 Aplikasi Umum	RAA.01.01 Aplikasi Umum Layanan Publik	DPD TT-DAD-03.05.03.02 Data Desa Wisata	DPD TT-DAL-01.11.03.04 Layanan Media Promosi Desa Wisata

ID Aplikasi	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	Fungsi Aplikasi	Luaran	Basis Aplikasi	Tipe Lisensi Aplikasi	Bahasa Pemrograman	Framework Pembangunan Aplikasi	Unit Pengembangan	Nama Basis Data	Unit Operasional Teknologi	Level 1	Level 2	Data dan Informasi	Layanan
DPD TT-DAA-01.01.15.02	Aplikasi Desa Wisata Nusantara (mobile)	memfasilitasi Desa untuk mempromosikan Desa Wisata dengan berbasis digital, sehingga dengan begitu maka dapat memberikan peningkatan pertumbuhan ekonomi Desa	sebagai media promosi bagi pengelola desa wisata dan sebagai pusat informasi bagi wisatawan	Katalog Desa Wisata	Mobile	Open Source	Java	Angular	Pusdatin BPI	My Sql	Ditjen PDP	RAA.01 Aplikasi Umum	RAA.01.01 Aplikasi Umum Layanan Publik	DPD TT-DAD-03.05.03.02 Data Desa Wisata	DPD TT-DAL-01.11.03.04 Layanan Media Promosi Desa Wisata
DPD TT-DAA-01.01.18.01	Sistem Informasi Peta Terpadu Kawasan Transmigrasi (SIPUKAT)	Sistem berbasis spasial yang berisi informasi ketransmigrasian, antara lain Data Penetapan Kawasan Transmigrasi, Rencana Satuan Kawasan Pengembangan	Tersajinya informasi kawasan-kawasan transmigrasi dalam bentuk spasial dan atribut dalam aplikasi berbasis Web GIS, tersedianya database kawasan transmigrasi potensial secara sistem	Informasi data spasial dan data atribut penduduk pada Kawasan Transmigrasi	Web Based	Open Source	PHP	Leaflet GIS	Pusat Data dan Informasi	My Sql	Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	RAA.01 Aplikasi Umum	RAA.01.01 Aplikasi Umum Layanan Publik	DPD TT-DAD-03.02.02.01 Data Dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi DPD TT-DAD-03.02.02.02 Data	DPD TT-DAL-01.43.03.04 Layanan Informasi Peta Terpadu Kawasan Transmigrasi

ID Aplikasi	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	Fungsi Aplikasi	Luaran	Basis Aplikasi	Tipe Lisensi Aplikasi	Bahasa Pemrograman	Framework Pemakaian Aplikasi	Unit Pengembangan	Nama Basis Data	Unit Operasional Teknologi	Level 1	Level 2	Data dan Informasi	Layanan
		Transmigrasi (RSKP), Rencana Teknis Satuan Pemukiman (RTSP), Program RPJMN 2020-2024, Pengembangan Usaha Transmigrasi 2020-2024, Data Penempatan Transmigrasi dan Ijin Pelaksanaan Transmigrasi (IPT), Komoditas Unggulan, Bumdes, Prukades, Lokasi Wisata dll	yang efisien dan efektif											Fasilitasi Hak Penggunaan Lahan (HPL) Transmigrasi DPDPT-DAD-03.02.02.03 Data Status Kawasan Transmigrasi DPDPT-DAD-03.02.04.02 Data Hasil Evaluasi Kawasan Transmigrasi DPDPT-DAD-03.02.04.03 Data Hasil Evaluasi Kawasan Perkotaan Baru DPDPT-DAD-03.02.04.04 Data Hasil Evaluasi Satuan	

ID Aplikasi	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	Fungsi Aplikasi	Luaran	Basis Aplikasi	Tipe Lisensi Aplikasi	Bahasa Pemrograman	Framework Pembangunan Aplikasi	Unit Pengembangan	Nama Basis Data	Unit Operasional Teknologi	Level 1	Level 2	Data dan Informasi	Layanan
														Kawasan Pengembangan Transmigrasi DPD TT-DAD-03.02.04.05 Data Hasil Evaluasi Satuan Permukiman Transmigrasi DPD TT-DAD-03.02.02.08 Peta Persebaran Lokasi Transmigrasi Skala 1:50.000 DPD TT-DAD-03.02.02.09 Peta Persebaran Kawasan Transmigrasi Skala 1:50.000	
DPD TT-DAA-01.01.21.01	Sistem Informasi Desa	Sistem Informasi yang mengintegrasikan	Melayani informasi data desa daerah	Informasi tentang Desa meliputi SDGs,	Web Based	Open Source	Java	React	Pusat Data dan Informasi	My Sql	Pusat Data dan Informasi	RAA.01 Aplikasi	RAA.01.01 Aplikasi Umum	DPD TT-DAD-03.05.03.22 Data SID	DPD TT-DAL-01.21.02.05 Layanan

ID Aplikasi	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	Fungsi Aplikasi	Luaran	Basis Aplikasi	Tipe Lisensi Aplikasi	Bahasa Pemrograman	Framework Pembangunan Aplikasi	Unit Pengembangan	Nama Basis Data	Unit Operasional Teknologi	Level 1	Level 2	Data dan Informasi	Layanan
		sistem informasi tentang desa, daerah tertinggal dan transmigrasi	tertinggal dan transmigrasi	Indeks Desa Membangun, BUMDes, APBDes								Umum	Layanan Publik		Dashboard Data dan Informasi Desa (SID)
DPD TT-DAA-01.01.28.01	JDIH	Aplikasi layanan pendayagunaan bersama peraturan perundang-undangan, bahan dokumentasi hukum lainnya dan informasi hukum secara mudah, cepat dan akurat	Sarana peningkatan akses data, penyebarluasan dan pencarian peraturan perundang-undangan, bahan dokumentasi hukum lainnya dan informasi hukum.	Wadah dokumentasi dan informasi berbasis website yang dikhususkan untuk menampung dokumen dan informasi hukum secara digital.	Web Based	Open Source	PHP	Codeigniter 3	Pusat Data dan Informasi	MariaDB	Pusat Data dan Informasi	RAA.01 Aplikasi Umum	RAA.01.01 Aplikasi Umum Layanan Publik	DPD TT-DAD-09.03.05.11 Data Undang-Undang DPD TT-DAD-09.03.05.12 Data Pengganti Undang-undang (PERPPU) DPD TT-DAD-09.03.05.13 Data Peraturan Pemerintah DPD TT-DAD-09.03.05.14 Data Peraturan Presiden DPD TT-DAD-09.03.05.1	DPD TT-DAL-02.09.03.01 Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH Kemendesa)

ID Aplikasi	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	Fungsi Aplikasi	Luaran	Basis Aplikasi	Tipe Lisensi Aplikasi	Bahasa Pemrograman	Framework Pembangunan Aplikasi	Unit Pengembangan	Nama Basis Data	Unit Operasional Teknologi	Level 1	Level 2	Data dan Informasi	Layanan
														5 Data Keputusan Presiden DPDTT-DAD-09.03.05.1 6 Data Instruksi Presiden DPDTT-DAD-09.03.05.1 7 Data Peraturan Menteri DPDTT-DAD-09.03.05.1 8 Data Keputusan Menteri DPDTT-DAD-09.03.05.1 9 Data Instruksi Menteri DPDTT-DAD-09.03.05.2 0 Data Surat Edaran Menteri DPDTT-DAD-09.03.05.2 1 Data Surat Edaran	

ID Aplikasi	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	Fungsi Aplikasi	Luaran	Basis Aplikasi	Tipe Lisensi Aplikasi	Bahasa Pemrograman	Framework Pemakaian Aplikasi	Unit Pengembangan	Nama Basis Data	Unit Operasional Teknologi	Level 1	Level 2	Data dan Informasi	Layanan
														Sekjen DPDPT- DAD- 09.03.05.2 2 Data Memorandum Of Understanding (MoU) & PKB DPDPT- DAD- 09.03.05.2 3 Data Rancangan Peraturan Menteri DPDPT- DAD- 09.03.05.2 4 Data Rancangan Undang-undang DPDPT- DAD- 09.03.05.2 5 Data Surat Edaran UKE I Terbuka DPDPT- DAD- 09.03.05.2 6 Data Surat Keputusan DPDPT-	

ID Aplikasi	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	Fungsi Aplikasi	Luaran	Basis Aplikasi	Tipe Lisensi Aplikasi	Bahasa Pemrograman	Framework Pembangunan Aplikasi	Unit Pengembangan	Nama Basis Data	Unit Operasional Teknologi	Level 1	Level 2	Data dan Informasi	Layanan
														DAD-09.03.05.27 Data Monografi Hukum DPDTT-DAD-09.03.05.28 Data Artikel Hukum DPDTT-DAD-09.03.05.29 Data Yurisprudensi DPDTT-DAD-09.03.05.30 Data Berita	
DPD TT-DAA-01.01.33.01	E PERPUSTAKAAN	Sistem informasi untuk buku-buku yang ada di perpustakaan Kementerian Desa, PD TT	Untuk mengetahui buku-buku yang ada di perpustakaan Kementerian Desa, PD TT	Informasi buku-buku di perpustakaan Kementerian Desa, PD TT	Web Based	Open Source	PHP	Slim	Pusat Data dan Informasi	My SQL	Biro Hubungan Masyarakat	RAA.01 Aplikasi Umum	RAA.01.01 Aplikasi Umum Layanan Publik	DPD TT-DAD-09.03.05.03 Data Buku di Perpustakaan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	DPD TT-DAL-01.43.03.03 Layanan Perpustakaan

ID Aplikasi	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	Fungsi Aplikasi	Luaran	Basis Aplikasi	Tipe Lisensi Aplikasi	Bahasa Pemrograman	Framework Pembangunan Aplikasi	Unit Pengembangan	Nama Basis Data	Unit Operasional Teknologi	Level 1	Level 2	Data dan Informasi	Layanan
DPD TT-DAA-01.01.44.01	Sipemandu	Aplikasi layanan publik untuk pengaduan dan permintaan informasi dari masyarakat umum	Pelaporan	Informasi tindak lanjut pengaduan; informasi dan data yang dimintakan	Web Based	Proprietary	PHP	Laravel	Pusat Data dan Informasi	MySQL	Biro Hubungan Masyarakat	RAA.01 Aplikasi Umum	RAA.01.01 Aplikasi Umum Layanan Publik	DPD TT-DAD-09.03.05.01 Data permohonan informasi dan pengaduan masyarakat	DPD TT-DAL-01.43.03.01 Layanan Permohonan Informasi dan Pengaduan Masyarakat Terpadu
DPD TT-DAA-01.01.44.02	PPID	Sistem pengelolaan informasi dan dokumentasi publik	Untuk mendukung keterbukaan informasi publik	Informasi dan dokumen tasi untuk ketebukaan informasi publik	Web Based	Open Source	PHP	Codeigniter 3	Pusat Data dan Informasi	MySQL	Biro Hubungan Masyarakat	RAA.01 Aplikasi Umum	RAA.01.01 Aplikasi Umum Layanan Publik	DPD TT-DAD-09.03.05.02 Data Informasi Publik	DPD TT-DAL-01.43.03.02 Layanan Informasi Publik
DPD TT-DAA-01.01.46	Portal Satu Data	Aplikasi Portal Satu Data Bidang Desa, PDT dan Transmigrasi merupakan untuk	Aplikasi Portal Satu Data Bidang Desa, PDT dan Transmigrasi ini sebagai fasilitas atau layanan dalam pengumpulan, verifikasi	Data bidang Desa, Derah Tertinggal dan Transmigrasi	Web Based	Open Source	Java	Comprehensive Knowledge Archive Network (CKAN)	Pusat Data dan Informasi	MySQL	Pusdatin BPI	RAA.01 Aplikasi Umum	RAA.01.01 Aplikasi Umum Layanan Publik		Portal Satu Data

ID Aplikasi	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	Fungsi Aplikasi	Luaran	Basis Aplikasi	Tipe Lisensi Aplikasi	Bahasa Pemrograman	Framework Pembangunan Aplikasi	Unit Pengembangan	Nama Basis Data	Unit Operasional Teknologi	Level 1	Level 2	Data dan Informasi	Layanan
		mendukung implementasi dari Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 71 Tahun 2022 Tentang Rincian Data, Walidata, dan Produsen Data Bidang Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	kesesuaian data, pengelolaan data yang disampaikan oleh produsen data yang telah mengacu pada Satu Data Indonesia												
DPD TT-DAA-01.02.02.01	Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI)	aplikasi yang digunakan sebagai sarana bagi satker dalam	untuk melakukan pengelolaan keuangan yang meliputi tahapan perencanaan	1. Mengelola data referensi yang akan digunakan	Web Based	Open Source	PHP		Kementerian Keuangan		Biro Keuangan dan BMN	RAA.01.01 Aplikasi Umum	RAA.01.02 Aplikasi Umum Administrasi	DPD TT-DAD-09.02.02.02 Data Pengelolaa	DPD TT-DAL-02.02.09.03 Layanan Sistem Aplikasi

ID Aplikasi	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	Fungsi Aplikasi	Luaran	Basis Aplikasi	Tipe Lisensi Aplikasi	Bahasa Pemrograman	Framework Pembangunan Aplikasi	Unit Pengembangan	Nama Basis Data	Unit Operasional Teknologi	Level 1	Level 2	Data dan Informasi	Layanan
		mendukung implementasi SPAN	hingga pertanggungjawaban anggaran	n oleh modul-modul lain, data user, user manual, dan database SAKTI 2. Surat Permintaan Pembayaran dan Surat Perintah Membayar untuk diajukan ke KPPN serta penyelesaian terhadap Surat Perintah Pencarian Dana dari KPPN									Pemerintahan	n Keuangan	Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI)
DPD TT-DAA-01.02.04.01	e-Kinerja BKN	suatu program aplikasi website yang dikembangkan oleh BKN untuk	Pencatatan atau pendokumentasian kinerja ASN		Web Based				BKN		Biro Kepegawaian dan Organisasi	RAA.01.01 Aplikasi Umum	RAA.01.02 Aplikasi Umum Administrasi	DPD TT-DAD-09.06.01.03 Data Evaluasi dan	DPD TT-DAL-02.04.01.05 Layanan Kinerja Pegawai

ID Aplikasi	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	Fungsi Aplikasi	Luaran	Basis Aplikasi	Tipe Lisensi Aplikasi	Bahasa Pemrograman	Framework Pembangunan Aplikasi	Unit Pengembangan	Nama Basis Data	Unit Operasional Teknologi	Level 1	Level 2	Data dan Informasi	Layanan
		mempermdah kegiatan penilaian kinerja PNS											Pemerintahan	Kinerja pegawai	
DPD TT-DAA-01.02.04.02	SIASN BKN	Aplikasi yang bertujuan untuk mengintegrasikan data ASN secara nasional meliputi seluruh Instansi Pemerintah Pusat dan Instansi Pemerintah Daerah	Dapat digunakan sebagai platform dalam pemberian pelayanan kepegawaian di Indonesia		Web Based				BKN		Biro Kepegawaian dan Organisasi	RAA.01 Aplikasi Umum	RAA.01.02 Aplikasi Umum Administrasi Pemerintahan	DPD TT-DAD-09.06.01.02 Data Pegawai	DPD TT-DAL-02.04.01.02 Layanan Informasi Data Pegawai
DPD TT-DAA-01.02.06.01	SPSE	Aplikasi e-Procurement yang dikembangkan oleh Direktorat Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik - LKPP untuk digunakan oleh	Mendukung pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah	Informasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah baik melalui tender maupun non tender	Web Based	Open Source	Spring Boot(Java)	Java Spring	LKPP	PostgreSQL	Biro Umum dan Layanan Pengadaan	RAA.01 Aplikasi Umum	RAA.01.02 Aplikasi Umum Administrasi Pemerintahan	DPD TT-DAD-09.03.06.01 Data Progress Tender DPD TT-DAD-09.03.06.02 Data Rekapitulasi Sirup	DPD TT-DAL-02.02.08.01 Penyelenggara Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

ID Aplikasi	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	Fungsi Aplikasi	Luaran	Basis Aplikasi	Tipe Lisensi Aplikasi	Bahasa Pemrograman	Framework Pembangunan Aplikasi	Unit Pengembangan	Nama Basis Data	Unit Operasional Teknologi	Level 1	Level 2	Data dan Informasi	Layanan
		Layanan Pengadaan Secara Elektronik di seluruh K/L/PD													
DPD TT-DAA-01.02.06.02	Online Monitoring SPAN (OMSPAN)	Aplikasi berbasis web digunakan melakukan monitoring transaksi Keuangan Negara	digunakan untuk melakukan monitoring transaksi Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN), dan menyajikan reporting sesuai kebutuhan	Laporan transaksi dan realisasi anggaran kementerian	Web Based	Open Source	PHP		Kementerian Keuangan		Biro Keuangan dan BMN	RAA.01 Aplikasi Umum	RAA.01.02 Aplikasi Umum Administrasi Pemerintahan	DPD TT-DAD-09.02.02.01 Data Realisasi Anggaran	DPD TT-DAL-02.02.04.02 Layanan Online Monitoring SPAN (OMSPAN)
DPD TT-DAA-01.02.06.03	SRIKANDI	Aplikasi yang diluncurkan Pemerintah sebagai aplikasi umum bidang kearsipan yang dapat mendukung pengelolaan arsip dan tata kelola pemerintah	Penciptaan arsip yang meliputi pembuatan, penandatanganan, pengiriman dan penerimaan naskah dinas secara elektronik antar instansi pemerintah. Selain itu terdapat fitur penggunaan arsip oleh	Arsip	Web Based	Open Source	Angular JS, ReactJS, JavaScript, CSS, Java, python, C++, Node JS, .Net, php	Spring Boot (Java), Laravel (php)	ANRI, MENKOM INFO, BSSN, MENPAN RB	Nginx, Apache, Tomcat	Biro Umum dan Layanan Pengadaan	RAA.01 Aplikasi Umum	RAA.01.02 Aplikasi Umum Administrasi Pemerintahan	DPD TT-DAD.09.06.08.01 Data Surat Rekomendasi Penerbitan Serifikat elektronik Pejabat Eselon I dan II DPD TT-DAD.09.06.08.02 Data ST administra	DPD TT-DAL-02.06.08.02 Layanan Persuratan dan Kearsipan

ID Aplikasi	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	Fungsi Aplikasi	Luaran	Basis Aplikasi	Tipe Lisensi Aplikasi	Bahasa Pemrograman	Framework Pembangunan Aplikasi	Unit Pengembangan	Nama Basis Data	Unit Operasional Teknologi	Level 1	Level 2	Data dan Informasi	Layanan
		an berbasis elektronik.	pengguna yang berhak, peminjaman arsip dan fitur penyusutan arsip yang meliputi pemindahan dan pemusnahan arsip											tor Eselon II	
DPD TT-DAA-01.02.07.01	E-KONTROL/SITIK A	Aplikasi pencatatan untuk pemutakhiran tindak lanjut atas temuan internal (APIP) dan eksternal (BPK RI) yang merupakan pemutakhiran (<i>upgrade</i>) dari aplikasi EKontrol	Sarana untuk updating rekon dan pemutakhiran secara <i>real time</i>		Web Based	Proprietary	PHP	Code Igniter	Pusat Data dan Informasi	My Sql	ITJEN	RAA.01 Aplikasi Umum	RAA.01.02 Aplikasi Umum Administrasi Pemerintahan	DPD TT-DAD-09.03.05.07 Data Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) DPD TT-DAD-09.03.05.08 Data Temuan Internal dan Eksternal DPD TT-DAD-09.03.05.09 Data Tindak lanjut Hasil Pengawasan DPD TT-DAD-09.03.05.1	DPD TT-DAL-01.43.03.10 Layanan Pengawasan Internal Pemerintah

ID Aplikasi	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	Fungsi Aplikasi	Luaran	Basis Aplikasi	Tipe Lisensi Aplikasi	Bahasa Pemrograman	Framework Pembangunan Aplikasi	Unit Pengembangan	Nama Basis Data	Unit Operasional Teknologi	Level 1	Level 2	Data dan Informasi	Layanan
														0 Data Keputusan Irjen	
DPD TT-DAA-01.02.07.02	WBS	Aplikasi layanan pengaduan masyarakat	bagian dari sistem penanganan pengaduan masyarakat yang memfokuskan pada penanganan dugaan tindak pidana korupsi		Web Based	Proprietary					ITJEN	RAA.01 Aplikasi Umum	RAA.01.02 Aplikasi Umum Administrasi Pemerintahan	DPD TT-DAD-09.03.05.04 Data Pengaduan Masyarakat DPD TT-DAD-09.03.05.05 Data WBS	DPD TT-DAL-01.43.03.11 Layanan Pengaduan Masyarakat Terpadu
DPD TT-DAA-01.02.07.03	SPI	Aplikasi untuk survei yang dilakukan terhadap institusi untuk memetakan dan memonitor risiko korupsi	Untuk meningkatkan kesadaran Risiko Korupsi dan perbaikan sistem antikorupsi	Informasi dan rekomendasi perbaikan sistem pencegahan korupsi sebagai dasar penyusunan kebijakan antikorupsi	Web Based	Proprietary	PHP	Laravel	KPK	My Sql	ITJEN	RAA.01 Aplikasi Umum	RAA.01.02 Aplikasi Umum Administrasi Pemerintahan	DPD TT-DAD-09.03.05.31 Data SPI	DPD TT-DAL-02.06.01.01 Layanan Survei Penilaian Integritas
DPD TT-DAA-	SIKUPAS	Aplikasi consulting bagi para satuan	Menerapkan fungsi pelayanan konsultasi	Hasil pelayanan konsultasi	Web Based	Proprietary					ITJEN	RAA.01 Aplikasi	RAA.01.02 Aplikasi Umum	DPD TT-DAD-09.03.05.06 Data	DPD TT-DAL-01.43.03.12

ID Aplikasi	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	Fungsi Aplikasi	Luaran	Basis Aplikasi	Tipe Lisensi Aplikasi	Bahasa Pemrograman	Framework Pembangunan Aplikasi	Unit Pengembangan	Nama Basis Data	Unit Operasional Teknologi	Level 1	Level 2	Data dan Informasi	Layanan
01.02.07.04		kerja (satker) di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	melalui sistem berbasis web	si melalui sistem berbasis web untuk meningkatkan kinerja Itjen								Umu	Administrasi Pemerintahan	Conselling & Consulting	Layanan Konsultasi Terpadu
DPDTT-DAA-02.01.01	SDGs Desa	Sistem Informasi pencapaian SDGs Desa	Pengolahan dan analisis dari data SDGs yang telah dilakukan pendataan sehingga dapat dipergunakan hasilnya secara optimal sebagai referensi dalam pengambilan kebijakan pembangunan desa merujuk pada rekomendasi yang olahan dan analisis SDGs	Hasil capaian SDGs Desa dan rekomendasi pembangunan desa berdasarkan 18 Goals SDGs Desa	Web Based	Open Source	Java	React	Pusat Data dan Informasi	My Sql	Pusat Data dan Informasi	RAA.02.02 Aplikasi Khusus	RAA.02.01 Aplikasi Khusus Fungsi Tertentu	DPDTT-DAD-03.05.03.23 Data SDGs	DPDTT-DAL-01.21.02.06 Layanan Pendataan Kuesioner Desa, RT, Keluarga dan Individu

ID Aplikasi	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	Fungsi Aplikasi	Luaran	Basis Aplikasi	Tipe Lisensi Aplikasi	Bahasa Pemrograman	Framework Pembangunan Aplikasi	Unit Pengembangan	Nama Basis Data	Unit Operasional Teknologi	Level 1	Level 2	Data dan Informasi	Layanan
DPD TT-DAA-02.01.02	Indeks Desa Membangun	Aplikasi pengukuran Indeks Desa Membangun dikembangkan berdasarkan konsepsi bahwa untuk menuju Desa maju dan mandiri perlu kerangka kerja pembangunan berkelanjutan di mana aspek sosial, ekonomi, dan ekologi menjadi kekuatan yang saling mengisi dan menjaga potensi serta kemampuan Desa untuk mensejahterakan	Aplikasi IDM akan memberikan masukan dalam perumusan targeting (sasaran lokasi) sebagai instrumen koordinasi antar Kementerian/Lembaga, Pemerintah daerah dan desa, guna efektifitas pencapaian sasaran pembangunan nasional melalui rekomendasi, infografis serta data yang ditampilkan untuk menunjang peningkatan status kemajuan dan kemandirian desa	1. Status Desa 2. Peringkat Desa, Kecamatan, Kabupaten, Provinsi 3. Rekomendasi Kegiatan di semua level 4. Rekomendasi per indikator di semua level 5. Rekap APBDes di Kecamatan, Kabupaten, Provinsi 6. Rekap Stunting di level desa sampai provinsi 7. Capaian target tahun	Web Based	Open Source	Java	React	Pusat Data dan Informasi	My Sql	Direktorat Advokasi dan Kerjasama	RAA.02.01 Aplikasi Khusus	RAA.02.01 Aplikasi Khusus Fungsi Tertentu	DPD TT-DAD-03.05.03.01 Data Indeks Desa Membangun	DPD TT-DAL-01.21.02.01 Layanan Evaluasi Perkembangan Status Desa

ID Aplikasi	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	Fungsi Aplikasi	Luaran	Basis Aplikasi	Tipe Lisensi Aplikasi	Bahasa Pemrograman	Framework Pembangunan Aplikasi	Unit Pengembangan	Nama Basis Data	Unit Operasional Teknologi	Level 1	Level 2	Data dan Informasi	Layanan
		kehidupan Desa		selanjutnya											
DPD TT-DAA-02.01.03	EHDW	Aplikasi seluler berbasis android sebagai alat bantu kerja Kader Pembangunan Manusia dalam rangka percepatan pencegahan stunting serta penurunan angka stunting di Indonesia	Sebagai alat bantu kerja Kader Pembangunan Manusia (KPM) untuk melakukan pemantauan, pencatatan dan pelaporan pada sasaran stunting sesuai Pepres 72 Tahun 2021 (Remaja Putri, Calon pengantin, Ibu hamil, Ibu menyusui, dan anak berusia 0 sampai dengan 59 bulan) dan cakupan layanan yang diterima.	Pendataan dan pemantauan data layanan yang diterima oleh kelompok sasaran keluarga beresiko stunting seperti sasaran Remaja Putri, Calon pengantin, Ibu hamil, Ibu menyusui, dan anak berusia 0 sampai dengan 59 bulan.	Web Based	Proprietary	Dart	Flutter	Program Iney, Direktur Pengembangan Sosial Budaya dan Lingkungan Desa dan Perdesaan, Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan, Kementerian Desa, Kementerian Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	My Sql	Direktorat Jenderal Pembangunan Desa, dan Perdesaan	RAA.02 Aplikasi Khusus	RAA.02.01 Aplikasi Khusus Fungsi Tertentu	DPD TT-DAD-03.05.03.04 Data Cakupan Layanan yang diterima oleh Kelompok Sasaran Penurunan Stunting	DPD TT-DAL-01.21.02.02 Layanan Konvergensi Stunting
DPD TT-DAA-02.01.04	SIPBM	Aplikasi berbasis web dan android yang digunakan	Untuk mengetahui jumlah anak yang melakukan kegiatan	Didapatkan data-data anak PAUD, putus	Web Based	Open Source	PHP, Javascript, android (Kotlin)	Yii framework, android	Konsultansi IT yang dibiayai oleh UNICEF	My Sql	Direktorat Jenderal Pembangunan Desa,	RAA.02 Aplikasi	RAA.02.01 Aplikasi Khusus	DPD TT-DAD-03.05.03.24 Data Sistem Informasi	DPD TT-DAL-01.21.02.03 Layanan Informasi

ID Aplikasi	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	Fungsi Aplikasi	Luaran	Basis Aplikasi	Tipe Lisensi Aplikasi	Bahasa Pemrograman	Framework Pembangunan Aplikasi	Unit Pengembangan	Nama Basis Data	Unit Operasional Teknologi	Level 1	Level 2	Data dan Informasi	Layanan
		untuk pendataan anak PAUD usia 4 – 6 tahun, anak putus sekolah dan anak berisiko putus sekolah usia 7 – 18 tahun. Data dari hasil pendataan akan digunakan untuk mengembalikan anak putus sekolah dan memonitoring anak berisiko putus sekolah apakah mereka menjadi anak putus sekolah.	PAUD, putus sekolah dan berisiko putus sekolah pada suatu daerah	dan berisiko putus sekolah serta kegiatan dan monitoring pengembalian anak putus sekolah untuk bisa bersekolah kembali							dan Perdesaan	Khusus	Fungsi Tertentu	Pembangunan Berbasis Masyarakat	Pembangunan Berbasis Masyarakat
DPD TT-DAA-02.01.05	Sibarduktrans	Database Penataan Persebaran Penduduk untuk	Melalui pelayanan pendaftaran dan seleksi calon	Tabel Data Animo Transmigrasi	Web Based	Open Source	ASP .net	Custom	Direktorat Fasilitasi Penataan Persebaran	My Sql	Direktorat Fasilitasi Penataan Persebaran	RAA.02.02 Aplikasi	RAA.02.01 Aplikasi Khusus	DPD TT-DAD-03.02.02.04 Data Profil	DPD TT-DAL-01.43.03.05 Layanan

ID Aplikasi	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	Fungsi Aplikasi	Luaran	Basis Aplikasi	Tipe Lisensi Aplikasi	Bahasa Pemrograman	Framework Pembangunan Aplikasi	Unit Pengembangan	Nama Basis Data	Unit Operasional Teknologi	Level 1	Level 2	Data dan Informasi	Layanan
		menyediakan media pengelolaan (pengumpulan dan penyajian) data penataan persebaran penduduk dalam format platform digital berbentuk situs jaringan (website) yang up to date.	transmigran diharapkan setiap warga negara dan penduduk yang berminat pindah ke kawasan transmigrasi dapat memahami berbagai persyaratan yang harus dipenuhi serta prosedur yang harus dilalui	Tabel Data Transmigran Terseleksi Tabel Data Transmigran Terlatih Tabel dan Grafik Data Penempatan Transmigrasi					n Penduduk di Kawasan Transmigrasi		an Penduduk di Kawasan Transmigrasi	Khusus	Fungsi Tertentu	Satuan Permukiman Transmigrasi DPDPT-DAD-03.02.02.05 Data Penempatan Transmigran DPDPT-DAD-03.02.02.10 Data Pendaftaran Transmigrasi Online/Animo Transmigrasi DPDPT-DAD-03.02.04.01 Data Status Satuan Permukiman Bina DPDPT-DAD-03.02.02.06 Data Daftar Aset Kawasan Transmigrasi	Database Kependudukan di Kawasan Transmigrasi

ID Aplikasi	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	Fungsi Aplikasi	Luaran	Basis Aplikasi	Tipe Lisensi Aplikasi	Bahasa Pemrograman	Framework Pembangunan Aplikasi	Unit Pengembangan	Nama Basis Data	Unit Operasional Teknologi	Level 1	Level 2	Data dan Informasi	Layanan
														asi DPDPT-DAD-03.02.02.07 Data Pembangunan Permukiman Transmigrasi DPDPT-DAD-03.02.04.06 Data Pengembangan Satuan Permukiman dan Pusat Satuan Kawasan Pengembangan	
DPDPT-DAA-02.01.06	Portal BUM Desa	Aplikasi Pendaftaran nama dan Badan Hukum BUM Desa dan BUM Desa bersama	Penerbitan Sertifikat Badan Hukum untuk Bum Desa dan BUM Desa bersama dari Kementerian Hukum dan HAM	sertifikat nama dan sertifikat badan hukum	Web Based	Open Source	PHP	Laravel	Pusat Data dan Informasi	My Sql	DITJEN PEID	RAA.02 Aplikasi Khusus	RAA.02.01 Aplikasi Khusus Fungsi Tertentu	DPDPT-DAD-02.10.02.01 Data Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) DPDPT-DAD-02.10.02.02 Data Badan Usaha	DPDPT-DAL-01.11.03.01 Layanan Pendaftaran Nama dan Penerbitan Sertifikat Badan Hukum BUM Desa/BU

ID Aplikasi	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	Fungsi Aplikasi	Luaran	Basis Aplikasi	Tipe Lisensi Aplikasi	Bahasa Pemrograman	Framework Pembangunan Aplikasi	Unit Pengembangan	Nama Basis Data	Unit Operasional Teknologi	Level 1	Level 2	Data dan Informasi	Layanan
														Milik Desa Bersama (BUMDesma) DPDDT-DAD-02.10.04.01 Data Lokus Penerima Bantuan Permodalan Badan Usaha Milik Desa	M Desa Bersama
DPDDT-DAA-02.01.07	e-IPT	Aplikasi Izin Pelaksanaan Transmigrasi (E-IPT) Online merupakan aplikasi berbasis web yang digunakan untuk perizinan pelaksanaan penanaman modal dan pemanfaatan	Memberikan kemudahan bagi badan usaha dalam permohonan perizinan penanaman modal.	izin pelaksanaan penanaman modal dan pemanfaatan tanah hak pengelolaan transmigrasi	Web Based	Proprietary	PHP	Code Igniter	Pusat Data dan Informasi	My Sql	DITJEN PEID	RAA.02 Aplikasi Khusus	RAA.02.01 Aplikasi Khusus Fungsi Tertentu	DPDDT-DAD-02.08.03.01 Data Mitra Usaha yang mengajukan izin penanaman modal di wilayah Transmigrasi (e-IPT)	DPDDT-DAL-01.16.04.01 e-IPT (Layanan Pemberian Izin Pelaksanaan Transmigrasi bagi calon mitra/mitra badan usaha berbasis elektronik)

ID Aplikasi	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	Fungsi Aplikasi	Luaran	Basis Aplikasi	Tipe Lisensi Aplikasi	Bahasa Pemrograman	Framework Pembangunan Aplikasi	Unit Pengembangan	Nama Basis Data	Unit Operasional Teknologi	Level 1	Level 2	Data dan Informasi	Layanan
		an tanah hak pengelola Transmigrasi													
DPD TT-DAA-02.01.08	Daily Report Pendamping	Aplikasi yang diperuntukan kepada TPP (Tenaga Pendamping Profesional) untuk share informasi, berita dan pencatatan laporan kegiatan harian.	Media pendokumentasian atau pencatatan laporan harian TPP, sebagai bahan evaluasi kinerja dan penggajian TPP	Data aktivitas Tenaga Pendamping Profesional	Mobile	Open Source	Java	Angular	Pusat Data dan Informasi	My Sql	BPSDM	RAA.02 Aplikasi Khusus	RAA.02.01 Aplikasi Khusus Fungsi Tertentu	DPD TT-DAD-03.05.04.05 Data Laporan Harian Pendamping Desa (TPP)	DPD TT-DAL-01.21.02.07 Layanan Pencatatan Aktivitas harian Tenaga Pendamping Profesional (TPP)
DPD TT-DAA-02.01.09	e-Presensi	Aplikasi yang memfasilitasi pegawai dalam mengisi daftar kehadiran baik WFO, WFH dan Dinas luar	memonitoring aktivitas kehadiran pegawai melalui e-presensi, menyajikan rekap laporan kehadiran pegawai	Informasi data kehadiran pegawai	Mobile	Open Source	java	dart	Pusat Data dan Informasi	My Sql	Biro Kepegawaian dan Organisasi	RAA.02 Aplikasi Khusus	RAA.02.01 Aplikasi Khusus Fungsi Tertentu	DPD TT-DAD-09.06.01.01 Data Kehadiran DPD TT-DAD-09.06.01.02 Data Pegawai	DPD TT-DAL-02.04.01.04 Layanan Presensi Pegawai
DPD TT-DAA-	Sistem Informasi Kepegawaian	Sistem Informasi Kepegawai	Sistem Informasi Kepegawaian	Informasi data manajemen	Web Based	Open Source	PHP	Laravel	Pusat Data dan Informasi	new_simepeg	Biro Kepegawaian dan	RAA.02 Aplikasi	RAA.02.01 Aplikasi	DPD TT-DAD-09.06.01.0	DPD TT-DAL-02.04.01.

ID Aplikasi	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	Fungsi Aplikasi	Luaran	Basis Aplikasi	Tipe Lisensi Aplikasi	Bahasa Pemrograman	Framework Pembangunan Aplikasi	Unit Pengembangan	Nama Basis Data	Unit Operasional Teknologi	Level 1	Level 2	Data dan Informasi	Layanan
02.01.10		an (SIMPEG) merupakan sebuah perangkat lunak yang membantu dalam proses pengolahan data kepegawaian, memudahkan dalam melakukan fungsi analisis dan pengawasan kepegawaian	adalah untuk mendukung integritas data, kemudahan dalam pengajuan cuti, pengaksesan data pegawai dan kemudahan pengelolaan sehingga dapat mendukung kelancaran pelaksanaan dan fungsi dalam bidang administrasi kepegawaian yang efektif dan efisien.	en kepegawaian							Organisasi	kasi Khusus	Khusus Fungsi Tertentu	1 Data Kehadiran DPDTT-DAD-09.06.01.02 2 Data Pegawai	02 Layanan Informasi Data Pegawai
DPDTT-DAA-02.01.11	Sistem Informasi Manajemen Usulan Hibah dan BMN	Aplikasi pencatatan dokumen usulan hibah atau bantuan Barang Milik Pemerintah yang dilaksanakan oleh Kemendesa PDTT	Memudahkan pengelolaan data hibah Barang Milik Negara, memudahkan proses verifikasi terhadap perkembangan data usulan sampai penghapusan hibah Barang Milik Negara	Surat Persetujuan Hibah Barang Milik Negara	Web Based	Open Source	PHP	Laravel	Pusat Data dan Informasi	My Sql	Biro Keuangan dan BMN	RAA.02 Aplikasi Khusus	RAA.02.01 Aplikasi Khusus Fungsi Tertentu	DPDTT-DAD-09.02.08.01 Data Usulan Hibah DPDTT-DAD-09.02.08.02 Data Pendukung Hibah DPDTT-DAD-09.02.08.03 Data	DPDTT-DAL-02.02.05.01 Layanan Sistem Informasi Manajemen Usulan Hibah

ID Aplikasi	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	Fungsi Aplikasi	Luaran	Basis Aplikasi	Tipe Lisensi Aplikasi	Bahasa Pemrograman	Framework Pembangunan Aplikasi	Unit Pengembangan	Nama Basis Data	Unit Operasional Teknologi	Level 1	Level 2	Data dan Informasi	Layanan
														Persetujuan Hibah DPDTT-DAD-09.02.08.04 Data SK Penghapusan Hibah	
DPDTT-DAA-02.01.12	Sistem Informasi Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (SIPPD)	Sistem informasi untuk menampilkan profil daerah tertinggal yang terdiri dari indikator makro, kriteria dan indikator ketertinggalan, daftar produk unggulan serta menampung usulan kebutuhan sesuai ketertinggalan daerah dan usulan kegiatan yang dapat meningkatkan potensi	Inventarisasi daftar usulan kebutuhan dan produk unggulan di daerah tertinggal yang akan dituangkan dalam dokumen perencanaan	Lampiran matriks rancangan awal Keprres RAN-PPDT setiap tahun (T-1) dengan detail sbb: 1. Daftar usulan kebutuhan daerah tertinggal 2. Daftar produk unggulan di daerah tertinggal	Web Based	Proprietary	php	Code Igniter	Pusat Data dan Informasi	Postgresql	Direktorat Penyerahan Rencana dan Program Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal	RAA.02 Aplikasi Khusus	RAA.02.01 Aplikasi Khusus Tertentu	DPDTT-DAD-03.05.02.01 Data desa di daerah tertinggal DPDTT-DAD-03.05.02.02 Data kecamatan di daerah tertinggal DPDTT-DAD-03.05.02.03 Data kabupaten daerah tertinggal DPDTT-DAD-03.05.02.04 Data provinsi yang memiliki daerah tertinggal DPDTT-	DPDTT-DAL-02.03.02.01 Layanan Informasi Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (SIPPD)

ID Aplikasi	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	Fungsi Aplikasi	Luaran	Basis Aplikasi	Tipe Lisensi Aplikasi	Bahasa Pemrograman	Framework Pembangunan Aplikasi	Unit Pengembangan	Nama Basis Data	Unit Operasional Teknologi	Level 1	Level 2	Data dan Informasi	Layanan
		produk unggulan di daerah tertinggal												DAD-03.05.02.05 Data usulan kebutuhan di daerah tertinggal DPD TT-DAD-03.05.02.06 Data produk unggulan di daerah tertinggal DPD TT-DAD-03.05.02.07 Data kriteria dan indikator daerah tertinggal DPD TT-DAD-03.05.02.08 Data BUMDes di daerah tertinggal DPD TT-DAD-03.05.02.09 Data IDM DPD TT-DAD-03.05.02.10 Data	

ID Aplikasi	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	Fungsi Aplikasi	Luaran	Basis Aplikasi	Tipe Lisensi Aplikasi	Bahasa Pemrograman	Framework Pemakaian Aplikasi	Unit Pengembangan	Nama Basis Data	Unit Operasional Teknologi	Level 1	Level 2	Data dan Informasi	Layanan
														dokumen hukum DPDPT-DAD-03.05.02.1 1 Data Koperasi DPDPT-DAD-03.05.02.1 2 Data UKM DPDPT-DAD-03.05.02.1 3 Data IKM DPDPT-DAD-03.05.02.1 4 Data BTS DPDPT-DAD-03.05.02.1 5 Data Sebaran Lokus DTE DPDPT-DAD-03.05.02.1 6 Data admin pusat DPDPT-DAD-03.05.02.1 7 Data admin provinsi	

ID Aplikasi	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	Fungsi Aplikasi	Luaran	Basis Aplikasi	Tipe Lisensi Aplikasi	Bahasa Pemrograman	Framework Pembangunan Aplikasi	Unit Pengembangan	Nama Basis Data	Unit Operasional Teknologi	Level 1	Level 2	Data dan Informasi	Layanan
														DPDPT-DAD-03.05.02.18 Data admin kabupaten	
DPDPT-DAA-02.01.13	EMONEV DAK	Aplikasi untuk membantu daerah membuat laporan progres pelaksanaan (Laporan Triwulan dan Laporan Akhir) kegiatan DAK Fisik Transportasi Perdesaan	Mendigitalisasi laporan progres pelaksanaan kegiatan DAK Fisik Transportasi Perdesaan, yang sebelumnya dilakukan secara manual (file hardcopy dan softcopy)	Matriks Laporan Triwulan, Laporan Akhir dan Dokumentasi progres pelaksanaan Kegiatan DAK Fisik Transportasi Perdesaan	Web Based	Open Source	php	Laravel	Pusat Data dan Informasi	MySQL	Biro Perencanaan dan Kerja Sama	RAA.02.02 Aplikasi Khusus	RAA.02.01 Aplikasi Khusus Fungsi Tertentu	DPDPT-DAD-09.05 perencanaan pembangunan nasional DPDPT-DAD-03.03.01.01 Data Menu Kegiatan DPDPT-DAD-03.03.01 pembinaan transportasi regional	DPDPT-DAL-02.03.04.01 Layanan Monitoring dan Evaluasi Dana Alokasi Khusus
DPDPT-DAA-02.01.14	ESAKIP	Aplikasi untuk memudahkan proses pemantauan dan pengendalian kinerja dalam rangka meningkatkan	Pelaporan	Informasi Capaian Output Kinerja dan Anggaran	Web Based	Open Source	php	Codeigniter	Pusat Data dan Informasi	Mysql	Biro Perencanaan dan Kerja Sama	RAA.02.02 Aplikasi Khusus	RAA.02.01 Aplikasi Khusus Fungsi Tertentu	DPDPT-DAD-09.06.05.01 Data Laporan Kinerja DPDPT-DAD-09.06.05.02 Data Laporan	DPDPT-DAL-02.07.02.01 Layanan Pengawasan Akuntabilitas Kinerja Instansi

ID Aplikasi	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	Fungsi Aplikasi	Luaran	Basis Aplikasi	Tipe Lisensi Aplikasi	Bahasa Pemrograman	Framework Pemakaian Aplikasi	Unit Pengembangan	Nama Basis Data	Unit Operasional Teknologi	Level 1	Level 2	Data dan Informasi	Layanan
		kan akuntabilitas dan kinerja unit kerja di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi												Hasil Evaluasi SAKIP DPDTT-DAD-09.06.05.03 Data Perjanjian Kinerja DPDTT-DAD-09.06.05.04 Data Indikator Kinerja Utama DPDTT-DAD-09.06.05.05 Data Target Kinerja dan Anggaran DPDTT-DAD-09.06.05.06 Data Capaian Unit DPDTT-DAD-09.06.05.07 Data Capaian Triwulan DPDTT-DAD-09.06.05.08 Data	Pemerintah

ID Aplikasi	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	Fungsi Aplikasi	Luaran	Basis Aplikasi	Tipe Lisensi Aplikasi	Bahasa Pemrograman	Framework Pembangunan Aplikasi	Unit Pengembangan	Nama Basis Data	Unit Operasional Teknologi	Level 1	Level 2	Data dan Informasi	Layanan
														Capaian Tahunan DPDTT-DAD-09.06.05.09 Data Nilai Kinerja Unit	
DPDTT-DAA-02.01.15	E-RB	Sistem Penilaian kinerja reformasi birokrasi yang dilakukan oleh seluruh satuan kerja Kementerian Desa PDTT berbasis aplikasi secara Online	Memberikan informasi sistem penilaian kinerja RB dari satuan kerja	informasi sistem penilaian kinerja RB dari satuan kerja	Web Based	Open Source	php	Codeigniter	Pusat Data dan Informasi	MySQL	Biro Kepegawaian dan Organisasi	RAA.02.02 Aplikasi Khusus	RAA.02.01 Aplikasi Khusus Fungsi Tertentu	DPDTT-DAD-09.06.04.01 pembinaan reformasi birokrasi instansi	DPDTT-DAL-02.04.09.01 Layanan Evaluasi Reformasi Birokrasi
DPDTT-DAA-02.01.16	CLBK	Sistem layanan kepegawaian dan Organisasi, dimana setiap pegawai di lingkungan Kementerian Desa,	Memberikan pelayanan terkait kepegawaian, organisasi dan Reformasi Birokrasi	Informasi data Layanan kepegawaian	Web Based	Open Source	PHP	Codeigniter	Biro Kepegawaian dan Organisasi	MySQL	Biro Kepegawaian dan Organisasi	RAA.02.02 Aplikasi Khusus	RAA.02.01 Aplikasi Khusus Fungsi Tertentu	DPDTT-DAD-09.06.01.02 Data Kepegawaian DPDTT-DAD-09.06.04.01 Data	DPDTT-DAL-02.04.01.06 Layanan kepegawaian, Organisasi dan Reformasi

ID Aplikasi	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	Fungsi Aplikasi	Luaran	Basis Aplikasi	Tipe Lisensi Aplikasi	Bahasa Pemrograman	Framework Pembangunan Aplikasi	Unit Pengembangan	Nama Basis Data	Unit Operasional Teknologi	Level 1	Level 2	Data dan Informasi	Layanan
		Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dapat melakukan komunikasi dengan PIC kepegawaian di Biro Kepegawaian dan Organisasi perihal layanan kepegawaian dan organisasi melalui media percakapan / chatting yang berbasis aplikasi secara online												Evaluasi RB	i Birokrasi
DPD TT-DAA-02.01.17	Monev Transformasi UPK PNPM MPd	Aplikasi mengenai pemetaan transformasi UPK Eks PNPM MPd	Untuk melihat perkembangan transformasi UPK Eks PNPM MPd	Klasifikasi lembaga ekonomi hasil transformasi UPK	Web Based	Open Source	PHP	Code Igniter	Direktorat Pengembangan Kelembagaan Ekonomi dan	My Sql	DITJEN PEID	RAA.02 Aplikasi Khusus	RAA.02.01 Aplikasi Khusus Fungsi Tertentu	DPD TT-DAD-02.10.04.02 Data Perhutanan Sosial DPD TT-DAD-	DPD TT-DAL-01.43.02.01 Layanan Monev Transformasi

ID Aplikasi	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	Fungsi Aplikasi	Luaran	Basis Aplikasi	Tipe Lisensi Aplikasi	Bahasa Pemrograman	Framework Pembangunan Aplikasi	Unit Pengembangan	Nama Basis Data	Unit Operasional Teknologi	Level 1	Level 2	Data dan Informasi	Layanan
				PNPM MPd					Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Ditjen PEI DDTT					02.10.02.05 Data Transformasi UPK Eks PNPM-MPd	UPK PNPM MPd
DPD TT-DAA-02.01.18	Layanan pemeringkatan BUM Desa	Aplikasi mengenai pemeringkatan BUM Desa/BUM Desa Bersama	Untuk melihat perkembangan usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama sehingga diketahui keberadaan suatu BUM Desa/BUM Desa Bersama satu sama lain, serta untuk melihat tolak ukur terhadap capaian kinerja usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama	kategori BUM Desa (perintis, pemula, berkembang, maju)	Web Based	Proprietary	PHP	Code Igniter	Direktorat Pengembangan Kelembagaan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Ditjen PEI DDTT	My Sql	DITJEN PEID	RAA.02 Aplikasi Khusus	RAA.02.01 Aplikasi Khusus Fungsi Tertentu	DPD TT-DAD-02.10.02.03 Data Pemeringkatan Badan Usaha Milik Desa DPD TT-DAD-02.10.02.04 Data Pemeringkatan Badan Usaha Milik Desa Bersama	DPD TT-DAL-01.11.03.02 Layanan pemeringkatan BUM Desa
DPD TT-DAA-02.01.19	BUMDes Learning (Pembelajaran BUM Desa Berbasis Digital)	Aplikasi mengenai media pembelajaran dua arah bagi BUM Desa/BUM	Sebagai sarana informasi dan komunikasi terkait pengelolaan usaha, praktik-	modul pembelajaran BUM Desa	Web Based	Proprietary	PHP	Code Igniter	Direktorat Pengembangan Kelembagaan Ekonomi dan	My Sql	DITJEN PEID	RAA.02 Aplikasi Khusus	RAA.02.01 Aplikasi Khusus Fungsi Tertentu	DPD TT-DAD-02.10.04.03 Data Program Pemberdayaan Pembelajaran	DPD TT-DAL-01.11.03.03 Layanan BUMDes Learning (Pembelaj

ID Aplikasi	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	Fungsi Aplikasi	Luaran	Basis Aplikasi	Tipe Lisensi Aplikasi	Bahasa Pemrograman	Framework Pembangunan Aplikasi	Unit Pengembangan	Nama Basis Data	Unit Operasional Teknologi	Level 1	Level 2	Data dan Informasi	Layanan
		Desa Bersama	praktik baik, dan inovasi BUM Desa/BUM Desa Bersama serta sebagai media pembelajaran bagi BUM Desa						Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Ditjen PEI DDTT					an bagi BUM Desa berbasis Digital (BUMDes Learning)	aran BUM Desa Berbasis Digital)
DPDTT-DAA-02.01.20	MONEV DD	Aplikasi MonevDD adalah untuk mempermu dah pengumpul an dan pengelolaa n data dana desa termasuk dan tidak terbatas pada data penyaluran dana desa dan data pemanfaat an dana desa	Sebagai alat monitoring dan evaluasi progres penyaluran dan pemanfaatan Dana Desa	Informasi monitorin g pengguna an Dana Desa	Web Based	Proprietary	PHP	Code Igniter	Pusdatin BPI	My Sql	Ditjen PDP	RAA.02.02 Aplikasi Khusus	RAA.02.01 Aplikasi Khusus Fungsi Tertentu	DPDTT-DAD-03.05.04.05 Data SDGs Data Laporan Harian Pendampi ng Desa (TPP)	DPDTT-DAL-01.21.02.04 Layanan Pencatat an Pemanfa atan Dana Desa
DPDTT-DAA-02.01.21	Sistem Informasi LMS "SIPINTAR APIK" (web)	Sistem Informasi Pelatihan Integratif, Adaptif, Responsif-Akuntabel	Pelatihan ASN	Informasi hasil capaian pelatihan ASN	Web Based	Proprietary	PHP	Laravel		MySQL	Puslat Pegawai ASN	RAA.02.02 Aplikasi Khusus	RAA.02.01 Aplikasi Khusus Fungsi Tertentu	DPDTT-DAD-09.03.18 Data Alumni Pelatihan Struktural	DPDTT-DAL-01.43.03.09 Layanan Pelatihan

ID Aplikasi	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	Fungsi Aplikasi	Luaran	Basis Aplikasi	Tipe Lisensi Aplikasi	Bahasa Pemrograman	Framework Pembangunan Aplikasi	Unit Pengembangan	Nama Basis Data	Unit Operasional Teknologi	Level 1	Level 2	Data dan Informasi	Layanan
		Profesional Integritas Kebersamaan												DPD TT-DAD-09.03.19 Data Alumni Pelatihan Fungsional DPD TT-DAD-09.03.20 Data Alumni Pelatihan Teknis DPD TT-DAD-09.03.21 Data Pelaksanaan Pelatihan Pegawai Aparatur Sipil Negara Kementerian an DPD TT-DAD-09.03.22 Data Jenis Peningkatan Kapasitas dan Pengembangan dan Tenaga Pelatih DPD TT-	Pegawai ASN

ID Aplikasi	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	Fungsi Aplikasi	Luaran	Basis Aplikasi	Tipe Lisensi Aplikasi	Bahasa Pemrograman	Framework Pembangunan Aplikasi	Unit Pengembangan	Nama Basis Data	Unit Operasional Teknologi	Level 1	Level 2	Data dan Informasi	Layanan
														DAD-09.03.23 Data Jenis Kerjasama Pelatihan Pegawai Aparatur Sipil Negara Kementerian	
DPD TT-DAA-02.01.22	Sistem Informasi LMS "SIPINTAR APIK" (mobile)	Sistem Informasi Pelatihan Integratif, Adaptif, Responsif-Akuntabel Profesional Integritas Kebersamaan	Pelatihan ASN	aplikasi mobile peserta pelatihan ASN	Mobile	Proprietary	Dart	Flutter		MySQL	Puslat Pegawai ASN	RAA.02.02 Aplikasi Khusus	RAA.02.01 Aplikasi Khusus Tertentu	DPD TT-DAD-09.03.18 Data Alumni Pelatihan Struktural DPD TT-DAD-09.03.19 Data Alumni Pelatihan Fungsional DPD TT-DAD-09.03.20 Data Alumni Pelatihan Teknis DPD TT-DAD-09.03.21 Data Pelaksanan Pelatihan	DPD TT-DAL-01.43.03.09 Layanan Pelatihan Pegawai ASN

ID Aplikasi	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	Fungsi Aplikasi	Luaran	Basis Aplikasi	Tipe Lisensi Aplikasi	Bahasa Pemrograman	Framework Pemakaian Aplikasi	Unit Pengembangan	Nama Basis Data	Unit Operasional Teknologi	Level 1	Level 2	Data dan Informasi	Layanan
														Pegawai Aparatur Sipil Negara Kementerian DPDTT-DAD-09.03.22 Data Jenis Peningkatan Kapasitas dan Pengembangan dan Tenaga Pelatih DPDTT-DAD-09.03.23 Data Jenis Kerjasama Pelatihan Pegawai Aparatur Sipil Negara Kementerian	
DPDTT-DAA-02.01.23	Sistem Monitoring dan Evaluasi TEKAD	Aplikasi mengenai Pendataan Laporan Harian Fasilitator Kabupaten, Fasilitator Kecamatan	Untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja para Fasilitator Kecamatan, Kabupaten, dan Kader	Laporan Harian dan Data hasil kinerja Fasilitator Kecamatan,	Web Based	Proprietary	PHP	Code Igniter	Direktorat Pengembangan Produk Unggulan Desa, Daerah Tertinggal	My Sql	DITJEN PEID	RAA.02 Aplikasi Khusus	RAA.02.01 Aplikasi Khusus Fungsi Tertentu	DPDTT-DAD-03.05.04.01 Data Daftar Lokus Transformasi Ekonomi	DPDTT-DAL-01.03.07.01 Layanan Sistem Monitoring dan

ID Aplikasi	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	Fungsi Aplikasi	Luaran	Basis Aplikasi	Tipe Lisensi Aplikasi	Bahasa Pemrograman	Framework Pembangunan Aplikasi	Unit Pengembangan	Nama Basis Data	Unit Operasional Teknologi	Level 1	Level 2	Data dan Informasi	Layanan
		, dan Kader Desa	Desa dalam mencapai target-target capaian program TEKAD	Fasilitator Kabupaten, dan Kader Desa					, dan Transmigrasi					Kampung Terpadu (TEKAD) DPD TT-DAD-03.05.04.02 Data Daftar Fasilitator Kabupaten DPD TT-DAD-03.05.04.03 Data Daftar Fasilitator Kecamatan DPD TT-DAD-03.05.04.04 Data Daftar Kader Desa DPD TT-DAD-03.05.02.16 Data Pengembangan Produk Unggulan DPD TT-DAD-02.02.04.01 Data Desa Sejahtera Astra	Evaluasi TEKAD

ID Aplikasi	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	Fungsi Aplikasi	Luaran	Basis Aplikasi	Tipe Lisensi Aplikasi	Bahasa Pemrograman	Framework Pembangunan Aplikasi	Unit Pengembangan	Nama Basis Data	Unit Operasional Teknologi	Level 1	Level 2	Data dan Informasi	Layanan
														DPD TT-DAD-02.03.06.01 Data Produk Unggulan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	
DPD TT-DAA-02.01.24	SIDITRANS	Aplikasi portal pendidikan di kawasan transmigrasi, salah satunya tentang beasiswa Program Penjaringan Siswa Berprestasi di Kawasan Transmigrasi (PPSBKT) yang mencakup namun tak terbatas pada pendaftaran, seleksi, pengumuman	Sebagai media informasi terkait pendidikan di kawasan transmigrasi dan platform pendaftaran, seleksi, pengumuman, dan pelaporan dalam pelaksanaan beasiswa PPSBKT	Data fasilitas pendidikan di kawasan transmigrasi dan data pendaftaran, penerima, dan alumni PPSBKT	Web Based	Proprietary	PHP	WordPress	Direktorat Pengembangan Satuan Permukiman dan Pusat Satuan Kawasan Pengembangan	MySQL	Direktorat Pengembangan Satuan Permukiman dan Pusat Satuan Kawasan Pengembangan	RAA.01 Aplikasi Umum	RAA.01.01 Aplikasi Umum Layanan Publik		

ID Aplikasi	Nama Aplikasi	Uraian Aplikasi	Fungsi Aplikasi	Luaran	Basis Aplikasi	Tipe Lisensi Aplikasi	Bahasa Pemrograman	Framework Pembangunan Aplikasi	Unit Pengembangan	Nama Basis Data	Unit Operasional Teknologi	Level 1	Level 2	Data dan Informasi	Layanan
		an, dan pelaporan													
DPD TT-DAA-02.01.25	E-MONEV	Aplikasi e-monev yang berfokus pada realisasi dan penyerapan anggaran saja dalam rangka Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan merupakan upaya untuk menjawab dan memenuhi tantangan dan kebutuhan dalam rangka melaksana	Menyediakan sistem bagi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dalam memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan	Informasi detail terkait sandingan pagu dan realisasi serta capaian kegiatan tematik	Web Based	Open Source	PHP	Codeigniter	Pusat Data dan Informasi	MySQL	Biro Perencanaan dan Kerja Sama	RAA.02.02 Aplikasi Khusus	RAA.02.01 Aplikasi Khusus Fungsi Tertentu	DPD TT-DAD-09.06.05.05 Data Target Kinerja dan Anggaran DPD TT-DAD-09.02.02.01 Data Realisasi Anggaran	DPD TT-DAL-02.03.04.02 Layanan Monitoring

E. DOMAIN INFRASTRUKTUR SPBE

1. Arsitektur Infrastruktur SPBE

Infrastruktur SPBE adalah semua perangkat keras, perangkat lunak, dan fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan sistem, aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data, perangkat integrasi/penghubung, dan perangkat elektronik lainnya. Domain infrastruktur SPBE akan memetakan semua perangkat keras, perangkat lunak, dan fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan sistem, aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data, perangkat integrasi/penghubung, dan perangkat elektronik lainnya, yang digunakan untuk menghasilkan layanan. Arsitektur Infrastruktur SPBE bertujuan untuk memudahkan penyelarasan pemilihan, perencanaan, implementasi, pemeliharaan, dan siklus hidup teknologi informasi secara keseluruhan. Dengan konsep integrasi pada arsitektur data dan aplikasi maka arsitektur infrastruktur SPBE juga harus mampu mendukung integrasi ini. Domain infrastruktur SPBE memiliki struktur dengan 3 (tiga) tingkat, dimana keseluruhan tingkat merupakan struktur di tingkat nasional.

Tabel 3.12 Referensi Arsitektur Infrastruktur SPBE

	Tingkat 2	Tingkat 3
		RAI.01 Fasilitas Komputasi
		RAI.01.01 Pusat Data
		RAI.01.01.01 Pusat Data Nasional
		RAI.01.01.02 Pusat Data Instansi Pusat
		RAI.01.01.03 Pusat Data Instansi Daerah
		RAI.01.01.04 Pusat Data Non Pemerintah
		RAI.01.01.05 Pusat Data Pemulihan
		RAI.01.02 Pusat Kendali
		RAI.01.02.01 Network Operation Center
		RAI.01.02.02 Data Operation Center
		RAI.01.02.03 Command/Operation Center
		RAI.01.02.04 Security Operation Center
		RAI.01.02.05 Emergency Operation Center
		RAI.01.03 Fasilitas Komputasi
		RAI.01.03.01 Laboratorium Komputer
		RAI.01.03.02 Ruang Server Farm
		RAI.01.03.03 Workstation Farm
		RAI.02 Sistem Integrasi
		RAI.02.01 Jaringan Intra
		RAI.02.01.01 Jaringan Intra Pemerintah
		RAI.02.01.02 Jaringan Intra Instansi Pusat
		RAI.02.01.03 Jaringan Intra Pemerintah Daerah
		RAI.02.01.04 Jaringan Komersial/Umum
		RAI.02.02 Sistem Penghubung
		RAI.02.02.01 Sistem Penghubung Pemerintah

	Tingkat 2	Tingkat 3
		RAI.02.02.02 Sistem Penghubung non Pemerintah
		RAI.03 Platform
		RAI.03.01 Perangkat Keras
		RAI.03.01.01 Server
		RAI.03.01.02 Data Storage
		RAI.03.01.03 Network and Communication Device
		RAI.03.01.04 Security Device
		RAI.03.01.05 Peripheral
		RAI.03.01.06 Mobile Device
		RAI.03.02 Perangkat Lunak
		RAI.03.02.01 Sistem Operasi
		RAI.03.02.02 Sistem Utilitas
		RAI.03.02.03 Sistem Database
		RAI.03.03 Teknologi Awan
		RAI.03.03.01 PaaS
		RAI.03.03.02 IaaS
		RAI.03.03.03 IaaS
		RAI.03.03.04 BaaS

2. Metadata Arsitektur Infrastruktur SPBE

Domain infrastruktur SPBE akan memetakan semua perangkat keras, perangkat lunak, dan fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan sistem, aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data, perangkat integrasi/penghubung, dan perangkat elektronik lainnya, yang digunakan untuk menghasilkan layanan. Metadata Arsitektur Infrastruktur SPBE dituangkan dalam beberapa atribut metadata yang selaras dengan Arsitektur SPBE Nasional. Adapun rincian terkait metadata arsitektur SPBE dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.13 Metadata Jaringan Intra Pemerintah

ID	Nama Jaringan	Deskripsi Jaringan	Jenis Jaringan	Kepemilikan	Nama Pemilik	Unit Kerja Pengelola Jaringan	Bandwidth	Tipe Media Jaringan	Media Lainnya	RAI Level 1	RAI Level 2	RAI Level 3	Sistem Penghubung Layanan
DPDTT-DAI-02.02.01.01	Metro E	Metro E antara DC Kalibata ke DRC Abdul Muis	Metro-e	BUMN	PT. Telekomunikasi Indonesia	Pusat Data dan Informasi Pembangunan Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	50 Mbps	Fiber Optic	P2P	RAI.02 Sistem Integrasi	RAI.02.02 Sistem Penghubung	RAI.02.02.01 Sistem Penghubung Pemerintah	
DPDTT-DAI-02.02.01.02	VPN	VPN KSP-Kemendesa	VPN	BUMN	PT. Telekomunikasi Indonesia	Pusat Data dan Informasi Pembangunan Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	10 Mbps	Fiber Optic	P2P	RAI.02 Sistem Integrasi	RAI.02.02 Sistem Penghubung	RAI.02.02.01 Sistem Penghubung Pemerintah	SISMONEV
DPDTT-DAI-02.02.01.03	VPN	VPN PMK-Kemendesa	VPN	BUMN	Icon+ PLN	Pusat Data dan Informasi Pembangunan Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	10 Mbps	Fiber Optic	P2P	RAI.02 Sistem Integrasi	RAI.02.02 Sistem Penghubung	RAI.02.02.01 Sistem Penghubung Pemerintah	War Room Menko PMK
DPDTT-DAI-02.02.01.04	Bandwidth Main	Bandwidth IX dan IIX 700Mbps (Main)	FO	BUMN	PT. Telekomunikasi Indonesia	Pusat Data dan Informasi Pembangunan Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	700 Mbps	Fiber Optic	P2P	RAI.02 Sistem Integrasi	RAI.02.02 Sistem Penghubung	RAI.02.02.01 Sistem Penghubung Pemerintah	
DPDTT-DAI-02.02.01.05	Bandwidth Backup	Bandwidth IX dan IIX 700Mbps (Backup)	FO	Swasta Dalam Negeri	PT. Mora Telematika Indonesia	Pusat Data dan Informasi Pembangunan Desa Daerah	700 Mbps	Fiber Optic	P2P	RAI.02 Sistem Integrasi	RAI.02.02 Sistem Penghubung	RAI.02.02.01 Sistem Penghubung Pemerintah	

ID	Nama Jaringan	Deskripsi Jaringan	Jenis Jaringan	Kepemilikan	Nama Pemilik	Unit Kerja Pengelola Jaringan	Bandwidth	Tipe Media Jaringan	Media Lainnya	RAI Level 1	RAI Level 2	RAI Level 3	Sistem Penghubung Layanan
						Tertinggal dan Transmigrasi							

Tabel 3.13 Metadata Sistem Penghubung Layanan Pemerintah

ID	Nama Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Deskripsi Sistem Penghubung	Jenis Sistem Penghubung	Status Kepemilikan	Nama Pemilik	RAI Level 1	RAI Level 2	RAI Level 3
DPDTT-DAI-02.02.01.01	MonevDD	API Kemendesa-Kemenkeu	Sistem Penghubung Pemerintah	Sendiri	Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi	RAI.02 Sistem Integrasi	RAI.02.02 Sistem Penghubung	RAI.02.02.01 Sistem Penghubung Pemerintah
DPDTT-DAI-02.02.01.02	BUMDES	API Kemendesa-Kemenkumham	Sistem Penghubung Pemerintah	Sendiri	Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi	RAI.02 Sistem Integrasi	RAI.02.02 Sistem Penghubung	RAI.02.02.01 Sistem Penghubung Pemerintah
DPDTT-DAI-02.02.01.03	PMK DESA	API Kemendesa-KemenPMK	Sistem Penghubung Pemerintah	Sendiri	Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi	RAI.02 Sistem Integrasi	RAI.02.02 Sistem Penghubung	RAI.02.02.01 Sistem Penghubung Pemerintah

Tabel 3.14 Metadata Komputasi Awan

Nama Government Cloud	Deskripsi Government Cloud	Tipe Cloud	Status Kepemilikan	Nama Pemilik	Biaya Layanan	Unit Pengembang	Unit Operasional	Jangka Waktu Pelayanan	RAI Level 1	RAI Level 2	RAI Level 3
-----------------------	----------------------------	------------	--------------------	--------------	---------------	-----------------	------------------	------------------------	-------------	-------------	-------------

Lambung File	Media Penyimpanan Awan Internal Kemendesa	IaaS	Sendiri	Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi	-	Pusat Data dan Informasi Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	Pusat Data dan Informasi Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	Pertahun	RAI.03 Platform	RAI.03.02 Teknologi Awan	RAI.03.03.02 IaaS
--------------	---	------	---------	---	---	--	--	----------	-----------------	--------------------------	-------------------

Tabel 3.15 Metadata Perangkat Keras Jaringan

ID	Nama Perangkat Jaringan	Deskripsi Perangkat Jaringan	Tipe Device	Kepemilikan	Nama Pemilik	Unit Pengelola	RAI Level 1	RAI Level 2	RAI Level 3
DPD TT-DAI-03.01.03.01	Core Switch Data Center	Dell S4148F-ON	Multilayer Switch	Sendiri	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	Badan Pengembangan dan Informasi	RAI.03 Platform	RAI.03.01 Kerangka Infrastruktur dan Aplikasi	RAI.03.01.03 Perangkat Keras Jaringan
DPD TT-DAI-03.01.03.02	Access Switch DMZ Data Center	Dell S4148T-ON	Switch L2	Sendiri	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	Badan Pengembangan dan Informasi	RAI.03 Platform	RAI.03.01 Kerangka Infrastruktur dan Aplikasi	RAI.03.01.03 Perangkat Keras Jaringan
DPD TT-DAI-03.01.03.03	Access Switch Farm Server Data Center	Dell S4148T-ON	Switch L2	Sendiri	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	Badan Pengembangan dan Informasi	RAI.03 Platform	RAI.03.01 Kerangka Infrastruktur dan Aplikasi	RAI.03.01.03 Perangkat Keras Jaringan
DPD TT-DAI-03.01.03.04	Access Switch Data Center	Extreme X670V-48t	Switch L2	Sendiri	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	Badan Pengembangan dan Informasi	RAI.03 Platform	RAI.03.01 Kerangka Infrastruktur dan Aplikasi	RAI.03.01.03 Perangkat Keras Jaringan
DPD TT-DAI-03.01.03.05	Router ISP	Cisco ASR 1002	Router	BUMN	PT. Telkom	PT. Telkom	RAI.03 Platform	RAI.03.01 Kerangka Infrastruktur dan Aplikasi	RAI.03.01.03 Perangkat Keras Jaringan

ID	Nama Perangkat Jaringan	Deskripsi Perangkat Jaringan	Tipe Device	Kepemilikan	Nama Pemilik	Unit Pengelola	RAI Level 1	RAI Level 2	RAI Level 3
DPDTT-DAI-03.01.03.06	Router ISP	Cisco ASR 1001	Router	Swasta Dalam Negeri	PT. Moratelindo	PT. Moratelindo	RAI.03 Platform	RAI.03.01 Kerangka Infrastruktur dan Aplikasi	RAI.03.01.03 Perangkat Keras Jaringan
DPDTT-DAI-03.01.03.07	Wireless Controller	Cisco 3500 Series	Wireless Equipment	Sendiri	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	Badan Pengembangan dan Informasi	RAI.03 Platform	RAI.03.01 Kerangka Infrastruktur dan Aplikasi	RAI.03.01.03 Perangkat Keras Jaringan
DPDTT-DAI-03.01.03.08	Distribution Switch Gedung Utama	Cisco C9300-24S	Router	Sendiri	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	Badan Pengembangan dan Informasi	RAI.03 Platform	RAI.03.01 Kerangka Infrastruktur dan Aplikasi	RAI.03.01.03 Perangkat Keras Jaringan
DPDTT-DAI-03.01.03.09	Distribution Switch Gedung A	Cisco WS-C3650-24TS	Router	Sendiri	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	Badan Pengembangan dan Informasi	RAI.03 Platform	RAI.03.01 Kerangka Infrastruktur dan Aplikasi	RAI.03.01.03 Perangkat Keras Jaringan
DPDTT-DAI-03.01.03.10	Distribution Switch Gedung B	Cisco WS-C3650-24TS	Router	Sendiri	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	Badan Pengembangan dan Informasi	RAI.03 Platform	RAI.03.01 Kerangka Infrastruktur dan Aplikasi	RAI.03.01.03 Perangkat Keras Jaringan
DPDTT-DAI-03.01.03.11	Distribution Switch Gedung C	Cisco WS-C3650-24TS	Router	Sendiri	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	Badan Pengembangan dan Informasi	RAI.03 Platform	RAI.03.01 Kerangka Infrastruktur dan Aplikasi	RAI.03.01.03 Perangkat Keras Jaringan
DPDTT-DAI-03.01.03.12	Access Switch Gedung A	Cisco SG200-26	Switch L2	Sendiri	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah	Badan Pengembangan dan Informasi	RAI.03 Platform	RAI.03.01 Kerangka Infrastruktur dan Aplikasi	RAI.03.01.03 Perangkat Keras Jaringan

ID	Nama Perangkat Jaringan	Deskripsi Perangkat Jaringan	Tipe Device	Kepemilikan	Nama Pemilik	Unit Pengelola	RAI Level 1	RAI Level 2	RAI Level 3
					Tertinggal dan Transmigrasi				
DPDTT-DAI-03.01.03.13	Access Switch Gedung B	Cisco SF300-24	Switch L2	Sendiri	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	Badan Pengembangan dan Informasi	RAI.03 Platform	RAI.03.01 Kerangka Infrastruktur dan Aplikasi	RAI.03.01.03 Perangkat Keras Jaringan
DPDTT-DAI-03.01.03.14	Access Switch Gedung C	Cisco WS-C2960+24PC-S	Switch L2	Sendiri	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	Badan Pengembangan dan Informasi	RAI.03 Platform	RAI.03.01 Kerangka Infrastruktur dan Aplikasi	RAI.03.01.03 Perangkat Keras Jaringan
DPDTT-DAI-03.01.03.15	Access Point	Cisco AIR-AP1832I-F-K9	Wireless Equipment	Sendiri	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	Badan Pengembangan dan Informasi	RAI.03 Platform	RAI.03.01 Kerangka Infrastruktur dan Aplikasi	RAI.03.01.03 Perangkat Keras Jaringan

Tabel 3.16 Metadata Perangkat Keras Keamanan

ID	Nama Perangkat Keamanan	Deskripsi Security Device	Tipe Security Device	Status Kepemilikan	Nama Pemilik	Unit Pengelola Security Device	RAI Level 1	RAI Level 2	RAI Level 3
DPDTT-DAI-03.01.04.01	Firewall	Paloalto NGFW 3220 dan 3020	Firewall	Sendiri	Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi	Pusat Data dan Informasi Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	RAI.03 Platform	RAI.03.01 Kerangka Infrastruktur dan Aplikasi	RAI.03.01.04 Perangkat Keras Keamanan
DPDTT-DAI-03.01.04.02	Load Balancer (masuk infra)	F5 - 2600i	Load Balancer	Sendiri	Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi	Pusat Data dan Informasi Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	RAI.03 Platform	RAI.03.01 Kerangka Infrastruktur dan Aplikasi	RAI.03.01.04 Perangkat Keras Keamanan
DPDTT-DAI-03.01.04.03	Anti-Spam	Iron Port	Intrusion Detection System	Sendiri	Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi	Pusat Data dan Informasi Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	RAI.03 Platform	RAI.03.01 Kerangka Infrastruktur dan Aplikasi	RAI.03.01.04 Perangkat Keras Keamanan
DPDTT-DAI-03.01.04.04	Anti-Spam	Cloud ASAV - MX Backup/Anti-Spam & Anti-Virus Gateway	Intrusion Detection System	Milik Pihak Ketiga	PT. Excellent Infotama Kreasindo	Pusat Data dan Informasi Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	RAI.03 Platform	RAI.03.01 Kerangka Infrastruktur dan Aplikasi	RAI.03.01.04 Perangkat Keras Keamanan

Tabel 3.17 Metadata Perangkat Keras Periferal

ID	Nama Perangkat Periferal	Deskripsi Periferal	Tipe	Lokasi	Unit Pengelola	RAI Level 1	RAI Level 2	RAI Level 3
DPDTT-DAI-03.01.05.01	Logitech	Webcam Logitech Rally System Conference Cam	Input/Output	Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi	Pusat Data dan Informasi Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	RAI.03 Platform	RAI.03.01 Kerangka Infrastruktur dan Aplikasi	RAI.03.01.05 Peripheral
DPDTT-DAI-03.01.05.02	Avaya IP Phone		Input/Output	Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi	Pusat Data dan Informasi Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	RAI.03 Platform	RAI.03.01 Kerangka Infrastruktur dan Aplikasi	RAI.03.01.05 Peripheral
DPDTT-DAI-03.01.05.03	Fingerprint Access Door		Input	Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi	Pusat Data dan Informasi Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	RAI.03 Platform	RAI.03.01 Kerangka Infrastruktur dan Aplikasi	RAI.03.01.05 Peripheral
DPDTT-DAI-03.01.05.04	IP CCTV		Output	Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi	Pusat Data dan Informasi Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	RAI.03 Platform	RAI.03.01 Kerangka Infrastruktur dan Aplikasi	RAI.03.01.05 Peripheral

Tabel 3.18 Metadata Perangkat Keras Server

ID	Nama Server	Deskripsi Server	Jenis Penggunaan Server	Status Kepemilikan	Nama Pemilik Server	Unit Pengelola	Lokasi Server	Perangkat Lunak yang Digunakan	Kapasitas Memori (RAM)	Jenis Teknologi Prosesor	Jumlah Kapasitas Penyimpanan	Kode Referensi Infrastruktur	Teknik Penyimpanan	RAI Level 1	RAI Level 2	RAI Level 3	Instansi	Perangkat Lunak Platform	Fasilitas Komputasi
DPDTT-DAI-03.01.01.01	Dell EMC VxRail P570	Intel Xeon Gold 6246R 3.4G, 16C/32T, 10.4GT/s, 35.75M Cache, Turbo, HT (205W); VxRail Software 4.7.410 Factory Install; Chassis with up to 24 x 2.5 Hard Drives including max of 4 NVMe Drives, 2CPU; 32GB RDIMM, 3200MT	Server Aplikasi	Sendiri	Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi	Pusat Data dan Informasi Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	Data Center Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi	Vmware vSAN	768 GB RAM	High End	38.4TB SSD		Raid 1	RAI.03 Platform	RAI.03.01 Kerangka Infrastruktur dan Aplikasi	RAI.03.01.01 Server	Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi	VMware vSAN	NOC, Data Center, dan Ruang Kendali

[illegible]

ID	Nama Server	Deskripsi Server	Jenis Penggunaan Server	Status Kepemilikan	Nama Pemilik Server	Unit Pengelola	Lokasi Server	Perangkat Lunak yang Digunakan	Kapasitas Memori (RAM)	Jenis Teknologi Prosesor	Jumlah Kapasitas Penyimpanan	Kode Referensi Infrastruktur	Teknik Penyimpanan	RAI Level 1	RAI Level 2	RAI Level 3	Instansi	Perangkat Lunak Platform	Fasilitas Komputasi
		plug, Redundant Power Supply (1+1), 1600W, 250 Volt Power Cord; Jumper Cord - C13/C14, 4M, 250V, 10A (US, EU, TW, APCC countries except ANZ); Intel X710 Quad Port 10GbE.																	
DPD TT -DAI- 03.01.01.02	Super Micro		Server Database	Sendiri	Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi	Pusat Data dan Informasi Pembangunan Desa, Daerah	Data Center Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi							RAI.03 Platform	RAI.03.01 Kerangka Infrastruktur dan Aplikasi	RAI.03.01.01 Server	Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi		

ID	Nama Server	Deskripsi Server	Jenis Penggunaan Server	Status Kepemilikan	Nama Pemilik Server	Unit Pengelola	Lokasi Server	Perangkat Lunak yang Digunakan	Kapasitas Memori (RAM)	Jenis Teknologi Prosesor	Jumlah Kapasitas Penyimpanan	Kode Referensi Infrastruktur	Teknik Penyimpanan	RAI Level 1	RAI Level 2	RAI Level 3	Instansi	Perangkat Lunak Platform	Fasilitas Komputasi
						Tertinggal, dan Transmigrasi													
DPD TT -DAI- 03.01. 01.03	Dell LPS E	Server ini dimanfaatkan untuk melayani aplikasi dan database	Server Aplikasi	Sendiri	Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi	Pusat Data dan Informasi Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	Data Center Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi							RAI. 03 Platform	RAI.03. 01 Kerangka Infrastruktur dan Aplikasi	RAI.03. 01.01 Server	Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi		
DPD TT -DAI- 03.01. 01.04	Infoblox 1415	Untuk menangani nama domain Kementerian	Domain Name Server	Sendiri	Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi	Pusat Data dan Informasi Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	Data Center Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi							RAI. 03 Platform	RAI.03. 01 Kerangka Infrastruktur dan Aplikasi	RAI.03. 01.01 Server	Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi		
DPD TT -DAI- 03.01. 01.05	Dell EMC VxRail	Intel Xeon Gold 6246R 3.4G,	Active Directory	Sendiri	Kementerian Desa, PDT, dan	Pusat Data dan Informasi	Data Center Kementerian Desa,	Vmware vSAN	768 GB RAM	High End	38.4TB SSD		Raid 1	RAI. 03 Platform	RAI.03. 01 Kerangka Infrastr	RAI.03. 01.01 Server	Kementerian Desa, PDT, dan	VMware vSAN	NOC, Data Center, dan Ruan

ID	Nama Server	Deskripsi Server	Jenis Penggunaan Server	Status Kepemilikan	Nama Pemilik Server	Unit Pengelola	Lokasi Server	Perangkat Lunak yang Digunakan	Kapasitas Memori (RAM)	Jenis Teknologi Prosesor	Jumlah Kapasitas Penyimpanan	Kode Referensi Infrastruktur	Teknik Penyimpanan	RAI Level 1	RAI Level 2	RAI Level 3	Instansi	Perangkat Lunak Platform	Fasilitas Komputasi
	P570	16C/32T, 10.4GT/s, 35.75M Cache, Turbo, HT (205W); VxRail Software 4.7.410 Factory Install; Chassis with up to 24 x 2.5 Hard Drives including max of 4 NVMe Drives, 2CPU; 32GB RDIMM, 3200MT/s, Dual Rank; 3.84TB SSD SAS Mixed			Transmigrasi	Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	PDT, dan Transmigrasi								uktur dan Aplikasi		Transmigrasi		g Kendali

[illegible]

Tabel 3.19 Metadata Perangkat Keras Platform

ID	Nama Perangkat Lunak	Deskripsi Perangkat Lunak	Tipe Perangkat Lunak	Nama Perangkat Sistem Operasi	Nama Perangkat Sistem Utilitas	Nama Perangkat Jenis Sistem Database	Jenis Lisensi	Nama Pemilik Lisensi	Validitas Lisensi	RAI Level 1	RAI Level 2	RAI Level 3
DPD TT-DAI-03.01.07.01	Windows Server	Windows Server 2016	Sistem Operasi	Windows Server 2016			Seumur Hidup	Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi		RAI.03 Platform	RAI.03.01 Kerangka Infrastruktur dan Aplikasi	RAI.03.01.07 Perangkat Lunak Platform
DPD TT-DAI-03.01.07.02	Zimbra	Zimbra Mail Kementerian	Sistem Utilitas		Zimbra		Periodik	Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi		RAI.03 Platform	RAI.03.01 Kerangka Infrastruktur dan Aplikasi	RAI.03.01.07 Perangkat Lunak Platform

F. DOMAIN KEAMANAN SPBE

Keamanan SPBE adalah pengendalian keamanan yang terpadu dalam SPBE, mencakup penjaminan kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan (nonrepudiation) sumber daya terkait data dan informasi, Infrastruktur SPBE, dan Aplikasi SPBE. Dalam penerapan keamanan SPBE harus memenuhi standar teknis dan prosedur Keamanan SPBE. Domain arsitektur keamanan SPBE ini bertujuan untuk mendeskripsikan pengendalian dan pengintegrasian keamanan data dan informasi, aplikasi SPBE, serta infrastruktur SPBE yang terpadu dalam SPBE dan menjadi acuan sehingga dapat dilakukan pengendalian. Subtansi domain Keamanan SPBE akan menggambarkan pelaksanaan manajemen keamanan yang dilakukan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi sebagai penyelenggara SPBE yang mencakup:

1. Standar keamanan yang digunakan;
2. Penerapan keamanan, termasuk di dalamnya edukasi kesadaran keamanan SPBE; dan
3. Kelaikan keamanan, termasuk di dalamnya identifikasi kerentanan terhadap sistem keamanan TIK.

Tabel 3.20 Standar Keamanan

No	Standar Keamanan	Mulai Penerapan	Unit Pelaksana
1	Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2023 tentang Tim Tanggap Insiden Siber Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	24 Maret 2023	Pusdatin
2	Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Standar Sistem Manajemen Keamanan Informasi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	24 Maret 2023	Pusdatin
3	SOP Pengamanan Database	13 Februari 2023	Pusdatin
4	SOP Operasional Server	13 Februari 2023	Pusdatin

Tabel 3.21 Penerapan Keamanan

No	Penerapan Keamanan	Deskripsi Kegiatan	Tanggal Kegiatan	Unit Pelaksana
1	Pelaksanaan Audit Keamanan TIK	Audit Keamanan SPBE	Periodik	Tim Audit TIK
2	Pelaksanaan Audit Aplikasi SPBE	Audit Aplikasi SPBE	Periodik	Tim Audit TIK
3	Pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE	Audit Infrastruktur SPBE	Periodik	Tim Audit TIK
6	Bimbingan Teknis Kesiapsiagaan Teknis Insiden Keamanan Siber pada CSIRT	Bimbingan Teknis Kesiapsiagaan Teknis Insiden Keamanan Siber pada CSIRT Pemerintah Pusat Tahun 2023 oleh BSSN	02 - 04 Februari 2023	KEMENDESA-CSIRT
7	#JagaRuangSiber IT Forum	Peningkatan literasi keamanan siber dan penguatan tata kelola pelaksanaan transformasi digital di sektor pemerintah	02 Maret 2023	KEMENDESA-CSIRT
8	Workshop Pengelolaan CSIRT	Peningkatan kesiapsiagaan instansi pemerintah dalam penanggulangan insiden siber	06 - 08 Maret 2023	KEMENDESA-CSIRT
9	Workshop Peduli Keamanan Informasi: Penerapan Manajemen Risiko berdasarkan SNI ISO/IEC 27005:2022	Mendukung penguatan tingkat kematangan keamanan siber	10 Mei 2023	KEMENDESA-CSIRT

No	Penerapan Keamanan	Deskripsi Kegiatan	Tanggal Kegiatan	Unit Pelaksana
10	Workshop Peduli Keamanan Informasi: Penerapan <i>Devsecops</i> dan <i>Vulnerability Management</i> dalam Pengelolaan Risiko Keamanan Siber	Penguatan pengelolaan sistem elektronik dan pengelolaan risiko keamanan informasi	11 Mei 2023	KEMENDESA-CSIRT
11	Recovery sistem	Melakukan recovery database dan file aplikasi sehingga aplikasi dapat digunakan kembali	Periodik	Pusdatin
12	Pembaharuan patch perangkat keamanan	Melakukan pengunduhan dan instalasi patch terbaru	Periodik	Pusdatin
13	Vulnerability assessment WBS	1. Melakukan scanning aplikasi menggunakan tools vulnerability assessment 2. Melakukan scanning virus pada server 3. Pengecekan pada pengguna dan user server dan user aplikasi 4. Pengecekan lalu lintas jaringan komunikasi data 5. Verifikasi user	Januari 2023	Pusdatin
14	Sosialisasi Standar Manajemen Keamanan Informasi (SMKI)	sosialisasi kepada semua pihak internal kemendesa baik dari level pimpinan sampai staf tentang pentingnya keamanan	19 Mei 2023	Pusdatin

No	Penerapan Keamanan	Deskripsi Kegiatan	Tanggal Kegiatan	Unit Pelaksana
		informasi sehingga menumbuhkan kepedulian dan meningkatkan pemahaman tentang keamanan informasi		
15	Edukasi Keamanan SPBE melalui Flyer, Banner, Website dan Email Blast	Penyebarluasan informasi kepada semua pihak internal kemendesa baik dari level pimpinan sampai staf tentang kesadaran keamanan informasi yang berhubungan dengan aktivitas pemanfaatan layanan Teknologi Informasi di Kemendesa	Periodik	KEMENDESA-CSIRT

Tabel 3.22 Kelaikan Keamanan

No	Kelaikan Keamanan	Tanggal Kelaikan	Unit Pelaksana
1	Kegiatan Kelaikan Keamanan untuk Aplikasi Umum	Rencana Tahun 2023 - 2024	Pusdatin
2	Kegiatan Kelaikan Keamanan untuk Aplikasi Khusus	Rencana Tahun 2023 - 2024	Pusdatin

BAB IV PENUTUP

Arsitektur SPBE Kementerian ini disusun sebagai kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, layanan SPBE Kementerian, infrastruktur SPBE Kementerian, aplikasi SPBE Kementerian, dan Keamanan SPBE Kementerian untuk menghasilkan layanan SPBE Kementerian yang terintegrasi.

Seluruh Unit Kerja dalam melaksanakan integrasi proses bisnis, data dan informasi, layanan, infrastruktur, aplikasi, dan keamanan harus selaras dan berpedoman pada Arsitektur SPBE Kementerian ini.

MENTERI DESA,
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN
TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ABDUL HALIM ISKANDAR

Salinan sesuai aslinya
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Plt. Kepala Biro Hukum

Rully Rachman